
Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2018

ONE FAMILY VISION NATION

— TO EXCELLENCE —



ONE FAMILY VISION NATION TO EXCELLENCE

Dalam rangka menegaskan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai, Kementerian BUMN mengangkat tema dan sekaligus menjadi tag line yakni **"One Family, One Vision, One Nation to Excellence"**. Tag line tersebut sekaligus menjadi semangat bagi insan BUMN untuk melaksanakan 4 (empat) pilar misi pembangunan dalam roadmap BUMN meliputi: kemandirian; kesejahteraan; keberlanjutan; dan pemerataan dan kesejahteraan.

Tag line tersebut sekaligus menggambarkan transformasi BUMN sebagai entitas bisnis yang bergerak dari product and program centric menuju customer centric. Transformasi yang digerakkan Kementerian BUMN mengharuskan setiap Direksi BUMN memahami dengan seterang-terangnya kebutuhan, hasrat, kehendak, dan kepentingan rakyat yang utama sesuai dengan 4 (empat) pilar strategis BUMN.

1. Sinergi antar BUMN.

Sinergi antar BUMN mengacu kepada kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa antar BUMN guna merealisasikan skala ekonomi dan mendorong tercapainya best practice. Sinergi diperlukan BUMN untuk mendukung akselerasi pertumbuhan dan cross selling transaction, serta memperkuat posisi BUMN dan meningkatkan pemerataan. Bentuk sinergi terbagi menjadi 4 tingkatan, mulai dari sinergi secara transaksional, kolaborasi atau kerjasama, aliansi strategis serta konsolidasi melalui restrukturisasi organisasi.

2. Hilirisasi dan kandungan lokal.

Hilirisasi bertujuan untuk memberikan nilai tambah atas produk yang dimiliki. Selain itu, BUMN diharapkan berperan secara aktif dalam pengembangan produk input pendukung yang diperlukan oleh beragam BUMN secara domestik. Pemanfaatan kandungan lokal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan industry dasar nasional dengan beberapa benefit yaitu: pengurangan biaya bahan baku, peningkatan profitabilitas, kualitas dan pengurangan penggunaan devisa, sekaligus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia.

In the Framework to affirm the State-Owned Enterprise's role as an agent of development, the Ministry of State-Owned Enterprise has appointed a theme and at the same time become a tagline namely : **One Family, One Vision, One Nation to Excellence"**. The tag line is also a spirit for the State-Owned Enterprise's people to implement the 4 (four) development mission pillars of the State-Owned Enterprise roadmap, including: Independency; Prosperity; Equality; Continuity; and Equality and Prosperity.

The tag line at the same time illustrates transformations of the State-Owned Enterprise as business entity moving from the affirmation on product and centric programs to customer centric. Transformation driven by the Ministry of State-Owned Enterprise requires that each State-Owned Enterprise Board of Directors, in accordance with the 4 (four) pillars of corporate action, shall understand as clearly as possible the main needs, desires, purposes and especially interest of people compatible with the 4 (four) State-Owned Enterprise's strategic pillars.

1. Inter-State-Owned Enterprise Synergy

Inter-State-Owned Enterprise Synergy according to collaborating or consolidating on identical functions of inter-State-Owned Enterprise to make a realization of economic scale and stimulate to achieve best practice. Synergy is needed by State-Owned Enterprises to supporting growth accelerating and Cross selling transaction, furthermore, to strengthen State-Owned Positions and to increase Equity. Synergy formed into 4 level, start from synergy in transactional, collaboration or teamwork, strategic alliance and consolidation by organization restructurization.

2. Downstreaming and local material

Downstreaming aims to provide value added on owned product. In Addition, State-Owned Enterprise is expected to actively play a role in supportive input product development which is needed by any State-Owned Enterprise in Domestic. The use of local material is expected to solve any national prime industry problem with several benefit such as: raw material cost reduction, profitability enhancement, quality, and devisa usage reduction, at same time to improve Indonesia Human resource abilities.

3. Pembangunan ekonomi daerah terpadu.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dibutuhkan pembangunan ekonomi daerah terpadu di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-proyek yang berpotensi menciptakan dampak spill over atau turut menyumbang PDB lokal melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan infrastruktur/ konektivitas.

4. Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai.

Kemampuan BUMN dalam mengembangkan potensi usahanya membutuhkan kapasitas keuangan. Dalam hal ini, BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, diluar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri. Kemandirian keuangan menunjukkan BUMN dapat mendanai aktivitas operasionalnya dengan mencari alternatif pendanaan sendiri tanpa mengandalkan APBN kecuali ada penugasan khusus dari Pemerintah.

Untuk mewujudkan 4 pilar roadmap BUMN dalam era disrupsi saat ini, transformasi BUMN harus dilakukan sekaligus untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Aksi korporasi di setiap perusahaan yang memiliki ketergantungan ekosistem usaha digerakkan oleh transformasi, inovasi, riset serta sistem manajemen dan teknologi informasi yang hebat dan efektif berorientasi pelanggan. Dalam konteks itu menjadi sangat penting standarisasi, kompatibilitas, konektivitas, layanan bersama, dan mobilitas.

Terkait dengan inilah sinergi BUMN melalui One Management System, Integrasi virtual, One Family, One Vision, One Nation to Excellence menjadi penting dan strategis. Maknanya adalah, transformasi bisnis merupakan keharusan, berbasis perubahan dari masalah kepada solusi. Ditopang oleh digitalisasi yang memungkinkan BUMN melakukan konsolidasi BUMN dengan fondasi pendanaan jangka panjang. BUMN hadir untuk memainkan peran strategisnya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan pemampuan sumber manusia menjadi human capital sekaligus human investment (modal insan).

Transformasi BUMN yang digerakkan Kementerian BUMN merupakan pondasi bagi berlangsungnya transformasi yang bergerak dari hulu ke hilir, sampai jauh ke masa yang mungkin tak terduga oleh seluruh insan BUMN yang saat ini berkarya kreatif, berkiprah inovatif, dan dapat dilanjutkan oleh generasi baru. Transformasi BUMN untuk bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

3. Integrated Regional Economic Development

Growth and regional development Equality has an important role to support national economic growth. Require integrated regional economic development in chosen regions through implementation in project which has potential to create spill over effect or contribute Local GDP through create employment opportunity, infrastructure/connectivity Availability.

4. Financial independence and Value Creation

State-Owned Enterprise Ability to develop its business potential needs financial capacity. In this case, State-Owned Enterprise needs to be independence and sustainable in financial and capable to create financial benefit, outside its credential as development agent to country. Financial Independency show that State-Owned Enterprise could fund its operational activity with seeking financing alternative without depend on APBN except there is any special assignment from government.

To Realize State-Owned Enterprise roadmap pillars in this era disruption, State-Owned Enterprise transformation of the State-Owned Enterprise shall be implemented at the same time to maintain its survival. Driven by transformation, innovation and corporate action research in every company, which has business ecosystem interdependence, as well as a great and effective customeroriented information technology and management system. In that context standardization, compatibility, connectivity, shared services, and mobility becomes very important.

Related to this is the synergy of the State-Owned Enterprise through One Management System, Virtual Integration, One Family, One Vision, One Nation to Excellence to be important and strategic. The meaning is business transformation is mandatory, based on changes from problems to solutions. It is supported by digitalization which enables the State-Owned Enterprise to consolidate the State-Owned Enterprise with the foundation of long-term funding. The State-Owned Enterprise with the foundation of long-term funding. The State-Owned Enterprise presents to play its strategic role as a driver of people's economy, food security, and the ability of human resources to become human capital as well as human investment.

Transformation of the State-Owned Enterprise driven by the Ministry of State-Owned Enterprise is the foundation for ongoing transformation which moves from upstream to downstream, up to far away in times that may not be visited by all State-Owned Enterprises employees who are currently working creatively, innovatively progressing, and can be continued by the new generation. Transformation of the State-Owned Enterprise for the nation towards a better future.

Sekapur Sirih Kinerja 2018

Foreword of the 2018 Performance

Di tengah kondisi ekonomi nasional dan global yang tumbuh, Kementerian BUMN terus mendorong dan memberikan dukungan kepada BUMN untuk mampu bertahan dan memberikan kontribusi terbaik.

In the midst of national and global economic conditions above, the Ministry of State-Owned Enterprise continues to encourage and provide support to the State-Owned Enterprise to be able to survive and provide the best contribution .



Data dari Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 tercapai 5,15%. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2018 ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,07% ditengah gejolak perekonomian dunia sebagai akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan peningkatan investasi. Dari aspek moneter, data dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mencatat Kurs rupiah sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 14.481 per dollar AS dengan rata-rata sepanjang tahun Rp14.247 per dollar AS. Demikian pula Inflasi sepanjang 2018 dapat terjaga sebesar 3,13%.

Data from the Ministry of Finance recorded that Indonesia's economic growth in 2018 achieved 5.15%. This 2018 economic growth rate is higher than 2017's achievement of 5.07% in the midst of global economic turmoil as result of trade wars between the United States and China. The condition of Indonesia's economic growth is supported by stability in household consumption growth, government consumption, and increased investment. From monetary aspect, the data from the Ministry of Finance and Bank Indonesia recorded that rupiah Exchange Rate up to December 31 was IDR 14,481 per USD, in addition the average throughout the year was IDR 14,247 per USD. Similarly, inflation throughout 2018 can be maintained at 3, 13%. In the midst of national and global economic conditions above, the Ministry of State-Owned

Di tengah kondisi ekonomi nasional dan global di atas, Kementerian BUMN terus mendorong dan memberikan dukungan kepada BUMN untuk mampu bertahan dan memberikan kontribusi terbaik. Pada tahun 2018 Kementerian BUMN berhasil menyelesaikan beberapa tugas yang memberikan dampak besar bagi perekonomian Bangsa Indonesia saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Sepanjang tahun 2018, Kementerian BUMN telah berhasil mencatatkan beberapa prestasi antara lain peningkatan jumlah aset BUMN yang luar biasa, memberikan kontribusi keuangan kepada Pemerintah, mendukung berbagai proyek strategis nasional, dan pembentukan holding BUMN sektoral.

Capaian Aset BUMN. Pada tahun 2018, Kementerian BUMN berhasil mencapai target capaian aset BUMN pada tahun 2018 sebesar Rp 8.097 triliun. Capaian ini melebihi target tahun 2018 sebesar Rp 7.375 triliun atau 109,8 persen. Apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar Rp7.913 triliun, capaian ini telah terlampaui atau tercapai sebesar 102,33 persen.

Kontribusi BUMN. Total capaian kontribusi BUMN terhadap keuangan Negara pada tahun 2018 adalah sebesar Rp422 triliun. Capaian ini melebihi target tahun 2018 sebesar Rp315 triliun atau 144,1%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar Rp385 triliun, maka capaian ini telah terlampaui atau tercapai sebesar 117,9%.

Proyek Strategis BUMN. Kementerian BUMN mendukung penuh seluruh program Pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur nasional. Kementerian BUMN melalui BUMN turut mengambil bagian dalam proses pembangunan proyek-proyek strategis nasional antara lain: pembangunan Jalan Tol Trans Jawa; Jalan Tol Trans Sumatera; pembangunan LRT Jabodebek dan LRT Palembang; program elektrifikasi nasional; dan pengembangan jaringan telekomunikasi yang menyebar ke seluruh nusantara. Selain itu, BUMN juga berperan dalam program BBM satu harga yang menjadikan harga BBP di Papua setara dengan harga di pulau-pulau lain di Indonesia.

Enterprise continues to encourage and provide support to the State-Owned Enterprise to be able to survive and provide the best contribution. In 2018 the Ministry of State-Owned Enterprise has succeeded in completing several tasks that gave a major impact to the economy of Indonesian nation currently and for the future.

Throughout 2018, the Ministry of State-Owned Enterprise managed to record several achievements, including an increase in the number of extraordinary State-Owned Enterprise assets, financial contributions to the Government, supporting various national strategic projects, and the establishment of sectorial State-Owned Enterprise holding.

Achievement of State-Owned Enterprise Assets. In 2018, the Ministry of State-Owned Enterprise succeeded in achieving the achievement target of State-Owned Enterprise assets in 2018 amounting to IDR 8,097 trillion. This achievement exceeds the 2018 target of IDR 7,375 trillion or 109,8 persen. When compared with targets of the 2015-2019 Strategic Plan of IDR. 7,913 trillion, this achievement has been exceeded or reached 102,33 persen.

Contribution of the State-Owned Enterprise. The total achievement of State-Owned Enterprise's contribution to the state finances in 2018 was IDR 422 trillion. This achievement exceeds the 2018 target of IDR 315 trillion or 144.1%. Meanwhile, if compared to targets of the 2015-2019 Strategic Plan of IDR 385 trillion, this achievement has been exceeded or reached 117,9%.

The State-Owned Enterprise's Strategic Project. The Ministry of State-Owned Enterprise fully supports all Government programs related to national infrastructure development. The Ministry of State-Owned Enterprise through the State-Owned Enterprise also takes part in the process of developing national strategic projects, among others: development of Trans Java Toll Road; Trans Sumatra Toll Road; development of Jabodebek LRT and Palembang LRT; national electrification program; and telecommunications network development which spread throughout the archipelago. In addition, the State-Owned Enterprise also plays a role in the one-price Fuel-Oil (BBM) program which equalizes BBP prices in Papua to prices in other islands in Indonesia.

Holding BUMN Sektoral. Tahun 2018 Kementerian BUMN membentuk beberapa holding BUMN sektoral yaitu BUMN Migas dengan induk perusahaan PT Pertamina (Persero) dan BUMN Pertambangan dengan induk perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero). Pembentukan holding BUMN sektoral ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan BUMN dan mempermudah proses konsolidasi BUMN sehingga BUMN mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Negara, serta mampu menjadi pemain kelas dunia.

Capaian besar lainnya yaitu keberhasilan Holding BUMN Tambang dibawah PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dalam mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan ini menjadikan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) yang merupakan bagian dari Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 41,2%.

Kementerian BUMN menyadari bahwa capaian-capaian di atas masih jauh dari sempurna dan perlu bekerja lebih keras dan optimal untuk memberikan kontribusi maksimal kepada Negara. Upaya dan strategi kedepan dalam pembinaan BUMN diarahkan mulai dari perbaikan proses perencanaan kinerja BUMN, proses bisnis, dan evaluasi kinerja Kementerian BUMN secara berkala. Perbaikan proses bisnis di Kementerian BUMN misalnya dengan melakukan standarisasi proses bisnis berdasarkan ISO 12000.

Sectorial State-Owned Enterprise Holding. In 2018 the Ministry of State-Owned Enterprise formed sectorial State-Owned Enterprise holding, namely the State-Owned Enterprise of Oil and Gas with PT Pertamina (Persero) holding company and Mining State-Owned Enterprise with PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) holding company. The establishment of sectorial State-Owned Enterprise holding is expected to strengthen the capital structure of State-Owned Enterprise and facilitate the State-Owned Enterprise consolidation process so that the State-Owned Enterprise are able to contribute more to the State, Also become world class company.

Another big achievement is the success of Mining State-Owned Enterprise Holding under PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) in acquiring shares of PT Freeport Indonesia. This success makes PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) part of the Government as PT Freeport Indonesia's majority shareholder of 41,2% share ownership.

The Ministry of State-Owned Enterprise realizes that the above achievements are far from perfect and required to work harder and optimally to provide a maximum contribution to the State. Future efforts and strategies in the development of State-Owned Enterprise are directed to start from improving the performance planning process of the State-Owned Enterprise, business process, and periodically evaluating performance of the Ministry of State-Owned Enterprise. Business process improvement at the Ministry of State-Owned Enterprise, for example by standardizing business process based on ISO 12000.

Kata Pengantar

Foreword



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kementerian BUMN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoptimalkan peran strategis BUMN sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai untuk menunjang program Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dibentuknya Kementerian BUMN menunjukkan upaya Pemerintah agar BUMN dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan dapat menjadi korporasi yang sesungguhnya. Upaya ini merupakan implementasi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Perpres Nomor 41 Tahun 2015.

Pada tahun 2018, BUMN-BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN telah berkembang secara pesat. Total aset BUMN mencapai Rp8.097 triliun, total laba menembus Rp203 triliun, dan kontribusi BUMN kepada Negara mencapai Rp454 triliun merupakan pencapaian positif dan kami bersyukur bahwa segala tantangan usaha yang terjadi sepanjang tahun 2018 dapat dilalui dengan baik. Sekarang ini, BUMN terus berupaya untuk saling bahu membahu bekerja sama dalam sebuah kesatuan untuk membangun negeri.

Pencapaian tersebut salah satunya merupakan upaya dari Kementerian BUMN dalam melaksanakan program sinergi BUMN yang telah berjalan selama 4 tahun belakangan ini. Dengan mengusung misi "BUMN Hadir Untuk Negeri", BUMN diharapkan dapat bersama-sama menyatukan visi untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peace for us all.

First of all, let us be thankful for the presence of Allah SWT God Almighty, because of His abundance grace and mercy, the Ministry of State-Owned Enterprise can implement its duties and functions in optimizing the strategic role of State-Owned Enterprise as an agent of development and Value Creator to support Government programs in improving society's welfare and economy.

Establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise indicates the Government's effort so that the State-Owned Enterprise are managed professionally, transparently, accountably, and can become real corporations. This effort is the implementation of Act No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise and Presidential Regulation No. 41 of 2015.

In 2018, State-Owned Enterprises under coordination of the Ministry of State-Owned Enterprise have developed rapidly. Its total assets reached IDR 8,097 trillion, while total of the State-Owned Enterprise's profit in 2018 was IDR 203 trillion. meanwhile, achievement of State-Owned Enterprise's contribution to State finances in 2018 was IDR 454 trillion. This is a positive achievement and we are grateful that all business challenges occurred throughout 2018 can be passed through. Currently, the State-Owned Enterprise continues to work hand in hand to work together in unity to develop the country.

One of the achievements was the effort of the Ministry of State-Owned Enterprise in implementing the State-Owned Enterprise synergy program which has been running for the past 4 years. By implementing the mission of "The State-Owned Enterprise Presents to the State", the State-Owned Enterprise is expected to be able to jointly unite the vision of improving the nation's economy and society's welfare.



Kementerian BUMN juga terus berupaya semaksimal mungkin agar BUMN dapat memberikan pengabdian terbaik bagi Indonesia. Di antaranya melalui program pembangunan infrastruktur untuk negeri, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, sampai dengan pembentukan Holding BUMN untuk menjadikan BUMN semakin kuat dan lincah sehingga mampu bersaing secara global dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Saat ini, BUMN dituntut untuk menjadi satu kesatuan dalam bingkai “One Family, One Vision, One Nation to Excellence” yang berarti BUMN bersama-sama saling bersinergi untuk menjadi unggul dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana harapan Presiden Republik Indonesia agar tugas dan fungsi BUMN tidak hanya diarahkan untuk mendapat keuntungan, tetapi juga dapat berkontribusi dan berperan aktif untuk menghasilkan *multiplier effect* bagi pondasi perubahan pembangunan, katalisator kecepatan membangun, dan memacu agar pembangunan dapat segera diselesaikan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Laporan ini juga sekaligus untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2018 merupakan bagian dari perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN. Selain itu, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja Kementerian BUMN pada tahun 2018 berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Berbagai pencapaian atas kinerja BUMN di tahun 2018 dan program BUMN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya tidak dapat dicapai dan terlaksana tanpa kontribusi dan partisipasi para pemangku kepentingan. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direksi, Komisaris dan segenap karyawan BUMN yang telah bekerja keras mencapai target-target perusahaan termasuk menuntaskan penugasan Pemerintah.

The Ministry of State-Owned Enterprise also continues to strive optimally so that the State-Owned Enterprise can provide the best service for Indonesia. These include infrastructure development program for the state, social justice, people's economy, and the establishment of State-Owned Enterprise Holding to make the State-Owned Enterprise stronger and more agile so it can compete globally and fulfill the requirements of the Indonesian society.

Currently, the State-Owned Enterprise is required to become unity in the frame of “One Family, One Vision, One Nation to Excellence”, which means that the State-Owned Enterprise work together to be superior and present in the midst of society. As an expectation of the President of the Republic of Indonesia that tasks and functions of the State-Owned Enterprise are not only directed to obtain profits, but also contribute and play an active role in producing multiplier effect for development change foundation, development speed catalysts, and encourage the development to be completed immediately, and be able to provide benefits to the society.

This report also fulfills the mandate of Government Regulation No. 8 of 2006 concerning Financial Reporting and Government Institution Performance, and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 29 of 2014 concerning Performance Accountability System of Government Institution, as well as Regulation of the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reform No. 53 of 2014 concerning Technical Guidelines of Performance Agreement Preparation, Performance Reporting, and Review of Performance Reporting.

The Ministry of State-Owned Enterprise's Performance Report in 2018 is part of realizations on the accountability of the Ministry of State-Owned Enterprise's performance. In addition, this Performance Report is expected to provide an overview concerning performance of the Ministry of State-Owned Enterprise in 2018 based on targets stipulated in the Ministry of State-Owned Enterprise's Strategic Plan of 2015-2019 and the 2018 Performance Agreement.

Various achievements on the performance of State-Owned Enterprise in 2018 and the State-Owned Enterprise program in providing benefits to the society certainly cannot be achieved and implemented without the contribution and participation of stakeholders. Therefore, we convey our highest appreciation to the Directors, Commissioners and all State-Owned Enterprise employees who have worked hard to achieve company targets including completing Government assignments.



Kami juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran pejabat dan pegawai Kementerian BUMN yang telah menunjukkan kinerja sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama terus berupaya untuk mewujudkan organisasi modern yang profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi serta mampu meningkatkan kontribusi BUMN untuk perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Melalui laporan ini, kami berharap masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian BUMN sepanjang tahun 2018. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus bekerja sama dan membantu Kementerian BUMN dalam melaksanakan perannya sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN.

Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

We also convey our appreciation to the panel of officials and employees of the Ministry of State-Owned Enterprise who have indicate their best performance. Let us continue to strive creating a modern, professional, integrated, high-performing organization and able to increase the contribution of State-Owned Enterprise to the nation's economy and society's welfare.

Through this report, we hope that the society and various interested parties can obtain an idea of performance results achieved by the Ministry of State-Owned Enterprise throughout 2018. Final word, we would like to thank all those who have sincerely worked together and assisted the Ministry of State-Owned Enterprise in implementing its role as an institution that has the task of formulating policies and coordination in the field of State-Owned Enterprise supervision.

Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 20 Februari 2019

Menteri BUMN / The Minister of State-Owned Enterprise

Rini M. Soemarno



Daftar Isi

Table of Content

- 2 One Family One Vision One Nation
- 4 Sekapur Sirih
Foreword of the 2018 Performance
- 7 Kata Pengantar Menteri BUMN Rini M. Soemarno
Foreword
- 10 Daftar isi
Table of Content
- 12 Ikhtisar Kinerja 2018
Performance Overview 2018
- 13 Ikhtisar Pengelolaan BUMN
Summary of SOE Portfolio
- 15 Investor Review
- 19 Peristiwa Penting Tahun 2018
Important Events 2018



Profil Kementerian BUMN

Profile of the Ministry of the SOE

- 28 Identitas Kementerian BUMN
Identity of the Ministry of the SOE
- 30 Logo
- 31 Kode etik
Code of Conduct
- 36 Sejarah Kementerian BUMN
Milestone
- 41 Visi & misi
- 47 Struktur Organisasi
Organization Structure
- 48 Profil Pejabat
Profile of Officials
- 58 Penghargaan
Awards

SDM sebagai Aset Utama Kementerian BUMN *Human Resources as the Main Asset*

- 66 Demografi SDM
Human Resources Demography
- 67 Pengelolaan SDM Kementerian BUMN
Human Resources Managemen of the SOE
- 68 Alih Status Pegawai
Transfer Status of Employees
- 70 Rekrutmen Pegawai
Employee Recruitment
- 72 Pengembangan SDM
Development of Human Resources
- 76 Penilaian Merit Sistem
Assessment of the Merit System
- 81 Aplikasi
Aplication
- 82 Menciptakan Pemimpin Masa Depan BUMN
Create the SOE Next Leader

Digitalisasi Proses Bisnis *Digitalizing Business Process*

- 99 Grand Design Pengembangan TI
Grand Design Information Technology Development
- 101 Cluster Publik
- 109 Cluster Internal
- 122 Cluster BUMN

Meningkatkan Nilai BUMN: Kontribusi Keuangan dan Agent Pembangunan *Increased of the SOE:*

- 136 Kontribusi Finansial
Financial Contribution

- 137 Agen Pembangunan
Development Agent
- 161 BUMN Hadir untuk Negeri
- 179 Holding
- 186 PT Freeport
- 188 Restrukturisasi
Restructure

Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Bersih *Bureaucratic Reform for Clean Governance*

- 220 Zona Integritas
Integrity Zone
- 223 Makin Baik
- 232 Akuntabilitas Kinerja
Performance Accountability
- 234 Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan
- 248 Capaian Kinerja
Performance Accountability
- 288 Hasil Assesment
Assessment Result

Wajah Baru Gedung Kementerian BUMN *New Look of the Ministry SOE Building*

Lampiran

- PK
- Renja
- Review Inspektorat
- Perbandingan Kinerja

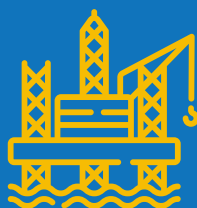
Ikhtisar Kinerja Tahun 2018

Performance Overview of 2018



Terbentuknya Holding BUMN Migas dengan induk PT Pertamina (Persero)

Establishment of Oil and Gas State-Owned Enterprise Holding with PT Pertamina (Persero) Holding



Terbentuknya Holding BUMN Pertambangan dengan induk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Establishment of Mining State-Owned Enterprise Holding with PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Holding



Akuisisi saham PT Freeport Indonesia dengan kepemilikan Indonesia menjadi 41,2%

Acquisition of PT Freeport Indonesia shares with Indonesian Ownership into 41,2%

Capaian Aset BUMN

Rp 8,097 T

Achievement of the State-Owned Enterprise Asset of IDR 8.097 Trillion



Capaian laba BUMN

Rp 203 T

Achievement of the State-Owned Enterprise profit of IDR 155.3 Trillion



Capaian Ekuitas BUMN

Rp 2.479 T

Achievement of the State-Owned Enterprise Equity of IDR 2.479 trillion



Capaian Capex BUMN

Rp 487 T

Achievement of the State-Owned Enterprise Capex of IDR 487 trillion

Kontribusi BUMN berupa pajak, dividen dan PNBPN ke Negara

Rp 422 T

Contribution of the State-Owned Enterprise in the form of tax, dividend and the Non-Tax State Revenues (PNBP) to the State of IDR 454 trillion

Ikhtisar Portofolio BUMN

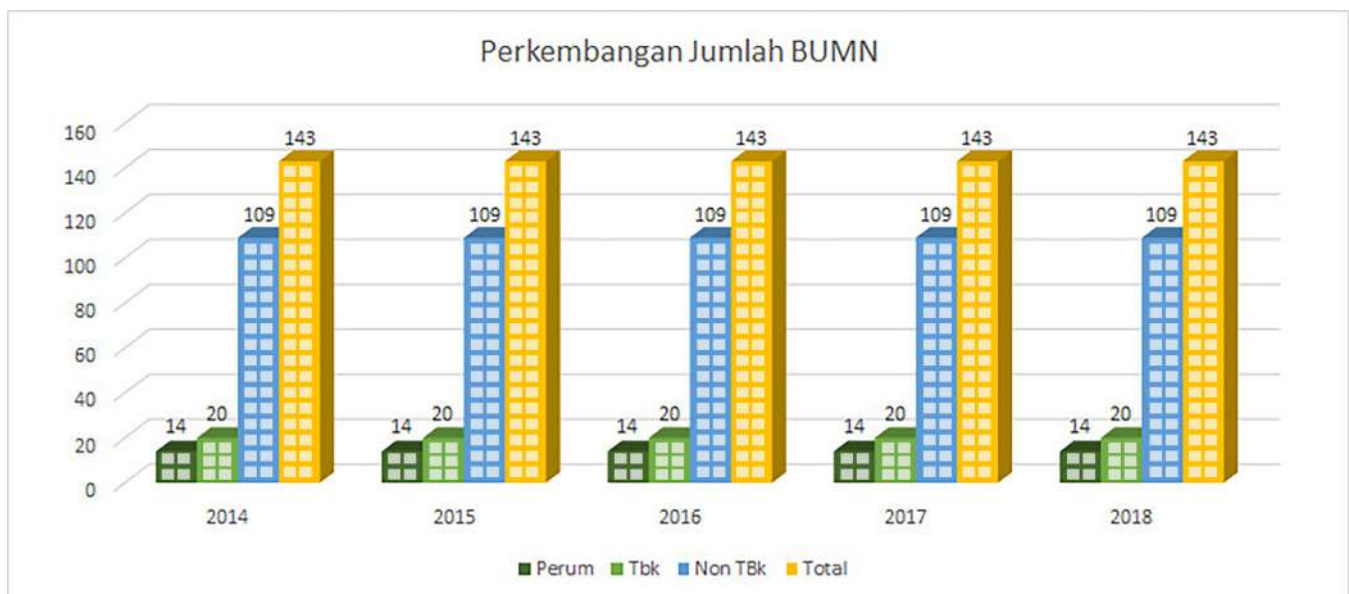
Summary Of BUMN Portfolio

Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dimana pada BUMN itu sendiri terdiri beberapa bentuk usaha seperti Perusahaan Perseroan, Perseroan terbuka, dan Perusahaan Umum.

The State-Owned Enterprise according to Act No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise is a business entity which entire or part of its capital is owned by the State through direct participation derived from separated State assets. Where the State-Owned Enterprise itself consist of several business forms such as Company's Company, open company, and Perum.

Adapun rekam jejak portofolio BUMN dapat dilihat pada infografis di bawah:

As for the track record of the State-Owned Enterprise's portfolio can be seen in below info-graphic:



Sepanjang periode 2014 - 2018 terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam upaya peningkatan nilai BUMN sebagai berikut:

1. PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) merger (bergabung) ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai risalah RUPS LB tanggal 15 Desember 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015.
2. Holding BUMN Pertambangan tanggal 29 November 2017 yaitu pengalihan saham negara pada PT Antam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk kepada PT Inalum (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017.
3. Holding BUMN PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke dalam PT Pertamina (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
4. Dalam rangka restrukturisasi, telah dilakukan penambahan modal oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ke dalam ekuitas PT Istaka Karya (Persero) sehingga menyebabkan kepemilikan Negara Republik Indonesia berkurang menjadi 7,66% yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018. Hal tersebut mengakibatkan status BUMN PT Istaka Karya (Persero) berubah menjadi Perusahaan Negara dengan Kepemilikan Minoritas.

During period 2014 - 2018, there are several strategic actions being taken by Ministry of BUMN to increase the value of BUMN as follows:

1. PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) merged into PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) in accordance with the minutes of General Meeting of Shareholders-LB on December 15th, 2015.
2. Mining State-Owned Enterprise Holding dated November 29th, 2017, namely the transfer of state shares to PT Antam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk and PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk to PT Inalum (Persero) based on Government Regulations Number 47 of 2017.
3. PT Perusahaan Gas Negara Tbk State-Owned Enterprise Holding into PT Pertamina (Persero) based on Government Regulations No. 6 of 2018 dated February 28th, 2018 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Pertamina Company (Persero).
4. In the framework of Restructuring, capital has been added by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) into the equity of PT Istaka Karya (Persero) which reduced ownership of the Republic of Indonesia into to 7,66% stipulated through Government Regulations No. 44 of 2018. This caused the status of PT Istaka Karya (Persero) State-Owned Enterprise changed into the State's Company (Perusahaan Negara) with Minority Ownership.



Kinerja Saham BUMN

Performance of SOE's Shares

BUMN telah berkontribusi besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar pada tahun 2018 mencapai 24,75 persen dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Prestasi ini tentu sangat membanggakan mengingat jumlah BUMN yang mencatatkan sahamnya di BEI hanya sekitar 4 persen yaitu 29 (dua puluh sembilan) perusahaan yang terdiri dari 16 (enam belas) BUMN dan 13 (tiga belas) anak perusahaan BUMN dari total Emiten di BEI yang mencapai 538 perusahaan. Selain itu, terdapat 4 (empat) emiten BUMN yang masuk dalam 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The State-Owned Enterprise has contributed greatly in the capital market sector with contribution of market capitalization in 2018 reaching 24, 75 percent of the total market capitalization in the Indonesia Stock Exchange (IDX). This achievement is certainly very encouraging considering that the amount of State-Owned Enterprise that listed their shares in the Indonesian Stock Exchange is only around 4 percent, namely 29 (twenty nine) companies which consist of 16 (sixteen) State-Owned Enterprise and 13 (thirteen) State-Owned Enterprise subsidiaries from the total issuing companies in the Indonesian Stock Exchange that reached 538 companies. In addition, there are 4 (four) State-Owned Enterprise issuers included in 10 (ten) issuers with the largest market capitalization, namely PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Empat BUMN yang masuk dalam 10 besar perusahaan dengan Kapitalisasi Terbesar di BEI per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

4 State-Owned Enterprises included in the top 10 companies with Largest Capitalizations on the Indonesia Stock Exchange per December 31st, 2018 are as follows:



Nilai Kapitalisasi Pasar Saham BUMN Selama Tahun 2015-2018

The Share Market BUMN Capitalization Value of 2015 - 2018



Kinerja emiten BUMN sejak tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2019 terus mencatatkan kinerja positif. Tahun 2015, total kapitalisasi pasar saham BUMN mencapai Rp 1.391,81 triliun dan naik menjadi Rp 1.686,13 triliun pada pembukaan pasar saham di awal tahun 2019. Nilai tersebut naik kurang lebih sebesar Rp 294,32 triliun atau 21.14 %.

Kinerja emiten BUMN selama 4 tahun terakhir mencatatkan beberapa emiten berkinerja paling prima yaitu emiten Bank BRI (kode BBRI), emiten PT Telkom (kode TLKM), emiten Bank Mandiri (kode BMRI), dan emiten Bank BNI (kode BBNI). Kinerja 4 saham BUMN tersebut senilai Rp 1.321,31 Triliun atau 78,36 % dibanding nilai total pasar saham BUMN.

Emiten Bank BRI pada tahun 2015 memiliki nilai kapitalisasi pasar saham sebesar Rp286,35 Triliun dan tumbuh secara signifikan di tahun 2019 menjadi Rp 444,49 Triliun atau meningkat sebesar 55%. Begitu pula pada Telkom yang sebelumnya pada tahun 2015 memiliki nilai pasar saham sebesar Rp 290,81 Triliun, pada tahun 2019 tumbuh positif menjadi Rp 372,47 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 28%.

Emiten Bank Mandiri pada rentang tahun 2015 hingga pada tahun 2019 mengalami peningkatan nilai kapitalisasi pasar saham sebesar 36%, dari semula memiliki nilai pasar saham sebesar Rp 250,63 Triliun menjadi Rp 341,88 Triliun. Begitu pula halnya pada Bank BNI yang mengalami peningkatan nilai kapitalisasi pasar saham sebesar 44% dari rentang waktu 2015-2019, dimana pada tahun 2015 nilai kapitalisasi pasar saham BNI sebesar Rp113,08 Triliun menjadi Rp 162,47 Triliun di tahun 2019.

Adapun pada awal tahun 2019, pergerakan indeks emiten BUMN (IDX BUMN20) secara gabungan terus memberikan kinerja yang menggembirakan. Sejak awal tahun, indeks emiten BUMN menguat sebesar 9,47%. Kenaikan emiten BUMN jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 3,48% dan LQ45 sebesar 2,57% pada periode yang sama.

Menghijanya indeks emiten BUMN tak bisa dilepaskan dari pergerakan dan kinerja positif beberapa BUMN di berbagai sektor, seperti properti dan konstruksi bangunan. Ada empat BUMN yang meramaikan sektor ini diantaranya adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKI), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Properti Tbk (PPRO). Emiten BUMN tersebut terus menghijau seiring program pemerintah yang menggalakkan pembangunan infrastruktur sampai beberapa tahun mendatang.

Seluruh capaian positif di atas, tak lepas dari peran Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN agar BUMN terus tumbuh dan berkembang, dan menciptakan kinerja positif pada pasar saham

State-Owned Enterprise issuer performance since 2015 to 2019 often achieve positive performance. In 2015, the total of State-Owned Enterprise Exchange reaches IDR 1.391,81 Trillion and increasing to IDR 1.686,13 Trillion at Initial Public Offering in start of the year 2019. The Value increase at IDR 294,32 Triliun or 21.14 %.

State-Owned Enterprise issuer performance for 4 last year record several best issuer performance such as Bank BRI (BBRI), PT Telkom (TLKM), Bank Mandiri (BMRI) and Bank BNI (BBNI). The Performance of State-Owned Enterprise issuer at IDR 1.321,31 Or 78,36 % by the total of State-Owned Enterprise market share.

Bank BRI issuer in 2015 has market share value at Rp286,35 Trillion and has Significant growth at 2019 to IDR 444,49 Trillion or increase at 55%. Same with Telkom, in 2015 has market share value at IDR 290,81 Trillion to IDR 372,47 Trillion or increasing at 28%.

Mandiri Bank issuer among 2015 and 2019 face the enhancement of share market capitalization value from IDR 250,63 Trillion to IDR 341,88 Trillion. Same as with BNI that through the increasing of share market capitalization value at 44% between 2015-2019, which is at 2015 BNI Share Market Capitalization value at IDR 113,08 Trillion to IDR 162,47 Trillion in 2019.

At the beginning of 2019, state-owned enterprise issuer index movement (State-Owned Enterprise IDX) keep on giving exciting performance compositely. At the beginning of the the year, State-Owned Enterprise issuer strengthened at 9,47%. State-Owned Enterprise issuer escalation is higher than IDX Composite at 3,48% and LQ45 at 2,57% on same period.

The Green on State-Owned Enterprise Issuer Index can not ignore the positive movement and performance in several State-Owned Enterprise in various sector, such as PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKI), PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT PP Properti Tbk (PPRO). That State-Owned Enterprise Issuer keeping green in a row with government program that improve infrastructure development until several upcoming years.

All Positive Achievement above, cannot ignore the role of Ministry of State-Owned Enterprise as the State-Owned Enterprise Mentor to make state-owned enterprise keep grow and develop, and create positive performance at stock market.

Tidak hanya mampu bersaing pada pasar saham nasional, BUMN juga mampu menembus Forbes 2000 pada tahun 2018, yakni 2000 perusahaan terbaik dunia di tahun 2018. BUMN yang masuk Forbes 2000 tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Not only able to compete in the national stock market, BUMN is also able to penetrate Forbes 2000 in 2018, namely the 2000 world's best companies in 2018. BUMN which enters Forbes 2000 in 2018 can be seen in the following table:

Forbes 2000 Ranking	Company	Sales	Profits	Assets	Market Value
(2018)	Company	Sales	Profits	Assets	Market Value
415	Bank Rakyat Indonesia	\$9,3 billion	\$2,2 billion	\$81,3 billion	\$27,7 billion
489	Bank Mandiri	\$8,1 billion	\$1,7 billion	\$79,8 billion	\$24,1 billion
720	Telkom Indonesia	\$9,6 billion	\$1,6 billion	\$15 billion	\$25,8 billion
903	Bank Negara Indonesia	\$4,9 billion	\$1 billion	\$50,8 billion	\$11,1 billion

Pada tahun 2018, PT Pertamina salah satu BUMN yang bergerak dibidang Migas juga masuk jajaran perusahaan kelas dunia versi Global Fortune 500, yaitu Ranking 253.

In 2018, PT Pertamina as one of SOEs engaged in oil and gas sector was included into World Class Company in the version of Global Fortune 500, which is rank 253.



Peristiwa Penting

Important Events



2 Januari 2018

Peresmian Kereta Bandara Soekarno Hatta oleh Presiden Joko Widodo Bersama Menteri BUMN Rini M. Soemarno Rini M. Inauguration of Soekarno Hatta Airport Train by President Joko Widodo with Minister of State Owned Enterprises, Rini Soemarno



12 Januari 2018

Peninjauan layanan navigasi udara di Bandara Udara Internasional Sentani oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno
Review of air navigation services at Sentani International Airport by Minister of State Owned Enterprises, Rini Soemarno



11 Januari 2018

Launching Pelayanan Kewirausahaan Pertanian di Indramayu oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno

Launching of Agricultural Entrepreneurship Services in Indramayu by The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno, Rini M. Soemarno



18 Januari 2018

Penandatanganan MoU Pengadaan Material Komponen Kereta Api antara INKA, Krakatau Steel, Barata Indonesia, Pindad, Inti, dan Inalum

MoU Signing for Procurement of Railway Component Materials between INKA, Krakatau Steel, Barata Indonesia, Pindad, Inti, and Inalum



21 Januari 2018

Peresmian Tol Trans Sumatra ruas Bakauheni – Terbanggi oleh Presiden RI

Inauguration of Trans Sumatra Toll Road for Bakauheni - Terbanggi section by the President of the Republic of Indonesia



8 Februari 2018

Pencanangan “Sinergi BUMN Mendukung Sumbar sebagai Destinasi Wisata” oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno Rini M. Soemarno, Wagub Sum-Bar Nasrul Abit, Dirut Pegadaian Sunarso.

Declaration of “State-Owned Enterprise Synergy Supports West Sumatra as Tourist Destination” by The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno, Rini M. Soemarno, West Sumatra Deputy Governor, Nasrul Abit, President Director of Pawnshop, Sunarso.



26 Februari 2018

Peraihan Procurement Award 2018 Kementerian Keuangan

The 2018 Award Procurement Achievement by the Ministry of Finance



26 Maret 2018

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Bantuan Pembangunan Bedah Rumah Eks Pejuang Integrasi Timor-Timur Cooperation Agreement signing, House Surgical Development Assistance of Ex Timor-Timur Integration Fighters



8 April 2018

Menteri BUMN Rini M. Soemarno menyerahkan bantuan bedah rumah kepada pegawai kementerian BUMN

Minister of State Owned Enterprises, Rini Soemarno submitted house surgical assistance to the Ministry of State-Owned Enterprise's employee



13 April 2018

Peringatan HUT Kementerian BUMN RI ke 20

The 20th Anniversary of the Ministry of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia

Tanggal/Date	Kegiatan Penting
5 Mei 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno melakukan panen raya padi bersama para petani Kebonagung, Imogiri. Panen raya ini merupakan 'Gerakan stabilisasi harga pangan'. Program sinergi BUMN untuk kesejahteraan petani dan stabilisasi harga pangan. The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno is planned to do a rice harvest with the farmers of Kebonagung, Imogiri. This harvest is a 'food price stabilization movement'. The State-Owned Enterprise synergy program for farmer's welfare and stabilization of food prices.
21 Mei 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) meluncurkan program 'Magang Mahasiswa Bersertifikat'. The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno, Rini Soemarno, along with Human Capital Indonesia Forum (FHCI) launched the 'Magang Mahasiswa Bersertifikat' program.
26 Mei 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno memberi pembekalan kepada 4.000 Account Officer (AO) program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Se-Jawa Barat. Menurut Rini, program Mekaar merupakan bentuk nyata keberpihakan Pemerintah melalui BUMN dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno briefed 4,000 Account Officers (AO) of Mekaar program (Supervising Economy of Prosperous Family) throughout West Java. According to Rini, Mekaar program is a concrete form of government's partisanship through the State-Owned Enterprise in improving the economy of small societies.
29 Mei 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno menyaksikan penandatanganan kontrak jual beli antara PT INKA dan Philippines National Railways (PNR) di Manila, Filipina. Kontrak tersebut memuat tentang pembelian empat trainset Diesel Multiple Unit atau Kereta Rel Diesel (KRD) dengan nilai USDz 21,4 juta, serta pembelian tiga lokomotif dan 15 kereta penumpang senilai USD 26,1 juta. The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno witnessed the signing of a sale and purchase contract between PT INKA and the Philippines National Railways (PNR) in Manila, Philippines. The contract contains purchase of four Diesel Multiple Unit train sets or Diesel Rail Units (Kereta Rel Diesel) with a value of USD 21.4 million, as well as the purchase of three locomotives and 15 passenger trains worth USD 26.1 million.
5 Juni 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno meresmikan masjid pintar PT Telkom The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno officially opened masjid pintar Telkom
9 juni 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno Apresiasi PT Angkasa Pura I atas beroperasinya Terminal Baru Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno Appreciates PT Angkasa Pura I for the operation of the New Terminal of Ahmad Yani International Airport, Semarang
28 Juni 2018	Peresmian Pembentukan BUMN Fund oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno Inauguration to the Establishment of Fund SOE by The Minister of State-Owned Enterprise, Rini M. Soemarno,
29 Juni 2018	PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah menandatangani Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (29/6/2018). Perjanjian tersebut menjadi dasar akusisi saham PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PGN. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) has signed a Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) on Friday (06/29/2018). This agreement is the basis of acquisition of Pertamina Gas (Pertagas) shares by PGN.

12 Juli 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno memantau secara langsung pemasangan instalasi listrik gratis untuk 10.000 rumah tak layak huni di Tasikmalaya, dibiayai oleh kementeriannya melalui PT Pertamina dan PLN. The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno directly monitors the set-up of free electricity installations for 10,000 uninhabitable houses in Tasikmalaya, financed by her ministry through PT Pertamina and PLN.
25 Juli 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno menghadiri Investment Forum di AS dan menyampaikan potensi yang dimiliki BUMN The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno attended the Investment Forum in the US and conveyed potential of the State-Owned Enterprise
31 Juli 2018	Pengambilalihan Blok Rokan oleh PT Pertamina Takeover of the Rokan Block by PT Pertamina
13 Agustus 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno meresmikan base transceiver station (BTS) tenaga surya untuk sistem telekomunikasi di Desa Oebela, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Rote sendiri merupakan pulau paling selatan Indonesia. The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno Inaugurated Balkondes Ngargogondo, the 19th Balkonds built by the State-Owned Enterprise
13 Agustus 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno meresmikan Base Transceiver Station (BTS) Tenaga Surya untuk sistem telekomunikasi pulau terluar yang terletak di Desa Oebela, Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (13/8/2018). The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno inaugurated solar power base transceiver station (BTS) for telecommunications systems in Oebela Village, Rote Island, East Nusa Tenggara (NTT) Rote Island itself is the southernmost island of Indonesia.
24 Agustus 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno resmikan infrastruktur listrik tegangan tinggi pertama di Papua The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno inaugurated the first high-voltage electricity infrastructure in Papua
24 Agustus 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno meresmikan 16 proyek strategis nasional (PSN) di Kawasan Timur Indonesia senilai Rp 2,153 triliun di Jayapura, Papua pada Jumat (24/08/2018). The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno, Rini M. Soemarno, inaugurated 16 national strategic projects (PSN) in the Eastern Region of Indonesia worth IDR 2.153 trillion in Jayapura, Papua on Friday (24/08/2018).
10 September 2018	Terbentuk Holding BUMN Migas The establishment of Oil and Gas State-Owned Enterprise Holding
13 September 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno Resmikan Balkondes Ngargogondo, Balkonds ke - 19 yang di bangun BUMN The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno Inaugurated Balkondes Ngargogondo, the 19th Balkonds built by the State-Owned Enterprise
20 September 2018	Jerman-Menteri BUMN Rini M. Soemarno Rini M. Soemarno menyaksikan penandatanganan MoU antara 3 BUMN dengan Perusahaan Besar Eropa yaitu PT Len Industri (Persero), PT Industri Kereta Api/INKA (Persero), PT KAI (Persero). Adapun PT Pertamina (Persero) yang juga akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan Eropa lainnya pada Jumat 21 September 2018. Germany-SOE Minister Rini M. Soemarno witnessed the signing of the MoU between 3 State-Owned Enterprises and European Large Companies namely PT Len Industri (Persero), PT Kereta Api Industry / INKA (Persero), and PT KAI (Persero). PT Pertamina (Persero) will also sign a cooperation agreement with other European companies on Friday, September 21, 2018.

Tanggal/Date	Kegiatan Penting
2 Oktober 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno meninjau langsung sinergi BUMN untuk Pulihkan Stabilitas Daerah terdampak gempa di Palu sekaligus menyalurkan bantuan kepada masyarakat. The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno directly reviews the synergy of State-Owned Enterprise to Recover the Stability of Regions affected by the earthquake in Palu while simultaneously channeling assistance to the society.
3 Oktober 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno membuka IBD Expo/ Pameran BUMN di Grand City, Surabaya The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno opened the IBD Expo/BUMN Exhibition in Grand City, Surabaya
5 Oktober 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno Hadiri Pelepasan Produk Perikanan Hasil Produksi BUMN di Makassar The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno Attended the Release of Fishery Products Produced by the State-Owned Enterprise in Makassar
9 Oktober 2018	Menteri BUMN Rini M. Soemarno meresmikan Indonesia Pavilion di Bali The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno inaugurated the Indonesia Pavilion in Bali





9 Oktober 2018

Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengunjungi Sigi, Sulteng guna memastikan BUMN Telah dibangun 550 Hunian Sementara

The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno visited Sigi, Central Sulawesi to ensure that the State-Owned Enterprise had been built in 550 temporary shelters



9 November 2018

Maskapai Garuda Indonesia secara resmi mengelola operasional Maskapai Sriwijaya Air dan Nam Air



23 - 24 Nov 2018

Kunjungan Presiden RI ke Tol Lampung

Visit of Indonesian President to Lampung Toll Road



29 November 2018

Pembentukan Holding BUMN Pertambangan sebagai babak baru BUMN Pertambangan

Establishment of Mining State-Owned Enterprise Holding as a new round of Mining State-Owned Enterprise



7 Desember 2018

Peresmian Museum Maritim Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pelindo II

Inauguration of the Indonesian Maritime Museum at Tanjung Priok Port by PT Pelindo II



13 Desember 2018

Acara Spirit of Millennials Games Day 2018 bersama Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Rini M. Soemarno dan PT Telkom Indonesia (Persero)

Spirit of Millennials Games Day 2018 event with The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno and PT Telkom Indonesia (Persero)



14 Desember 2018

Peresmian Tol ruas Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 km

Inauguration of the Toll Road for Banda Aceh-Sigli section of 74 km



20 Desember 2018
Peresmian Tol Trans Jawa
Inauguration of Trans Java
Toll Road



21 Desember 2018
Pembelian saham PT
Freeport Indonesia senilai Rp
55 triliun
Purchase of PT Freeport
Indonesia shares worth IDR
55 trillion



1

Profil Kementerian BUMN

*Profile of the Ministry of
the State-Owned Enterprise*



BUMN mampu untuk mendukung program pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pencapaian kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

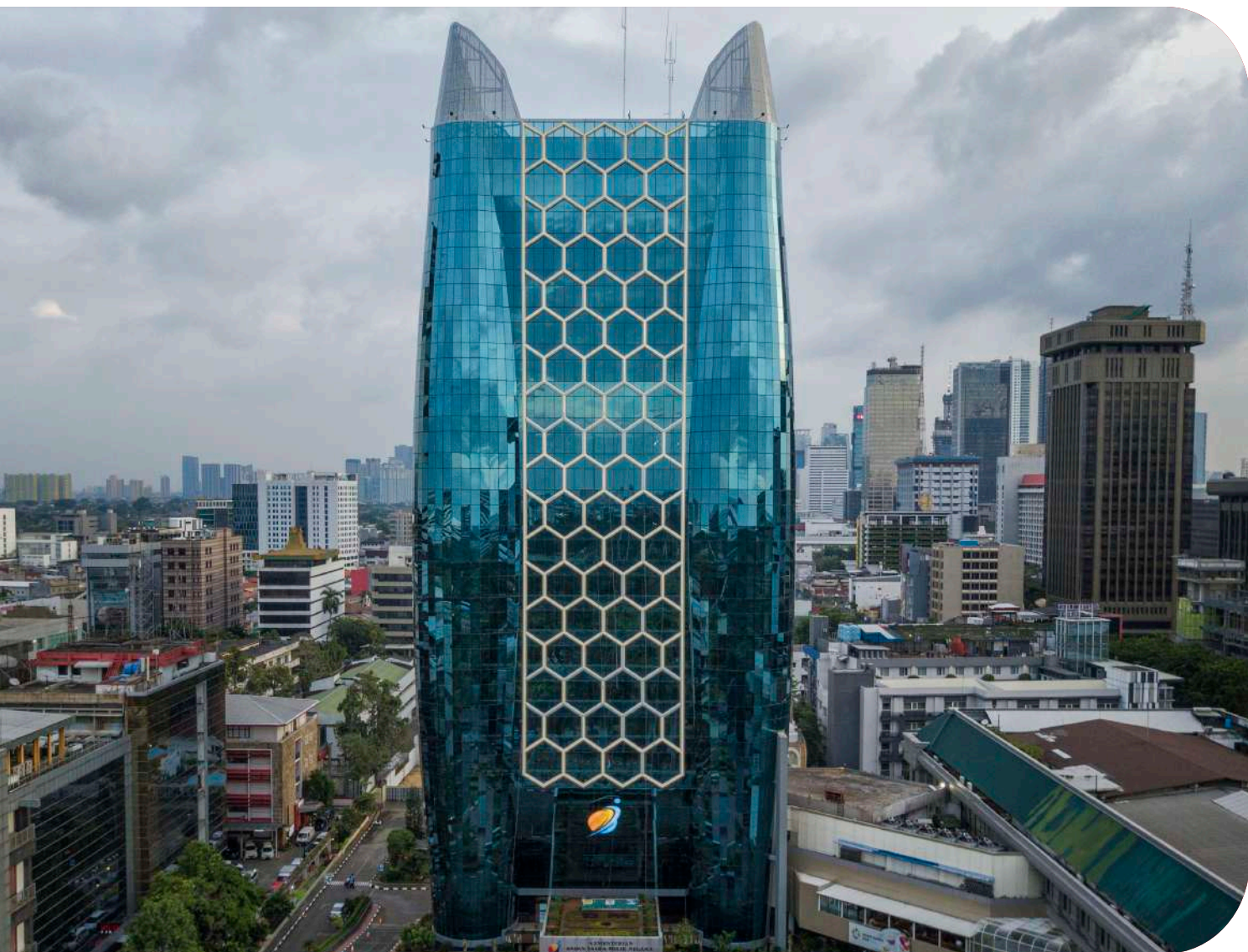
BUMN (State-Owned Enterprise) is able to support economic development program that are oriented on achieving the prosperity of all the people of Indonesia.

Tanri Abeng,
*Former Minister for the Empowerment of BUMN
(State-Owned Enterprise) of Indonesia*



Profil Kementerian BUMN

Profile of the Ministry of the State-Owned Enterprise



Kementerian BUMN RI

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta

10110 Indonesia, Telp 021-29935678 Fax

021-29935742

Website : www.bumn.go.id

Instagram: @kementerianbumn

Twitter : @KemenBUMN

Facebook: @KementerianBUMNRI

Youtube : Kementerian BUMN RI



Amanat Konstitusi

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 2 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui registrasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik Negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
Contribute to the development of the national economy in general and state revenues in particular;
- Mengejar keuntungan;
Chasing profit;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
Organize public benefits in the form of provision of high quality and adequate goods and / or services for the fulfillment of many people's live;

Mandate of the Constitution

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 Paragraph (2) states that “Production branches which are important for the State and which affect the livelihood of the public shall be controlled by the State”. In executing this constitutional duty, the State controls all economic forces through sectoral regulations which are the authority of The Minister of Technical Issues and State Ownership on the state-owned business units under the SOEs Minister's authority.

Based on Law No. 19 Year 2003 concerning SOEs, Article 2, the purpose and objective establishment is to:

- Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
Become a pioneer in business activities that cannot be implemented by the private sector and cooperatives;
- Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Actively participate in coaching and giving assistance to small entrepreneurs, cooperatives and the community.





Makna Logo

Logo



Bentuk:

Bentuk Dasar Lingkaran:

Lingkaran merupakan titik awal perubahan dunia dimana pergerakannya memberikan energi perubahan dan kekuatan. Lingkaran juga menunjukkan ketidakterbatasan kesatuan nan harmoni, integritas dan kesempurnaan

Garis Lengkung:

Garis garis lengkung menuju ke kanan atas dalam logo ini melambangkan pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan

Warna:

Kuning Orange:

Warna Kuning Orange, merupakan simbol warna kuning matahari, yang menggambarkan sumber energi produktif bagi dunia.

Warna Kuning Orange, juga melambangkan Etos dan Semangat Kerja setiap insan di Kementerian BUMN. Hal tersebut menggambarkan peran Kementerian BUMN sebagai sumber energi transformasi korporasi BUMN menuju *"World Class Company"*

Biru:

Simbolisasi dari warna global dan universal terkait korporasi yang siap bersaing secara global. Personifikasi dari "karakter utama" (makna psikologis warna biru: kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas) yang melandasi tata kelola yang baik Kementerian BUMN.

Kesiapan beradaptasi dalam era ekonomi biru, dimana prinsip ekonomi biru adalah memanfaatkan modal alam dan teknologi yang berorientasi pada kelestarian alam, melalui efektivitas biaya produksi dan konsumsi, peningkatan kualitas hidup manusia dan makhluk alam, pengurangan risiko lingkungan hidup demi keharmonisan kehidupan alam dan manusia.

Dalam ekonomi biru, BUMN ditantang untuk memanfaatkan sesuatu yang sudah baik menjadi nilai tambah baru. Artinya bukan mengolah limbah menjadi menjadi pro lingkungan melainkan memanfaatkan limbah secara kreatif dan inovatif, dengan nilai tambah baru. Mendaur ulang dengan satu tujuan mulia, untuk pertumbuhan, untuk mendukung pembangunan dan mengangkat derajat ekonomi masyarakat Indonesia (*pro-growth pro-poor pro-development*). Dengan kata lain dalam mengembangkan bisnis BUMN berbasis triple bottom line "P": *People, Planet dan Profit*



Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN

The Ministry of State-Owned Enterprise Apparatus' Code of Conduct

Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat pada Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Kementerian maupun dalam pergaulan sehari-hari. Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN sendiri, di susun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; dan Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor: PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian BUMN.

Maksud dan Tujuan

Kode Etik dimaksudkan untuk:

1. Mewujudkan aparatur Kementerian BUMN yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas,
2. Peningkatan disiplin dan mengamalkan etika aparatur di lingkungan Kementerian BUMN

Kode Etik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan disiplin pegawai;
2. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
3. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kementerian;
4. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan menjaga iklim kerja yang kondusif; dan
5. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional.

Penerapan Kode Etik Insan Kementerian BUMN

Di tahun 2018, Kementerian BUMN telah menekankan pada setiap pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk patuh pada kode etik yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai dasar Etika Aparatur Kementerian BUMN, yakni sebagai berikut:

The Ministry of State-Owned Enterprise Apparatus' Code of Conduct is a guideline for attitudes, behavior, actions, values and norms binding the Ministry of State-Owned Enterprise's employees in implementing their main duties and functions as the Ministry Apparatus and in their daily interactions. The Ministry of State-Owned Enterprise Apparatus' Code of Conduct is arranged based on Government Regulation No. 42 Year 2004 concerning Corps Soul Guidance and Civil Servants' Code of Conduct; and the State-Owned Enterprise Ministerial Regulation Number: PER-04/MBU/2012 concerning the Code of Conduct for the Ministry of State-Owned Enterprise's Apparatus.

PURPOSE AND OBJECTIVES

The Code of Conduct is intended to:

1. Embody the Ministry of State-Owned Enterprise's apparatus who are clean, authoritative, and responsible, as well as has integrity in implementing their duties,
2. Enhance discipline and implement the Ministry of State-Owned Enterprise's apparatus code of conduct.

The Code of Conduct aims to:

1. Improve employee discipline;
2. Guarantee the maintenance of order;
3. Maintain the Ministry of State-Owned Enterprise's dignity, honor, image and credibility;
4. Guarantee smooth implementation of duties and maintain a favorable work climate; and
5. Create and maintain professional working condition and behavior.

PEOPLE'S CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION

In 2018, the Ministry of State-Owned Enterprise has emphasized all employees in the Ministry to comply with the Ministry of State-Owned Enterprise's Code of Conduct, in accordance with the basic values of the Ministry of State-Owned Enterprise Apparatus' Code of Conduct as follows:



1. Integritas

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen dan kepatuhan pada peraturan yang ada serta mempertimbangkan benturan kepentingan.

- Bersikap, berperilaku, dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan.
- Konsisten dalam bersikap dan bertindak.
- Memiliki komitmen terhadap visi dan misi Kementerian.
- Disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas.
- Komitmen terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab.
- Melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Menghindari benturan kepentingan yang menyebabkan suatu tindakan tidak objektif.

2. Profesionalisme

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang mendalam, pengalaman yang sesuai dan keterampilan yang memadai.

- Setiap aktivitas pelaksanaan tugas harus menggunakan alasan dan pertimbangan yang benar dalam rangka menerapkan kemandirian dan objektivitasnya;
- Berorientasi terhadap hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas;
- Bekerja sesuai dengan standar kinerja.

3. Produktivitas

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan berbasis pada prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi baik dari sisi waktu, biaya dan sumberdaya lainnya.

- Mampu bekerja keras.
- Mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif.
- Memberikan kontribusi signifikan bagi target yang telah ditetapkan.

4. Inisiatif

Yaitu bersikap, bertindak dan mengambil keputusan dengan berlandaskan pada semangat proaktif,

1. Integrity

To behave, act and make decisions based on the system of values, morals, honesty, commitment and compliance with prevailing regulations and to take conflicts of interest into consideration.

- Behave and act honestly with oneself and the surrounding people.
- Be consistent in behaving and making actions.
- Have a commitment to the Ministry's vision and mission.
- Be disciplined and responsible in implementing duties.
- Have a commitment to the completion of duties and responsibilities.
- Implement duties based on prevailing rules and regulations.
- Avoid conflicts of interest that lead to a biased action.

2. Professionalism

To behave, act and make decisions based on in-depth knowledge, appropriate experience and adequate skills.

- All duties must be implemented based on the right reasons and considerations in order to implement independence and objectivity;
- Orientation to work results that are systematic, directed and excellent;
- To work according to performance standards.

3. Productivity

To behave, act and make decisions based on the principles of effectiveness and efficiency in terms of time, cost and other resources.

- Be able to work hard.
- Be able to use available resources efficiently and effectively.
- Give significant contributions to the set targets.

4. Initiative

To behave, act and make decisions based on proactive, pioneering and sustainable improvement spirits.

- Be able to convey new ideas to improve the

kepeloporan dan perbaikan berkelanjutan.

- Mampu menyampaikan ide-ide baru dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian.
- Mempelopori tindakan untuk mencapai tujuan Kementerian dalam batas kewenangannya
- Mengambil tindakan positif sesuai dengan batas kewenangannya melebihi apa yang diminta untuk mencapai tujuan.
- Bersikap proaktif tanpa diminta atau tanpa menunggu pihak lain.
- Mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- Bertekad kuat untuk melakukan tugas dengan perbaikan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kementerian BUMN juga memastikan pada seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk patuh dan mentaati setiap kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk penerapan kode etik aparatur Kementerian BUMN.

Ministry's performance.

- Pioneer actions to achieve the Ministry's objectives within the authority limit.
- Take positive action in accordance with authority limit beyond what is requested to achieve the goal.
- Be proactive without being asked or without waiting for other party.
- Solve problems arising in the implementation of duties.
- Have a strong determination to do the job with sustainable improvement.

Meanwhile, the Ministry of State-Owned Enterprise also emphasizes all employees in the Ministry of State-Owned Enterprise to comply with and adheres to all obligations and prohibitions that have been set, as a form of the Ministry of State-Owned Enterprise's Code of Conduct implementation as follows:





Kewajiban yang harus dilaksanakan terkait penerapan kode etik aparatur Kementerian BUMN adalah:

1. Menghormati kebebasan dan perbedaan agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
2. Bekerja sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh Kementerian.
 - a. Menjaga nama baik serta bertindak untuk kepentingan negara, pemerintah, Kementerian, dan tidak untuk kepentingan pribadi dan golongan.
 - b. Menggunakan statusnya sebagai aparatur Kementerian untuk hal-hal yang seharusnya dilakukan.
 - c. Melaporkan aktivitas yang bertentangan dengan hukum, prosedur serta kode etik kepada pejabat yang berwenang.
 - d. Berlaku jujur dan obyektif dalam melakukan tindakan, proses analisis, penyampaian usulan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan serta kebijakan yang dilakukan.
 - e. Mengoptimalkan sumber daya Kementerian dalam perwujudan BUMN ke arah visi Kementerian.
3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki oleh Kementerian.
4. Memberikan pelayanan kepada pihak lain dan atau sesama aparatur dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.
5. Menaati ketentuan jam kerja, peraturan

The Obligations that must be conducted with regard to the Ministry of State-Owned Enterprise Apparatus' Code of Conduct implementation are as follows:

1. Respect the freedom and differences of religion, beliefs, culture and customs of others.
2. Perform works in accordance with the Ministry's basic values.
 - a. Maintain good reputation and act for the interests of the state, the government, the Ministry, and not for personal or group interests.
 - b. Use his/her position as Ministry apparatus to do things that should be done.
 - c. Report activities that are contrary to laws, procedures, and code of conduct, to the competent authorities.
 - d. Be honest and objective in implementing actions, analysis process, submission of proposals for problem solving, decision making and the policies taken.
 - e. Optimize the Ministry's resources in the realization of SOEs towards the Ministry's vision.
3. Secure data and/or information owned by the Ministry.
4. Serve other parties and/or fellow apparatus to do their best in performing duties.
5. Adhere to work hour rules, administrative regulations,



administratif dan perintah kedinasan dengan penuh tanggungjawab.

6. Melaporkan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Kementerian.
8. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

and work orders with full responsibility.

6. Report gratification in accordance with laws and regulation.
7. Be responsible for the use of the Ministry's inventories.
8. Behave, appear and communicate in a polite manner.

Larangan terkait penerapan kode etik aparatur Kementerian BUMN adalah:

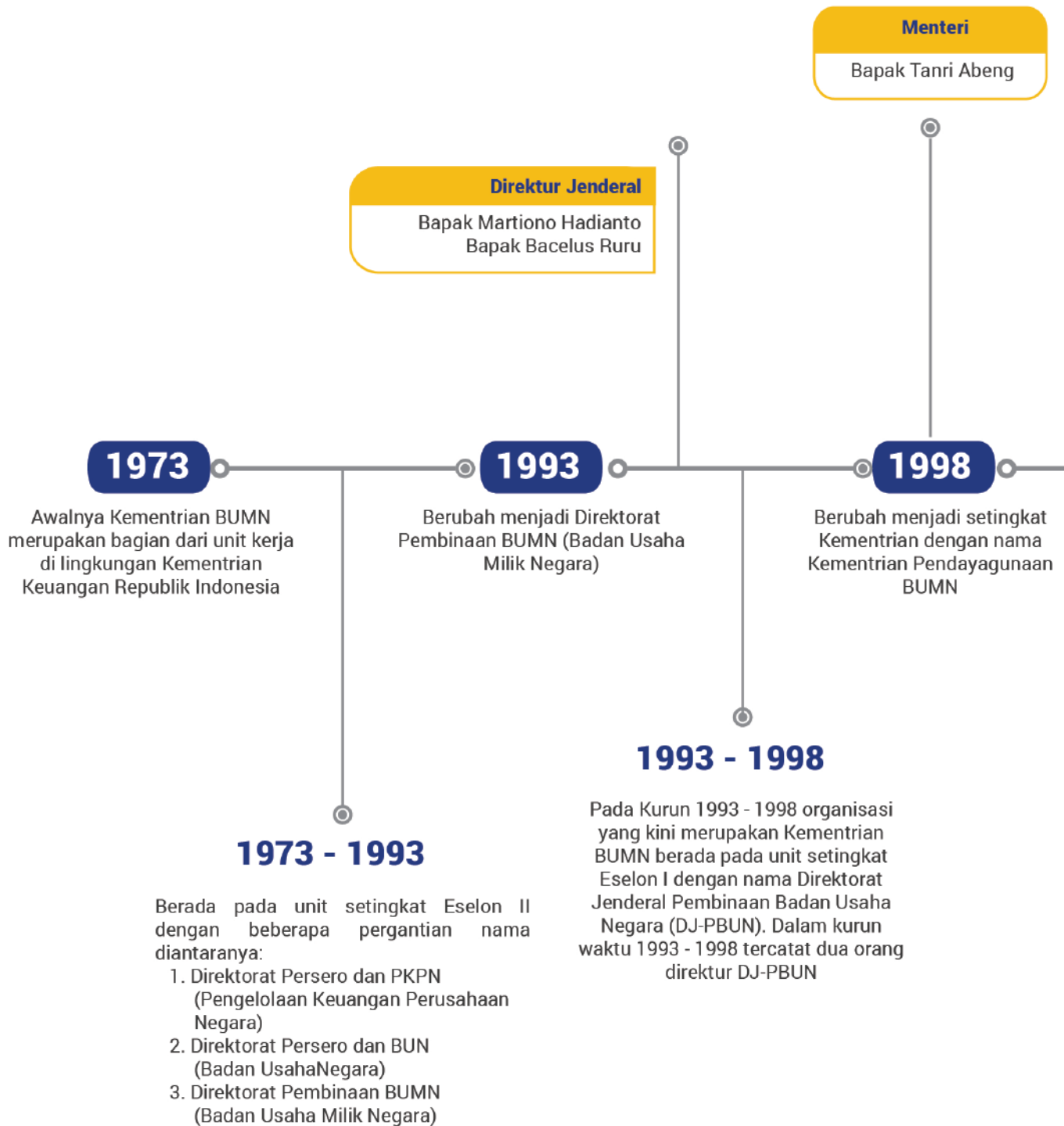
1. Bersikap diskriminatif dalam bertugas.
2. Menjadi pengurus dan anggota partai politik.
3. Ikut serta atau diikutsertakan sebagai pelaksana atau peserta atau menghadiri kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dan atau pemilihan kepala daerah dan atau anggota legislatif.
4. Menyalahgunakan kewenangan jabatan
- a. Menyalahgunakan kedudukan dan statusnya sebagai aparatur Kementerian untuk hal-hal yang tidak patut dilakukan.
- b. Sengaja secara perseorangan dan atau bekerja sama dalam aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan serta prosedur dan kebijakan Kementerian yang berlaku.
5. Menyalahgunakan data dan atau informasi Kementerian.
6. Menghilangkan aset negara, dokumen milik negara/ Kementerian, dan barang bukti.
7. Menyalahgunakan aset dan dokumen milik negara/ Kementerian.
8. Menggunakan fasilitas Kementerian untuk selain kepentingan Kementerian.
9. Menerima dan memberi suap.
10. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Kementerian.
11. Membeli saham perdana BUMN dalam program Initial Public Offering (IPO).
12. Melakukan bisnis apapun juga dengan BUMN.

Prohibitions related to the Ministry of State-Owned Enterprise's Code of Conduct implementation are as follows:

1. To act discriminatory in performing duties.
2. To involve in management or as a member of a political party.
3. To participate in or be included as executor or participant or to attend the presidential election campaign and/or regional head campaign and/or legislative election campaign.
4. To conduct abuse of authority:
 - a. Through misuse of position and status as Ministry apparatus for inappropriate matters.
 - b. By intentionally doing activities, individually and/ or in collaboration with other parties, which violate prevailing regulations and the Ministry's procedures/ policies.
5. To conduct abuse of the Ministry's data and/ or information.
6. To conduct omission of state assets, state/ministerial documents, and evidence.
7. To conduct abuse of the state/ministry's assets and documents.
8. To use the Ministry's facilities not for the Ministry's interests.
9. To receive and give bribes.
10. To conduct any contrary action to the norms of decency that could damage the Ministry's image and dignity.
11. To purchase the initial shares of State-Owned Enterprise in the Initial Public Offering (IPO) program.
12. To conduct any business with the State-Owned Enterprise.

Sejarah Kementerian BUMN

History Of The Ministri Of SOE – MILESTONE





2001

Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN

Bapak Laksamana Sukardi
digantikan Bapak Rozy Munir

2004 (Kabinet Gotong Royong)

Menteri BUMN

Bapak Laksamana Sukardi

2004-2006

(Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I)

Menteri BUMN

Bapak Sugiharto

2014 - 2019

(Kabinet Gotong Royong)

Menteri BUMN

Ibu Rini M. Soemarno

2001 - SEKARANG

Kembali menjadi setingkat Kementerian setelah
sebelumnya kembali menjadi organisasi
setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan

2000 - 2001

Direktur Jenderal

Bapak I Nyoman Tjager

Pada rentang tahun 2000 - 2001
struktur organisasi Kementerian
sempat dihapuskan dan kembali
menjadi setingkat Eselon I di
Lingkungan Departemen
Keuangan

2006 - 2009

(Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I))

Menteri BUMN

Bapak Sofyan A. Djalil

2009 - 2011

(Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I)

Menteri BUMN

Bapak Mustafa Abubakar

2009 - 2011

(Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II)

Menteri BUMN

Bapak Dahlan Iskan



BUMN

Hadir untuk negeri





Kementerian BUMN sebagai organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, Kementerian BUMN telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.

Pembinaan BUMN sebelum tahun 1973 dilakukan secara terpisah oleh masing-masing Departemen Teknisnya. Berbagai aturan mengenai BUMN (atau sebelumnya disebut sebagai Perusahaan Negara) antara lain Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1973, maka pembinaan terhadap Perusahaan Negara/BUMN dilimpahkan dari Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku pemegang saham dari penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Negara/BUMN kepada Menteri bidang teknis yang terkait. Mengingat Departemen Keuangan hanya berperan dalam penatausahaan kepemilikan Negara atas saham Perusahaan Negara/BUMN tersebut, maka sejak 1973 tersebut, unit yang menangani Perusahaan Negara/BUMN berada pada unit setingkat Eselon II.

Pada tahun 1983 terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan, organisasi pembinaan Perusahaan Negara/BUMN yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian.

The Ministry of State-Owned Enterprise ("Ministry of State-Owned Enterprise") as a Government organization with Main Duty and Function to oversee State Companies or State-Owned Enterprises (SOEs) in the Republic of Indonesia. During its journey, the Ministry of State-Owned Enterprise has undergone a number of changes and developments.

The establishment of State-Owned Enterprise before 1973 was implemented separately by the respective Technical Departments. Diverse legislation concerning State-Owned Enterprise (or previously referred to as Perusahaan Negara or State Enterprise) includes Law No. 19 Prp. Year 1960 on State Enterprise, Law No. 9 Year 1969 on the Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 1969, and Government Regulation No. 12 Year 1969 on Perusahaan Perseroan (PERSERO).

With the issuance of Presidential Instruction No. 11 Year 1973, the development of State Enterprises/State-Owned Enterprise is delegated from the Minister of Finance in his position as shareholder of the State capital participation in the State Enterprise/State-Owned Enterprise to the Minister of the related Technical Area. Considering that the Ministry of Finance's role was only to administer the State's share ownership in the State Enterprises/State-Owned Enterprise, since 1973, the unit handling State Enterprises/State-Owned Enterprise was a Second Echelon unit.

In 1983 upon the issue of Government Regulation No. 3 Year 1983 regarding Procedures for Guiding and Overseeing Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum and Perusahaan Perseroan, State Enterprise/State-Owned Enterprise development organization which previously was only at the Directorate/Second Echelon level, were upgraded to the Directorate General/First Echelon level, under the name Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).

Considering the significant role, function and contribution of State-Owned Enterprise to state finances, in 1998 the Government of the Republic of Indonesia changed the form of State-Owned Enterprise developing and managing organization to be at the Ministry level.



Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), struktur organisasi Kementerian ini sempat digabungkan dengan Badan Penanaman Modal sehingga menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. Dari tanggal 23 Agustus 2000, keberadaan Kementerian yang membina BUMN sempat dihapus dan dikembalikan lagi menjadi setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan Presiden Megawati, organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan menjadi setingkat Kementerian. Pada tanggal 9 Agustus 2001, kala itu kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan penanaman modal.

During the period of Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Government, the Ministry's organizational structure was once combined with the Capital Investment Coordinating Board (Badan Penanaman Modal) to become the State Ministry of Capital Investment and State-Owned Enterprise Development. From August 23, 2000, the existence of a Ministry overseeing the State-Owned Enterprise was removed and returned to a First Echelon within the Ministry of Finance. However, when the Republic of Indonesia's leadership succession took place, under the Kabinet Gotong Royong (Mutual Assistance Cabinet) under the leadership of President Megawati, the organization overseeing State-Owned Enterprise was restored to be at the Ministry Level. At that time, the organizations to oversee SOEs and capital investment were separated.

Visi dan Misi

VISION and MISSION

Visi dan misi Kementerian BUMN selaras dengan Pemerintah dalam menjadikan Indonesia Hebat. Semua itu tertuang dalam konsep Trisakti yang menjadi basis dalam pembangunan karakter bangsa ke depan sehingga Indonesia mampu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan

The vision and mission to the Ministry of BUMN is in harmony with the Government in making Indonesia Great. All those are contained in the concept of Trisakti which is the basis in developing national character in the future so that Indonesia is capable of political sovereignty, economically independent, and having personality in cultural area





Komitmen Terhadap RPJMN

COMMITMENT TOWARD RPJMN

Sebagai instansi Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi sejalan dengan visi dan misi Presiden yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan misi tersebut dituangkan dalam nawacita yang terdiri dari 9 (sembilan) agenda.

As a Government institution that has duties and responsibilities in managing state assets, the Ministry of State-Owned Enterprise has vision and mission that are in line with the President's vision and mission, which is to reach and realize an Indonesia that has political sovereignty, economic independence and cultural character based on mutual assistance. The vision and mission are outlined in the RPJMN consisting of 9 (nine) agendas.

- | | |
|---|--|
| 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. | 1. Bringing the Country back to protect the entire nation and give a sense of security to all Citizens; |
| 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. | 2. Maintaining the government's presence by building a clean, effective, democratic, and trustworthy government governance; |
| 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. | 3. Building Indonesia from the periphery by strengthening the regions and villages within the framework of the unitary state; |
| 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. | 4. Strengthening the State's presence in conducting system reformation and law enforcement that are corruption-free, dignified and reliable; |
| 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | 5. Improving the life quality of Indonesian human through improved quality of education and training with a view to promote the people's welfare; |
| 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. | 6. Increasing people's productivity and competitiveness in international markets so that the Indonesian people can advance and rise together with other Asian nations; |
| 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. | 7. Realizing the nation's self-reliance; |
| 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. | 8. Revolutionizing the nation's character by making policies to rearrange the national education curriculum; |
| 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga | 9. Enhancing Indonesia's diversity and social restoration by conducting education on diversity and creating spaces for citizens' dialogues. |



Tugas dan Fungsi

Duty and Function

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, maka terdapat 2 (dua) kata kunci yang menjadi arahan bagi Kementerian BUMN yaitu:

1. Pembina BUMN yang profesional.
2. Kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2015 tentang kementerian BUMN, susunan organisasi tugas dan fungsi Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Tugas pokok
Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

In line with the Government's vision and mission as well as the intention and purpose of establishing BUMN based on Act Number 19 of 2003, thus there are 2 (two) keywords which becomes direction for the Ministry of BUMN, namely:

1. Professional BUMN supervisors.
2. The optimal contribution of BUMN to the national economy.

Based on Presidential Regulation no. 41 of 2015 concerning the Ministry of BUMN, the organizational structure of tasks and functions to the Ministry of BUMN are as follows

1. Position
The Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) is led by The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarnos (BUMN) under and responsible to the President.
2. Main tasks
The Ministry of BUMN has the task of organizing government affairs in the field of State-Owned Enterprises (BUMN) within the government to assist the president in organizing state government.



3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas Infrastruktur Bisnis Badan Usaha Milik Negara perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas Infrastruktur Bisnis Badan Usaha Milik Negara;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan

3. Function

In implementing this task, the Ministry of BUMN holds the following functions:

- Formulation and stipulation of policies in the field of strategic business initiatives, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth, restructuring, business development, as well as increasing the capacity of Business Infrastructure to the State-Owned Enterprises (BUMN) in formulating and establishing policies in the field of developing State-Owned Enterprises (BUMN);
- Coordination and synchronization to the implementation of policies in the field of strategic business initiatives, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth, restructuring, business development, and increasing the capacity of Business Infrastructure to the State-Owned Enterprises (BUMN);
- Coordinating the implementation of tasks, supervision and providing administrative support within the ministry of state-owned enterprises



pemberian dukungan administrasi di lingkungan kementerian badan usaha milik negara;

- d. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Dengan telah ditetapkan struktur organisasi kementerian BUMN dalam peraturan presiden nomor 41 tahun 2015 tentang kementerian BUMN, dan ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian BUMN, Susunan Organisasi Eselon I Kementerian BUMN terdiri dari :

1. Sekretariat Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian BUMN.
2. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi (IAF) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi.
3. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata (ELKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan dan pariwisata.
4. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media (PISM) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN

(BUMN);

- d. Management of State Property that is the responsibility of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN); and
- e. Supervision of the task implementation within the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).

With the Ministry of BUMN's organizational structure stipulated in presidential regulation no 41 of 2015 concerning Ministry of BUMN, and followed up with the stipulation of the Minister of BUMN regulation number PER-10/MBU/07/2015 concerning organization and working procedures to the Ministry of BUMN, Echelon I Organization Structure consists of:

1. Secretariat to the Ministry of BUMN has the task of coordinating task implementation, supervision and providing administrative support to all organizational units within the ministry of BUMN.
2. The Deputy of Agro and Pharmaceutical Industry (IAF) has the task of organizing policy formulation and coordination and synchronization of policy implementation in the formulation of strategic business initiatives, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth of BUMN in the plantation, agriculture, irrigation, fisheries, forestry and pharmacy industrial sectors.
3. The Deputy for Energy, Logistics, Regions and Tourism (ELKP) has the task of organizing policy formulation and coordination and synchronization of policy implementation in the field of strategic business initiatives, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth of BUMN in the energy industrial sector, trade, logistics, warehousing, territory and tourism.
4. The Deputy for Mining, Strategic Industry and Media (PISM) has the task of organizing policy formulation as well as coordinating and synchronizing the implementation of policies in the field of strategic business initiatives, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating



di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media.

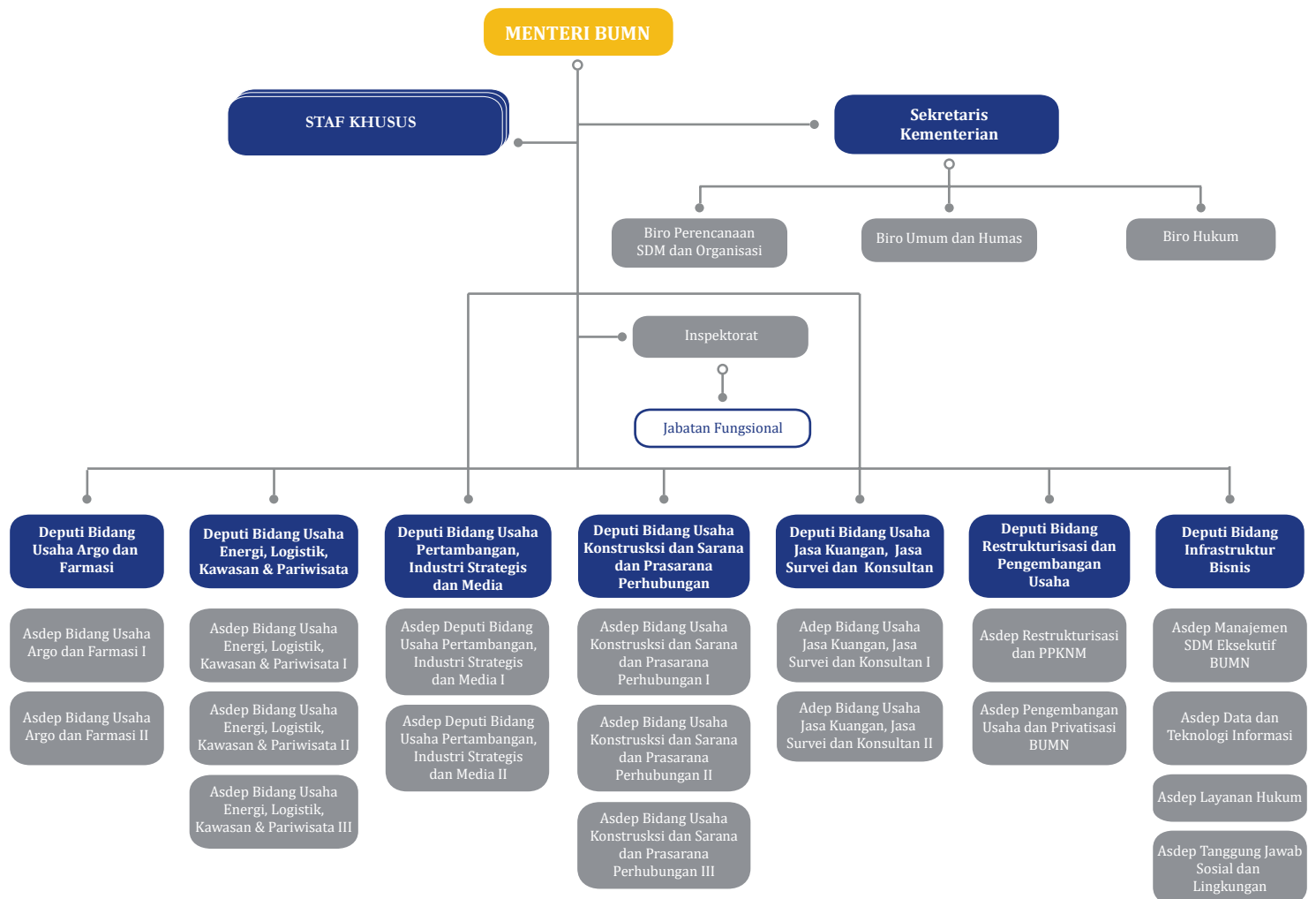
5. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara.
6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan (JKJSK) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan.
7. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha (RPU) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, pengembangan usaha, dan kebijakan peta jalan (road map) BUMN.
8. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif, pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, layanan hukum BUMN, serta pengelolaan data dan teknologi informasi kementerian BUMN.
9. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengenai masalah komunikasi strategis dan hubungan industrial BUMN.

sustainable growth of BUMN in the mining industry, cement, strategic industry, printing, telecommunications and media.

5. The Deputy of Construction and Transportation Infrastructure and Facilities (KSPP) has the task of organizing policy formulation as well as coordinating and synchronizing policies implementation in the field of strategic business initiatives, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth of BUMN and entities controlled by BUMN both directly and indirectly in construction industry sector, as well as land, sea and air transportation facilities and infrastructure.
6. The Deputy for Financial Services, Survey Services and Consultants (JKJSK) has the task of organizing policy formulation as well as coordinating and synchronizing the implementation of policies in the formulation of strategic business initiatives, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth of BUMN and entities controlled by BUMN both directly and indirectly in the banking industry, insurance, financing services, survey services, and consulting sectors.
7. The Deputy for Business Restructuring and Development (RPU) has the task of organizing policy formulation and coordination and synchronization of policy implementation in the field of restructuring, utilization of portfolio to minority ownership companies, business development, and policies on BUMN road maps.
8. The Deputy of Business Infrastructure has the task of organizing policy formulation and coordination and synchronization of policy implementation in the field of increasing executive human resource management capacity, management of social and environmental responsibilities, BUMN legal services, as well as data management and information technology to the ministry of BUMN.
9. The Expert Staff for Strategic Communication and Industrial Relations has the task of reviewing the minister of BUMN on the issue of strategic communication and industrial relations of BUMN.

10. Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengenai masalah kebijakan tata kelola, sinergi, dan investasi BUMN. Struktur organisasi kementerian BUMN dapat digambarkan sebagai berikut:

10. Expert Staff in the Field of Governance, Synergy and Investment has the task of providing review to the minister of BUMN concerning issues of governance policies, synergies, and BUMN investments. The organizational structure to the ministry of BUMN can be described as follows





Profil Pejabat Kementerian BUMN

Profile of Officials to the Ministry of BUMN

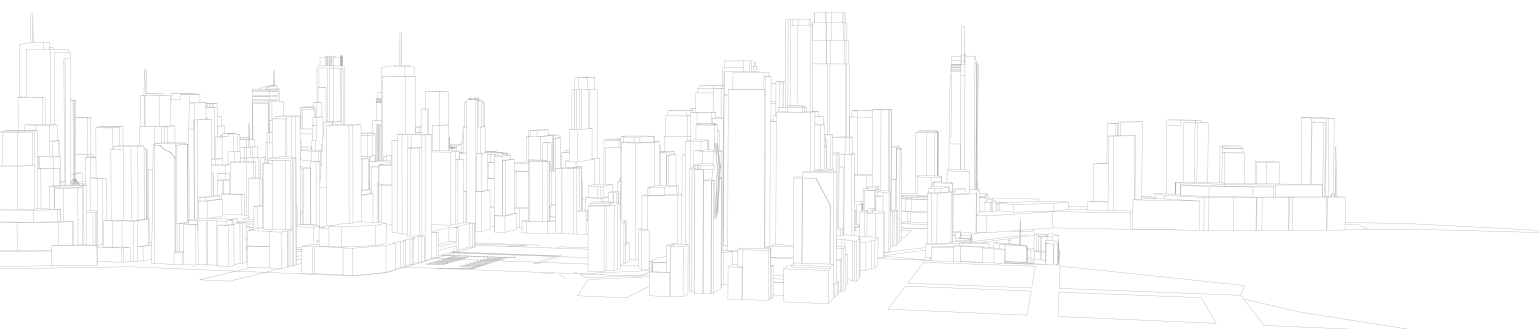


Menteri BUMN Rini M. Soemarno | Minister of State Owned Enterprises

Rini Mariani Soemarno

Rini Mariani Soemarno lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Beliau diangkat oleh Presiden Joko Widodo dan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Kerja sejak 26 Oktober 2014 untuk masa bakti 2014-2019. Sarjana Ekonomi lulusan Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat, tahun 1981 ini, termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong, dari tahun 2001 hingga tahun 2004.

Rini Mariani Soemarno was born in Maryland, United States, June 9th, 1958. She was appointed by President Joko Widodo and served as The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarnos (BUMN) in the Working Cabinet since October 26th, 2014 for 2014-2019 service periods. This Bachelor of Economics graduated from Wellesley College, Massachusetts, USA, in 1981, including one of the ministers appointed by professionals. She previously served as the Minister of Industry and Trade in the Mutual Cooperation Cabinet, from 2001 to 2004.





Sekretaris Kementerian BUMN
Secretary to the Ministry of SOE

Imam Apriyanto Putro

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 18 Maret 2013 hingga sekarang. Tidak hanya berpengalaman di dalam kementerian. Ia juga banyak berkontribusi di luar jabatan struktural di sejumlah BUMN

Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) since March 18th, 2013 until now. Not only experienced in the ministry. He also contributed a lot outside structural positions in several BUMNs.

Quotes Kinerja

Tahun 2018 adalah tahun Inovasi. Berbagai karya dihadirkan untuk meningkatkan layanan dan kinerja Kementerian BUMN yang kesemuanya mengarah pada layanan secara paperless.

Performance Quotes

2018 is the year of Innovation. Various works were presented to improve the service and performance to the Ministry of BUMN, all of which directing to paperless services.

Sinadine (Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik) mampu mempercepat proses pengelolaan persuratan. Aplikasi Makin Baik (Manajemen Kinerja Berbasis Elektronik) telah mengubah budaya kerja dan pengelolaan kinerja.

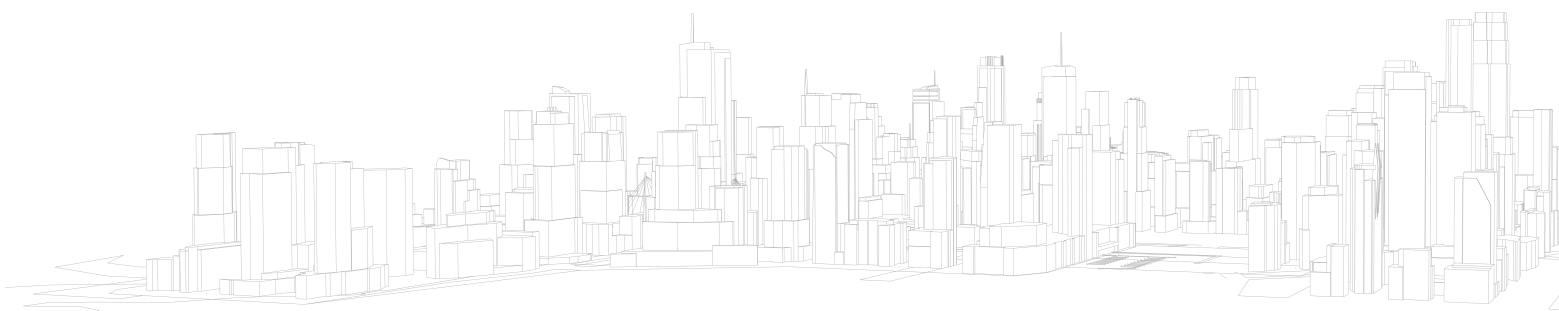
Sinadine (Electronic Service Manuscript System) is able to accelerate the process of mail management. Makin Baik Application (Electronic Based Performance Management) has changed work culture and performance management.

Kementerian BUMN juga memiliki wajah baru berupa Gedung Kementerian BUMN dengan tampilan yang lebih modern dan elegan.

The Ministry of BUMN also has a new look in the form of the Ministry of BUMN Ministry with a more elegant and modern look.

Seluruh inovasi hadir untuk memberikan yang terbaik bagi Kementerian BUMN dan BUMN.

All innovations are present to provide the best for the Ministry of BUMN and BUMN.





Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi
Deputy of Agro and Pharmaceutical Industry Business Fields

Wahyu Kuncoro

Menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 9 Februari 2016 hingga sekarang. Sebelum bekerja di Kementerian BUMN, Ia memiliki banyak pengalaman profesional di berbagai bidang industri dan infrastruktur.

Quotes Kinerja

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan. Penurunan harga jual komoditas kelapa sawit dan gula, perubahan kebijakan pemerintah a.l. pencabutan subsidi benih, transformasi Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai/ BPNT), dan semakin kecilnya margin obat dalam e-katalog berdampak pada kinerja BUMN. Tahun 2019 kita akan fokus pada penguatan daya saing dan peningkatan nilai perusahaan melalui pembentukan holding BUMN Sektor Farmasi, refocusing bisnis inti masing-masing perusahaan, penguatan bisnis retail dengan dukungan hulu, dan akselerasi realisasi investasi dari dana PMN.

Served as Deputy of Agro and Pharmaceutical Industry Business Fields at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) since February 9th 2016 up to this moment. Before working at the Ministry of BUMN, he had a lot of professional experience in various fields of industry and infrastructure.

Performance Quotes

2018 is a challenging year. Decrease in selling prices of palm oil and sugar commodities, changes in government policy among others revocation of seed subsidies, transformation of Beras Sejahtera (Rastra) Subsidies into Rastra Sosical Assistance and Non Cash Food Ai/BPNT, and smaller margins of drugs in e-catalogs have an impact on the BUMN performance. In 2019 we will focus on strengthening competitiveness and increasing corporate value through the establishment of Pharmaceutical Sector BUMN holding, refocusing the core business of each company, strengthening the retail business with upstream support, and accelerating investment realization from PMN funds.



Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata
Deputy of Energy, Logistics, Regions and Tourism Business Fields

Edwin Hidayat Abdullah

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ia juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Quotes Kinerja

Gejolak perekonomian global di tahun 2018 menjadi tantangan tersendiri bagi BUMN. Alhamdulillah, dengan pondasi yang lebih baik melalui sinergi BUMN dan dukungan masyarakat Indonesia, BUMN mampu melewatinya dengan kinerja yang terbilang baik. Di tahun 2019, BUMN tetap terus berbenah, memperkuat pondasi usaha dengan melakukan berbagai transformasi agar dapat terus berada di garis depan pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas usaha dan memberikan pemerataan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Deputy of Energy, Logistics, Regions and Tourism to the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), He also served as Deputy President Commissioner of PT Pertamina (Persero).

Performance Quotes

The global economic turmoil in 2018 is a challenge for BUMN. Thankfully, with a better foundation through the synergy of BUMN and the support of Indonesian society, BUMN is able to go through it with a fairly good performance. In 2019, BUMN continue to improve, strengthen the business foundation by implementing various transformations in order to continue to be at the forefront of activators of economic growth while maintaining business stability and provide equal benefits for Indonesian society.



Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Deputy of Mining, Strategic Industry and Media Business Fields

Fajar Harry Sampurno

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang. Ia memiliki banyak pengalaman di bidang keuangan dan pertambangan

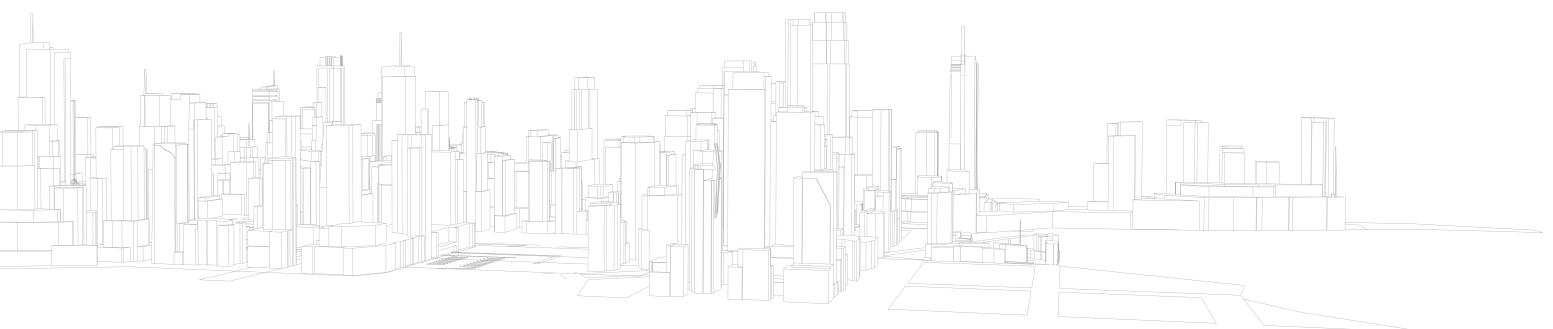
Deputy of Mining, Strategic Industry and Media Business Fields at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) since July 27th, 2015 up to this moment. He has a lot of experience in finance and mining fields.

Quotes Kinerja

“Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sampai dengan bangsa itu berusaha mengubahnya sendiri. Sebagai BUMN, jangan pernah berharap pihak lain berubah untuk BUMN tetapi BUMN harus bertransformasi dan Insya Allah pihak lain akan mengikuti dan paham. Hal ini pula yang terjadi pada tahun 2018 dimana PT Inalum berhasil mengambil sebagian besar saham PT Freeport Indonesia dan mulailah babak baru bisnis pertambangan BUMN.

Performance Quotes

“God does not change the fate of a nation until the nation tries to change it themselves.” As BUMN, do not ever expect the other party to change to BUMN but BUMN shall transform and hopefully other parties will follow and understand it. This also happened in 2018 where PT Inalum succeeded in taking most of PT Freeport Indonesia’s shares and starting a new round of BUMN mining business.





Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Deputy of Construction and Transportation Facilities and Infrastructure
Business Fields

Ahmad Bambang

Menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 3 November 2017 hingga sekarang. Ia sempat meniti karier di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1988 hingga Februari 2017, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama Pertamina.

Quotes Kinerja

Tahun 2018 merupakan tahun luar biasa. Tantangan BUMN untuk segera menuntaskan berbagai proyek strategis nasional sering kali mendapatkan sorotan dari media nasional dan internasional. Kami terus berkarya memberikan yang terbaik untuk bangsa.

Motto saya adalah “Jangan pernah menyerah. Gagal Ulangi, Salah Perbaiki, Berhenti Mati.”

Served as Deputy of Construction and Transportation Facilities and Infrastructure Business Fields at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) since November 3rd, 2017 up to this moment. He had a career in PT Pertamina (Persero) from 1988 to February 2017, with his last position as Deputy President Director of Pertamina.

Performance Quotes

2018 is a Year full of Innovation, Creativity by prioritizing BUMN Synergy which has succeeded in pushing the performance achievement in 2018. As for 2019, the thing which needs to be completed immediately is supporting the holding program of Super Holding.

My motto is

People of BUMN is the nation talent Indonesia is the freedom country In that case, BUMN's People must play a role for the nation progress, and completely ready to overcome the neighboring countries



Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan
Deputy of Financial Services, Survey Services and Consultants Business
Fields

Gatot Trihargo

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 10 Juni 2015 hingga sekarang. Sebelum menjabat di Kementerian BUMN, Ia banyak berkontribusi di bidang keuangan, industri, dan infrastruktur.

Quotes Kinerja

Tahun 2018 memberikan berbagai tantangan bagi Industri Jasa Keuangan di Indonesia. Di sepanjang tahun, BUMN Sektor Perbankan dan Asuransi telah mengambil berbagai peran penting sebagai agen of development di Tanah Air. BUMN senantiasa didorong agar berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

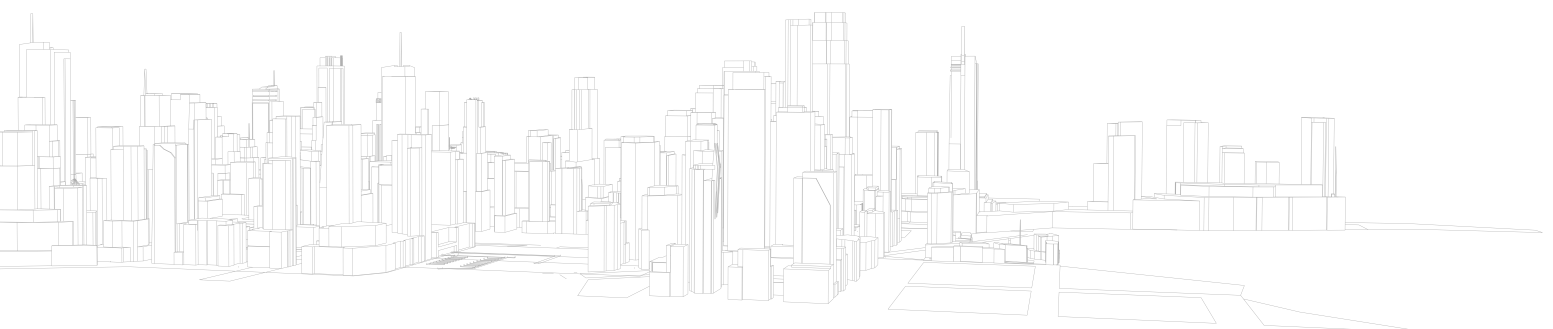
Semoga BUMN dapat terus berkembang dan berperan aktif sebagai Agent of Development dalam pembangunan nasional.

Deputy of Financial Services, Survey Services and Consultants Business Fields at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) since June 10th, 2015 up to this moment. Before serving at the Ministry of BUMN, he contributed a lot in the fields of finance, industry and infrastructure.

Performance Quotes

2018 provides various challenges for Financial Services Industry in Indonesia. Throughout the year, the BUMN Banking and Insurance Sector have taken various important roles as an agent of development in the state. BUMN is always encouraged in order to innovate to improve service to the society.

Hopefully BUMNs can continue to develop and play an active role as Agent of Development in national development.





Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis
Deputy of Business Infrastructure

Hamba

Menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 9 Februari 2016 hingga sekarang. Selain memiliki keahlian di bidang, Ia juga banyak berkontribusi di bidang industri dan komunikasi.

Quotes Kinerja

Tahun 2018 merupakan Tahun yang penuh dengan Inovasi, Kreativitas dengan mengedepankan Sinergi BUMN telah berhasil mendorong pencapaian kinerja tahun 2018. Adapun pada tahun 2019, hal yang ingin segera dituntaskan adalah mendukung program holding Super Holding.

Motto saya adalah

People of BUMN is the nation talent Indonesia is the freedom country In that case, BUMN's People must be a main role for the nation progress, and completely ready to overcome the neighboring countries

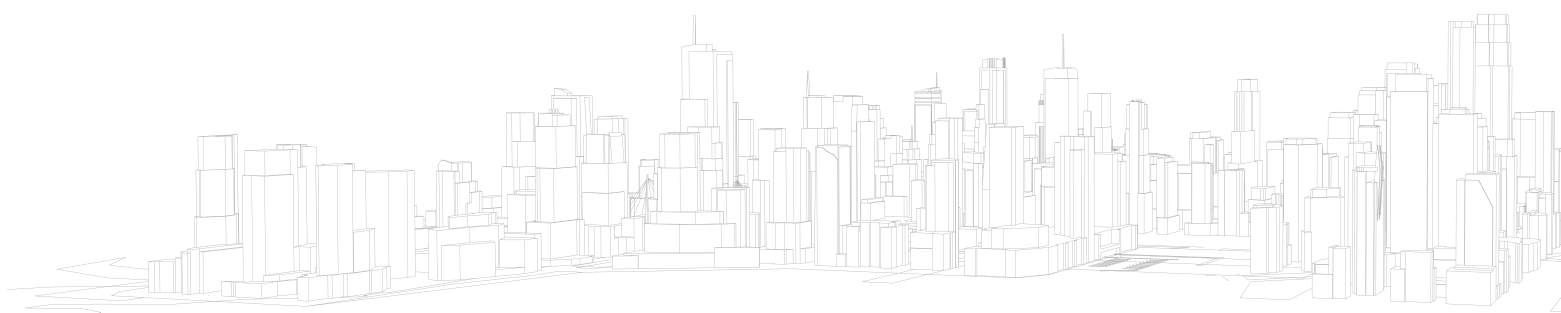
Served as Deputy for Business Infrastructure at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) from February 9th, 2016 up to this moment. Besides having expertise in the field, he also contributes a lot in the industrial and communication fields.

Performance Quotes

2018 is a Year full of Innovation, Creativity by prioritizing BUMN Synergy which has succeeded in pushing the performance achievement in 2018. As for 2019, the thing which needs to be completed immediately is supporting the holding program of Super Holding.

My motto is

People of BUMN is the nation talent Indonesia is the freedom country In that case, BUMN's People must play a role for the nation progress, and completely ready to overcome the neighboring countries





Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha
Deputy of Business Restructuring and Development

Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 27 Juli 2017 hingga sekarang. Sebelum memiliki jabatan di Kementerian BUMN, Ia sempat menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Danareksa (Persero) dan Direktur Keuangan PT Aneka Tambang (Persero).

Quotes Kinerja

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh dengan terobosan-terobosan baru untuk membangun BUMN agar semakin maju. Hal utama adalah terbentuknya Holding BUMN Pertambangan dan Holding BUMN Migas.

Tahun 2019, semoga target pembentukan holding BUMN lain bisa terlaksana dengan lancar.

Motto saya adalah "Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." by Winston Churchill

Deputy of Business Restructuring and Development at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) since July 27th, 2017 up to this moment. Before having a position at the Ministry of BUMN, he had served as Business Director of PT Danareksa (Persero) and Finance Director of PT Aneka Tambang (Persero).

Performance Quotes

2018 is a year full of new breakthroughs to build BUMN to be more advanced. The main thing is the establishment of Mining BUMN Holding and Oil and Gas BUMN Holding.

In 2019, hopefully the target of establishing another BUMN can be implemented smoothly.

My motto is "Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts."
-By Winston Churchill-





Penghargaan Kementerian BUMN

Award of the Ministry of State-Owned Enterprise

1. WTP selama 12 tahun

WTP for 12 Years







2. Penghargaan dari Kementerian Keuangan selaku Kuasa Pengelola Barang Milik Negara atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2016.

Award from the Ministry of Finance as an Authority of the State-Owned Enterprise's management toward an excellence performance in the 2016 State-Owned Enterprise's management.



- 3.. Procurement Award Kategori Percepatan Pengadaan
Procurement Award of the Procurement Acceleration Category





4. Penghargaan dari Menteri Keuangan atas kerjasama dalam pelaksanaan barang/jasa secara elektronik sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas belanja pemerintah melalui pengadaan yang modern, efisien dan akuntabel.

Award from the Minister of Finance toward collaboration in the implementation of goods/services electronically as an effort to realize government's expenditure quality enhancement through a modern, efficient and accountable procurement.



5. Penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai Kementerian/ Lembaga/ Instansi yang telah bekerja sama fengan Kementerian Keuangan dalam menyukkseskan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Award from the Minister as Institutions/Ministries that has collaborated with the Ministry of Finance in succeeding the procurement of the government's goods/services electronically.



6. Sewindu Pusat LPSE

LPSE Centre



7. JDIH





8. Keterbukaan Informasi Badan Publik Cukup Informatif Tahun 2018

Public Entity Information Disclosure is quite informative in 2018



Penghargaan ini diberikan oleh Komisi informasi Pusat Republik Indonesia
This award is provided by the Central Information Commission of the Republic of Indonesia

9. Piagam Penghargaan dari BKN

Award Charter of the State Civil Servant Agency





KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

2

SDM sebagai Aset Utama

Human Resources as the Main Asset



Di usia Kementerian BUMN yang ke 21 tahun 2019, Kementerian BUMN harus lebih dewasa dan mandiri. Kedewasaan itu diwujudkan dengan saling sinergi di antara keluarga BUMN, serta lebih bekerja keras untuk rakyat.

Rini Soemarno,
The Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) of Indonesia

SDM Sebagai Aset Utama

Human Resources as the Main Asset

Demografi SDM Kementerian BUMN

Human Resources Demography to the Ministry of State-Owned Enterprise

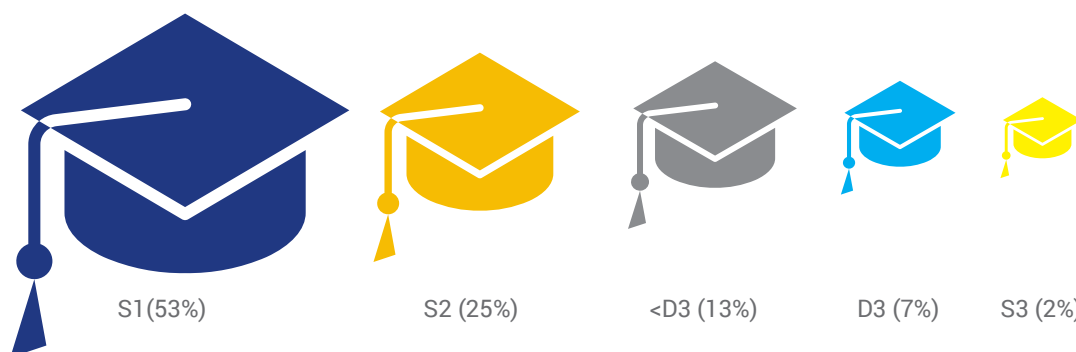
Total jumlah pegawai Kementerian BUMN apabila dijumlah dengan CPNS Kementerian BUMN makan berjumlah 398 Orang, dimana apabila didasarkan pada hal Gender, tingkat pendidikan, dan Usia/Umur dapat dilihat dari grafik berikut:

The total number of employees of the Ministry of State-Owned Enterprise when summed up with the Civil Servants of the Ministry of State-Owned Enterprise amounted to 398 people, whereby if it is based on Gender, education level, and Age can be seen from the following graph:

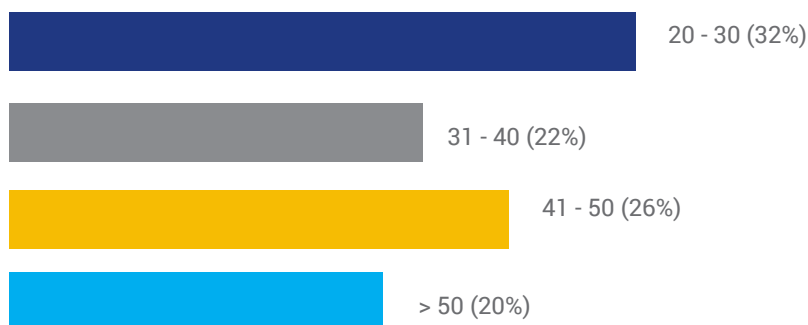
Gender



Pendidikan



Umur





Pengelolaan SDM Kementerian BUMN

Human Resources Management of the Ministry of State-Owned Enterprise

Paradigma tentang pengelolaan sumber daya manusia (Human Capital/HC) telah berkembang menjadi Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Capital Management/HCM) yang mengintegrasikan sistem pengelolaan SDM dengan strategi SDM guna meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan berintegrasi dengan strategi organisasi dan senantiasa mempertimbangkan pengaruh perkembangan global sebagai pemicunya.

Kementerian BUMN meyakini bahwa pengelolaan SDM yang terkoordinasi dengan baik dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Memiliki SDM yang andal, loyal dan berkompeten merupakan modal utama bagi Kementerian BUMN guna meraih visi, misi dan kinerja yang berkelanjutan. Integrasi antara HCM dengan strategi organisasi dapat dicapai dengan memiliki sistem pengelolaan SDM yang memastikan bahwa Kementerian BUMN memiliki SDM berkualitas, dengan mengembangkan pelatihan yang berfokus pada pembelajaran organisasi dan manajemen.

Oleh karena itu, kompetensi setiap pegawai, termasuk kinerja yang unggul, produktivitas, fleksibilitas terhadap perubahan organisasi, inovasi dan kemampuan untuk menghasilkan layanan yang baik dari setiap individu,

The human capital management paradigm has evolved into Human Capital (HC) Management that integrates HC management system with HC strategy to improve competitiveness and accelerate organization performance. Therefore, HC management and development are implemented to integrate with the organization's strategy and always consider the influence of global development as a trigger.

The Ministry of State-Owned Enterprise believes that well-coordinated HC management may support the achievement of organization goals. Having a reliable, loyal and competent HC is the Ministry of State-Owned Enterprise's main capital to achieve sustainable vision, mission and performance. Integration of HC Management Strategy and Organization Strategy can be achieved by having HC management system that ensures excellent quality of the Ministry of State-Owned Enterprise's HC, by developing training that focuses on organization and management learning.

Therefore, the competence of each employee, including superior performance, productivity, flexibility to organizational change, innovation, and ability to generate good services from each individual, can provide value



dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan daya saing organisasi. Kunci utama dalam menciptakan SDM yang turut meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja adalah proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan talenta serta kompetensi.

Serangkaian proses mulai dari memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia, mengadakan seleksi calon pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Kementerian BUMN, serta memfasilitasi pelatihan kepada pegawai sesuai dengan karakter dan kompetensi masing-masing. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan karier sesuai bidangnya, dengan tidak membedakan penerapannya berdasarkan gender. Melalui pelatihan dan pengembangan pegawai yang dilakukan, Kementerian BUMN secara berkelanjutan menerapkan dan memantau strategi pengelolaan SDM untuk mendapatkan talenta yang berkualitas dan mendorong seluruh pegawai untuk merespon tantangan dan dinamika bisnis.

Alih Status Pegawai Kementerian BUMN

Sesuai dengan sejarah Kementerian BUMN yang berasal dari salah satu unit di Kementerian Keuangan, Pegawai Kementerian BUMN sebagian besar masih berstatus sebagai pegawai Kementerian Keuangan yang dipekerjakan di Kementerian BUMN. Pada tahun 2017, jumlah pegawai yang berstatus sebagai pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 233 orang atau sebesar 80% dari pegawai yang bekerja di Kementerian BUMN.

Sesuai Diktum Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430/KMK.01/2013, diatur:

- a. Masa tugas pegawai dipekerjakan atau pegawai diperbantukan ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) tahun.
- b. Perpanjangan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - 1) Tahap pertama ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - 2) Tahap kedua ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun

added in improving the organization's competitive advantages. The main key to creating HC that contributes to competitive advantage enhancement and performance acceleration is the process of recruitment, selection, training, as well as talent and competence development.

A series of processes ranging from providing complete and clear information regarding available job openings, selecting prospective employees according to the qualifications required by the Ministry of State-Owned Enterprise, and facilitating employee training in accordance with their respective character and competence. Each employee has the same right to obtain training and career development according to their expertise, by not differentiating their application based on gender. Through employee training and development, the Ministry of State-Owned Enterprise continuously implements and monitors HC management strategies to get quality talents and encourage all employees to respond to business challenges and dynamics.

Transfer Status of Employees of the Ministry of State-Owned Enterprise

In accordance with the history of the Ministry of State-Owned Enterprise from one of the units at the Ministry of Finance, the Ministry of State-Owned Enterprise employees are mostly still employees of the Ministry of Finance employed at the Ministry of State-Owned Enterprise. In 2017, there were 233 employees with employee status of the Ministry of Finance or 80% of employees working in the Ministry of State-Owned Enterprise.

In accordance with the Second Decision, Decree of the Minister of Finance Number 256/KMK.01/2011 as amended by the Decree of the Minister of Finance Number 430/KMK.01/2013, it is regulated as follows:

- a. The employee's service period is hired or the employee is assigned a maximum of 4 (four) years and can be extended for a maximum of 6 (six) years.
- b. The extension as intended is implemented in 2 (two) stages, namely:
 - 1) The first stage is stipulated for a maximum of 4 (four) years; and
 - 2) The second stage is stipulated at the latest 2 (two) years

Berdasarkan kondisi tersebut, Kementerian BUMN menyampaikan permohonan alih status kepegawaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebagian besar PNS Kementerian Keuangan yang dipekerjakan dimaksud telah menduduki jabatan dan mengalami peningkatan karir di lingkungan Kementerian BUMN;
2. Perpindahan PNS Kementerian Keuangan ke Kementerian BUMN sejalan dengan Program Leaders Factory;

Surat Keputusan pindah instansi untuk 212 pegawai Kementerian Keuangan yang dipekerjakan di Kementerian BUMN telah ditetapkan oleh Kepala BKN. Dengan demikian, terhitung mulai 1 Maret 2018, PNS Kementerian Keuangan yang di Dipekerjakan di Kementerian BUMN telah resmi berpindah status menjadi PNS Kementerian BUMN.

Based on these conditions, the Ministry of State-Owned Enterprise submitted a transfer request for employment with the following considerations:

1. Most of the civil servants (PNS) of the Ministry of Finance who have been employed have held positions and experienced career advancements in the Ministry of State-Owned Enterprise;
2. The transfer of the civil servants (PNS) from the Ministry of Finance to the Ministry of State-Owned Enterprise is in line with the Leaders Factory Program;

Decree to move institutions to 212 Ministry of Finance employees employed at the Ministry of State-Owned Enterprise has been determined by the Head of State Civil Servant Agency (BKN). Thus, starting March 1st, 2018, the civil servants (PNS) from the Ministry of Finance employed at the Ministry of State-Owned Enterprise have officially moved to become the civil servants (PNS) at the Ministry of State-Owned Enterprise.





Rekrutmen Pegawai

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian BUMN, Kementerian BUMN telah melakukan reviu perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK) pada setiap unit kerja untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan perhitungan ABK tersebut, jumlah riil pegawai saat ini masih belum mencukupi untuk dapat menjalankan tugas-tugas Kementerian BUMN secara optimal. Jumlah kekurangan pegawai saat ini adalah 297 orang, dan dari jumlah tersebut, kekurangan pegawai pada level pelaksana atau jabatan fungsional umum adalah sebanyak 243 orang, yang akan dipenuhi melalui formasi CPNS Umum sebanyak 88 orang dan CPNS lulusan STAN sebanyak 20 orang, sedangkan sisanya akan dilakukan rekrutmen selama empat tahun kedepan.

Data demografi seluruh pegawai Kementerian BUMN yang sudah berada pada usia di atas 40 tahun telah mencapai 59,86%. Disamping itu, total pegawai Kementerian BUMN yang akan pensiun dalam 10 tahun kedepan sebanyak

Employee Recruitment

As stipulated in Presidential Regulation No. 41 of 2015 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 41 of 2015 concerning Ministry of State-Owned Enterprise, the Ministry of State-Owned Enterprise has reviewed the calculation of Workload Analysis (ABK) in each working unit for the next 5 (five) years.

Based on the calculation of Workload Analysis (ABK), the current number of employees is still insufficient to implement the tasks of the Ministry of State-Owned Enterprise optimally. The current number of staff shortages is 297 people, and from that number, the lack of employees at the implementing level or general functional positions is 243 people, which will be fulfilled through the 88 General Candidate of Civil Servants (CPNS) formation and 20 STAN graduates, while for the rest, recruitment will be implemented for the next four years.

Demographic data of all employees of the Ministry of State-Owned Enterprise which have been above the age of 40 have reached 59.86%. In addition, the total number of employees of the Ministry of State-Owned Enterprise



97 orang. Hal tersebut terjadi karena beberapa tahun ke belakang, Kementerian BUMN tidak mendapatkan formasi penambahan CPNS, sehingga terjadi gap yang cukup besar sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko melalui regenerasi pegawai yang dipersiapkan secara baik dan terstruktur.

1. Rekrutmen CPNS formasi umum

Kementerian PAN dan RB melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 35 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2018, memutuskan penetapan rincian kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Kementerian BUMN pada tahun 2018 sebanyak 88 orang. Berdasarkan formasi tersebut dibentuk panitia seleksi untuk melakukan proses pengadaan CPNS. Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon PNS Tahun 2018. Berdasarkan hasil seleksi pengadaan CPNS 2018, peserta yang lulus sebanyak 88 orang dan dapat memenuhi seluruh formasi Kementerian BUMN tahun 2018.

2. Rekrutmen CPNS lulusan STAN

Dalam rangka memenuhi kekurangan pegawai, Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mendapatkan alokasi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2018. Berdasarkan permintaan Kementerian BUMN tersebut, Kementerian BUMN mengalokasikan 20 orang untuk ditempatkan di Kementerian BUMN yang terdiri atas lulusan D1 dan D3. Selanjutnya 20 CPNS tersebut akan ditempatkan pada jabatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara sesuai permintaan Kementerian Keuangan.

who will retire in the next 10 years is 97 people. This happened because in the past few years, the Ministry of State-Owned Enterprise did not obtain the addition of Civil Servants (CPNS) formation, resulting in a large gap so that risk mitigation was required through regeneration of employees who were well prepared and structured.

1. Recruitment of public formation to the Candidate of Civil Servants (CPNS)

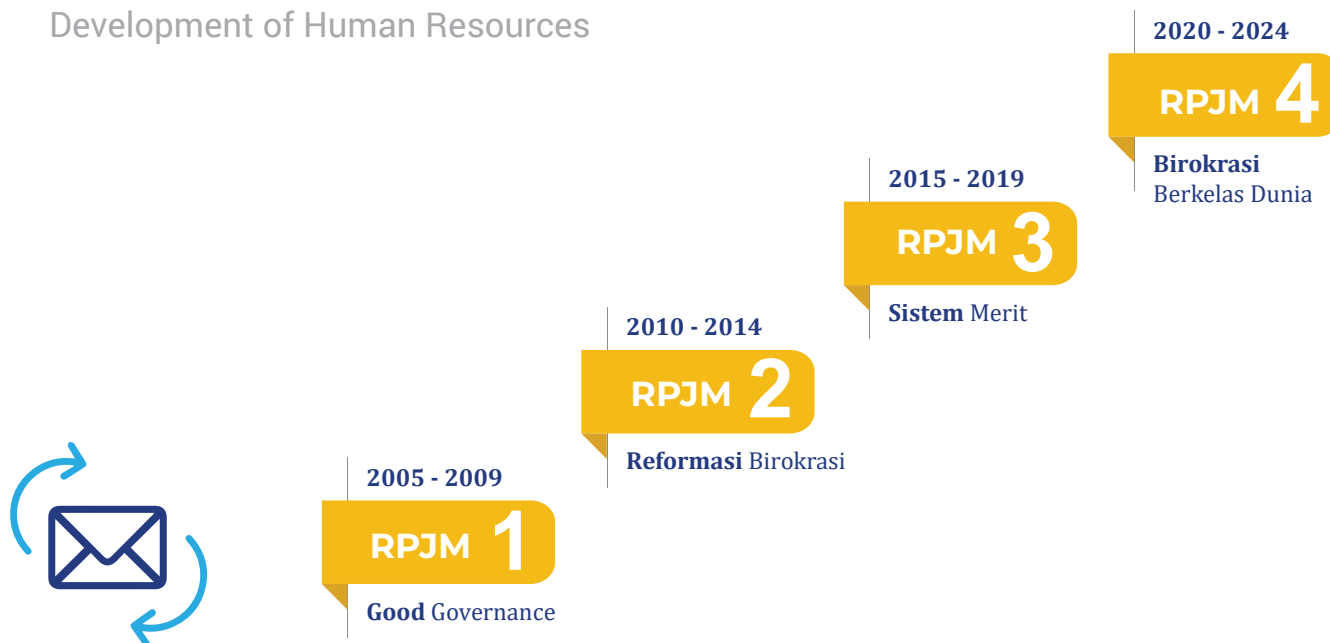
Ministry of State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reform through the Decree of the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reform Number: 35 of 2018 concerning the Needs of State Civil Apparatus Employees in the Ministry of State-Owned Enterprise of the 2018 Budget Year, deciding the details of the needs of the State Civil Apparatus at the Ministry of State-Owned Enterprise in 2018 as many as 88 people. Based on this formation a selection committee was established to implement the Candidate of Civil Servants (CPNS) procurement process. The Candidate of Civil Servants (CPNS) selection process in 2018 is in accordance with Ministerial Regulations of the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reforms Number 36 of 2018 concerning Criteria for Determining Civil Servants (PNS) requirements and Implementation of Civil Servant (PNS) Candidate Selection for 2018. Based on results of the 2018 Candidate Civil Servants (CPNS) procurement selection, participants who graduated were 88 people and could fulfill the entire formation of the Ministry of State-Owned Enterprise in 2018.

2. Recruitment of the Candidate of Civil Servants (CPNS) graduates from STAN

In order to meet employee shortages, the Ministry of State-Owned Enterprise coordinated with the Ministry of State-Owned Enterprise to obtain the allocation of graduates of STAN's State Financial Polytechnic in 2018. Based on requests of the Ministry of State-Owned Enterprise, the Ministry of State-Owned Enterprise allocated 20 people to be placed in the Ministry of State-Owned Enterprise consisting of D1 and D3 graduates. Furthermore, the 20 Candidates of Civil Servants (CPNS) will be placed in positions related to the management of state finances at the request of the Ministry of Finance.

Pengembangan SDM

Development of Human Resources



Hingga pada tahun 2018 Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi Kementerian BUMN telah merancang Grand Design ASN pada Kementerian BUMN untuk tahun 2019-2024. Berawal dari garis besar pembangunan ASN yang termaktub pada RPJM 1 (2005-2009) dengan berfokus pada penerapan Good Governance, RPJM 2 (2010-2014) reformasi birokrasi, RPJM 3 (2015-2019) dengan penerapan sistem merit, dimana kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuannya dengan adanya sistem merit tersebut adalah:

1. Merekrut ASN yang professional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;
2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak;
3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat;
4. Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan prinsip merit (nepotisme dan primordialisme).

Until 2018 the Planning, HR, and Organization Bureau of the Ministry of State-Owned Enterprise has designed the Grand Design of State Civil Apparatus (ASN) at the Ministry of State-Owned Enterprise for 2019-2024. Starting from the outline of the State Civil Apparatus (ASN) development as outlined in RPJM 1 (2005-2009) by focusing on the implementation of Good Governance, RPJM 2 (2010-2014) bureaucratic reform, RPJM 3 (2015-2019) with the implementation of merit systems, where State Civil Apparatus (ASN) policies and management based on qualifications, competencies, and performance fairly and reasonably without discrimination. The goals with the merit system are as follows:

1. Recruit ASN who are professional and have integrity and place them in positions of government bureaucracy according to their competence;
2. Maintaining State Civil Apparatus (ASN) through providing fair and decent compensation;
3. Developing the ability of State Civil Apparatus (ASN) through guidance and training;
4. Protecting ASN careers from politicization and policies that contradict merit principles (nepotism and primordialism).



Kemudian, dalam menyongsong RPJM 4 (2020-2024), pembangunan ASN kementerian BUMN akan menuju Birokrasi berkelas dunia.

Roadmap Pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian dari roadmap reformasi birokrasi dimana dengan adanya penataan sistem manajemen SDM akan tercipta ASN yang profesional yang dapat diukur melalui indeks profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit.

Pada bulan September 2018, Kementerian BUMN melakukan assessmen kompetensi terhadap pegawai mulai dari level Pelaksana sampai dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dari hasil assessmen tersebut, diketahui bahwa rata-rata kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian BUMN berada pada skala 4, yaitu tingkat kesenjangan kompetensi rendah.

Skala pengukuran dimaksud mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dimana yang dimaksud dengan kesenjangan kompetensi rendah yaitu telah memenuhi $\frac{3}{4}$ dari seluruh indikator perilaku kompetensi jabatannya. Skala tersebut menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Kementerian BUMN sudah baik dan relatif setara.

Namun demikian, program pengembangan lanjutan diperlukan untuk menutup kesenjangan kompetensi yang masih ada di beberapa area, salah satunya pada kompetensi customer focus.

Pada pengukuran Indeks Profesionalitas yang menjadi objek penilaian adalah individu, sedangkan yang menjadi instansi pengawas adalah Badan Kepegawaian nasional. Pada Indeks Profesionalitas, terdapat 4 (empat) Indikator penilaian yakni Kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

1. Kualifikasi

Indikator ini menitikberatkan pada tingkat pendidikan dan latihan yang sudah dienyam oleh Individu apakah telah sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatannya.

Furthermore, in welcoming the RPJM 4 (2020-2024), development of State Civil Apparatus (ASN) of the ministry of State-Owned Enterprise will lead to world-class bureaucracy.

The Roadmap for the Development of the State Civil Apparatus (ASN) is part of the roadmap for bureaucratic reform where the arrangement of the Human Resources management system will create a professional State Civil Apparatus (ASN) that can be measured through the State Civil Apparatus (ASN) professionalism index and the Merit System Index.

In September 2018, the Ministry of State-Owned Enterprise implemented competency assessments of employees starting from the Implementing level to the Primary Executive Officer. From the assessment result, it is known that the average competency of employees in the Ministry of State-Owned Enterprise is on a scale of 4, namely the level of low competency gap.

The measurement scale refers to the Regulation of the State Administration Institution No. 10 of 2018 concerning Competence Development of Civil Servants, which is meant by a low competency gap that is fulfilling $\frac{3}{4}$ of all position competency behavior indicators. The scale indicates that the competencies possessed by the Ministry of State-Owned Enterprise employees are good and relatively equal.

However, further development programs are required to close competency gaps that are still exist in several areas, one of which is on customer focus competencies.

The measurement of the Professionalism Index which is the object of assessment is an individual, while the one that becomes the supervisory institution is the National Personnel Institution. On the Professionalism Index, there are 4 (four) assessment indicators namely Qualification, competence, performance, and discipline.

1. Qualification

This indicator focuses on the level of education and training which has been received by an Individual whether it is in accordance with the implementation of his/her job duties.

2. Kompetensi

Indikator ini bertitik-tumpukan pada pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang ada pada individu yang bertugas di suatu unit.

3. Kinerja

Adapun menjadi titik tumpuannya adalah dengan adanya sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dibuat secara daring (online) baik dilakukan per bulan dengan SKP bulanan, ataupun pertahun dengan SKP tahunan.

4. Disiplin

Pada data organisasi yang sudah modern, seperti sistem absen dan administrasi pelanggaran disiplin yang dilakukan secara proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah.

2. Competence

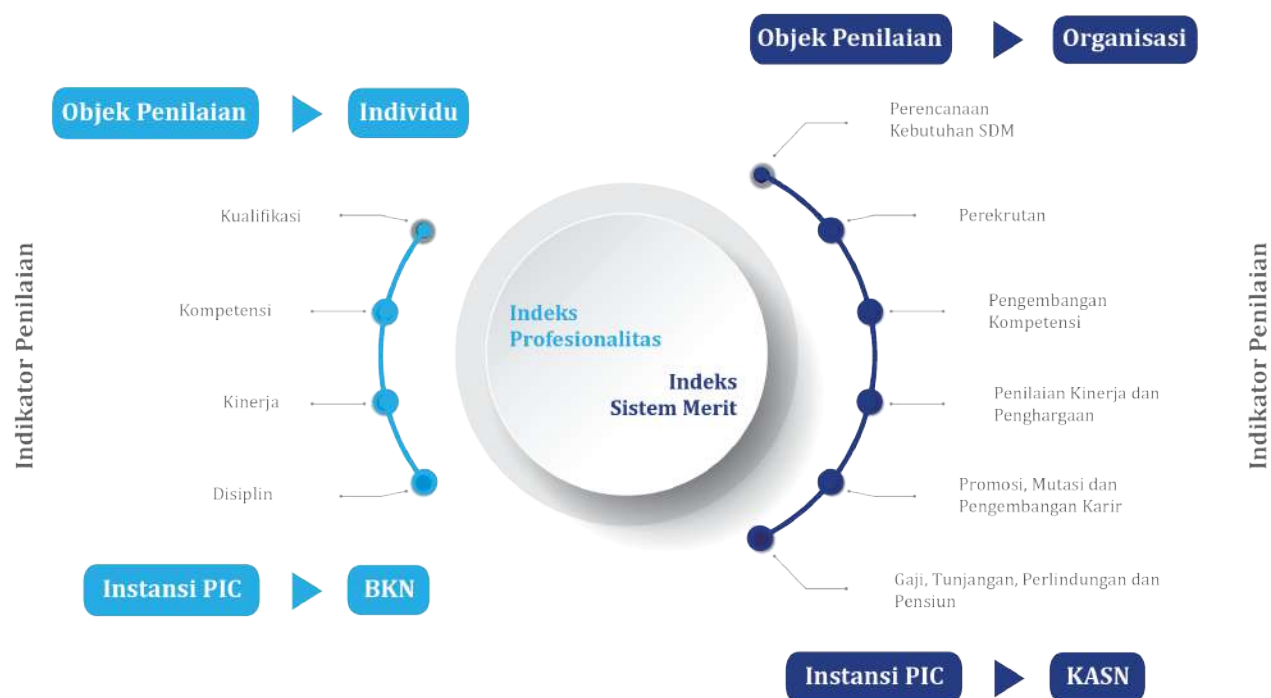
This indicator is based on the knowledge, expertise and experience that exist in an individual who is in charge of a unit.

3. Performance

As to become the fulcrum, there is an employee performance target (SKP) made online, both monthly and monthly employee performance target (SKP) with annual employee performance target (SKP).

4. Discipline

On a modern organizational data, such as absent and administration systems of disciplinary violations implemented in a proxy, where an employee is considered increasingly professional if the level of violation is lower.



Adapun dalam Indeks Sistem Merit, penggunaan objek, indikator, dan PIC berbeda dengan pengukuran indeks sistem profesionalitas ASN. Pada Indeks sistem merit yang menjadi objek penilaian adalah organisasi, dalam hal ini Kementerian BUMN. Sedangkan yang menjadi pengawas atau PIC adalah KASN.

As for the Merit System Index, the use of objects, indicators and PIC is different from the State Civil Apparatus (ASN) professional system index measurement. The merit system index that is the object of assessment is an organization, in this case the Ministry of State-Owned Enterprise, Whereas the supervisor or PIC is KASN.





Adapun kegiatan yang dilakukan dalam implementasi sistem merit antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan SDM

Perencanaan Kebutuhan SDM dilakukan dengan menerapkan kebijakan rewiu ABK, penyusunan kebutuhan ABK 5 tahun, penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional rewiu kebutuhan dan pola karir jabatan fungsional. Pada proses pelaksanaannya, perencanaan kebutuhan SDM juga memperhatikan pengisian posisi jabatan struktural. Dalam praktiknya, pengisian jabatan posisi tersebut dapat dilakukan dengan adanya pengisian data e-formasi

2. Perekrutan

Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pada tahap rekrutmen berupa penyusunan formasi umum dan formasi STAN, penyusunan kebutuhan JPT Pratama dan Madya, serta pengadaan posisi jabatan fungsional. Selain itu dalam pelaksanaannya Kementerian BUMN melakukan pengisian CPNS formasi umum dan formasi STAN, posisi JPT Pratama/Madya, dan pengisian jabatan fungsional dengan pengkinian data di portal SSCN BKN dan Portal Rekrutmen agar lebih memudahkan proses perekrutan.

3. Pengembangan kompetensi

Kebijakan yang diambil pada pengembangan kompetensi adalah adanya penyusunan updating standar kompetensi ASN Kementerian BUMN, pedoman pemberian beasiswa, dan pedoman pemagangan (nasional dan internasional). Adapun pelaksanaannya, dilakukan pengembangan kompetensi rutin seperti pendidikan, pelatihan klasikal, pelatihan non klasikal dengan pendekatan 4 academy yaitu leadership academy, culture academy, corporate academy, dan operational academy. Selain itu Kementerian BUMN juga telah membangun sistem pengembangan kompetensi SDM berupa aplikasi Makin Kompeten yang sudah diintegrasikan dengan aplikasi Makin Baik dan data probadi di aplikasi Simanis. Ke depan akan untuk

Activities implemented in the implementation of merit system are as follows:

1. Planning of Human Resources Requirement

Planning of Human Resources is implemented by implementing the Workload Analysis (ABK) review policy, preparation of the of 5-year Workload Analysis (ABK) requirement, preparation of Functional Position Requirement of Requirement reviews and career patterns of functional positions. In the implementation process, planning of Human Resources requirement also takes into account the filling of structural positions. In its practice, filling in such position title can be implemented by filling in the e-formation data.

2. Recruitment

Policies implemented at the recruitment stage are in the formulation of general formations and STAN formations, preparation of High Leadership Position (JPT) Pratama and Madya requirements, and the procurement of functional positions. In addition, in its implementation the Ministry of State-Owned Enterprise fills in the general formation of the Candidate Civil Servant (CPNS) and STAN formation, High Leadership Position (JPT) Pratam/Madya, and filling in functional positions by updating data on the SSCN State Civil Servant Agency (BKN) portal and Recruitment Portal to facilitate the recruitment process.

3. Development of competence

The policy taken in developing competencies is the arrangement of updating the State Civil Apparatus (ASN) competency standards of the Ministry of State-Owned Enterprise, scholarship guidance, and apprenticeship guidelines (national and international). As for the implementation, routine competency development such as education, classical training, non-classical training with 4 academy approaches is implemented, namely academy leadership, culture academy, corporate academy, and operational academy. In addition, the Ministry of State-Owned Enterprise has also built Human Resources competency development system in the form of Makin Kompeten Application which has been integrated with Makin Baik application and probable data in Simanis application. In the future,



mendukung pengembangan SDM akan dibangun sistem pembelajaran e-learning.

4. Penilaian kinerja dan penghargaan

Dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja, telah dilakukan penyusunan konsep penilaian 360 derajat dan pedoman coaching. Dalam pelaksanaannya, dilakukan monitoring realisasi SKP bulanan dan tahunan, implementasi penilaian 360 derajat, dan implementasi coaching dalam dialog kinerja pencapaian SKP. Untuk mendukung program kebijakan tersebut, dilakukan pembangunan aplikasi penilaian 360 derajat dan mengintegrasikannya dengan aplikasi Makin Baik.

Adapun untuk pemberian penghargaan dalam jangka waktu dekat akan dilakukan melalui penetapan nominatif 20% pegawai berkinerja, pemberian penghargaan SLKS dan kenaikan pangkat. Ke depan akan dilakukan penyusunan pedoman pemberian reward di lingkungan Kementerian BUMN, agar pemberian penghargaan dilakukan lebih transparan dan adil.

5. Promosi, mutasi, dan pengembangan karir

Dalam rangka pengelolaan promosi dan mutasi, Kementerian BUMN telah menyusun sistem pola karir dan mutasi pegawai, implementasi pola karir dan mutasi serta melakukan revaluasi sesuai dengan implementasinya. Implementasi pola karir juga telah didukung dengan sistem informasi berupa menu pola karir pada aplikasi Simanis.

Dalam pengembangan karir, Kementerian BUMN akan menyusun kebijakan talent management. Dengan pelaksanaan talent people management, Kementerian BUMN mendapatkan talent pool sebagai bahan dalam melakukan pengisian jabatan yang sesuai. Adapun untuk pelaksanaannya didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi dengan aplikasi Makin Kompeten.

6. Gaji, tunjangan, perlindungan dan pensiun

Pola penggajian dan tunjangan yang dilakukan di Kementerian BUMN saat ini mengikuti ketentuan pemerintah sesuai dengan PP Gaji serta Permen 05/

the e-learning system will be developed to support Human Resources development.

4. Performance and award assessment

In the framework of implementing performance appraisals, the concept of 360 degree assessment and coaching guidelines has been prepared. In its implementation, monitoring of monthly and annual employee performance target (SKP) realization is implemented, implementing the 360-degree assessment, and implementing coaching in the employee performance target (SKP) of achievement performance dialogue. To support the policy program, application of the 360 degree assessment and integration with Makin Baik application is implemented.

As for awarding in the near term, it will be implemented through nominative determination of 20% performing employees, awarding SLKS awards and promotion. In the future there will be preparation of rewards guidelines in the Ministry of State-Owned Enterprise, so that awards will be fairer and more transparent.

5. Promotion, transfer and career development

In the framework of managing promotions and transfers, the Ministry of State-Owned Enterprise has developed a system of career patterns and employee transfers, implementation of career patterns and transfers and reviews according to its implementation. The implementation of career patterns has also been supported by information systems in the form of a career pattern menu in Simanis application.

In career development, the Ministry of State-Owned Enterprise will develop a talent management policy. With the implementation of talent people management, the Ministry of State-Owned Enterprise obtains the talent pool as material to fill in the appropriate positions. As for the implementation it is supported by an information system which is integrated with Makin Kompeten application.

6. Salaries, benefits, protection and pensions

The payroll and allowance pattern implemented at the Ministry of State-Owned Enterprise currently follows the government's regulation in accordance with PP Salary

MU/03/2018 untuk pembayaran tunjangan kinerja. Sesuai Permen tersebut, pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran serta realisasi sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dilakukan secara bulanan. Ke depan pola penggajian dan tunjangan akan mengikuti kebijakan single salary berdasarkan UU ASN pada tahun 2020.

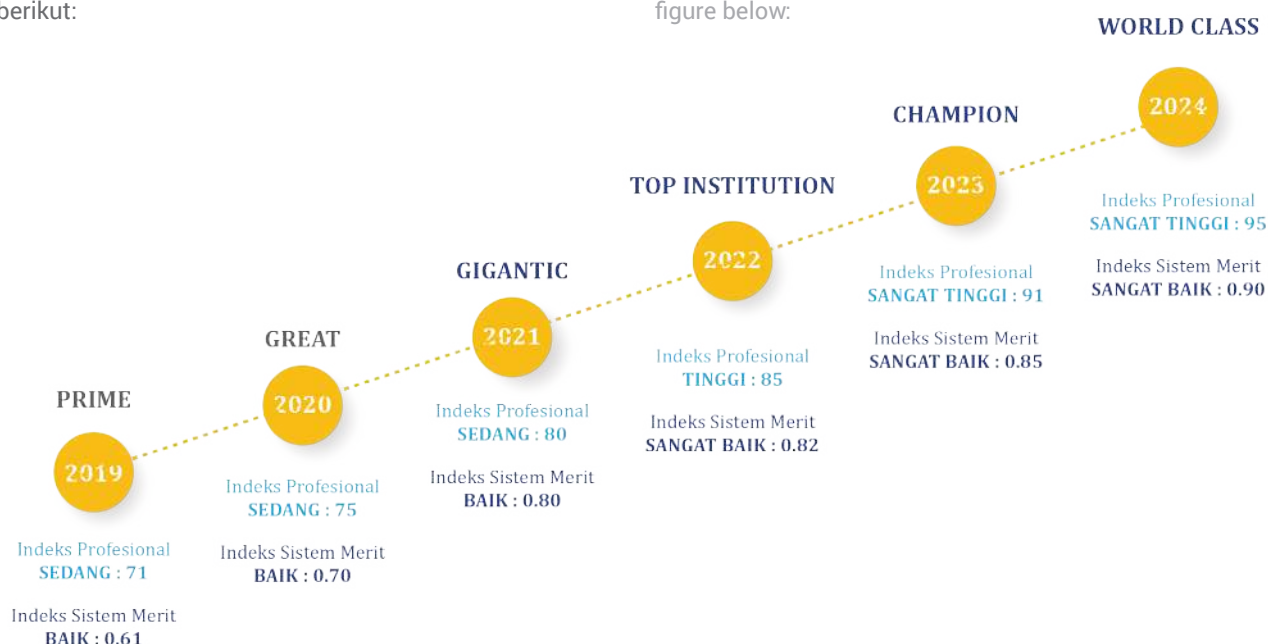
as well as Ministerial Regulation 05/MU/03/2018 for payment of performance benefits. In accordance with the Regulation, payment of performance benefits based on attendance and realization of employee performance targets (SKP) are implemented on a monthly basis. In the future, payroll and benefits pattern will follow a single salary policy based on the Law of State Civil Apparatus (ASN) in 2020.

Untuk perlindungan dan pensiun, Kementerian BUMN menyelenggarakan kegiatan untuk pengurusan SK Pensiun, pembayaran THT serta perlindungan hukum. Ke depan akan dilakukan penyusunan skema pensiun fully funded sesuai dengan Roadmap Pembangunan ASN.

For protection and retirement, the Ministry of State-Owned Enterprise organizes activity to arrange Pension decree, THT payments and legal protection. In the future, preparation of a fully funded pension scheme will be implemented in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Development Roadmap.

Dalam rangka pencapaian indeks sistem merit dan indeks profesionalitas ASN, kementerian BUMN telah menyusun Roadmap ASN tahun 2019-2024, sebagaimana gambar berikut:

In order to achieve the merit system index and State Civil Apparatus (ASN) professionalism index, the ministry of State-Owned Enterprise has compiled the State Civil Apparatus (ASN) Roadmap in 2019-2024, as shown in the figure below:



Penilaian Merit Sistem Kementerian BUMN oleh Komisi ASN

Berdasarkan peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah, KASN telah melakukan pemetaan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Kementerian BUMN.

Assessment of the Merit System of the Ministry of State-Owned Enterprise by the ASN Commission

Based on KASN regulation Number 5 of 2017 concerning the Independent Assessment of Merit System Implementation in Government Institutions, KASN has mapped the implementation of the merit system in ASN management at the Ministry of State-Owned Enterprise.



Penilaian dilakukan berdasarkan 8 kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun yang dirinci menurut jenis dan jenjang jabatan serta disusun berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) dengan mempertimbangkan pegawai yang memasuki masa pensiun;
2. Melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain;
3. Mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan dan pembentukan talent pool dan rencana suksesi;
4. Menerapkan manajemen kinerja, yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya;
5. Mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin;
6. Melaksanakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool;
7. Memberi perlindungan dan pelayanan agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik;
8. Mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, assessment center, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN.

Assessment is implemented based on 8 assessment criteria as follows:

1. Have a plan for ASN requirements for 5 years which are detailed according to the type and level of position and are prepared based on Position Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK) by considering employees who are entering retirement age;
2. To recruit employees openly and competitively, both from CPNS, PPPK, and also from civil servants from other institutions;
3. Having career development policies and programs that begin with talent mapping, competency gap analysis, and performance gaps, strategies and programs to overcome gaps and the establishment of talent pools and succession plans;
4. Implement performance management, which starts with setting performance targets, periodic performance evaluation using objective methods, analyzing performance gaps, and having strategies to overcome them;
5. Link payroll policies, award, and promotions with performance and discipline;
6. Implementing promotions, mutations objectively and transparently based on the suitability of qualifications, competencies and performance by utilizing the talent pool;
7. Providing protection and service so that ASN employees can implement their duties properly;
8. Having a support system such as an integrated employment information system, assessment center, and other applications that support the implementation of ASN management.



Tujuan pemetaan penerapan sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk:

- a. Mendapatkan informasi yang akurat terkait tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi Pemerintah guna memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan nasional terkait pengembangan SDM Aparatur;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan penerapan sistem merit di masing-masing instansi Pemerintah guna menyediakan baseline data bagi KASN dalam melakukan pengawasan dan pembinaan;
- c. Memberi masukan kepada instansi yang dinilai terkait upaya-upaya yang masih diperlukan dalam upaya menerapkan prinsip merit.

Hasil penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah pada kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 40 Tahun 2018 dan Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Kategori I (nilai 100-174), dengan indikator berwarna merah menunjukkan bahwa instansi dinilai 'BURUK'. Instansi dalam kategori ini masih perlu dibimbing intensif untuk dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan dalam penerapan sistem merit manajemen ASN.
- b. Kategori II (nilai 175-249), dengan indikator berwarna kuning, menunjukkan bahwa instansi dinilai 'KURANG'. Instansi dalam kategori ini perlu dibimbing untuk melengkapi berbagai persyaratan sistem merit dalam manajemen ASN.
- c. Kategori III (nilai 250-324), dengan indikator berwarna hijau, menunjukkan bahwa instansi dinilai 'BAIK'. Instansi dalam kategori ini masih perlu menyempurnakan berbagai persyaratan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansinya, tetapi sudah dapat menerapkan seleksi terbatas dari talent pool dengan pengawasan KASN serta dievaluasi setiap tahun.
- d. Kategori IV (nilai 325-400), dengan indikator berwarna biru, menunjukkan bahwa instansi dinilai 'SANGAT BAIK'. Instansi dalam kategori ini menunjukkan bahwa

The purpose of mapping the implementation of merit system in the State Civil Apparatus (ASN) Management is to:

- a. Obtain accurate information related to the implementation level of merit system in the State Civil Apparatus (ASN) management within Government Institutions in order to provide input for the preparation of national policies related to Apparatus Human Resources development;
- b. Evaluate the implementation of merit system in each Government institution to provide baseline data for the State Civil Apparatus Commission (KASN) in implementing supervision and guidance;
- c. Provide input to institutions that are assessed concerning efforts which are still required in an effort to implement merit principles.

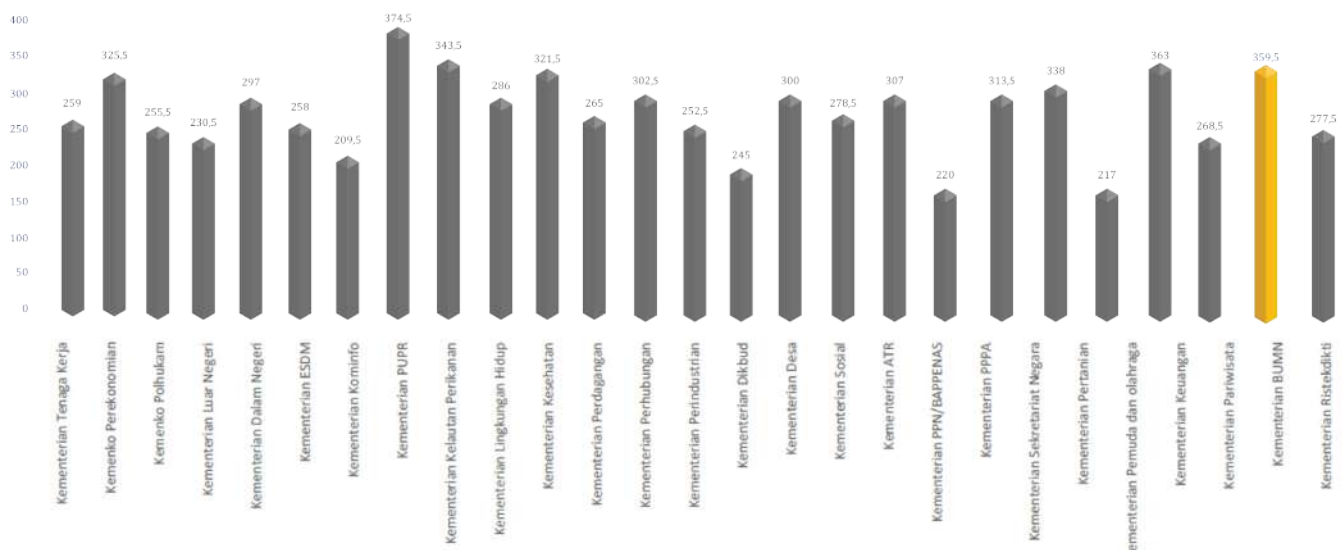
Assessment results of the merit system implementation in government institutions in the assessment category according to the value and index achieved as explained in the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reform No. 40 of 2018 and KASN Regulation No. 5 of 2017 as follows:

- a. Category I (grade 100-174), with red indicator indicating that the institution is rated 'BAD'. Institution in this category still needs intensive guidance to be able to meet the expected requirements in implementing the ASN management merit system.
- b. Category II (grade 175-249), with yellow indicator, indicating that the institution is rated 'LESS'. Institution in this category requires to be guided to complement various merit system requirements in the ASN management.
- c. Category III (grade 250-324), with green indicator, indicating that institution is rated 'GOOD'. Institution in this program still require to improve various requirements for implementing merit system in the ASN management in its institution, but have been able to apply limited selection of talent pool with KASN supervision and are evaluated annually.
- d. Category IV (grade 325-400), with blue indicator, indicating that the institutions is rated 'VERY GOOD'.

sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diijinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui talent pool dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Institution in this category indicate that most of the requirements have been fulfilled and have been permitted to implement limited selection in its institution through the talent pool and evaluated every 2 (two) years.

Peta Penerapan Sistem Merit Manajemen Aparatur Sipil Negara di beberapa Kementerian 2018



Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KASN, sistem merit di Kementerian BUMN masuk dalam kategori IV “Sangat Baik” dengan skor nilai 359,5. Capaian tersebut menempatkan Kementerian BUMN di urutan ketiga Nasional dibawah Kementerian PUPR (skor 374,5) dan Kementerian Keuangan (skor 363).

Based on assessment results implemented by KASN, merit system in the Ministry of State-Owned Enterprise was included in category IV “Very Good” with a score of 359.5. This achievement placed the Ministry of State-Owned Enterprise in the third National rank under the Ministry of PUPR (score 374.5) and the Ministry of Finance (score 363).

Aplikasi Application

Dalam upaya pengembangan SDM telah dibantu dengan digitalisasi proses bisnis yaitu dengan aplikasi diklat.bumn.go.id. Hal ini bertujuan untuk membantu pengelolaan setiap diklat yang dilaksanakan oleh SDM dan agar dapat dilakukan evaluasi atas setiap diklat yang telah dilaksanakan.

In the effort of Human Resources development, it has been assisted by digitizing business processes, namely the application of diklat.bumn.go.id. This is intended to assist the management of each training program implemented by Human Resources and evaluation to each education and training which has been implemented.



Menciptakan Pemimpin Masa Depan BUMN

Create the State-Owned Enterprise Next Leader

Program pengelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN merupakan serangkaian proses dalam mempersiapkan, mempertahankan, dan mengembangkan pimpinan BUMN untuk memastikan keberlangsungan BUMN dalam jangka panjang dan menyiapkan pemimpin BUMN di masa depan. Program ini juga bertujuan agar pimpinan BUMN dapat berkinerja unggul pada masa kini maupun di masa yang akan datang sejalan dengan visi, misi, serta sistem nilai BUMN.

Program ini sendiri memiliki beberapa tahapan, di antaranya

Fungsi Eksisting

1. Planning

- Pemetaan Kebutuhan Eksekutif BUMN baik untuk Direksi Maupun Komisaris/Pengawas.
- Sesuai Permen untuk Direksi telah diatur harus disusun dalam jangka waktu 1 tahun berjalan, namun belum diatur untuk Komisaris/Dewan Pengawas.

The State-Owned Enterprise Executive Human Resources Management program is a series of process in preparing, maintaining, and developing the State-Owned Enterprise leaders to ensure the sustainability of State-Owned Enterprise in the long term and prepare the future State-Owned Enterprise leaders. The program also aims for the State-Owned Enterprise leaders to perform well in the present and in the future to be in accordance with the vision, mission, and value system of the State-Owned Enterprise.

The program itself has several stages, among others are as follows:

Existing Function

1. Planning

- Mapping the Requirement of Executive State-Owned Enterprise both for Directors and Commissioners/ Supervisors.
- In accordance with the Decree for the Board of Directors, it shall be arranged in a 1 year period, but it has not been arranged for the Commissioner/ Supervisory Board.



2. Screening

Permen telah mengatur persyaratan, sumber Bakal Calon dan mekanisme penyampaian data Bakal Calon.

3. Develop

Permen belum mengatur mekanisme development yang diperlukan untuk menyiapkan Bakal Calon.

4. Assest & Deploy

- Permen telah mengatur mekanisme penilaian dan parameter UKK , termasuk Kriteria UKK yang dilakukan oleh Tim Kementerian maupun oleh Lembaga Profesional.
- Permen telah mengatur mekanisme pengangkatan Direksi dan Komisaris/Dewan pengawas.

5. Reward & Punishment

Permen telah mengatur mekanisme dan parameter remuneration baik gaji, tunjangan, fasilitas, tantiem termasuk LTI. Permen juga telah mengatur mekanisme pemberhentian Direksi & Komisaris/Dewan Pengawas.

Uji Kelayakan & Kepatutan Bakal Calon Direksi BUMN

Mekanisme penjangkaran, seleksi, nominasi, dan penempatan Calon Direksi BUMN, mengacu pada ketentuan PER-03/ MBU/02/2015

2. Screening

The Decree has regulated requirements, source of Candidates and mechanism for submitting Candidate data.

3. Develop

Candidates have not yet regulated the development mechanism required to prepare Candidates.

4. Assess & Deploy

- The Decree has regulated assessment mechanism and UKK parameter, including the UKK Criteria implemented by the Ministry Team as well as by Professional Institutions.
- The Decree has regulated the appointment mechanism of Directors and Commissioners/ Supervisory Board.

5. Reward & Punishment

The Decree has regulated remuneration mechanisms and parameters in term of salaries, benefits, facilities, bonuses, including LTI. The Decree also regulated mechanism for dismissal of Directors & Commissioners/ Supervisory Board.

Feasibility Test & Compliance to Prospective Directors of the State-Owned Enterprise

Selection, nomination and placement mechanism to prospective Directors of the State-Owned Enterprise are based on provisions of PER-03/MBU/02/2015.





Penilaian Bakal Calon Dekom/Dewas BUMN

Mekanisme penjangkaran, penilaian, dan penempatan Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, mengacu pada ketentuan PER-02/MBU/02/2015

Assessment to Prospective Board of Commissioners/Supervisory Board of the State-Owned Enterprise

Selection, assessment, and placement mechanism to Prospective Board of Commissioners/Supervisory Board of the State-Owned Enterprise refers to the provision of PER-02/MBU/02/2015.



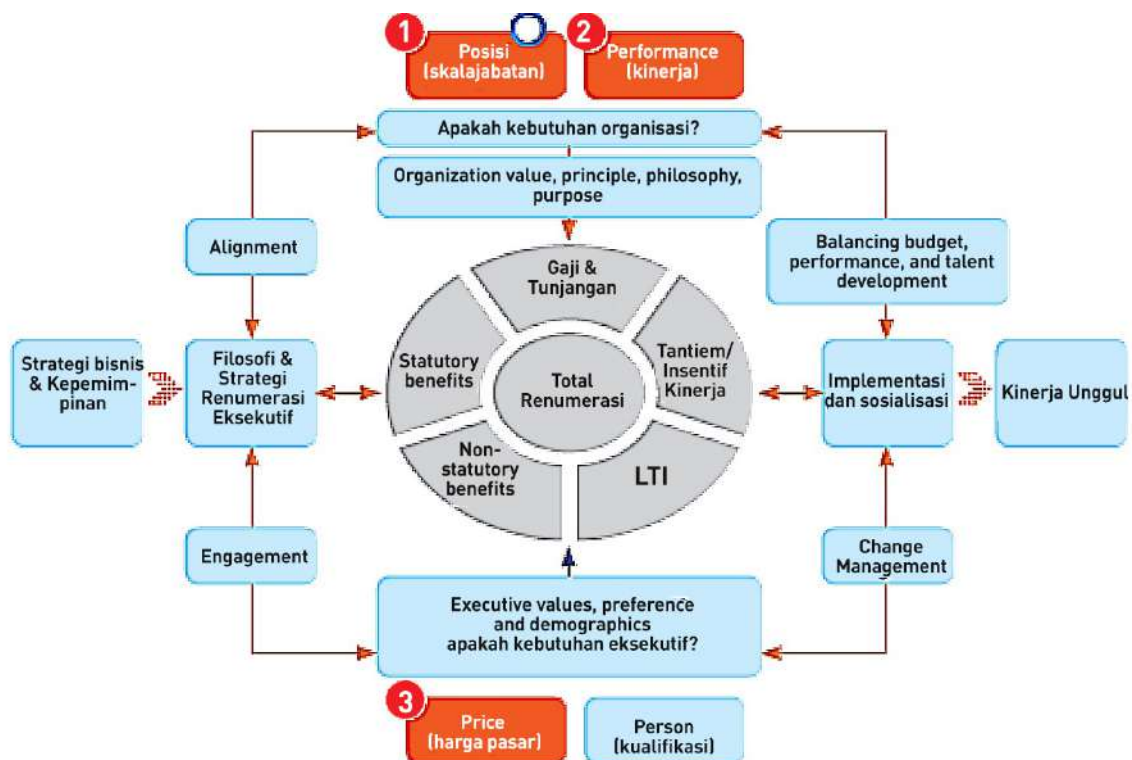


Sistem Remunerasi Eksekutif BUMN

Upaya ini untuk mendorong munculnya best leaders dari internal BUMN dan agar BUMN memiliki daya tarik serta memotivasi profesional handal untuk ikut berkiprah memajukan BUMN.

The State-Owned Enterprise Executive Remuneration System

This effort is to encourage the emergence of best leaders from the internal State-Owned Enterprise and so that the State-Owned Enterprise have the attraction as well as motivate reliable professionals to take part in advancing the State-Owned Enterprise.





Executive Leadership Program (ELP)

Salah satu program pengembangan SDM BUMN adalah penyelenggaraan Executive Leadership Program (ELP) yang diinisiasi oleh talent committee Kementerian BUMN. Talent Committee ini bertugas untuk menyeleksi dan mengembangkan kandidat potensial untuk menduduki posisi kunci di BUMN seperti Direktur maupun Komisaris. Adapun kegiatan ELP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan, mengembangkan sinergi, dan meningkatkan daya saing dalam kaitannya dengan transformasi BUMN Holding Company.

Executive Leadership Program (ELP)

One of the State-Owned Enterprise Human Resources development programs is the implementation of Executive Leadership Program (ELP) initiated by the talent committee of the Ministry of State-Owned Enterprise. The Talent Committee is tasked with selecting and developing potential candidates to occupy key positions in the State-Owned Enterprise such as Directors and Commissioners. The Executive Leadership Program (ELP) activity aims to improve leadership effectiveness, develop synergies, and enhance competitiveness in relation to transformations of the State-Owned Enterprise Holding Company.



ELP dilaksanakan dalam bentuk pelatihan untuk mengembangkan dan menciptakan pemimpin-pemimpin BUMN yang berkarakter, berintegritas, memiliki wawasan nasional yang baik, dan memiliki pola pikir global. Terdapat 3 (tiga) macam ELP, yakni:

1. ELP-1 yang diikuti oleh seluruh Direksi BUMN yang sedang menjabat (BOD Existing). Bertujuan agar Direksi BUMN dapat menciptakan bisnis-bisnis baru dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. ELP-2 yang diikuti oleh Direksi BUMN yang baru menjabat (New BOD). Bertujuan untuk menyiapkan Direksi BUMN yang kompeten dan siap memimpin perusahaan.
3. ELP-3 yang diikuti oleh pejabat satu level di bawah Direksi BUMN/Direksi anak perusahaan (BOD-1). Bertujuan untuk menyiapkan calon terbaik Direksi BUMN yang siap memimpin perusahaan.

ELP is implemented in the form of training to develop and create BUMN leaders with character, integrity, have good national insight, and have a global mindset. There are 3 (three) types of ELP, namely:

1. ELP-1, which is attended by all serving BUMN Directors (BOD Existing). Aiming for BUMN Directors to create new businesses and increase company value.
2. ELP-2, which is followed by newly appointed BUMN Directors (New BOD). Aims to prepare competent and ready BUMN Directors to guide the company.
3. ELP-3 which is followed by officials of one level under the Directors of BUMN/Directors of subsidiaries (BOD-1). Aims to prepare the best candidates for BUMN Directors that are ready to guide the company.



Integrated Talent Management System

Dalam upaya mendukung roadmap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas. Tantangan dalam pengelolaan SDM adalah adanya gap antara supply dan demand untuk talent BUMN, yaitu sebagai berikut:

Tantangan kebutuhan talent BUMN

1. Jumlah BUMN dan Eksekutif BUMN yang cukup banyak
2. Masa jabatan Eksekutif BUMN yang terbatas

Integrated Talent Management System

In an effort to support the roadmap of State-Owned Enterprise as an agent of development and value creation, one aspect that requires to be considered is the capacity of Human Resources and productivity. The challenge of Human Resources management is the gap between supply and demand for the State-Owned Enterprise's talent, namely as follows:

Challenges of the State-Owned Enterprise talent requirements

1. There are quite a number of the State-Owned Enterprise



3. Spesifikasi talent yang khusus/spesifik dengan variasi kompleksitas pengelolaan BUMN

Tantangan ketersediaan talent BUMN

1. Jumlah talent terbatas
2. Tingkat persaingan untuk mendapatkan talent semakin meningkat termasuk dari sisi reward yang ditawarkan
3. Globalisasi menyebabkan mobilitas talent lebih fleksibel

and the State-Owned Enterprise Executives

2. Limited State-Owned Enterprise Executive's terms of service
3. Talent specifications which are specific with variations in the complexity of the State-Owned Enterprise's management

Challenges to the availability of the State-Owned Enterprise's talent

1. The number of talent is limited
2. The level of competition to obtain talent is increasing, including from the side of an offered reward
3. Globalization causes talent mobility to be more flexible



Untuk itu Kementerian BUMN telah menerapkan Integrated Talent Management System (ITMS) yang merupakan suatu proses untuk mempersiapkan, mengembangkan, dan meretensi talent untuk mengisi posisi strategis di BUMN agar dapat berkinerja unggul pada masa kini maupun di masa yang akan datang sejalan dengan visi, misi, serta sistem nilai BUMN.

Therefore, the Ministry of State-Owned Enterprise has implemented an Integrated Talent Management System (ITMS) which is a process to prepare, develop, and retain talent to fill strategic positions in the State-Owned Enterprise so that they can perform well in the present and in the future, in line with their vision, mission, and the State-Owned Enterprise's value system.



Sustainable Talent Pipeline

Memastikan ketersediaan dan kesiapan *talent* untuk *sustainable growth* BUMN



Attract & Retain Talent

Meningkatkan daya tarik BUMN dalam mempertahankan dan/atau mengembangkan *talent* terbaik yang ada di BUMN



Best Talent Provider

Menjadikan BUMN sebagai salah satu sumber *talent* unggulan Nasional



Proper Talent Management

Pengelolaan fungsi-fungsi *talent* management dengan sistematis dan mekanisme yang lebih baik

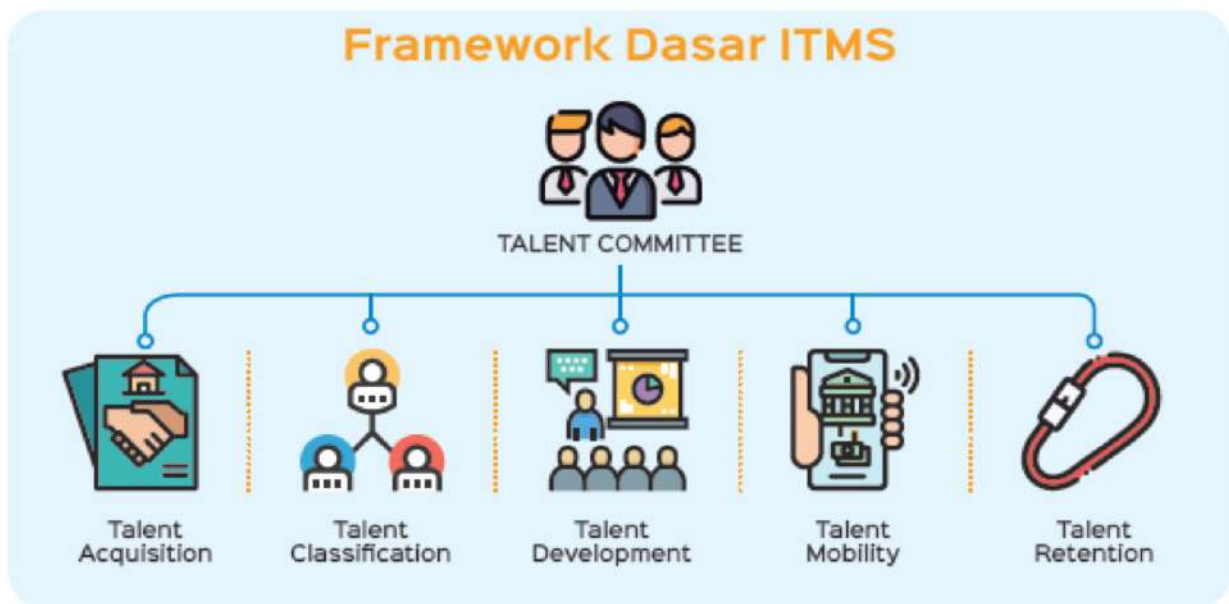


Good Governance

Menjaga tata kelola proses pemelihan calon direksi BUMN

Dalam pengimplementasian ITMS, framework dasar yang digunakan meliputi Talent Acquisition, Talent Classification, Talent Development, Talent Mobility dan Talent Retention dimana dalam setiap tahap tersebut dilaksanakan oleh Talent Committee sebagaimana gambar berikut:

In implementing ITMS, the basic framework used includes Talent Acquisition, Talent Classification, Talent Development, Talent Mobility and Talent Retention wherein each stage is implemented by the Talent Committee as indicated below:



Untuk dapat mengimplementasikan masing-masing tahapan dalam ITMS tersebut di atas, maka Talent Committee memiliki peranan yang sangat penting. Adapun Talent Committee mempunyai tugas sebagai berikut:

To be able to implement each stage in the ITMS above, the Talent Committee has a very important role. The Talent Committee has the following tasks:

1. Berperan aktif dalam proses Talent Acquisition untuk Kandidat Direksi;
2. Menetapkan Talent Classification Calon Kandidat Direksi;

1. Take an active role in the Talent Acquisition process for the Board of Directors Candidates;
2. Establish Talent Classification Candidates for the Board of Directors Candidates;



3. Menyusun program dan pelaksanaan Talent Development

4. Menyusun pelaksanaan Talent Mobility berdasarkan keputusan Menteri BUMN Rini M. Soemarno;
5. Menyusun Sistem Retensi.

Selanjutnya, penjelasan mengenai masing-masing tahapan dalam ITMS adalah sebagai berikut:

1. Talent Acquisition

Merupakan tahapan akuisisi talent yang bersumber dari Pegawai terbaik Perusahaan BUMN, Kementerian BUMN dan External berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Talent Classification

Merupakan proses menetapkan (slotting) talent berdasarkan mapping asesmen ke dalam Box dengan dimensi: 1. Function; 2. Sektor BUMN; 3. Kelas BUMN.

3. Talent Mobility

Merupakan proses pengembangan kandidat potensial, pada umumnya dimulai dengan adanya kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Hal tersebut bisa diperoleh dari (cross) mentoring serta pelatihan yang diberikan.

4. Talent Development

Merupakan proses mobilisasi bagi para kandidat potensial untuk mengembangkan kompetensinya pada sektor/ industri yang sama atau sektor/industri yang berbeda yang dikelola oleh Kementerian BUMN.

5. Talent Retention

Merupakan usaha dalam mempertahankan talenta sebagai calon Direksi BUMN misalkan akselerasi karir, reward and recognition program, special development program dan lain-lain.

Standarisasi Talent Management di Perusahaan

Pengelolaan talent di perusahaan sangat penting dan mendesak untuk dilakukan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam proses perencanaan suksesi

3. Organizing programs and implement Talent Development

4. Prepare the implementation of Talent Mobility based on The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno's decision;
5. Organizing Retention System.

Furthermore, explanation of each stage in the ITMS is as follows:

1. Talent Acquisition

It is the stage of talent acquisition originating from the best employees of the State-Owned Enterprise, the Ministry of State-Owned Enterprise and External based on established criteria.

2. Talent Classification

It is the process of assigning (slotting) talent based on assessment mapping into a Box with dimensions: 1. Function; 2. The State-Owned Enterprise's Sector; 3. The State-Owned Enterprise Classes.

3. Talent Mobility

It is the process of developing potential candidates, generally starting with the current and future requirements. This can be obtained from (cross) mentoring and training provided.

4. Talent Development

It is a mobilization process for potential candidates to develop their competencies in similar sector/industry or different sectors/industries managed by the Ministry of State-Owned Enterprise.

5. Talent Retention

It is an effort to retain talents as candidates for the State-Owned Enterprise Directors such as career acceleration, reward and recognition programs, special development programs and others.

Talent Management Standards in the Company

Management of talent in companies is very important and urgent to be implemented so that the effectiveness and

kepemimpinan. Oleh karena itu, perlu untuk mendesain dan membangun sistem yang terintegrasi dalam mengelola talent executive BUMN. Untuk mendukung pengimplementasian Integrated Talent Management System (ITMS) yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN, maka salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah melalui standarisasi proses Talent Management di masing-masing perusahaan BUMN.

Di setiap BUMN mungkin memiliki standar dan pendekatan yang berbeda-beda terkait pengelolaan talent. Namun, dalam hal ini Kementerian BUMN menetapkan standarisasi Talent Management melalui aplikasi ITMS yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk BUMN-BUMN lain. Sehingga ITMS menjadi sistem yang terintegrasi dalam mengelola talent executive BUMN secara keseluruhan.

Talent Committee

Dalam proses standarisasi Talent Management di masing-masing perusahaan BUMN, akan dilakukan oleh Talent Committee berdasarkan guiding principle Talent Management yang ditetapkan.

1. Peran Talent Committee

Adapun peran dari Talent Committee tersebut adalah memastikan tersedianya talent pipe line dengan:

- Berperan aktif dalam proses talent acquisition
- Menetapkan talent classification
- Mendorong pelaksanaan talent development
- Mempercepat talent mobility
- Meretensi Top Talent

Dalam panduan ini, peran talent committee hanya akan difokuskan pada pemilihan talent (talent acquisition) dan talent classification khususnya untuk posisi pejabat eksekutif BOD – 1 atau setingkat.

2. Peserta Talent Committee

Dalam pelaksanaan Talent committee tersebut, peserta terdiri atas:

efficiency can be achieved in the leadership succession planning process. Therefore, it is necessary to design and build a system which is integrated in managing talent executive of the State-Owned Enterprise. To support the implementation of an Integrated Talent Management System (ITMS) coordinated by the Ministry of State-Owned Enterprise, one of the strategies which require to be implemented is through standardizing Talent Management process in each State-Owned Enterprise company.

Each State-Owned Enterprise may have different standards and approaches related to talent management. However, in this case the Ministry of State-Owned Enterprise establishes Talent Management standardization through ITMS application which can be used as references for other State-Owned Enterprise. So that ITMS becomes an integrated system in managing the State-Owned Enterprise talent executives as a whole.

Talent Committee

In the process of standardizing Talent Management in each State-Owned Enterprise company, it will be implemented by the Talent Committee based on guiding principles of the stipulated Talent Management.

1. Role of the Talent Committee

The role of the Talent Committee is to ensure the availability of pipe line talents by:

- Act actively in the talent acquisition process
- Establish talent classification
- Encouraging the implementation of talent development
- Speed up talent mobility
- Top Talent Retention

In this guideline, the role of talent committee will only be focused on talent selection (talent acquisition) and talent classification specifically for BOD - 1 or equivalent level executive positions.

2. Participants in the Talent Committee

In the implementation of Talent Committee, participants consisted of:



Penanggung Jawab : Direktur Utama
Ketua Komite : Direktur yang men-supervisi fungsi Human Capital
Anggota : Board of Director (BOD) fungsi lainnya
Sekretaris : General Manager (BOD-1) pada fungsi Human Capital.

Responsible Agency: Managing Director
Committee Chairperson: Director who supervises Human Capital functions
Member: Board of Director (BOD) of other functions
Secretary: General Manager (BOD-1) at Human Capital function.

Standarisasi Talent Management

Dalam melakukan standarisasi Talent Management, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya adalah General Principle, Definisi, dan Mekanisme Talent Management. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. General Principle

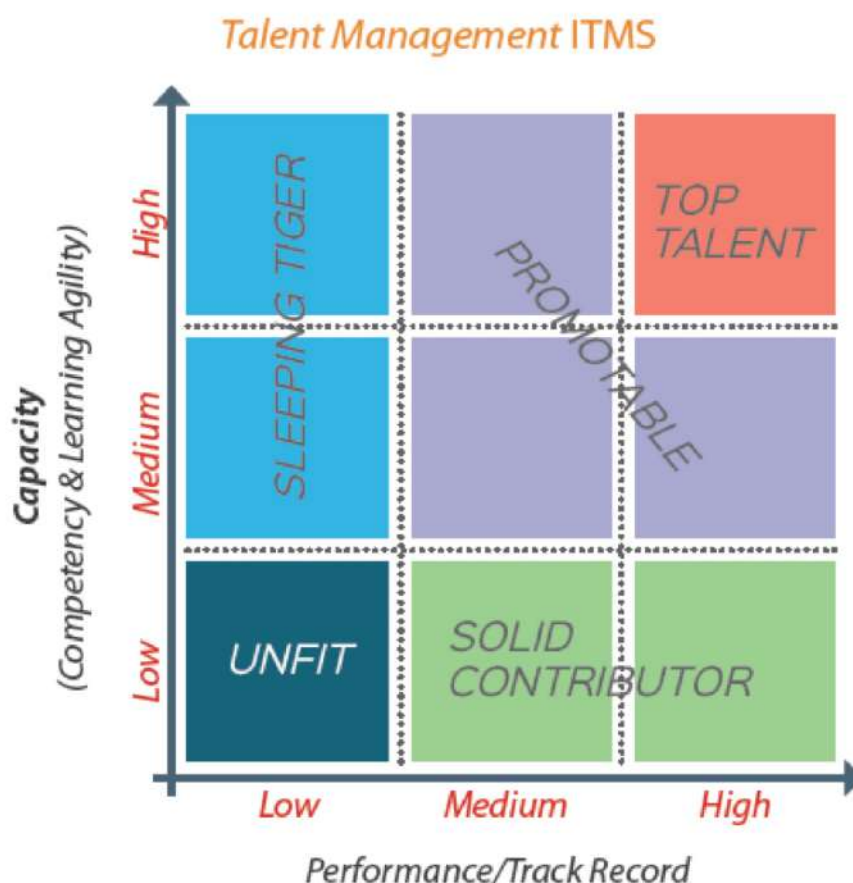
Pendekatan yang digunakan dalam ITMS untuk melakukan standarisasi Talent Management adalah pendekatan kinerja dan kapasitas dengan pemetaan menjadi 5 (lima) klasifikasi (Top Talent, Promotable, Solid Contributor, Sleeping Tiger, dan Unfit)

Talent Management Standardization

In standardizing Talent Management, there are several things which require to be considered including General Principles, Definition and Talent Management Mechanism. Further explanation is as follows:

1. General Principle

The approach used in the ITMS to standardize Talent Management is an approach to performance and capacity with mapping into 5 (five) classifications (Top Talent, Promotable, Solid Contributor, Sleeping Tiger, and Unfit)





2. Definisi Masing-Masing Klasifikasi

Berdasarkan 5 (lima) klasifikasi yang dilakukan dalam Talent Management, penjelasan dari masing-masing klasifikasi adalah sebagai berikut:

a. Top Talent

Merupakan Top Talent (Future Leader) yang memiliki kompetensi tinggi/unggul dan mampu mengoptimalkannya ke dalam pekerjaan sehari-hari. Pegawai dalam klasifikasi ini merupakan kandidat utama yang akan diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi agar dapat mengembangkan kapasitasnya.

b. Promotable

Merupakan pegawai yang memiliki kinerja dan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga mampu memenuhi target yang diberikan, namun masih terdapat area untuk pengembangan agar unggul dalam kinerja dan kompetensi. Pegawai dalam klasifikasi ini merupakan kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi.

c. Solid Contributor

Merupakan pegawai yang mampu menunjukkan kinerja sesuai atau melebihi target yang ditetapkan secara konsisten, namun kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pegawai dalam klasifikasi ini pola pengembangannya lebih diarahkan ke jenis pekerjaan yang serupa dengan pekerjaan ini.

d. Sleeping Tiger

Merupakan pegawai yang memiliki kompetensi yang memenuhi dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, namun belum mampu mengoptimalkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Pegawai dalam klasifikasi ini pola pengembangannya lebih diarahkan ke posisi lainnya yang lebih sesuai (Contoh: Job and Location Fit)

e. Unfit

Merupakan pegawai yang belum mampu memenuhi standar kompetensi dan kinerja yang ditetapkan sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pegawai dalam klasifikasi ini perlu diperhatikan khusus terkait dengan kontribusinya di organisasi

2. Definition of Each Classification

Based on 5 (five) classifications implemented in Talent Management, the explanation of each classification is as follows:

a. Top Talent

Is a Top Talent (Future Leader) with high/superior competence and able to optimize it into daily work. Employees in this classification are the main candidates who will be given higher responsibilities in order to develop their capacity.

b. Promotable

An employee who has performance and competency in accordance with the stipulated standards so that he/she is able to meet the provided targets, but there are still areas for development to excel in performance and competence. Employees in this classification are candidates who can be considered for higher responsibility.

c. Solid Contributor

An employee who is able to show performance according to or exceeds the stipulated target consistently, but competence still requires to be improved. Employees in this classification pattern of development are more directed to the type of work that similar to this work.

d. Sleeping Tiger

Employee with competence that meets and/or exceeds stipulated standard but was not able to optimize it in daily work. Employees in this classification are more directed toward other positions that are more suitable (Example: Job and Location Fit)

e. Unfit

An employee who has not been able to meet the stipulated competency and performance standards so that it is not in accordance with the organization's requirement. Employees in this classification require to be considered specifically related to their contribution to the organization

Penyampaian Data Talent

Data/dokumen terkait talent yang harus disampaikan adalah :

1. Curriculum Vitae (format standar dari Kementerian BUMN)
2. Hasil Asesmen
3. Data Kesehatan
4. Data Performance
5. Data Total Annual Nett Income (TANI).
6. Data Track Record
7. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
8. Label Personal

Semua data harus dipenuhi karena sebagai dasar approval untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu Talent Source. Apabila terdapat talent di perusahaan masing-masing yang dinilai sebagai top performer (top talent & Promotable) namun belum memiliki hasil asesmen yang sesuai dengan ketentuan Kementerian BUMN atau hasil asesmen sudah tidak berlaku, maka data talent tetap dikirimkan terlebih dahulu ke Kementerian BUMN dan secara paralel dilakukan asesmen kepada pegawai tersebut. Sepanjang talent tersebut belum memiliki hasil asesmen yang standar, maka data talent dimaksud akan tetap berada di tahap Talent Register.

Submission of Talent's Data

Data/documents related to talent which shall be submitted are as follows:

1. Curriculum Vitae (standard format from the Ministry of State-Owned Enterprise)
2. Assessment Results
3. Health Data
4. Data Performance
5. Total Annual Net Income (TANI) Data.
6. Data Track Record
7. State Official Assets Report (LHKPN)
8. Personal Label

All data shall be fulfilled because it is the basis for approval to enter the next stage, namely Talent Source. If there are talents in each company that are considered as top performers (top talent & Promotable) but does not yet have assessment results which are in accordance with the Ministry of State-Owned Enterprise provisions or assessment results are not valid, talent's data will still be sent first to the Ministry of State-Owned Enterprise and in parallel assessment of the employee. As long as the talent does not yet have a standard assessment result, the intended talent's data will remain at the Talent Register stage.

TALENT DARI BUMN



Penyampaian Hasil Talent Classification

1. Setelah Talent Committee menetapkan talent classification, maka selanjutnya unit fungsi human capital mempersiapkan guiding principle metode pengembangan pegawai sesuai dengan talent classificationnya masing-masing. Guiding principle tersebut disampaikan ke Direksi yang menjadi atasan langsung masing-masing talent.
2. Selanjutnya atasan langsung dari talent tersebut menyampaikan feedback yang terkait dengan talent

Submission of Talent Classification Results

1. After Talent Committee determines talent classification, thus human capital function unit prepares the guiding principle for employee development methods in accordance with their respective talent classification. The guiding principle is conveyed to the Directors who are the direct supervisor of each talent.
2. Furthermore talent's direct supervisor conveys feedback related to talent development and career

KOMITMEN BERSAMA ITMS





KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

3

Digitalisasi Proses Bisnis

*Digitalization Business Process of the
Ministry of State-Owned Enterprise*

Saya mendorong BUMN terus mengikuti perubahan teknologi. BUMN harus berinovasi untuk terus mengembangkan riset dan lebih inovatif agar mampu bersaing dengan perusahaan nasional maupun global.

I encourage BUMN (State-Owned Enterprise) to continue following technological changes. BUMN (State-Owned Ownership) shall innovate to continue developing research and be more innovative in order to be able to compete with national and global companies.

Rini Soemarno,
The Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) of Indonesia





Digitalisasi Proses Bisnis Kementerian BUMN

Digitalization Business Process of the Ministry of State-Owned Enterprise

Digitalisasi proses bisnis merupakan salah satu inovasi dalam tata kelola dan pembinaan BUMN agar seluruh proses bisnis dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Digitizing business processes is one of the innovations in governance and supervision of the State-Owned Enterprise so that all business processes can be implemented quickly and accurately.

Grand Design Pengembangan TI

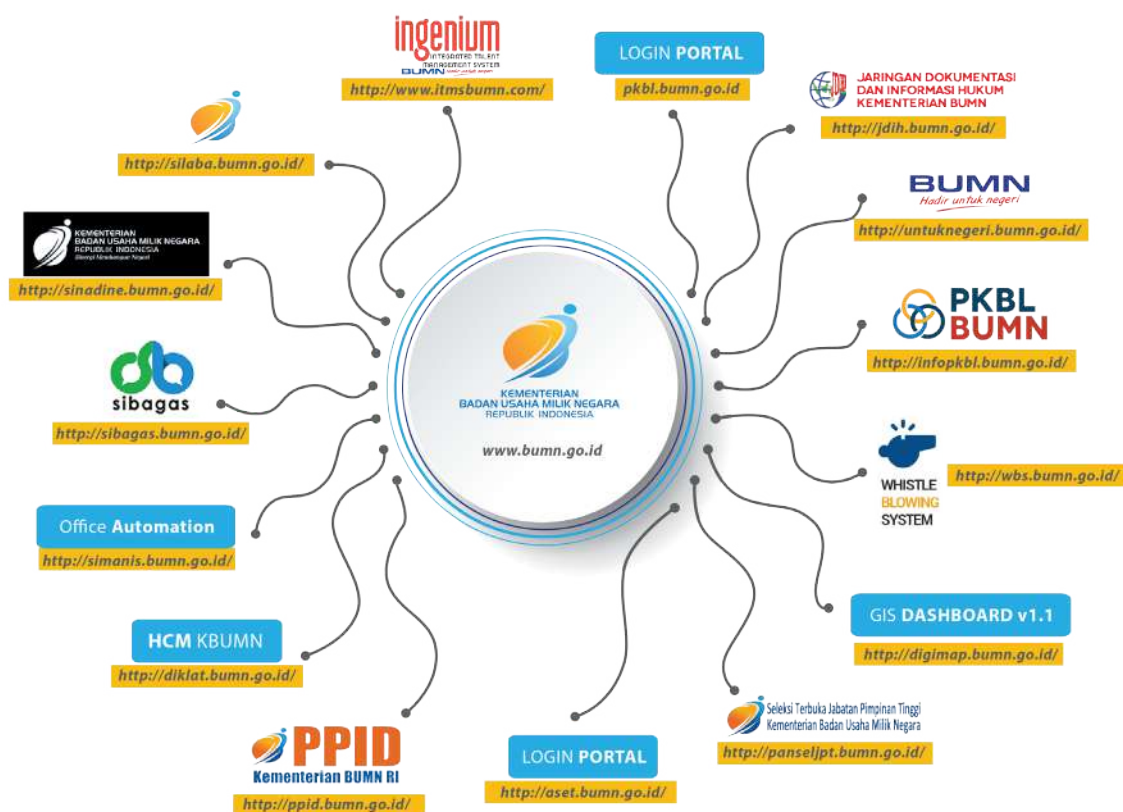
Grand Design Information Technology Development

Dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif di era global seperti ini, sangat diperlukan kecepatan pengambilan keputusan dan kebijakan secara tepat oleh pejabat Kementerian BUMN. Sistem informasi menjadi sangat penting dan menjadi hal utama untuk menunjang tujuan tersebut. Kementerian BUMN membangun sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung kelancaran penyelesaian pekerjaan sehari-hari, baik di lingkungan Kementerian BUMN atau dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan BUMN.

Dalam menjalankan proses bisnis, pada tahun 2018 Kementerian BUMN memiliki setidaknya 16 portal dalam upaya pencapaian target kinerja Kementerian BUMN, yaitu:

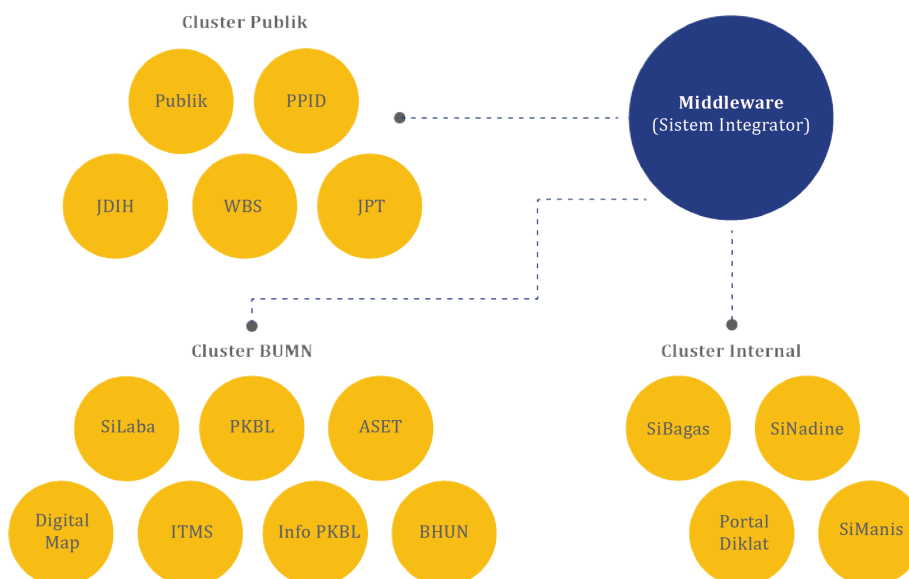
In order to increase competitiveness of the State-Owned Enterprise to face competitive business competition in this global era, the speed of decision-making and policy is urgently required by officials of the Ministry of State-Owned Enterprise. Information system becomes very important and become the main thing to support these goals. The Ministry of State-Owned Enterprise builds adequate work facilities and infrastructure to support the smooth completion of daily work, either within the Ministry of State-Owned Enterprise or in the context of implementing its duties in conducting the State-Owned Enterprise development.

In implementing the business process, in 2018 the Ministry of State-Owned Enterprise has at least 16 portals in an effort to achieve the Ministry of State-Owned Enterprise's performance targets, namely:



Selama tahun 2018, pengembangan teknologi informasi terutama yang terkait dengan aplikasi ataupun sistem informasi telah dilakukan secara masif dan juga melakukan pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan aplikasi yang sudah ada yang selama ini telah digunakan dilingkungan Kementerian BUMN. Berikut gambaran arsitektur aplikasi TI Kementerian BUMN tahun 2018:

During 2018, the development of information technology, especially those related to applications or information systems was implemented massively and also implemented maintenance, repair and development of existing applications which had been used so far in the Ministry of State-Owned Enterprise. Following is an overview of the 2018 Ministry of State-Owned Enterprise's Information Technology application architecture:



Cluster Publik

1. Portal Publik

bumn.go.id

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa keterbukaan informasi sebagai hal yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah dan badan publik, "Dua puluh tahun lalu setelah reformasi ada tiga hal yang terjadi yaitu dari otoriter menjadi demokrasi, kedua sentralistik menjadi desentralisasi, dan ketiga pers yang dikontrol menjadi pers bebas. Tiga hal itu bisa berjalan jika sistem informasi kita terbuka kepada publik". Kehadiran teknologi membuat Pemerintah akan lebih mudah diawasi dikarenakan adanya keterbukaan informasi. Teknologi mempermudah dan menimbulkan dampak tidak ada yang bisa disembunyikan oleh lembaga publik. Apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan lembaga publik dapat diketahui oleh publik.

Penilaian keterbukaan informasi dilakukan berdasarkan kualifikasi sesuai rentang nilai kategori keterbukaan informasi publik. Kategori kualifikasi informasi publik yaitu: Badan Publik Informatif; Badan Publik Menuju Informatif; Badan Publik Cukup Informatif; Badan Publik Kurang Informatif; dan Badan Publik Tidak Informatif. Penilaian dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penilaian keterbukaan informasi publik, pada tahun 2018 Kementerian BUMN memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Cukup Informatif.

1. Public Portal

bumn.go.id

Vice President Jusuf Kalla stated that information disclosure was something that shall be implemented by government institutions and public entities, "Twenty years ago after reform there were three things that happened, namely from authoritarian to democratic, both centralistic became decentralized, and the three controlled presses became press free. Three things can work if our information system is disclosed to the public. "The presence of technology makes it easier for the Government to be monitored due to information disclosure. Technology makes it easy and has no impact which can be hidden by public institutions. What is implemented and what public institutions does not do can be recognized by the public.

The assessment of information disclosure is based on qualifications according to the range of values in the category of public information disclosure. Categories of public information qualification are: Informative Public Entity; Toward Informative Public Entity; Sufficiently Informative Public Entity; Less Informative Public Entity; and Non-Informative Public Entity. Assessment is implemented through monitoring and evaluation in implementing Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. In assessing public information disclosure, in 2018 the Ministry of State-Owned Enterprise received an award as Sufficiently Informative Public Entity.





Keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian BUMN juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor. PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor. PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor. PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN, yang di dalamnya mencakup ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN.

2. PPID Kementerian BUMN

ppid.bumn.go.id

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian layanan informasi publik oleh PPID di lingkungan Kementerian BUMN berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor , PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor. PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor. PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN. PPID Kementerian BUMN dan Perangkat PPID Kementerian BUMN bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN menerima dengan terbuka setiap permohonan dari masyarakat atau seluruh pemangku kepentingan secara langsung, tidak langsung. PPID Kementerian BUMN juga melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui surat elektronik yang ditujukan

Information disclosure within the Ministry of State-Owned Enterprise also refers to The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno Regulation Number. PER-08/MBU/2014 dated June 30th, 2014 concerning Guidelines for Information and Documentation Management in the Ministry of State-Owned Enterprise as amended based on the State-Owned Minister Regulation Number. PER-12/MBU/10/2015 concerning Amendment to the State-Owned Minister Regulation Number. PER-08/MBU/2014 dated June 30th, 2014 concerning Guidelines for Information and Documentation Management in the Ministry of State-Owned Enterprise, which includes the scope of authority of the Ministry of State-Owned Enterprise Public Information Services.

2. PPID of the State-Owned Enterprise Ministry

ppid.bumn.go.id

In order to provide Public Information services as mandated in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. Provision of public information services by PPIDs within the Ministry of State-Owned is guided by The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno Regulation No. PER-08/MBU/2014 dated June 30th, 2014 concerning Guidelines for Management of Information and Documentation in the Ministry of State-Owned Enterprise as updated according to the State-Owned Enterprise Minister Regulation Number PER-12/MBU/10/2015 concerning Amendments to the State-Owned Enterprise Minister Regulation Number. PER-08/MBU/2014 dated June 30th, 2014 concerning Guidelines for Information and Documentation Management in the Ministry of State-Owned Enterprise. The Ministry of State-Owned Enterprise's PPID and the Ministry of State-Owned Enterprise's PPID Toolkit are responsible for storing, documenting, providing, and/or serving public information within the Ministry of State-Owned Enterprise.

The Ministry of State-Owned Enterprise accepts openly every request from the society or all stakeholders directly, indirectly. The Ministry of State-Owned Enterprise' PPID also serves information requests submitted by e-mail addressed through the address: ppid@bumn.go.id as well



melalui alamat: ppid@bumn.go.id serta melalui portal publik dengan pengisian formulir permohonan informasi publik.

Setiap permohonan informasi, kemudian akan diproses, yang secara umum membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing pelayanan, terhitung sejak diterima/ mendapat disposisi hingga pengesahan jawaban oleh PPID setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

as through public portal by filling out forms of public information requests.

Each information request will then be processed, which generally takes 10 (ten) working days and an extension of 7 (seven) working days for each service, from the time of receipt/obtaining disposition to an answer ratification



3. JDIH

jdih.bumn.go.id

Informasi hukum yang baik didapat dari kegiatan dokumentasi hukum yang baik yang memenuhi kaedah pendokumentasian yang benar dengan memakai sistem simpan dan sitem temu kembali. Pemanfaatan TIK dapat meningkatkan sistem simpan dan temu kembali karena mempunyai media penyimpanan yang ringkas namun memuat kapasitas yang besar dan kecepatan proses yg tinggi sehingga mempercepat penemuan kembali untuk layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Untuk optimalisasi JDIH maka diperlukan Revitalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang merupakan Amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Terjalinnya sistem Dokumentasi dan

3. JDIH

jdih.bumn.go.id

Good legal information is obtained from good legal documentation activities that fulfill the correct documentation method using storage system and the retrieval system. The use of TIK can improve the storage and retrieval system because it has a compact storage medium but contains a large capacity and high processing speed so as to accelerate rediscovery for legal information services which are complete, accurate, easy, and fast.

To optimize JDIH, it is necessary to revitalize the National Legal Information and Documentation Network, which is the mandate of Presidential Instruction Number 9 of 2011 concerning Action Plans for the Prevention and Eradication of Corruption in 2011. The establishment of an integrated



Informasi Hukum yang terpadu, serta sebagai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah salah satu pilar penunjang pembangunan hukum dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai sarana diseminasi dan penyebarluasan bahan hukum yang telah didokumentasikan dan dikelola oleh setiap instansi pemerintah dalam wadah yang terintegrasi dengan terjadinya kelancaran arus informasi aturan hukum harus terjamin serta diinformasikan dan dikomunikasikan dengan baik kepada pengguna, baik bagi aparatur negara, penegak hukum, kalangan akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya serta masyarakat luas pada umumnya.

Untuk itu, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bawah kewenangannya dengan mengembangkan sarana saluran komunikasi ataupun infrastruktur informasi yang modern (seperti internet/website) agar informasi hukum dapat dengan mudah diakses oleh pengguna dan merupakan sarana layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Sehingga dengan terbukanya akses informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya akan tercipta suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel sehingga akan meminimalkan penyimpangan-penyimpangan.

Keberadaan sistem informasi hukum merupakan salah satu faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan di bidang hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional merupakan satu sistem pendayagunaan bersama peraturan per-uu-an dan bahan dokumentasi lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesimbangan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, pengelola perlu menyebarluaskan informasi hukum merupakan sistem tertentu. Langkah tersebut akan menghasilkan dan mewujudkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh JDIH adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, antara lain dengan WEB, Internet dan lain sebagainya, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan dan memberikan pelayanan yang hukum.

Legal Documentation and Information system, as well as the National Law Documentation and Information Network are one pillar that supports legal development in the framework of establishing legislation, namely as means of dissemination and dissemination of legal material which has been documented and managed by every government institution in an integrated place with the smooth flow of information where legal rules shall be guaranteed and well informed and communicated to users, both for state apparatus, law enforcement, academics and various other legal professions and wider societies in general.

Therefore, the government shall disseminate legislation under its authority by developing modern communication channels or information infrastructure (such as the internet/website) so that legal information can be easily accessed by users and is a complete, accurate, easy and fast legal information service facility. So that the disclosure of access to legal information in the form of legislation and other legal materials will create a clean and accountable government so that it will minimize deviations.

The existence of legal information system is one of the main factors which require attention in the development process within legal field. The National Legal Documentation and Information Network (JDIH) is a system of joint utilization of regulations and other documentation materials in an orderly, integrated and sustainable manner and is a complete means of providing legal information services. To achieve efficiency and effectiveness, managers need to disseminate legal information to a particular system. This step will produce and realize legal information services that are complete, accurate, easy and fast.

Steps taken by JDIH are by utilizing information and communication technology, including WEB, Internet and so forth, this is implemented so that the society can use and provide legal services.



4. Whistle Blowing System

wbs.bumn.go.id

The United Nations Convention against Corruption of 9 December 2003, mengimbau setiap negara untuk menggunakan kriteria yang sesuai pada sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang dengan itikad baik dan rasional melaporkan kepada pihak berwenang segala tindakan pelanggaran. Secara leter lek, Whistle blowing dapat diartikan dengan meniup peluit yang biasanya akan terdengar bunyi yang bernada tinggi, melengking dan mengusik perhatian seseorang. Situasinya pun tidak biasa dan kita pun terpanggil untuk bersikap waspada. Siapapun akan berusaha mencari tahu tentang segala sesuatu yang terkait dengan suara peluit itu. Demikian yang dimaksud dengan whistleblowing.

Whistleblowing system, tentu menunjukkan adanya suatu mekanisme pengaturan sehingga suatu sistem akan dapat berjalan baik dan memberi manfaat bagi organisasi. Dalam lingkup yang lebih luas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dimana organisasi tersebut berada. Makna Whistleblowing system dalam konteks disini adalah sebagai suatu sistem yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik ASN maupun masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan, dialami maupun rasa kepekaannya terhadap hal-hal yang terkait dengan perilaku ataupun tindak korupsi.

Whistle blowing system merupakan salah satu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah digalakkan, tidak hanya di lingkup Kementerian/Lembaga Pemerintah tapi juga di tiap organisasi swasta. Whistle blowing system ini memberi kesempatan luas bagi seluruh elemen bangsa untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Melalui sistem ini, siapapun berhak melaporkan kepada pihak dalam organisasi yang ditunjuk dan diberikan mandat kewenangan dalam menerima pesan atau laporan dan bertanggung jawab serta meneruskannya untuk proses lebih lanjut. Dalam hal ini sebaiknya kewenangan dapat dipegang oleh pimpinan tertinggi dan selanjutnya dapat diproses secara hukum.

Langkah Kementerian BUMN dengan meletakkan standing

4. Whistle Blowing System

wbs.bumn.go.id

The United Nations Convention against Corruption of December 9th, 2003, calls on each state to use appropriate criteria in legal system that is applicable in their respective countries to provide protection to anyone in good faith and rationally reports to the authorities concerning all violations. In terms of frequency, whistle blowing can be interpreted by blowing a whistle which usually sounds high-pitched, shrill and disturbing one's attention. The situation is unusual and we are also called to be vigilant. Anyone will try to find out about anything related to the sound of the whistle. This is what is meant by whistleblowing.

The Whistleblowing system, of course, indicates the existence of a regulatory mechanism so that a system will run well and benefit the organization. In a broader scope, it is expected to be able to benefit the society where the organization is located. The meaning of Whistleblowing system in the context here is as a system that is available and can be used by anyone, both the State Civil Apparatus (ASN) and the society, to convey what is known, felt, experienced and a sense of sensitivity to matters related to behavior or acts of corruption.

Whistle blowing system is one of the steps of Corruption Eradication Commission (KPK) which is being promoted, not only in the scope of Ministries/Government Institutions but also in each private organization. This whistle blowing system provides a broad opportunity for all elements of the nation to participate in efforts to eradicate corruption. Through this system, anyone has the right to report to parties in the organization appointed and given the authority mandate to receive messages or reports and be responsible and forward them for further processing. In this case, the authority should be held by the highest leadership and can thus be processed legally.

Steps of the Ministry of State-Owned Enterprise by putting



banner di area yang terlihat pengunjung dan menyediakan tool yang sangat mudah, merupakan langkah positif dan berani. Positif – karena sebagai bentuk upaya yang baik dan berani – karena menunjukkan komitmen kepada masyarakat sebagai organisasi yang tengah berusaha melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Kementerian BUMN berharap agar WBS yang tersedia dapat digunakan dan dimanfaatkan baik oleh para ASN pada umumnya dan khususnya di lingkungan Kementerian BUMN, maupun anggota masyarakat yang mengetahui atau mencurigai adanya perilaku atau tindak pidana korupsi.

Suatu organisasi hendaknya menyadari bahwa setiap pegawai merupakan sumber informasi yang berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mengenali adanya permasalahan, mampu untuk menanganinya dan mencegahnya sebelum permasalahan tersebut menyebabkan kerusakan yang besar atau membahayakan reputasi organisasi atau stakeholders. Whistleblowing system hendaknya dapat memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya jaminan kerahasiaan. Termasuk jaminan bagi pegawai atau ASN sebagai pelapor yang memberikan laporan dengan benar dapat tetap memperoleh jaminan terhadap status kepegawaian dan karir mereka.

Whistleblowing system dapat berjalan baik apabila ada peran aktif masyarakat yang juga ditindaklanjuti dengan peran aktif organisasi untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk baik meneliti kebenarannya, menetapkan proses sanksi, maupun perlindungan kerahasiaan bagi pelapor dan kesempatan pembelaan bagi pihak terlapor.

Whistleblowing system merupakan alat bantu deteksi kecurangan yang cukup efisien dan sebagai bagian dari program internalisasi nilai-nilai integritas dalam diri setiap pegawai. Oleh karena itu, organisasi Kementerian BUMN mempersiapkannya dengan baik segala hal terkait dengan tata kelola sistem Whistleblowing ini demi transparansi dan akuntabilitas organisasi yang mendorong tata pemerintahan yang baik.

standing banners in areas that are visible to visitors and providing very easy tools are positive and courageous steps. Positive because it is a form of a good and courageous effort and it indicates commitment to the society as an organization which tries to make effort to eradicate corruption.

The Ministry of State-Owned Enterprise hopes that the available WBS can be used and utilized by the State Civil Apparatus (ASN) in general and especially in the Ministry of State-Owned Enterprise, as well as society members who know or suspect corruption behavior or criminal case of corruption.

An organization should realize that every employee is a valuable source of information which can be used to recognize problems, being able to handle it and prevent it before it cause great damage or endanger the reputation of the organization or stakeholders. The Whistleblowing system should be able to provide a sense of security and comfort with a guarantee of confidentiality. Including guarantees for employees or the State Civil Apparatus (ASN) as reporters who provide reports correctly can still obtain a guarantee of their employment status and career.

The Whistleblowing system can run well if there is an active role of the society which is also followed up with an active role of the organization to follow up on every incoming report, examining the truth, establishing sanctions, and protecting confidentiality for the reporter and the defense opportunity for the reported party.

Whistleblowing system is a fairly efficient cheating detection tool and as part of the program to internalize the values of integrity in each employee. Therefore, the Ministry of State-Owned Enterprise's organization prepares all things related to the governance of this Whistleblowing system for the sake of transparency and accountability of the organization which encourages good governance.



5. Pansel JPT

panselJPT.bumn.go.id

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aktor utama penggerak birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menggantikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tersebut disusun sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, yang merupakan upaya untuk mentransformasi birokrasi Pemerintah Indonesia, dari rule-based bureaucracy menuju ke-dynamic governance.

Sejalan dengan itu maka manajemen Aparatur Sipil Negara juga harus berubah dari administrasi kepegawaian, menuju ke pembangunan Human Capital. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN merupakan amanat utama dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Dengan menerapkan sistem merit maka pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja.

Sistem merit telah diamanatkan penerapannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan demikian maka tujuan pembangunan bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan.

Untuk melaksanakan sistem merit, Undang-Undang mewajibkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka dan instansi menerapkan prinsip-prinsip merit dalam manajemen ASN. Kebijakan tersebut hanya dikecualikan bagi instansi yang sudah menerapkan

5. JPT Pansel

panselJPT.bumn.go.id

The State Civil Apparatus (ASN) is the main actor driving the government bureaucracy in implementing government tasks, development and public services. To create a professional, integrity, neutral and high-performing State Civil Apparatus (ASN), the Government has established Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN) to replace Law No. 8 of 1974 and Law No. 43 of 1999. Law No. 5 of 2014 was compiled as part of a bureaucratic reform program, which was an effort to transform the Indonesian government bureaucracy, from rule-based bureaucracy to dynamic governance.

In line with that, the management of the State Civil Apparatus (ASN) shall also change from the personnel administration, towards the development of Human Capital. Application of the merit system in the State Civil Apparatus (ASN) management is the main mandate in Law No. 5 of 2014. By implementing the merit system, employee appointments, transfers, promotions, payroll, awards and employee career development are based on employee qualifications, competencies and performance. The system does not only create a sense of justice among employees, it can also encourage increased competence and performance.

The merit system has been mandated to be implemented in Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN). The implementation of merit system aims to ensure that positions in the government bureaucracy are occupied by employees who meet the qualification and competency requirements. Thus, the development objectives of the Apparatus Human Resources field to realize the State Civil Apparatus (ASN) employees who are professional and have integrity, neutral and high-performing can be realized.

To implement merit system, the Law requires filling in High Leadership Position (JPT) through open selection and institutions apply merit principles in the State Civil Apparatus (ASN) management. This policy is only excluded for institutions which have implemented the merit system.



sistem merit. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diberi tugas mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut KASN membuat pemetaan penerapan sistem merit untuk mengetahui kesiapan instansi pemerintah dalam melaksanakan sistem merit. Hasil pemetaan menyediakan informasi tentang aspek-aspek yang masih perlu dibenahi agar sistem merit dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk tahun 2018, pemetaan dilaksanakan di Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Provinsi, salah satunya di Kementerian BUMN.

Hambatan yang dihadapi instansi dalam membangun sistem merit tidak hanya keterbatasan dana, namun juga keterbatasan kemampuan para pengelola pegawai untuk menyiapkan berbagai prasyarat yang diperlukan. Disamping itu, komitmen yang kuat sangat diperlukan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi untuk mewujudkan manajemen ASN yang berbasis sistem merit. Tantangan ke depan dalam membangun sistem merit adalah:

- a. Mendorong instansi untuk menyiapkan rencana strategis bidang SDM yang menjadi bagian dari rencana strategis instansi;
- b. Membangun sistem pembinaan karier yang berkelanjutan, yang dimulai sejak mereka diterima menjadi pegawai sampai mereka mengakhiri masa jabatannya, agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional;
- c. Mengembangkan manajemen kinerja untuk memastikan masing-masing pegawai dapat mencapai target yang telah diturunkan dari visi, misi dan tujuan instansi;
- d. Menyusun kebijakan penggajian, penghargaan yang dikaitkan dengan kinerja dan disiplin untuk menjadi reward and punishment yang efektif dalam mendorong kinerja serta membentuk budaya kerja yang lebih produktif; dan
- e. Menyiapkan para calon pemimpin yang dibutuhkan instansi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan membangun talent pool yang berkesinambungan melalui upaya peningkatan kapasitas pegawai secara konvensional maupun non-konvensional.

The State Civil Apparatus Commission (KASN) was given the task of monitoring the implementation of merit system in the State Civil Apparatus (ASN) policies and management. To implement its function, KASN made a mapping of merit system implementation to determine the readiness of government institutions in implementing merit system. Results of the mapping provide information concerning aspects that still requires to be addressed so that the merit system can be implemented effectively. For 2018, the mapping is implemented in the Ministry, Non-Ministry Government Institutions (LPNK) and the Provincial Government, one of which is in the Ministry of State-Owned Enterprise.

The obstacles faced by institutions in developing merit system are not only limited funds, but also the limited ability of the employee managers to prepare the necessary prerequisites. Besides that, a strong commitment is very much required from the Personnel Development Officer (PPK) in each institution to realize the State Civil Apparatus (ASN) management based on merit system. The future challenges in building merit system are as follows:

- a. Encouraging institutions to prepare strategic plans for Human Resources sector which are part of the institution's strategic plan;
- b. Building a sustainable career guidance system, which starts from when they are accepted to become employees until they terminated their term of service, in order to implement their duties professionally;
- c. Develop performance management to ensure that each employee can achieve targets which have been derived from the vision, mission and objectives of the institution;
- d. Develop payroll policies, rewards that are associated with performance and discipline to be reward and punishment which are effective in encouraging performance and forming a more productive work culture; and
- e. Prepare prospective leaders required by institutions in the short and long term by building a sustainable talent pool through efforts to increase the capacity of employees both conventionally and unconventionally.



Internal Cluster

1. SiManis

Simanis.bumn.go.id

Sistem Manajemen Informasi ASN atau SiManis merupakan portal yang memudahkan Kementerian BUMN dalam pengelolaan administrasi dan data kepegawaian, manajemen kinerja organisasi dan individu, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pengelolaan organisasi dan proses bisnis internal lainnya.

Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian BUMN, SiManis menjadi alat untuk penguatan pelaksanaan manajemen kinerja individu dan organisasi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi Makin Baik (Manajemen Kinerja Berbasis Elektronik).

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Kementerian BUMN mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Kementerian BUMN untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kementerian BUMN. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya

1. SiManis

Simanis.bumn.go.id

The State Civil Apparatus (ASN) or SiManis Information Management System is a portal that facilitates the Ministry of State-Owned Enterprise in managing administration and employment data, managing organizational and individual performance, accountability for financial management, organization management and other internal business processes.

In managing performance accountability in the Ministry of State-Owned Enterprise, SiManis is a tool for strengthening the implementation of performance management for individuals and organizations, in which there is Makin Baik application (Electronic Performance Based Management).

Strengthening performance accountability is one of the programs implemented in the framework of bureaucratic reform to create clean and free government from Corruption, Collusion & Nepotism (KKN), increasing the quality of public services to the society, and increasing the capacity and accountability of bureaucratic performance. Strengthening accountability is implemented by implementing the Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) as referred to in Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP).

To find out the extent to which the Ministry of State-Owned Enterprise implements its Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP), as well as to encourage an increase in the performance of government institutions, an evaluation toward Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) implementation is necessary. This evaluation is expected to be able to encourage the Ministry of State-Owned Ministry to consistently improve the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) and realize the performance achievements (results) of its institutions as mandated in the RPJMN.

Evaluation of the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) is a systematic analysis activity, providing values, attributes, appreciation, and recognition of problems, as well as providing solutions to problems found for the purpose of increasing the accountability and performance of the Ministry of State-Owned Enterprise. In various



evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar Kementerian BUMN juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Seluruh aktivitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dapat diakses melalui aplikasi SiManis dalam menu Makin Baik.

cases, evaluation is implemented through monitoring the existing system, but sometimes evaluations cannot be implemented only by using information generated by the information system in the institution. Data from outside the Ministry of State-Owned Enterprise is also very important as an analysis material. Evaluation can be implemented by not having to depend on the completeness and accuracy of existing data. Adequate information can be used to support arguments concerning requirements for improvement. The use of data for evaluation prioritizes the speed of obtaining data and its usefulness. Thus, evaluation results will be more quickly obtained and corrective actions can be taken immediately. Unlike the audit, evaluation focuses more on data collection and analysis to build arguments for the formulation of recommendations/suggestions for improvement. The nature of evaluation is more persuasive, analytical, and considers the possibility of its application.

The evaluation purpose of the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) can be determined annually in accordance with the established evaluation policy. The goals and objectives of the evaluation are highly dependent on users of evaluation results and policies of institutions/working unit chairperson that is authorized to implement evaluations, taking into account on various constraints which exist.

Generally, the purpose of evaluating the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) is to:

1. Obtain information concerning Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) implementation.
2. Assessing implementation level of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP);
3. Providing suggestions for improvement to increase the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP).
4. Monitoring recommendation follow-up from previous evaluation results.

All performance planning activities, performance measurement, performance evaluation, and performance achievements can be accessed through SiManis application in Makin Baik menu.



2. Sinadine

sinadine.bumn.go.id

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi atau e-government dalam proses pemerintahan telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan e-government merupakan upaya Pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Tata Naskah Dinas Elektronik yang merupakan salah satu bentuk implementasi e-government tersebut, diyakini akan mempercepat proses dalam penanganan surat dan komunikasi kerja, karena prosedur standar yang biasanya dilakukan secara manual dialihkan pada sistem komputerisasi. Dengan Tata Naskah Dinas Elektronik, kinerja dalam hal koordinasi dan penanganan surat juga akan meningkat karena sistem aplikasi memungkinkan semua aktivitas berlangsung secara real time yang dibantu dengan teknologi informasi.

Selain itu, penerapan e-government dan Tata Naskah Dinas Elektronik juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan petunjuk pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN. Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik, tercapainya efektivitas dan efisiensi serta kelancaran proses penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Adapun sasaran dari Tata Naskah Dinas Elektronik, adalah:

1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman

2. Sinadine

sinadine.bumn.go.id

The use of communication and information technology or e-government in the governance process has been proven to increase efficiency, effectiveness, transparency and accountability in the administration of government. The use of e-government is an effort of the Government to develop electronic-based governance in order to increase productivity and quality of public services effectively and efficiently.

The Electronic Office Manuscript, which is one form of e-government implementation, is believed to accelerate the process of handling letters and work communications, because standard procedures that are usually implemented manually are transferred to computerized systems. With Electronic Service Manuscripts, performance in terms of coordination and handling of letters will also increase because the application system allows all activities to take place in real time assisted by information technology.

In addition, the application of e-government and Electronic Scripts is also in line with Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as Law Number 43 of 2009 concerning Archives.

The Guidelines for Electronic Manuscripts are intended as a reference in the management and preparation of instructions for the implementation of Electronic Manuscripts for all organizational units within the Ministry of State-Owned Enterprise. The Electronic Service Manuscript Guidelines aim to create uniformity in the management of Electronic Manuscripts, achieve effectiveness and efficiency as well as smooth the process of organizing Electronic Manuscripts for all organizational units within the Ministry of State-Owned Enterprise.

The targets of Electronic Manuscript are as follows:

1. Achieving common understanding of the implementation



tentang penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN;

2. Terwujudnya keterpaduan Tata Naskah Dinas Elektronik pada seluruh unit di lingkungan Kementerian BUMN;
3. Lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam Tata Naskah Dinas;
4. Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam Tata Naskah Dinas; dan
5. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Tata Naskah Dinas.

Sementara manfaat dari Tata Naskah Dinas Elektronik, adalah:

1. Terwujudnya percepatan e-government
Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan memberikan manfaat berupa penghematan sumber daya, seperti tenaga, kertas, waktu, dan biaya karena mengurangi jumlah Naskah Dinas yang harus dicetak. Efektivitas dan efisiensi pekerjaan dapat dicapai dengan tersampainya informasi secara langsung atas Naskah Dinas atau informasi lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi, tanpa bergantung pada keberadaan kurir.
3. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi
Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik akan mendorong terjadinya reformasi birokrasi aparatur negara
 - a. Mempercepat komunikasi dan proses koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.
 - b. Kemudahan pengelolaan dokumen Naskah Dinas dan penggunaannya

Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik akan memberikan keamanan dalam penyimpanan dokumen, kemudahan dalam menangani dokumen, dan keakuratan dalam pelacakan status dokumen.

of Electronic Manuscripts for all organizational units within the Ministry of State-Owned Enterprise;

2. Realization to the integration of Electronic Manuscripts for all units within the Ministry of State-Owned Enterprise;
3. The spread of communication and convenience in the Official Manuscript;
4. Achieving effectiveness and efficiency in Official Manuscripts; and
5. The realization of information technology usage in Service Manuscripts.

While the benefits of Electronic Scripts are as follows:

1. Realization of e-government acceleration
Utilization of Electronic Manuscripts will support the realization of good governance by utilizing information technology.
2. Realizing the effectiveness and efficiency of government administration The use of Electronic Manuscripts will provide benefits in the form of saving resources, such as labor, paper, time and costs because it reduces the number of Manuscripts which shall be printed. The effectiveness and efficiency of work can be achieved by conveying information directly on Manuscripts or other information that utilizes information technology, without depending on courier's presence.
3. Realizing the acceleration of bureaucratic reform
Utilization of Electronic Manuscripts will encourage reform of the state apparatus bureaucracy.
 - a. Speed up communication and coordination processes between organizational units within the Ministry of State-Owned Enterprise.
 - b. Ease of management of Manuscript documents and its usage

The use of Electronic Manuscript will provide security in document storage, ease of handling documents, and accuracy in tracking document status.



Aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SiNadine) merupakan proses korespondensi dilakukan secara online/elektronik sehingga proses tata persuratan dilingkungan Kementerian BUMN lebih efisien dan dilakukan dengan lebih cepat. Kementerian BUMN telah mengimplementasikan aplikasi SiNadine selama tahun 2017.

Aplikasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktifitas kerja serta tertib administrasi di lingkungan Kementerian BUMN untuk menerapkan sistem tata naskah elektronik dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan komputer dan aplikasi web based guna memproses naskah dinas dan mempermudah arus informasi/lalu lintas naskah dinas di lingkungan Kementerian BUMN.

Cakupan Sistem aplikasi ini antara lain:

1. Komunikasi Eksternal

Komunikasi Eksternal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dalam hal ini dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar dengan instansi di luar Kementerian BUMN.

2. Komunikasi Internal

Naskah Dinas Internal merupakan Naskah Dinas Korespondensi meliputi Nota Dinas, Memorandum dan Surat Undangan. Aplikasi SiNadine akan memberikan fasilitas untuk pembuatan konsep Naskah Dinas keluar berdasarkan template pedoman TND Kementerian BUMN sampai dengan pengabsahan Naskah Dinas secara elektronik. Aplikasi SiNadine akan melakukan pengelolaan Naskah Dinas, pengagendaan dan penomoran Naskah Dinas keluar serta pendistribusian secara langsung, sehingga semua data tersimpan dalam Database. Untuk berkas Naskah Dinas keluar yang berbentuk dokumen fisik dilakukan scanning dan diunggah pada Aplikasi SiNadine menjadi file Digital.

SiNadine is a correspondence process implemented online/ electronically so that the process of correspondence within the Ministry of State-Owned Enterprise is more efficient and implemented more quickly. The Ministry of State-Owned Enterprise has implemented SiNadine application during 2017.

This application was built in order to improve the effectiveness and productivity of work and orderly administration in the Ministry of State-Owned Enterprise to implement an electronic script system by utilizing computer network-based technology and web-based applications to process official texts and facilitate information flow/official script traffic within the Ministry of State-Owned Enterprise.

System Coverage of this application includes:

1. External Communication

External Communication is the process of delivering information where in this case is implemented through incoming letters and outgoing letters with institutions outside the Ministry of State-Owned Enterprise.

2. Internal Communication

Internal Service Manuscripts are Correspondence Service Manuscripts including Official Memorandum, Memorandum and Invitation Letter. SiNadine application will provide facilities for making outgoing Service Manuscript concepts based on template of the Ministry of State-Owned Enterprise's TND guideline up to the validation of Official Manuscript electronically. SiNadine application will manage Office Manuscripts, appointment and numbering of outgoing Service Manuscripts and distribution directly, so that all data is stored in the Database. For outgoing Office Manuscript files in the form of physical documents scanning and uploading are implemented at SiNadine Application into Digital files.



3. Disposisi

Disposisi merupakan perintah atasan terhadap bawahan dalam menindaklanjuti surat masuk. Aplikasi SiNadine memberikan mekanisme pembuatan dan metode koordinasi antara pembuat dan penerima dalam menyelesaikan satu alur disposisi

4. Pembuatan Naskah Dinas dengan Template

Pembuatan Naskah Dinas dengan menggunakan template akan memberikan kemudahan dan keseragaman, dalam hal ini aplikasi SiNadine. Proses melengkapi template dengan data yang diperlukan dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi penyunting teks (text editor) yang disediakan di situs (web), tanpa harus membuka aplikasi lain.

5. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran seluruh Naskah Dinas Kementerian BUMN diagendakan melalui aplikasi SiNadine. Serta pengagendaan Pengiriman/Ekspedisi Naskah Dinas Korespondensi Eksternal.

6. Fasilitas Arsip Elektronik

Penyimpanan seluruh Naskah Dinas dalam bentuk Soft Copy untuk memudahkan pencarian. Untuk kepentingan arsip, berkas Naskah Dinas Internal dicetak dan ditandatangani pejabat.

7. Fasilitas Pencetakan

Aplikasi SiNadine menyediakan fasilitas pencetakan data sesuai kebutuhan (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan).

3. Disposition

Disposition is an order of superiors to subordinates in following up incoming letters. SiNadine application provides a mechanism for making and coordinating methods between the maker and recipient in completing a disposition path

4. Making Manuscripts with Templates

Making Manuscripts using templates will provide convenience and uniformity, in this case SiNadine application. The process of completing a template with a required data can be implemented directly through a text editor application (text editor) provided on the site (web), without having to open another application.

5. Numbering of Manuscripts

Numbering of all State-Owned Enterprise Ministry's Manuscripts is scheduled through SiNadine application. Appointment of External Correspondence Manuscript Shipping/Expedition.

7. Electronic Archive Facilities

Store all Manuscripts in the form of softcopy to facilitate search. For the sake of archives, the Internal Manuscript file is printed and signed by officials.

7. Printing Facility

SiNadine application provides data printing facilities as required (daily, weekly, monthly, and annually).





3. SiBagas

<http://sibagas.bumn.go.id>

Kementerian BUMN membangun Knowledge Management System (KMS) yang terdiri dari tiga bagian penting, yaitu electronic sharing (e-sharing), electronic learning (e-learning), dan electronic repository (e-repository).

Aplikasi Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) merupakan media implementasi KMS untuk e-sharing, yaitu pembelajaran sosial melalui berbagi ide/gagasan serta bekerja secara kolaboratif (social learning and collaboration). SiBagas mampu memfasilitasi; (1) penyampaian, pertukaran, pengayaan, dan penyebaran informasi, ide, gagasan, pemikiran dan pengetahuan di lingkungan Kementerian BUMN; (2) Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Melalui aplikasi ini, insan Kementerian BUMN dituntut untuk memasukkan aktivitas berbagi pengetahuan melalui www.sibagas.bumn.go.id (SiBagas), sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk mengaktifkan SiBagas di Mobile Device, terlebih dahulu harus men-download aplikasi SAP JAM di Google Play (Android) atau App Store (IOS).

Dengan penggunaan yang optimal atas aplikasi ini, diharapkan akan tercapai peningkatan efektivitas dan produktivitas seluruh komponen di Kementerian BUMN. Akhirnya, cita-cita menjadikan Kementerian BUMN sebagai learning organization dapat diwujudkan.

Dalam rangka mendorong proses transformasi Kementerian BUMN menjadi sebuah organisasi pembelajar (learning organization) perlu diciptakan atmosfer yang kondusif untuk dapat mengembangkan kapasitas diri melalui proses mendapatkan, menyimpan, menyebarluaskan, menerapkan, dan mengevaluasi/ menyempurnakan pengetahuan yang ada baik yang sudah tertulis ataupun yang masih dalam diri masing-masing individu pegawai.

3. SiBagas

<http://sibagas.bumn.go.id>

The Ministry of State-Owned Enterprise builds a Knowledge Management System (KMS) which consists of three important parts, namely electronic sharing (e-sharing), electronic learning (e-learning), and electronic repository (e-repository).

(SiBagas) is a KMS implementation media for e-sharing, namely social learning through sharing ideas/suggestions and working collaboratively (social learning and collaboration). SiBagas is able to facilitate; (1) delivery, exchange, enrichment, and dissemination of information, ideas, suggestions, thoughts and knowledge within the Ministry of State-Owned Enterprise; (2) Communication, coordination and collaboration between employees in implementing their duties and functions.

Through this application, the Ministry of State-Owned Enterprise's personnel are required to include knowledge sharing activities through www.sibagas.bumn.go.id (SiBagas), as one of the Main Performance Indicators (IKU) in Employee Performance Target (SKP). To activate SiBagas in Mobile Device, you shall first download the SAP JAM application on Google Play (Android) or App Store (IOS).

With optimal use of this application, an increase is expected in the effectiveness and productivity of all components in the Ministry of State-Owned Enterprise. Finally, the goal is to realize the Ministry of State-Owned Enterprise as learning organization.

In order to encourage transformation process of the Ministry of State-Owned Enterprise into learning organization, atmosphere that is conducive shall be created to be able to develop self-capacity through the process of obtaining, storing, disseminating, implementing, and evaluating/ perfecting an existing knowledge both written and in each individual employee.

Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang terencana, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh stakeholders organisasi dalam bentuk manajemen pengetahuan. Guna mendorong implementasi manajemen pengetahuan saat ini, Kementerian BUMN telah membangun Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) yang dapat memfasilitasi penumbuhan, penyebaran, penyimpanan informasi, gagasan, dan pengetahuan.

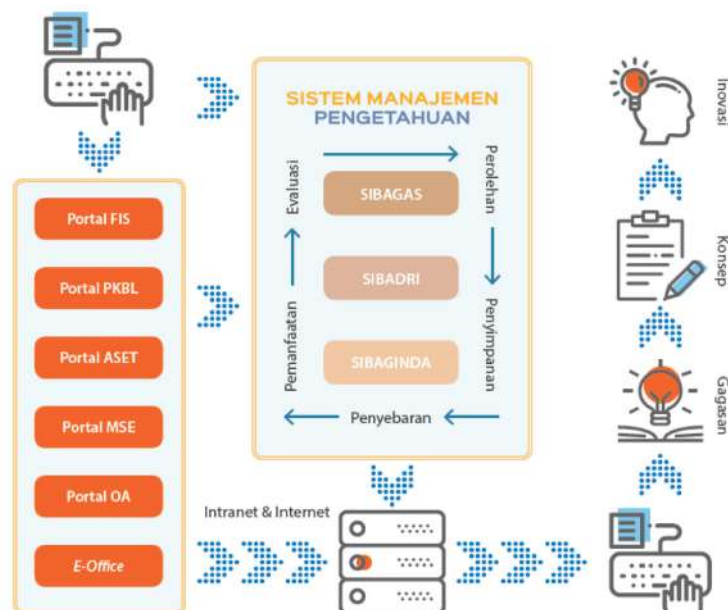
Pada prinsipnya, aplikasi manajemen pengetahuan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan tiga komponen dasar yaitu teknologi komunikasi, teknologi kolaborasi, dan teknologi storage & retrieval. Sistem knowledge management memiliki manfaat yang sangat berguna, diantaranya:

1. Pengetahuan adalah aset paling berharga dan sumber competitive advantage;
2. Tingkat kadaluwarsa pengetahuan sangat cepat, sekitar 500 hari, bahkan di beberapa sektor bisa lebih cepat lagi;
3. "Reinventing the Wheel"; tidak tahu apa yang sudah diketahui; tidak tahu di mana mengakses pengetahuan, (costly and inefficient activity);
4. Berbagi pengetahuan (knowledge sharing) adalah kekuatan: pengetahuan membangun kepercayaan dan kepercayaan membangun pengetahuan;
5. Alur pengetahuan: ide - konsep - inovasi

Therefore, it requires planned, systematic, structured and sustainable efforts involving all organizational stakeholders in the form of knowledge management. In order to encourage the implementation of current knowledge management, the Ministry of State-Owned Enterprise has built SiBagas which can facilitate growth, dissemination, storage of information, ideas and knowledge.

In principle, knowledge management applications may at least be used to identify and integrate three basic components, namely communication technology, collaboration technology, and storage & retrieval technology. Knowledge management systems have very useful benefits, including:

1. Knowledge is the most valuable asset and source of competitive advantage;
2. Knowledge expiration rates are very fast, around 500 days, it can be even faster in some sectors;
3. "Reinventing the Wheel"; do not know what is known; do not know where to access knowledge (costly and inefficient activity);
4. Knowledge sharing is power: knowledge builds trust and trust in building knowledge;
5. Flow of knowledge: ideas – concepts – innovations





Setiap insan Kementerian BUMN yang menggunakan fasilitas Sistem Berbagi Gagasan (SiBagas) ini, harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, sebagaimana berikut ini:

1. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi, ide, gagasan, dan pemikiran secara obyektif, rasional, dan beradab.
2. Berperilaku positif dan berpikiran terbuka.
3. Peka terhadap keberagaman latar belakang, karakter dan minat pengguna lain.
4. Menghormati ide dan pemikiran orang lain dan menjaga orisinalitas karya.
5. Menggunakan bahasa jelas, santun, dan mudah dipahami.
6. Tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kepentingan kedinasan.
7. Tidak menyebarkan rahasia negara dan rahasia jabatan.
8. Tidak melakukan penghinaan, intimidasi, bullying, ujaran kebencian atas dasar SARA dan keterbatasan.
9. Tidak menyebarkan konten pornografi dan pornoaksi atau hal-hal lain yang bertentangan dengan norma kesopanan.
10. Tidak menggunakan aplikasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Pedoman Perilaku Aparatur Kementerian BUMN.
11. Pelanggaran kode etik menimbulkan konsekuensi teguran, penghapusan konten, penghapusan akun dan penegakan ketentuan dan peraturan organisasi.

Pada aplikasi ini, juga diterapkan sistem poin yang ditujukan untuk mendorong penggunaan SiBagas di lingkungan Kementerian BUMN. Setiap aktivitas pada Sibagas akan dinilai dalam poin-poin yang dapat dikumpulkan, dan dalam satu periode waktu tertentu dapat ditukar dengan merchandise.

Every Ministry of the State-Owned Enterprise person who uses SiBagas facility shall comply with the established code of ethics, as follows:

1. Delivering and disseminating information, ideas, suggestions, and thoughts objectively, rationally, and civilized.
2. Be positive and open-minded.
3. Be sensitive to the diversity of backgrounds, characters and interests of other users.
4. Respect other people's ideas and thoughts and maintain the originality of the work.
5. Using clear, polite, and easy to understand language.
6. Does not use matters which are not related to official's interests.
7. Does not disseminate state secrets and position secrets.
8. Does not commit insults, intimidation, bullying, utterances of hatred on the basis of SARA and limitations.
9. Does not spread pornographic and pornographic content or other things that are contrary to the norms of modesty.
10. Does not use the application to do things that are contrary to the Apparatus Code of Conduct of the State-Owned Enterprise Ministry.
11. Violation of the code of conduct results in consequences of reprimand, deletion of content, deletion of account and enforcement of organizational rules and regulations.

In this application, a point system is also applied to encourage the use of SiBagas in the Ministry of State-Owned Enterprise. Every activity in Sibagas will be assessed in points which can be collected, and in a certain period of time can be exchanged for merchandise.





4. Portal Diklat

diklat.bumn.go.id

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah personil, tenaga kerja, karyawan yang bekerja di lingkungan organisasi. SDM merupakan penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, aset dan modal (nonmaterial dan nonfinansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dalam mewujudkan eksestensi organisasi.

Sebagaimana filosofi SDM, pegawai atau karyawan dipandang sebagai investasi, jika dikelola dengan perencanaan yang baik akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar. Manajer membuat berbagai kebijakan, program dan praktik

4. Education and Training Portal

diklat.bumn.go.id

Human Resources are personnel, labor, employees who work within the organization. Human Resources is the driving force of the organization in realizing its existence, assets and capital (non-material and non-financial) in business organizations, which can be realized to become physically tangible potential in realizing the organization's existence.

As the philosophy of Human Resources, employees are seen as investments, if managed with good planning will provide rewards for the organization in the form of greater productivity. Managers make various policies, programs and practices which satisfy both economic requirements



yang memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang di dalamnya para pegawai didorong untuk menggunakan keahlian serta kemampuan semaksimal mungkin. Program dan praktik personalia diciptakan dengan tujuan agar terdapat keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan kebutuhan organisasi.

Dalam upaya pencapaian tujuan pembentukan BUMN, Kementerian BUMN mengedepankan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian BUMN sebagai kekayaan yang paling berharga dalam organisasi. SDM merupakan investasi sangat berharga bagi Kementerian BUMN yang perlu dijaga. Kementerian BUMN mempersiapkan program yang berisi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM supaya Kementerian BUMN bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan lingkungan. Untuk mencapai produktivitas yang maksimum, Kementerian BUMN menjamin dipilihnya tenaga kerja yang tepat dengan pekerjaan serta kondisi yang memungkinkan mereka bekerja optimal.

Ciri-ciri SDM yang produktif di lingkungan Kementerian BUMN adalah tampak tindakannya konstruktif, percaya diri, mempunyai rasa tanggungjawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya, mempunyai pandangan jauh kedepan, dan mampu menyelesaikan persoalan. Selain itu, SDM yang produktif adalah cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat, kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif, memahami pekerjaan, belajar dengan cerdas, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan, selalu mencari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti, dianggap bernilai oleh atasannya, memiliki catatan prestasi yang baik, selalu meningkatkan diri. Terdapat tujuh manfaat dari adanya pengembangan SDM di lingkungan Kementerian BUMN, yaitu:

1. Peningkatan produktifitas kerja,
2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan,
3. Tersedianya proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,
4. Meningkatnya semangat kerja seluruh anggota dalam organisasi,

and employee satisfaction and create working environment in which employees are encouraged to use their skills and abilities to the maximum extent. Personal programs and practices are created with the aim that there is a balance between employee requirements and organizational requirements.

In an effort to achieve the goal of establishing the State-Owned Enterprise, the Ministry of State-Owned Enterprise prioritizes Human Resources of the State-Owned Enterprise Ministry as the most valuable wealth in the organization. Human Resources are a very valuable investment for the Ministry of State-Owned Enterprise that requires to be maintained. The Ministry of State-Owned Enterprise prepares a program which contains activities that can improve the capabilities and professionalism of Human Resources so that the Ministry of State-Owned Enterprise can survive and develop in accordance with the environment. To achieve maximum productivity, the Ministry of State-Owned Enterprise guarantees the right choice of workforce with jobs and conditions which enables them to work optimally.

Characteristics of productive human resources within the Ministry of State-Owned Enterprise are constructive, confident, have a sense of responsibility, have a sense of love for their work, have a far-sighted future, and are able to solve problems. In addition, productive human resources are smart and can learn relatively quickly, professionally competent, creative and innovative, understand the work, learn smartly, use logic, efficient, not easily get stuck at work, always look for improvements, but know when to stop, considered valuable by his/her supervisor, has a good track record, always improving. There are seven benefits from the development of human resources within the Ministry of State-Owned Enterprise, namely:

1. Increased work productivity,
2. Realizing harmonious relationship between superiors and subordinates,
3. Availability of a fast and appropriate decision-making process
4. Increased morale of all members in the organization,



5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen,
6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif,
7. Penyelesaian konflik secara fungsional.

Untuk mewujudkan insan Kementerian BUMN yang terbaik, Kementerian BUMN didukung oleh portal human capital management untuk pengelolaan diklat bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian BUMN.

5. Encourage an attitude of management disclosure,
6. Streamlining effective communication,
7. Functional conflict resolution.

To realize the best State-Owned Enterprise Ministry's personnel, the Ministry of State-Owned Enterprise is supported by the human capital management portal to manage education and training for all employees in the Ministry of State-Owned Enterprise.



capin

HCM KBUMN Login

Human Capital Management System Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia: [Unduh User Manual disini](#)

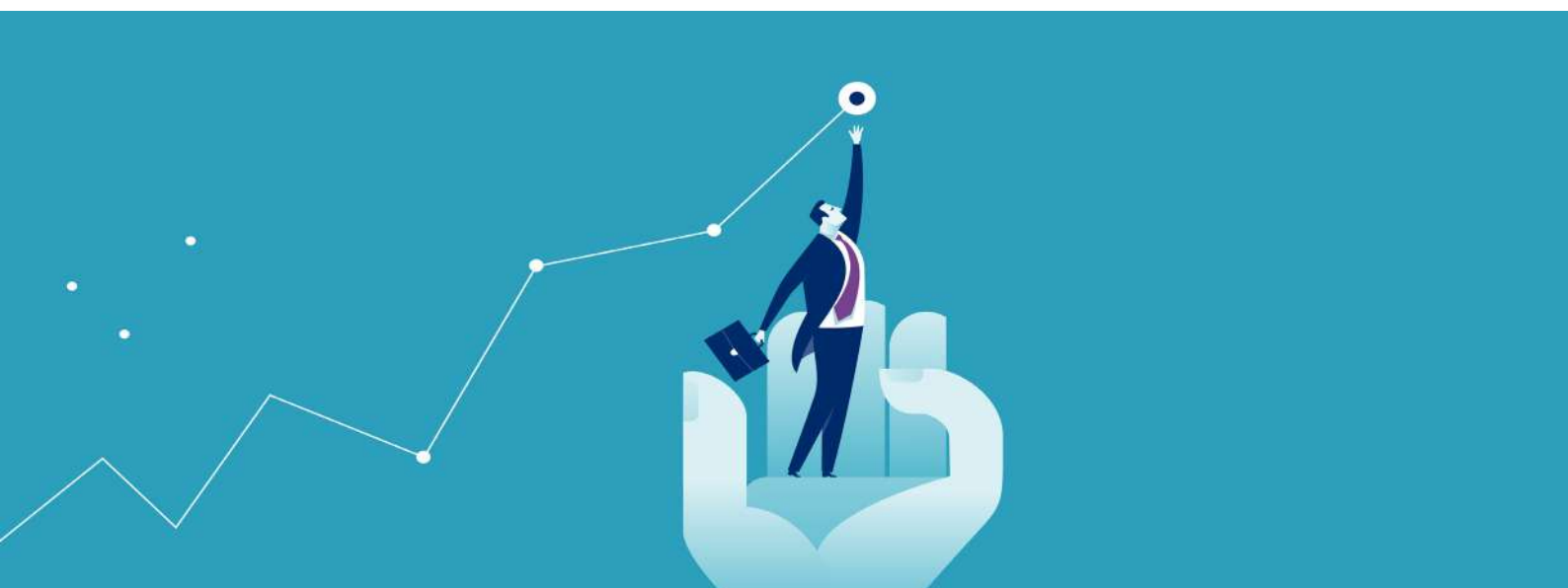
Untuk login pertama, silakan login dengan username berdasarkan email dan password berdasarkan NIP Anda.

khairulmampe

☐ Remember me

[Forgot Password?](#)

[Sign In](#)





Cluster BUMN

1. Silaba

Sistem Informasi Laporan Berkala
silaba.bumn.go.id

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif di era global seperti saat ini, sangat diperlukan sistem dan mekanisme pengambilan keputusan dan kebijakan secara cepat dan tepat di setiap Organ BUMN, utamanya Menteri BUMN Rini M. Soemarno/RUPS.

Bahwa dalam rangka pengambilan keputusan, diperlukan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam kaitannya dengan pembinaan BUMN, penggunaan sarana elektronik dapat digunakan untuk penyampaian data, laporan berkala BUMN atau dokumen lain yang diminta oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno/RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga lebih akurat, efisien, efektif dan akuntabel. Lebih lanjut, melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian BUMN, maka data yang disampaikan secara elektronik tersebut dapat diolah sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dalam pembinaan BUMN.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyampaian data, laporan, dokumen oleh BUMN, Menteri BUMN Rini M. Soemarno menetapkan Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor NOMOR PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, Dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara Secara Elektronik. Penyampaian data, laporan, dan dokumen dimaksud dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian BUMN agar efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengguna Data Portal adalah Unit Organisasi/Pejabat/ Pihak yang memanfaatkan data sesuai dengan kewenangan

1. Silaba

Sistem Informasi Laporan Berkala
silaba.bumn.go.id

That in order to increase the competitiveness of State-Owned Enterprise (hereinafter referred to as the State-Owned Enterprise) to face competitive business world competition in the global era as it is today, a system and mechanism for decision-making and policy is urgently and quickly required at each State-Owned Enterprise's Organ, especially The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno/General Meeting of Shareholders.

That in the framework of decision making, accurate, complete and timely data is required by utilizing the advances in information technology. In relation to the development of State-Owned Enterprise, the use of electronic facilities can be used to deliver data, periodic State-Owned Enterprise reports or other documents requested by The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno/General Meeting of Shareholders in accordance with the laws and regulations, making it more accurate, efficient, effective and accountable. Furthermore, through the information system owned by the Ministry of State-Owned Enterprise, the electronically submitted data can be processed as a supporting material for decision making in the development of State-Owned Enterprise.

In relation with the foregoing, in an effort to improve the effectiveness and efficiency of data submission, reports, documents by the State-Owned Enterprise, The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno stipulates The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno's Regulation NUMBER PER-18/MBU/10/2014 on Submission of Data, Reports, and Documents of the State-Owned Enterprise electronically. Submission of data, reports and documents is implemented electronically through information system provided by the Ministry of State-Owned Enterprise to be effective, efficient and accountable.

Data Portal Users are Organizational Units/Officials/ Parties that utilize data in accordance with the authority



hak akses yang dibuat oleh Unit Kerja Pengelola Data dan Sistem Informasi berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi pengguna data dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan data perusahaan.

Jenis data, laporan, dan dokumen yang wajib disampaikan melalui sistem informasi Kementerian BUMN meliputi:

a. Laporan berkala kepada Menteri BUMN Rini M. Soemarno/RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang wajib disampaikan secara elektronik dan menggantikan penyampaian laporan dalam bentuk asli tercetak (berbasis kertas) terdiri dari:

- 1) Laporan Tahunan;
- 2) Laporan Manajemen Triwulanan;
- 3) Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta revisi jika ada;
- 5) Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

b. Data dan dokumen yang diperlukan Menteri/RUPS sesuai konten Sistem Informasi Kementerian BUMN terdiri dari:

- 1) Data keuangan, kinerja, laporan audit, dan data BUMN lainnya;
- 2) Data Sumber Daya Manusia BUMN;
- 3) Data PKBL BUMN;
- 4) Profil BUMN, berita, dan publikasi lainnya;
- 5) Data aset BUMN.

Data, laporan, dan dokumen selain di atas, tetap disampaikan dalam bentuk asli tercetak (berbasis kertas). Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, Menteri/RUPS dapat meminta data, dokumen, dan laporan lain yang penyampaiannya secara elektronik melalui sistem informasi Kementerian BUMN.

of access rights made by the Data Management and Information System Working Unit based on the authority, duties and functions of data users while taking into account the principles of corporate data confidentiality.

Types of data, reports, and documents which shall be submitted through the Ministry of State-Owned Enterprise's information system are as follows:

a. Periodic reports to The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno/General Meeting of Shareholders as stipulated in the laws and regulations which shall be submitted electronically and replace the report submission in a printed form (paper-based) consisting of:

- 1) Annual Report;
- 2) Quarterly Management Report;
- 3) Report on the Partnership and Society Development Program (PKBL);
- 4) Company's Work Plan and Budget as well as revisions if any;
- 5) Company's Long Term Plan.

b. Data and documents required by the Minister/General Meeting of Shareholders according to the content of the Ministry of State-Owned Enterprise's Information System are as follows:

- 1) Financial data, performance, audit reports, and other State-Owned Enterprise's data;
- 2) Data on State-Owned Enterprise's Human Resources;
- 3) The State-Owned Enterprise's Report on the Partnership and Society Development Program (PKBL) Data;
- 4) Profile of the State-Owned Enterprise, news, and other publications;
- 5) Data of the State-Owned Enterprise's asset.

Data, reports, and documents other than the above, shall still be submitted in original printed form (paper-based). In accordance with requirement development, the Minister/General Meeting of Shareholders can request data, documents, and other reports which are sent electronically through the Ministry of State-Owned Enterprise's information system.



Sistem Informasi Pelaporan Berkala atau Silaba merupakan aplikasi bagi BUMN dalam melaporkan laporan rutin (triwulanan dan tahunan) terkait kinerja BUMN sebagai implementasi dari Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor NOMOR PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, Dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara Secara Elektronik. Laporan-laporan yang terdapat dalam SiLaba antara lain laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi, Arus Kas, Perubahan Modal, Capex dan Opex, Pajak, Dividen, berbagai buku laporan dan lain-lain.

Periodic Reporting Information System or Silaba is an application for the State-Owned Enterprise in reporting routine (quarterly and annual) reports related to the performance of State-Owned Enterprise as an implementation of the State-Owned Enterprise Minister's Regulation No. NUMBER-18/MBU/10/2014 concerning Data Submission, Report and the State-Owned Enterprise's document electronically. Reports contained in the Profit include reports on Financial Position, Profit and Loss, Cash Flow, Changes in Capital, Capex and Opex, Taxes, Dividends, various report books and others.

LIHAT PELAPORAN BUMN PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK		
Jenis Laporan	Status Laporan	Tindakan
▼ Umum		
Komposisi Saham	VERIFIED	Lihat Laporan
▼ Keuangan		
Posisi Keuangan	VERIFIED	Lihat Laporan
Laba Rugi	VERIFIED	Lihat Laporan
Arus Kas	VERIFIED	Lihat Laporan
Perubahan Ekuitas	VERIFIED	Lihat Laporan
Segmentasi Operasi	VERIFIED	Lihat Laporan
Capex	VERIFIED	Lihat Laporan
Rasio BUMN	VERIFIED	Lihat Laporan

2. Info PKBL

infopkbl.bumn.go.id

Kementerian BUMN dan BUMN sebagai bagian dari masyarakat bernegara, telah melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara berkesinambungan yang direalisasikan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program BUMN Hadir Untuk Negeri. Dasar Hukum pelaksanaan program PKBL adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di mana Pasal 2, huruf e salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah "turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat". Atas dasar tersebut, terbit Peraturan Menteri

2. PKBL Info

infopkbl.bumn.go.id

The Ministry of State-Owned Enterprise and the State-Owned Enterprise as part of the state society, has implemented a sustainable Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program that is realized through the Partnership and Society Development Program (PKBL) and the 'State-Owned Enterprise Present for the State' program. The Legal Basis for the implementation of Partnership and Society Development Program (PKBL) is Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise where Article 2, letter e is one of the aims and objectives of the establishment of State-Owned Enterprise "to actively provide guidance and assistance to the economically weak entrepreneurs,



BUMN Rini M. Soemarno Nomor PER-09/MBU/07/2015 jo PER-02/ MBU/07/2017 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program Kemitraan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan cara penyaluran pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Sementara itu, Program Bina Lingkungan (BL) merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang disalurkan dalam bentuk bantuan untuk korban bencana alam, peningkatan kesehatan, bantuan pendidikan/ pelatihan, pembangunan sarana ibadah, pelestarian lingkungan/alam, pembangunan sarana/ prasarana umum dan pengentasan kemiskinan. Informasi terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau Info PKBL merupakan portal Kementerian BUMN yang menginformasikan kepada masyarakat tentang informasi terkini terkait program-program PKBL yang telah dijalankan oleh BUMN. Selain informasi terkini terkait PKBL, portal ini juga menginformasikan bagaimana mekanisme, sektor usaha, dan kriteria pengajuan PKBL.

3. BUMN Hadir Untuk Negeri

untuknegeri.bumn.go.id

Disadari bahwa Indonesia merupakan sebuah negeri yang berlimpah kekayaan alam & dihiasi dengan berbagai keragaman, mulai dari ribuan pulau yang menghiasi khatulistiwa, dengan ragam budaya, bahasa daerah, suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu dengan adanya “BUMN Hadir untuk Negeri”, diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia sehingga ke depannya Indonesia mampu tegak berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keragaman tersebut sebagai perwujudan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

cooperatives and societies”. On this basis, The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno’s Regulation Number PER-09/MBU/07/2015 was published jo PER-02/ MBU/07/2017 concerning the State-Owned Enterprise’s Partnership Program and Society Development Program.

The Partnership Program is a program that aims to improve the ability of small businesses to become resilient and independent by way of lending distribution to finance working capital and/or purchase of fixed assets in order to increase production and sales. Meanwhile, the Society Development Program (BL) is an empowerment program for society social conditions by State-Owned Enterprise that are channeled in the form of assistance to victims of natural disasters, health improvement, education/ training assistance, construction of religious facilities, environmental/natural conservation, construction of public facilities/infrastructure and poverty alleviation. Information related to the Partnership and Society Development Program (PKBL) or PKBL Info is a portal of the Ministry of State-Owned Enterprise that informs the society concerning the latest information related to PKBL programs which have been implemented by the State-Owned Enterprise. In addition to the latest information related to Partnership and Society Development Program (PKBL), this portal also informs the mechanism, business sector, and Partnership and Society Development Program (PKBL) submission criteria.

3. The State-Owned Enterprise Presents to the State

untuknegeri.bumn.go.id

It is realized that Indonesia is a state that is rich in natural wealth and decorated with a variety of diversity, ranging from thousands of islands which adorn the equator, with a variety of cultures, regional languages, ethnicities, races, religions and beliefs, and others. Therefore, with the presence of “The State-Owned Enterprise Present for the State”, it is expected to grow a sense of pride as an Indonesian citizen so that in the future Indonesia can stand as the Unitary State of the Republic of Indonesia amid such diversity as an embodiment of the motto “Unity in Diversity”, which means different but still one.



Kementerian BUMN dan BUMN sebagai bagian dari masyarakat bernegara, mewujudkan “BUMN Hadir untuk Negeri” sebagai komitmen untuk menumbuhkan dan memupuk rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok Negeri.

Pada tahun 2015, Kementerian BUMN bersama BUMN telah melaksanakan kegiatan Peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka di 34 Provinsi sebagai perwujudan nyata: “Gerakan Nasional Ayo Kerja 70 Tahun Indonesia Merdeka”. Kegiatan ini sebagai bentuk kehadiran BUMN di seluruh provinsi di Indonesia.

Kegiatan tersebut antara lain upacara peringatan HUT RI, jalan sehat 8 KM, bantuan penambahan fasilitas laboratorium 17 SMK di tiap provinsi, bedah rumah veteran, pemutaran film layar tancap, penjualan sembako murah, kegiatan lomba yang diikuti masyarakat, Siswa Mengenal Nusantara dan BUMN Mengajar.

Sedangkan untuk tahun 2016, kegiatan BHUN terdiri dari Siswa Mengenal Nusantara, Bedah Rumah Veteran, BUMN Mengajar, pembinaan eks narapidana, pembinaan mantan atlet, pembinaan desa tertinggal, pembangunan tempat penitipan anak, pembangunan sarana air bersih, jalan sehat, elektrifikasi, pemutaran film, pembangunan MCK, menyalurkan sembako, penyelenggaraan lomba, dan upacara peringatan HUT RI.

Untuk tahun 2017, kegiatan BHUN mengerucut menjadi SMN, BRV, Upacara, dan pembersihan lingkungan. Sedangkan pada tahun 2018, kegiatan yang sudah berjalan adalah SMN, Peringatan HUT RI, Safari Ramadhan, mudik gratis, dan HUT Bersama BUMN. Akan Direncanakan juga penyelenggaraan konservasi badak dan peringatan Natal. Tujuan dari “Program BUMN hadir Untuk Negeri” adalah untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan Nusantara serta sebagai

The Ministry of State-Owned Enterprise and the State-Owned Enterprise as part of the state society, embodies “The State-Owned Enterprise Present for the State” as a commitment to grow and plant a sense of pride in the nation and Indonesia for all societies in all corners of the state.

In 2015, the Ministry of State-Owned Enterprise along with the State-Owned Enterprise implemented the 70th Anniversary of Independent Indonesia in 34 Provinces as a concrete manifestation: “Gerakan Nasional Ayo Kerja 70 Tahun Indonesia Merdeka”. This activity is presence form of the State-Owned Enterprise in all provinces in Indonesia.

These activities included the commemoration of the Indonesian Independence Day, 8 km of healthy walking, assistance with the addition of 17 laboratory facilities in each province, veteran house surgery, screening of open-screen films, cheap groceries sales, competition activities attended by the society, Students Knowing the Archipelago (Siswa Mengenal Nusantara), and BUMN Mengajar.

Whereas for 2016, BHUN activities consist of Students Knowing the Archipelago (Siswa Mengenal Nusantara), Veterans Home Surgery, BUMN Mengajar, coaching ex-prisoners, supervising former athletes, developing underdeveloped villages, building child care centers, building clean water facilities, healthy walking, electrification, film screenings, construction of MCK, distributing basic necessities, organizing competitions, and commemorating the Republic of Indonesia’s anniversary.

For 2017, BHUN activities converge into SMN, BRV, Ceremony, and environmental cleaning. Whereas in 2018, the activities which have been running are SMN, Commemoration of the Republic of Indonesia Anniversary, Safari Ramadhan, free homecoming, and the Anniversary of the State-Owned Enterprise. Rhino conservation and Christmas commemoration will also be planned.

The aim of the “State-Owned Enterprise present for the state program” is to instill a sense of pride as a nation



wujud nyata peran BUMN di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan difasilitasi oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 Provinsi seluruh Indonesia, juga menjadi bagian dalam “membangun pemahaman para pemangku kepentingan (stakeholders)” mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN sebagai Agen Pembangunan (Agent of Development) untuk turut serta “Membangun Kapasitas Nasional (National Capacity Building)”.

Salah satu bentuk komitmen dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah pelaksanaan BUMN Hadir Untuk Negeri yang telah dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN pada 2018 sebagai rangkaian peringatan HUT RI oleh BUMN di seluruh provinsi di Indonesia dengan program sebagai berikut: kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI; Bedah Rumah Veteran (BRV); BUMN Hadir di Kampus (BHDK); Kegiatan Siswa Mengenal Nusantara (SMN);

Portal BUMN Hadir Untuk Negeri merupakan portal Kementerian BUMN yang berisi tentang informasi terkait dengan program-program BUMN Hadir Untuk Negeri yang telah dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Pada tahun 2018, kegiatan yang sudah berjalan adalah SMN, Peringatan HUT RI, Safari Ramadhan, mudik gratis, dan HUT Bersama BUMN.

4. PKBL

pkbl.bumn.go.id

PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 ttg BUMN serta Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor PER-09/MBU/07/2015 jo PER-02/ MBU/07/2017 Tentang Program Kemitraan

that has a diversity of archipelago wealth as well as a tangible manifestation of the State-Owned Enterprise's role in the society. The activities initiated by the Ministry of State-Owned Enterprise and facilitated by all state-owned enterprises which owned work areas in over 34 provinces throughout Indonesia, also become part of “membangun pemahaman para pemangku kepentingan (stakeholders)” concerning the role of the Ministry of State-Owned Enterprise and the State-Owned Enterprise as an Agent of Development to participate in “Membangun Kapasitas Nasional (National Capacity Building)”.

One form of commitment from the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) is the implementation of the ‘State-Owned Enterprise Present for the State’ which has been coordinated by the Ministry of State-Owned Enterprise in 2018 as a series of commemoration of Indonesian Anniversary by the State-Owned Enterprise in all provinces in Indonesia with the following programs: commemoration activities of the Republic of Indonesia's Independence Day; Veteran Home Surgery (BRV/Bedah Rumah Veteran); The State-Owned Enterprise Present on Campus (BHDK/BUMN Hadir di Kampus); Students Know the Archipelago (SMN/Siswa Mengenal Nusantara) Activities;

“The State-Owned Enterprise Present for the State” program is the Ministry of State-Owned Enterprise's portal which contains information related to “The State-Owned Enterprise Present for the State” programs which have been implemented by the Ministry of State-Owned Enterprise. In 2018, activities that have been running are SMN, Commemoration of the Republic of Indonesia Anniversary, Safari Ramadhan, free homecoming, and the Anniversary of the State-Owned Enterprise.

4. PKBL

pkbl.bumn.go.id

PKBL is a form of the State-Owned Enterprise's responsibility to the public. PKBL is implemented on the basis of Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise and The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno No. PER-09/MBU/07/2015 jo PER-02/



dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN

Tujuan program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Sedangkan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program BL ini bersifat bantuan (Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana dan Bantuan Sarana Ibadah).

Portal PKBL ini merupakan media bagi BUMN untuk melaporkan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada Kementerian BUMN secara elektronik.

MBU/07/2017 concerning the State Owned Enterprise Partnership Program and Society Development Program which stated that the intention and purpose of establishing the State-Owned Enterprise is not only to pursue profits but also to actively provide guidance and assistance to weak economic entrepreneurs, cooperatives and communities.

PKBL is a Small Business Development Program and the empowerment of environmental conditions by the State-Owned Enterprise through the use of funds from the State-Owned Enterprise profit section. The State-Owned Enterprise's Partnership Program with Small Business, hereinafter referred to as the Partnership Program, is a program to improve the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of funds from the State-Owned Enterprise profit section.

The aim of the Partnership program is to improve the ability of small entrepreneurs to be resilient and independent while at the same time empowering social conditions of the society. Whereas the Society Development Program, hereinafter referred to as the BL Program, is a program to form new Supervising Partner candidates and empower society social conditions by the State-Owned Enterprise through the utilization of funds from the State-Owned Enterprise profit section. This BL program is assisting in nature (Natural Disaster Victims, Education and/or Training Assistance, Health Improvement Assistance, Facilities and/or Infrastructure Development Assistance and Worship Facility Assistance).

This PKBL portal is a medium for the State-Owned Enterprise to electronically report the management of Partnership and Society Development Program to the Ministry of State-Owned Enterprise.

5. ASET

aset.bumn.go.id

Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyampaian data, laporan, dokumen oleh BUMN, Menteri BUMN Rini M. Soemarno menetapkan Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor NOMOR PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, Dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara Secara Elektronik. Penyampaian data, laporan, dan dokumen dimaksud dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian BUMN agar efektif, efisien, dan akuntabel. Pengguna Data Portal adalah Unit Organisasi/Pejabat/Pihak yang memanfaatkan data sesuai dengan kewenangan hak akses yang dibuat oleh Unit Kerja Pengelola Data dan Sistem Informasi berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi pengguna data dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan data perusahaan.

Portal aset merupakan media bagi BUMN untuk melaporkan mutasi dan informasi detail terkait dengan aset tetap BUMN.

5. ASSETS

aset.bumn.go.id

In an effort to improve the effectiveness and efficiency of data submission, reports, documents by the State-Owned Enterprise, The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno stipulates The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno's Regulation Number PER-18/MBU/10/2014 on Submitting Data, Reports, and Documents to the State-Owned Enterprise electronically. Submission of data, reports and documents is implemented electronically through an information system provided by the Ministry of State-Owned Enterprise to be effective, efficient and accountable. Data Portal Users are Organizational Units/Officials/Parties that utilize data in accordance with the authority of access rights made by the Data Management and Information System Work Unit based on the authority, duties and functions of data users while taking into account the principles of corporate data confidentiality.

The asset portal is a medium for the State-Owned Enterprise to report mutations and detailed information related to the State-Owned Enterprise's fixed assets.

6. Digital Map

digimap.bumn.go.id

Pemetaan digital BUMN disini merupakan suatu sebuah peta dalam format digital yang dapat dipantau secara terkini sesuai keinginan dalam jumlah atau skala peta yang dihasilkan. Digital map BUMN merupakan portal Kementerian BUMN yang berisi tentang informasi lokasi BUMN, anak perusahaan BUMN dan proyek-proyek strategis BUMN serta informasi terkini terkait dengan hal tersebut.

6. Digital Map

digimap.bumn.go.id

Digital mapping of the State-Owned Enterprise here is a map in a digital format which can be monitored up to date as desired in the number or scale of maps produced. Digital map of the State-Owned Enterprise is the Ministry of State-Owned Enterprise's portal which contains information on the location of State-Owned Enterprise, the State-Owned Enterprise subsidiaries and strategic projects of the State-Owned Enterprise as well as up-to-date information related to this.





4

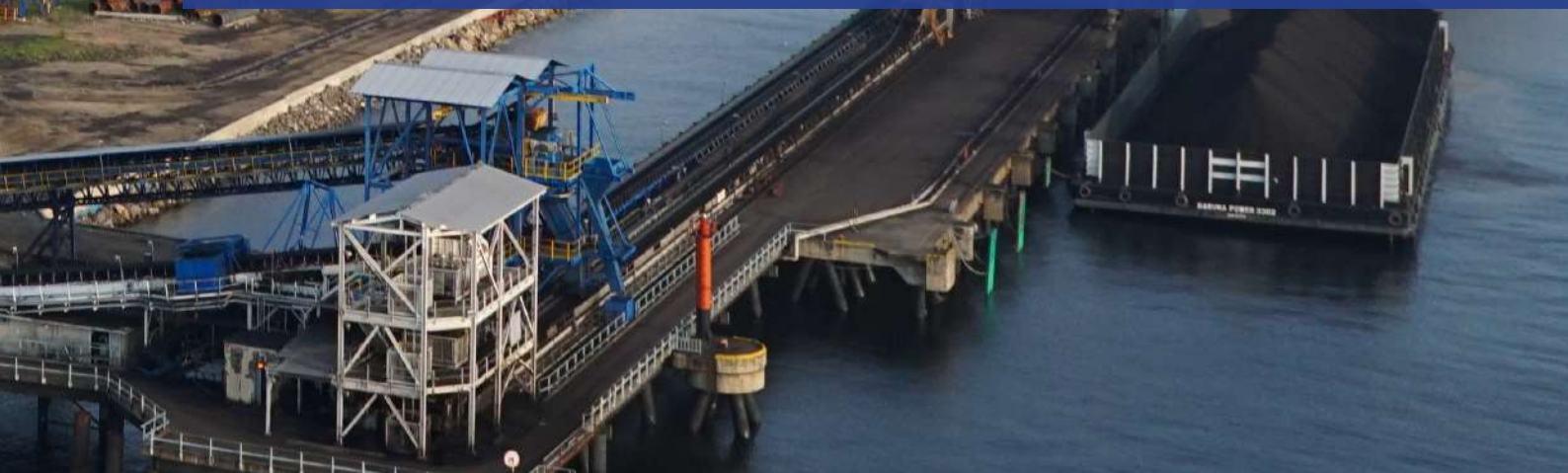
Meningkatkan Nilai BUMN: Kontribusi Keuangan dan Agen Pembangunan

*Increased of the State-Owned Enterprise Value:
Financial Contribution and an Agent of Development*



“Kita satu garis, pemegang saham kita mayoritas pemerintah pusat. Berarti kita satu garis, satu pemikiran, Pemerintah pusat selalu memikirkan bangsa Indonesia secara total”

Rini Soemarno,
The Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) of Indonesia





Meningkatkan Nilai BUMN: Kontribusi Keuangan & Agen Pembangunan

Increased of the State-Owned Enterprise Value: Financial Contribution & an Agent of Development

Indonesia merupakan Negara yang kaya serta memiliki potensi untuk menjadi unggul dan sejahtera, bahkan diproyeksikan akan mampu menjadi regional economic powerhouse. Hal tersebut didukung dengan potensi Indonesia yang sangat melimpah, tercermin antara lain dari besarnya populasi masyarakat dan sumber daya alam.

Indonesia is a rich country and has the potential to be superior and prosperous, even projected to be able to become a regional economic powerhouse. This is supported by Indonesia's abundant potential, reflected in, among others, the size of society population and natural resources.

Meskipun demikian, saat ini masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, antara lain:

- 1) Pembangunan yang belum merata (inequality development) serta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia;
- 2) Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik;
- 3) Lemahnya daya saing infrastruktur dan manufaktur serta ketergantungan terhadap impor material cost;
- 4) Akses layanan keuangan masyarakat Indonesia masih rendah; dan
- 5) Jumlah tenaga kerja terdidik dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah dibandingkan tenaga kerja regional.

Even so, currently there are still various challenges faced by Indonesia, among others

- 1) inequality development and the high rate of poverty in Indonesia;
- 2) High dependence toward energy and food imports to fulfill domestic needs;
- 3) Weak infrastructure and manufacturing competitiveness as well as dependence toward imported material costs;
- 4) Financial services access for Indonesian society is still low; and
- 5) The number of educated manpower and Indonesian manpower productivity is still low compared to regional labor.

Sehubungan dengan potensi dan tantangan yang dihadapi tersebut, Pemerintah terus berinisiatif mendorong pembangunan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Prioritas pembangunan tersebut diarahkan melalui NAWACITA yang menjadi landasan seluruh Inisiatif pembangunan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dengan berbagai target kualitatif dan kuantitatif

In relation with the potential and challenges faced, the Government continues to take the initiative to encourage Indonesia's development to create a sovereign, independent and personable Indonesia. The development priorities are directed through NAWACITA which becomes the foundation of all development initiatives and it is set forth in the 2015-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) with various qualitative and quantitative targets.

Dalam koridor program pembangunan Pemerintah inilah peran BUMN menjadi sangat strategis mengingat BUMN adalah kepanjangan tangan Pemerintah yang berfungsi sebagai agen pembangunan. BUMN saat ini telah berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional, baik melalui perannya secara langsung sesuai bidang usaha masing-masing maupun kontribusi pajak, dividen, belanja modal dan penyerapan tenaga kerja. Total aset 118 BUMN yang mencapai kisaran Rp 5.700 triliun dan portofolio BUMN yang tersebar di berbagai sektor industri juga membuka peluang sinergi yang sangat luas antar BUMN.

Kedepannya BUMN terus bercita-cita untuk menjadi "AGEN PEMBANGUNAN DAN PENCIPTAAN NILAI BAGI INDONESIA" sehingga mampu mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, keberlanjutan dan pemerataan & kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Cita-cita BUMN tersebut selanjutnya disusun dalam kerangka 4 pilar strategis yaitu sinergi antar BUMN, hilirisasi dan kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah, kemandirian keuangan dan penciptaan nilai.

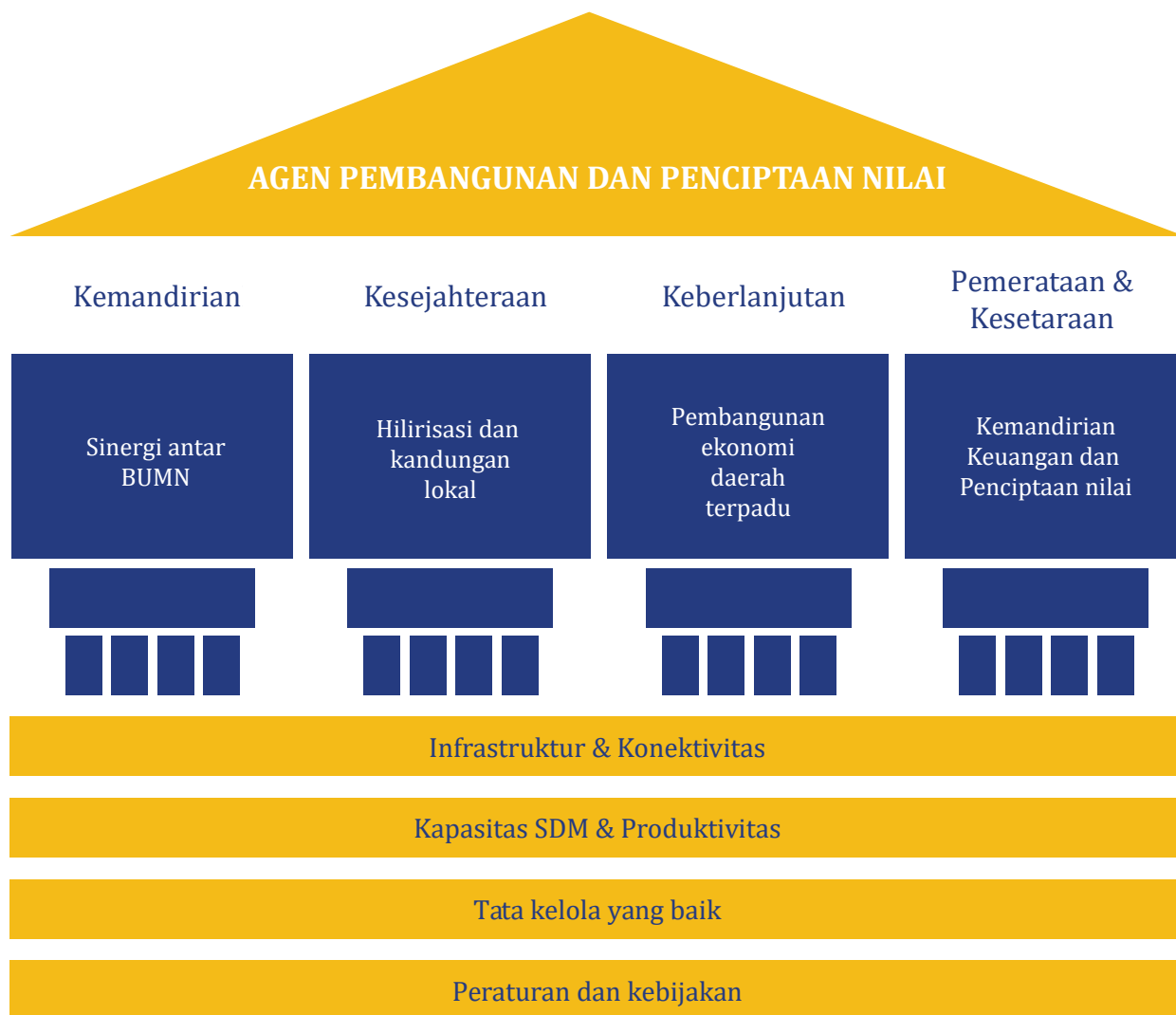
It is in this corridor of the Government's development program that the role of the State-Owned Enterprise is very strategic considering that the State-Owned Enterprise is an extension of the Government which functions as an agent of development. Currently the State-Owned Enterprise has contributed positively toward national development, both through the direct role in its respective business fields and contribution of taxes, dividends, capital expenditures and manpower absorption. The total assets of 118 State-Owned Enterprise that reached around IDR 5,700 T and the State-Owned Enterprise portfolios spread in various industrial sectors also opened up opportunities for a very wide synergy between State-Owned Enterprises.

In the future, the State-Owned Enterprise continues to aspire to become "AN AGENT OF DEVELOPMENT AND VALUE CREATION FOR INDONESIA" so as to be able to realize independence, prosperity, sustainability and equity & equality for all Indonesian society.

Aspirations of the State-Owned Enterprise are then arranged into the framework of 4 strategic pillars, namely synergy between the State-Owned Enterprises, down-streaming and local content, regional economic development, financial independence and value creation.

4 Pillars of the State-Owned Enterprise's Supervision





Pilar Strategis yang pertama adalah dengan membangun Sinergi BUMN, dimana sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai serupa bekerja bersama guna mengoptimalkan hasil dan mengurangi redundansi. Sinergi dilakukan dengan berbagai tingkatan, baik melalui restrukturisasi korporasi, transaksi maupun operasional.

The first strategic pillar is to build BUMN Synergy, where number of BUMN included in similar value chain groups collaborate together to optimize results and reduce redundancy. Synergy is implemented with various levels, both through corporate restructuring, transactions and operations.

Pilar Strategis yang kedua adalah mendorong Hilirisasi dan Kandungan Lokal dengan meningkatkan fokus BUMN untuk berperan serta dalam pengembangan produk-produk hilir yang berada di dalam rantai nilai yang sama. Selain itu, BUMN juga terus meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk yang diperlukan oleh beragam BUMN secara domestik.

The second strategic pillar is to encourage downstream and Local Content by increasing the focus of BUMN to participate in the development of downstream products within the same value chain. In addition, BUMN also continue to increase their participation in product development required by various BUMN domestically.



Pilar Strategis yang ketiga adalah Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu dimana berbagai BUMN bekerjasama secara efektif untuk menggerakkan pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-proyek yang berpotensi menciptakan dampak “spill over” atau turut menyumbang PDB lokal.

The third Strategic Pillar is an Integrated Regional Economic Development where various BUMN collaborate effectively to drive economic development in selected regions through the implementation of projects which have the potential to create a “spill over” impact or contribute to local GDP.

Pilar Strategis yang keempat adalah Kemandirian Keuangan & Penciptaan Nilai dimana BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, di luar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri.

The fourth strategic pillar is Financial Independence & Value Creation where BUMN needs to be independent and financially sustainable and able to create financial benefits, beyond their mandate as agents of development for the state.

Keempat pilar ini selanjutnya menjadi dasar untuk pengembangan strategi Kementerian BUMN berdasarkan sektoral mapping dan organizational restructuring BUMN dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

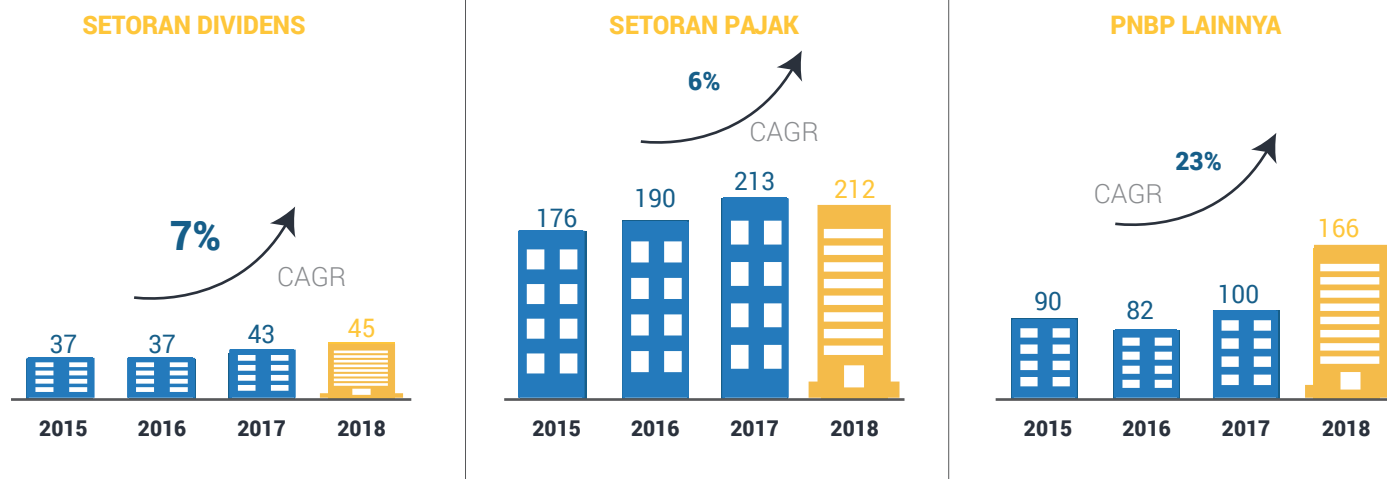
The four pillars then become development basis of the strategy to the Ministry of BUMN based on mapping and BUMN organizational restructuring sectors in order to maximize the potential of Indonesian Society.



Kontribusi Financial

Financial Contribution

*2018 = Prognosa Rp Triliun



Dari grafik tersebut (dalam besaran triliun) dapat dilihat bahwa Dividen yang disetorkan BUMN kepada APBN berdasarkan perhitungan Compound Annual Growth Rate (CAGR) mengalami peningkatan 7 persen dalam selang waktu tahun 2015-2018, selama 2015-2016 setoran dividen yang disetorkan ke dalam APBN cenderung stabil, sebesar Rp 37 triliun, namun pada tahun 2017, setoran dividen mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp 43 triliun dan konsisten terjadi pada tahun 2018 menyetorkan dividen sebesar Rp 45 triliun.

Demikian pula dengan setoran pajak BUMN kepada Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2015 besaran setoran pajak yang diberikan BUMN adalah Rp 176 triliun, hingga pada tahun 2018, pajak yang disetorkan mencapai Rp 212 triliun. Oleh karena hal tersebut, besaran CAGR yang didapat adalah 6 persen.

Adapun pada PNBPs lainnya, BUMN memberikan besaran yang cukup besar dan signifikan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2015 memberikan kontribusi Rp 90 triliun, tercatat hingga 2018 memberikan kontribusi Rp 166 triliun.

From the graph (in the amount of trillions) it can be seen that dividends deposited by BUMN to the State Budget (APBN) based on the Compound Annual Growth Rate (CAGR) calculation experienced a 7 percent increase in 2015-2018 periods, during 2015-2016 dividend deposits deposited into the State Budget (APBN) tended stable, amounting to IDR 37 trillion, however in 2017, dividend deposits experienced a slight increase to IDR 43 trillion and consistently occurred in 2018 depositing dividends of IDR 45 trillion.

Likewise with BUMN tax deposit to the Directorate General of Taxes, in 2015 the amount of tax deposits provided by BUMN was IDR 176 trillion, until 2018, the tax paid was IDR 212 trillion. Due to this issue, an amount of CAGR obtained is 6 percent.

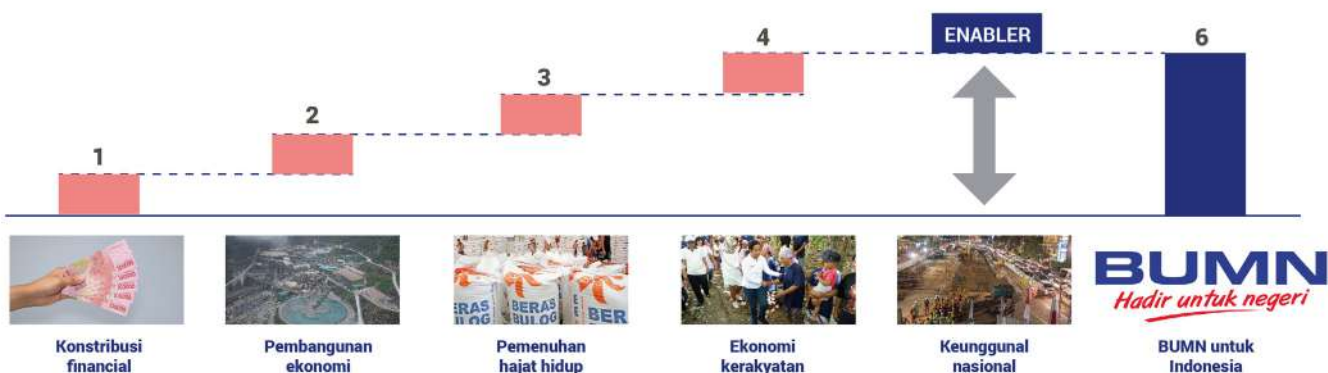
As for other PNBPs, BUMN provide a significant and sufficient amount from year to year, contributing IDR 90 trillion starting from 2015, contributing IDR 166 trillion as recorded until 2018.

BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

BUMN As Agent of National Development

Secara garis besar, peran BUMN terbagi atas Kontributor Keuangan dan Agen Pembangunan, dimana dari peran tersebut Kementerian BUMN menjadi Enabler pada BUMN.

Broadly, the role of BUMN is divided into Contributors to Finance and Development Agencies, where from such role the Ministry of BUMN becomes Enabler on BUMN.

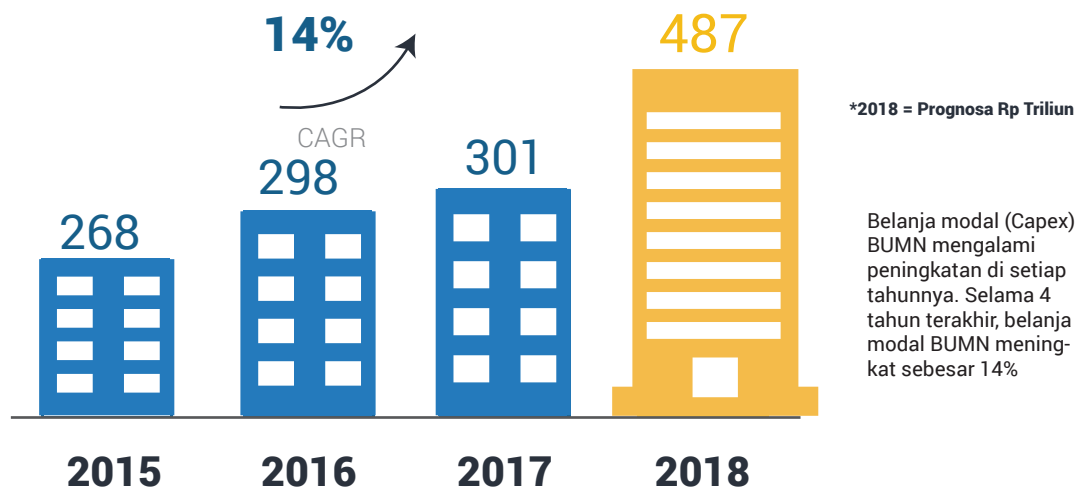


Pada gambar, dapat dilihat bahwa peran Kontributor Keuangan berada pada Poin 1 (satu), untuk Agen Pembangunan, berada pada Poin 2 (dua), Poin 3 (tiga), Poin 4 (empat), dan Poin 5 (lima). Dari kelima peran tersebut dapat dilihat bahwa Kementerian BUMN berfungsi sebagai enabler pada BUMN agar dapat memenuhi perannya dengan baik.

Berikut beberapa proyek yang telah dilakukan dalam memenuhi perannya sebagai Agen Pembangunan, yakni pembangunan ekonomi, pemenuhan hajat hidup, ekonomi kerakyatan, keunggulan nasional

In the figure, it can be seen that the role of Financial Contributors is in Point 1 (one), for Development Agent, is in Point 2 (two), Point 3 (three), Point 4 (four), and Point 5 (five). From the five roles, it can be seen that the Ministry of BUMN functions as an enabler for BUMN to fulfill their roles well.

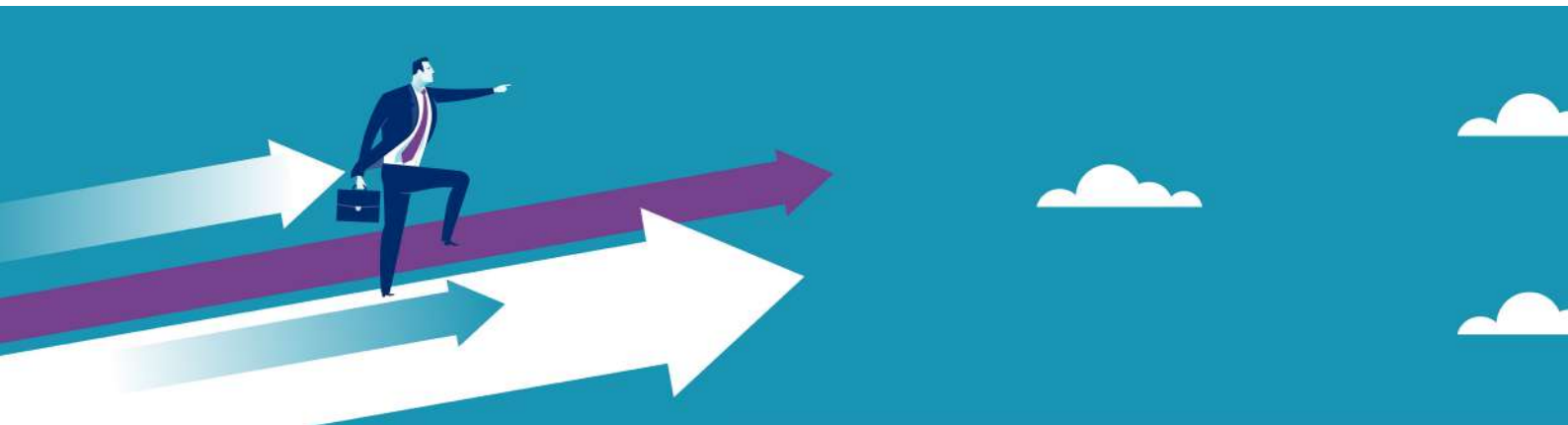
Following are several projects which has been implemented in fulfilling their role as Development Agents, namely economic development, fulfillment of livelihood, people's economy, national excellence



Sepanjang tahun 2015-2018, belanja modal atau capital expenditure BUMN mengalami peningkatan dengan tingkat CAGR sebesar 14 persen. Pada tahun 2015, belanja modal BUMN yakni sebesar Rp 268 triliun dan terus tumbuh sampai pada tahun 2018 yakni sebesar Rp 487 triliun. Capex yang berangsur-angsur terus mengalami pertumbuhan ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Adapun BUMN dengan kontribusi terbesar terhadap CAPEX di antaranya adalah PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Jasa Marga, dan PT Hutama Karya.

During 2015-2018, capital expenditure or the State-Owned Enterprise capital expenditure increased with a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 14%. In 2015, capital expenditure of the State-Owned Enterprise was IDR 268 trillion and continued to grow until 2018, amounting to IDR 458.7 trillion. Capex which is gradually continuing to experience growth is expected to provide a multiplier effect on the economy and national development. The State-Owned Enterprise with the largest contribution to CAPEX includes PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Jasa Marga, and PT Hutama Karya.





Konektivitas Darat, Laut, dan Udara Land, Sea and Air Connectivity

Guna mendukung visi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Nawacita dalam rangka menjalin konektivitas negeri, BUMN memiliki tanggung jawab menjadi motor pembangunan infrastruktur di darat, laut, dan udara dari Sabang sampai Merauke. Pencapaian pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh BUMN sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut:

• Konektivitas Darat

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, sangat penting untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antardaerah. Konektivitas darat dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di daerah, melalui proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dan moda transportasi di perkotaan. Dengan adanya konektivitas darat, kebutuhan logistic masyarakat di wilayah-wilayah Indonesia akan semakin terpenuhi, sehingga menekan perbedaan harga produk pada masing masing wilayah, serta menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan konektivitas darat diharapkan akan mendatangkan manfaat yang berkesinambungan, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia saat ini, namun juga untuk generasi baru Indonesia di masa depan.

In order to support the vision of the President of the Republic of Indonesia as set forth in Nawacita in the framework of establishing domestic connectivity, BUMN (State-Owned Enterprise) is responsible of being an activator for infrastructure development on land, sea and air from Sabang to Merauke. The achievement of infrastructure development which has been implemented by BUMN until the end of 2018 is as follows:

• Land connectivity

In the framework of increasing an equitable economic growth, it is very important to improve and develop infrastructure in order to enhance connectivity between regions. Land connectivity can increase productivity and competitiveness in regions, through infrastructure development projects in the form of toll roads and transportation modes in urban areas. With the existence of land connectivity, logistical needs of the people in Indonesian territories will be increasingly fulfilled, thereby compressing the difference within product prices in each region, as well as stimulating regional economic growth.

Land connectivity development is expected to cause sustainable profits, not only for the people of Indonesia today, but also for the new generation of Indonesia in the future.



1. Tol Trans Jawa

1. Trans-Java Toll Road



Dalam kurun waktu 2015-2018 pemerintah melalui beberapa BUMN PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya (Persero) telah merampungkan 616 kilometer jaringan Tol Trans-Jawa. Hingga akhir tahun 2018 jaringan Tol Trans-Jawa telah terhubung antara Merak sampai Grati di Pasuruan sepanjang 933 kilometer. Adapun untuk Pasuruan-Banyuwangi sepanjang 217 kilometer ditargetkan beroperasi pada 2021.

In a period of 2015-2018, the government through several BUMN (State-Owned Enterprise) PT Jasa Marga and PT Waskita Karya (Persero) has completed 616 kilometers of Trans-Java Toll Road network. Until the end of 2018, Trans-Java Toll Road network has been connected between Merak to Grati in Pasuruan for 933 kilometers. As for Pasuruan-Banyuwangi, 217 kilometers are targeted to operate in 2021.

2. Tol Trans Sumatera

2. Trans-Sumatra Toll Road



Tol pertama yakni Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 kilometer). Saat ini, progres konstruksi sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 98,820. Nilai investasi untuk ruas tol ini adalah sebesar 16,795 Triliun.

The first Toll Road, namely Bakauheni-Terbanggi Besar Toll Road (140.9 km). Currently, construction progress until the end of 2018 has reached 98,820. The investment value for this toll road is 16.795 Trillion.



Pematang Panggang – Kayu Agung dengan Panjang ruas 77 kilometer dengan nilai investasi sebesar 10,085 Triliun sampai dengan akhir tahun 2018 progres konstruksi ruas ini telah mencapai 89,7 persen.

Sedangkan tol ketiga yakni Kayu Agung-Palembang-Betung (111, 69 kilometer) yang digarap PT Sriwijaya Markmore Persada. Saat ini, sampai dengan akhir tahun 2018 progres pembebasan lahan mencapai 82,46 persen, dan progres konstruksi mencapai 36,41 persen.

Palembang – Indralaya dengan Panjang 21,93 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 3,301 Triliun saat ini progress konstruksi sudah mencapai 100 persen.

Tol keempat ialah Pekanbaru-Kandis-Dumai (131,48 kilometer) yang terdiri 6 seksi. Progres pembebasan lahan tol yang ditarget rampung di Desember 2019 ini mencapai 75,6 persen, dan progres konstruksi mencapai 35,86 persen sampai dengan akhir 2018.

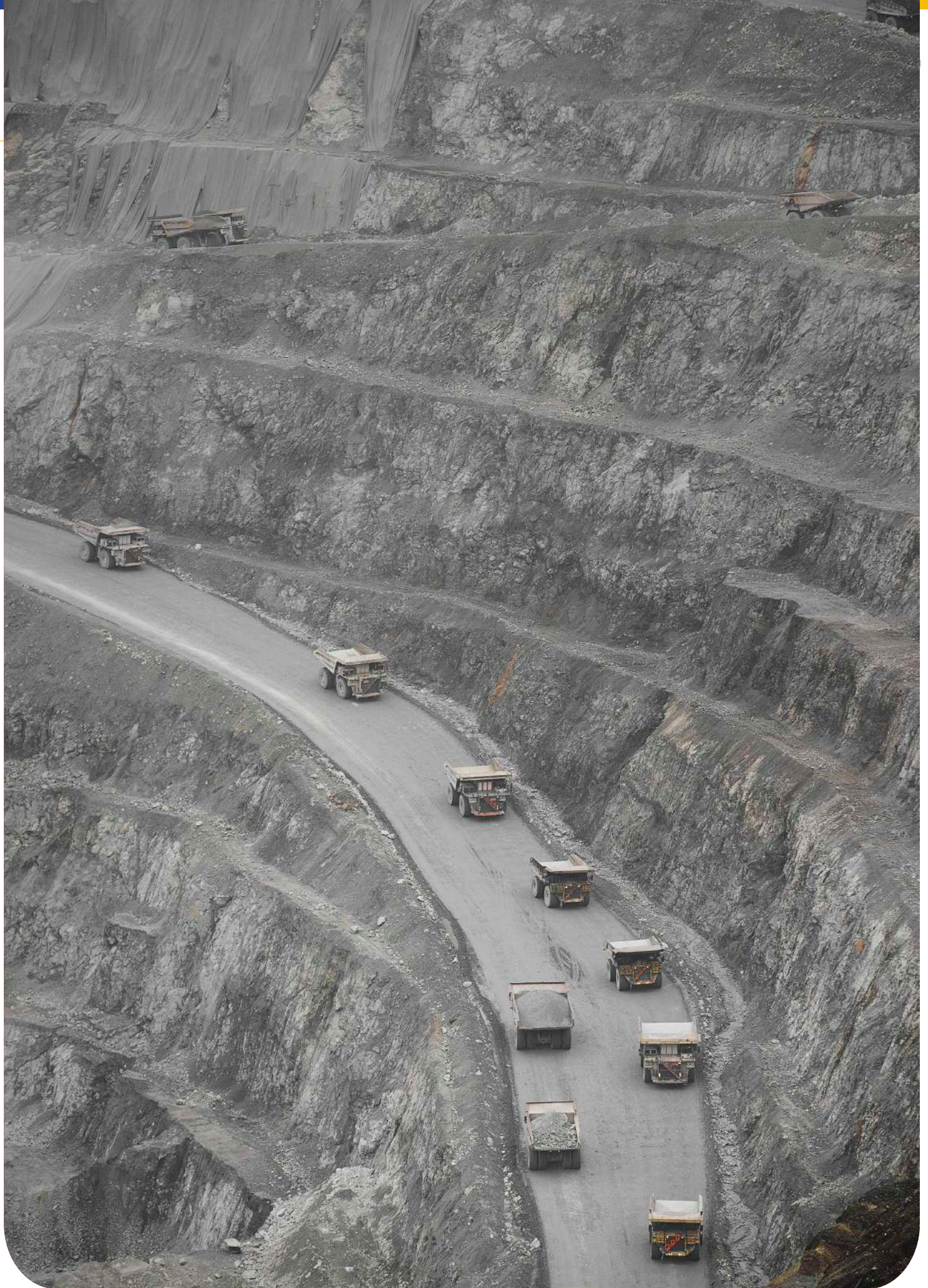
Pematang Panggang - Kayu Agung with a length of 77 kilometers and investment value of 10,085 trillion until the end of 2018, this segment construction progress has reached 89,7percent.

Whereas the third toll road, namely Kayu Agung-Palembang-Betung (111, 69 km) worked on by PT Sriwijaya Markmore Persada. Currently, until the end of 2018 the progress of land acquisition reached 82.46 percent, and construction progress reached 36.41 percent.

Palembang – Indralaya with a length of 21, 93 kilometers with an investment cost of IDR 3,301 Trillion and currently the construction progress has reached 100 percent.

The fourth toll road is Pekanbaru-Kandis-Dumai (131, 48 km) which consists of 6 sections. The progress on toll road acquisition targeted for completion in this December 2019 reached 75, 6 percent, and construction progress reached 35, 86 percent until the end of 2018.







Medan-Binjai sepanjang 25,44 kilometer dengan nilai investasi Rp 2,5 dan progres konstruksi seksi 1 sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 87 persen.

3. Tol Kalimantan

Di Kalimantan akan ada sebuah jalan tol yang menghubungkan dua kota besar di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Tol Balikpapan-Samarinda memiliki nilai investasi sebesar Rp 9,97 triliun. Pembangunan jalan tol ini dilakukan oleh PT. Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JMBS) dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi.

Pembangunan dibagi menjadi lima seksi yakni seksi I ruas KM 13 Balikpapan-Samboja (21,9 kilometer), seksi II ruas Samboja-Muara Jawa (30,9 kilometer), Seksi IV ruas Palaran-Jembatan Mahkota II (17,5 kilometer), dan seksi V ruas KM 13 Balikpapan-Sepinggah (10,9 kilometer) Adapun penyelesaian konstruksi telah mencapai 45,6 persen.

4. Tol Sulawesi

Jalan Tol Manado-Bitung merupakan jalan tol yang menghubungkan kota Manado hingga kota Bitung yang berada di provinsi Sulawesi Utara. Jalan tol yang direncanakan memiliki panjang 39,90 kilometer ini dibagi menjadi empat seksi. Seksi 1A Manado-Sukur (7 kilometer), seksi IIB Sukur-Airmadidi (7 kilometer), seksi IIA Airmadidi-Danowudu (11,50 kilometer), dan seksi IIB Danowudu-Bitung (13,50 kilometer).

Adapun Jalan Tol Manado-Bitung Seksi 1B dan 2A sudah beroperasi secara fungsional. Sampai saat ini, pembebasan lahan Jalan Tol Manado-Bitung Seksi 2A Airmadidi-Danowodu dan Seksi 2B Danowodu-Bitung secara keseluruhan telah mencapai 70,44 persen. Ditargetkan pekerjaan konstruksi selesai 100% pada kuartal ke-2 tahun 2019.

Medan-Binjai with a length of 25, 44 kilometers with an investment value of IDR 2, 5 and section 1 construction progress until the end of 2018 reached 87 percent.

3. Kalimantan Toll Road

There will be a toll road in Kalimantan which connects two major cities in East Kalimantan, namely Balikpapan and Samarinda. Balikpapan-Samarinda toll road has an investment value of IDR 9, 97 trillion. This toll road development is implemented by PT. Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JMBS) with support of the central and provincial governments.

The development is divided into five sections namely section I, section KM 13 Balikpapan-Samboja (21.9 Km), section II, section Samboja-Muara Jawa (30.9 Km), Section IV, section Palaran-Jembatan Mahkota II (17.5 Km), and section V, section KM 13 Balikpapan-Sepinggah (10, 9 Km). The construction completion has reached 45, 6 percent.

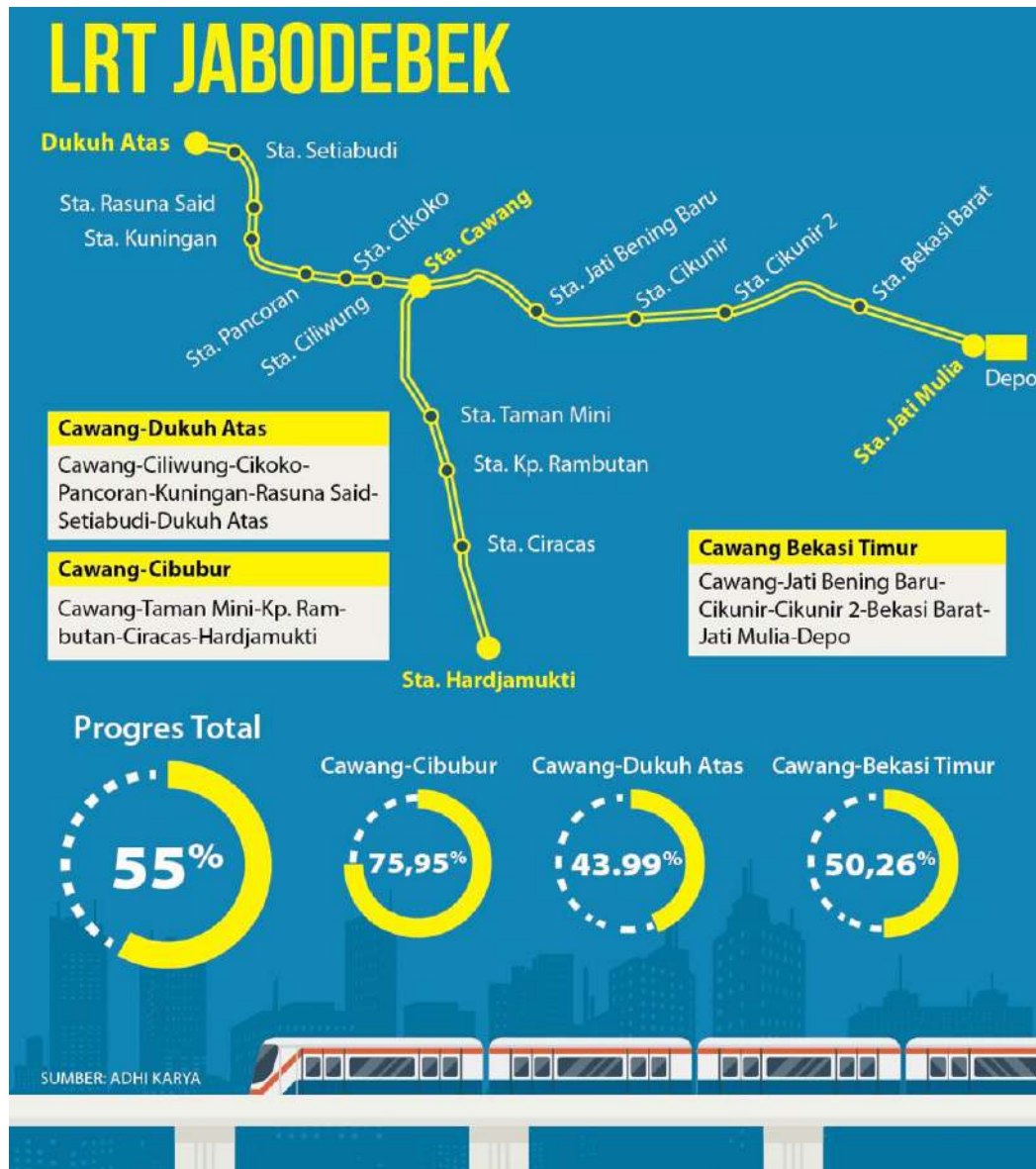
4. Sulawesi Toll Road

Manado-Bitung Toll Road is a toll road which connects Manado city to Bitung city which located in North Sulawesi province. The toll road planned to have a length of 39, 90 kilometers is divided into four sections. Section 1A Manado-Sukur (7 Km), section IIB Sukur-Airmadidi (7 Km), section IIA Airmadidi-Danowudu (11, 50 Km), and section IIB Danowudu-Bitung (13, 50 Km).

As for Manado-Bitung Toll Road Section 1B and 2A has been operating functionally. Up to this moment, land acquisition for Manado-Bitung Toll Road Section 2A Airmadidi-Danowodu and Section 2B Danowodu-Bitung has entirely reached 70, 44 percent. Construction work is targeted to be 100% complete in the second quarter of 2019.

5. Light Rail Transit (LRT) Jabodebek

5. Light Rail Transit (LRT) of Jabodebek



Proyek light rail transit Jabodebek atau disingkat LRT Jabodebek adalah sebuah system angkutan cepat dengan kereta api ringan yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang masuk ke Jakarta dan kota-kota satelit disekitarnya. Dengan adanya moda transportasi LRT Jabodebek, diharapkan bisa meminimalisasi kemacetan di tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Jagorawi.

Light rail transit Jabodebek Project or abbreviated as LRT Jabodebek is a fast transit system with light railways aiming to reduce vehicles density that enters Jakarta and surrounding satellite cities. With the existence of Jabodebek LRT transportation mode, it is expected to minimize congestion on Jakarta-Cikampek (Japek) and Jagorawi toll roads.



Proyek yang digarap oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. ini, dibagi dalam dua tahap; LRT Jabodebek tahap I terdiri dari 3 lintas layanan, yaitu lintas layanan 1 Cawang-Cibubur, lintas layanan 2 Cawang-Dukuh Atas, dan lintas layanan 3 Cawang-Bekasi Timur.

Adapun progress pembangunan untuk lintas layanan Cawang-Cibubur terealisasi 75,95 persen, Cawang-Dukuh Atas terealisasi 43,99 persen, sedangkan Cawang-Bekasi Timur 50,26 persen. Total realisasi proyek LRT Jabodebek adalah 55 persen.

Selain manfaat transportasi, LRT memiliki fungsi dan manfaat pembangunan di bidang pemukiman. LRT menstimulus munculnya kawasan hunian yang mengusung konsep transit oriented development (TOD), yaitu pemukiman yang dikembangkan dengan mengacu pada jejaring atau system transportasi sebagai solusi.

6. Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

Proyek light rail transit (LRT) Sumatera Selatan adalah sebuah system angkutan cepat dengan model Lintas Rel Terpadu yang dibangun di Palembang, untuk menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring.

LRT di Sumatera Selatan yang memiliki trase sepanjang 23,5 kilometer ini memiliki total investasi senilai Rp 12,6 triliun. Pembangunan proyek ini dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan menggunakan anggaran dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dengan adanya LRT Sumatera Selatan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan di kota Palembang.

• Konektivitas Laut

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Salah satu program unggulan terkait konektivitas laut adalah Program Tol Laut. Program tol laut ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi stabilitas harga kebutuhan

This project worked on by PT. Adhi Karya (Persero) Tbk is divided into two stages; Phase I of LRT Jabodebek consists of 3 cross services, namely cross service 1 Cawang-Cibubur, cross service 2 Cawang-Dukuh Atas, and cross service 3 Cawang-Bekasi Timur.

The development progress for Cawang-Cibubur cross service was realized by 75, 95 percent, 43, 99 percent for Cawang-Dukuh Atas, whereas 50, 26 percent for Cawang-Bekasi Timur. The total realization of Jabodebek LRT project is 55 percent.

In addition to transportation benefits, LRT has development function and benefits in settlement area. LRT stimulates the emergence of residential areas which implements transit oriented development (TOD) concept, namely a settlement developed by referring to a network or transportation system as solution.

6. Light Rail Transit (LRT) of South Sumatra

South Sumatra light rail transit (LRT) project is a fast transit system with an Integrated Cross Rail model built in Palembang, to connect Sultan Mahmud Badaruddin II International Airport with Jakabaring Sports Complex.

LRT in South Sumatra which has 23, 5 kilometer track has a total investment of IDR 12, 6 trillion. This project development was implemented by PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, using budgets from the Ministry of Transportation through the Directorate General of Railways. With the existence of South Sumatra LRT, it is expected to reduce congestion in Palembang city.

• Sea Connectivity

Indonesia as the largest archipelago country in the world has great potential to become the world's maritime axis. The maritime axis constitutes strategic idea that is realized to ensure inter-island connectivity, industrial development of shipping and fisheries, sea transportation improvement as well as focusing on maritime security.

One of the leading programs related to sea connectivity is the Sea Toll Program. This sea toll program is expected to become one of the solutions to price stability needs



di seluruh Indonesia, melalui program ini biaya pengiriman barang antar Pulau akan semakin kecil sehingga harga jual barang kebutuhan di masyarakat akan dapat ditekan.

1. Tol Laut

Tahun 2018 ini, PT. Pelni (Persero) melayani enam trayek tol laut penugasan pemerintah, yaitu:

T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Belinyu-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Tanjung Priok),

T-4 (Rute Tanjung Perak-Makassar-Tahuna),

T-6 (Tanjung Perak-Tidore-Morotai-PP),

T-13 (Kalabahi-Moa-Rote-Sabu),

T-14 (Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong-Larantuka), dan

T-15 (Kisar-Namrole-PP).

Dengan adanya tol laut PT Pelni (persero) sebagai salah satu operator kapal angkut sapi mampu membawa hingga 2.000 ekor sapi ke Jakarta setiap bulannya, sehingga dapat berdampak positif pada perekonomian secara langsung.

2. Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga

Tidak hanya Tol Laut, konektivitas laut juga bisa dikembangkan melalui pembangunan pelabuhan dan dermaga. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT. ASDP Indonesia Ferry dipercaya untuk membangun beberapa proyek strategis pelabuhan di Indonesia, yaitu:

Pembangunan Terminal Peti Kemas Belawan Fase II

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo I, tengah melakukan pembangunan perpanjangan terminal peti kemas Pelabuhan Belawan untuk fase II sepanjang 350 meter. Hal ini dilakukan untuk terus meningkatkan pelayanan dan antisipasi pertumbuhan bisnis dan konektivitas laut di masa depan.

Pengembangan pelabuhan di Kuala Tanjung menjadi pelabuhan hub internasional sebagai pintu masuk ke Kuala Lumpur wilayah barat Indonesia. Pelabuhan Kuala Tanjung akan memiliki kapasitas hingga 10 juta TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) secara bertahap dikembangkan hingga tahun 2040. Fase pertama pengembangan (Terminal Serba Guna) telah diselesaikan oleh PT. Prima Multi Terminal yang merupakan anak perusahaan bersama Pelindo I, PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Waskitya Karya.

throughout Indonesia, through this program the cost of shipping goods between islands will be smaller so that the selling price of goods required in the society will be reduced.

1. Sea Toll

In this year of 2018, PT. Pelni (Persero) serves six sea toll routes assigned by the government, namely:

T-2 (Tanjung Priok-Tanjung Batu-Belinyu-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Tanjung Priok),

T-4 (Route of Tanjung Perak-Makassar-Tahuna),

T-6 (Tanjung Perak-Tidore-Morotai-PP),

T-13 (Kalabahi-Moa-Rote-Sabu),

T-14 (Tanjung Perak-Lewoleba-Adonara/Tenong-Larantuka), and

T-15 (Kisar-Namrole-PP).

With the existence of sea toll, PT Pelni (Persero) as one operators of cattle transporter is able to carry up to 2,000 cows to Jakarta each month, so that it may have a direct positive impact on the economy.

2. Development of Ports and Docks

Not only Sea Toll, sea connectivity can also be developed through the development of ports and docks. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT. ASDP Indonesia Ferry is trusted to build several strategic port projects in Indonesia, namely:

Development of Belawan ISO Container Terminal - Phase II

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo I, is currently developing an extension of Belawan Port ISO container terminal of phase II for 350 meters. This is implemented to continue improving services and anticipate business growth and sea connectivity in the future.

Port development in Kuala Tanjung becomes an international hub port as entrance to Kuala Lumpur to the western territory of Indonesia. Kuala Tanjung Port will have a capacity of up to 10 million TEU (Twenty Foot Equivalent Units) which has been gradually developed until 2040. The first phase of development (Multipurpose Terminal) has been completed by PT. Prima Multi Terminal which is a joint subsidiary company of Pelindo I, PT. Pembangunan Perumahan, and PT. Waskitya Karya.



Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung
Pengembangan pelabuhan di Kuala Tanjung menjadi pelabuhan hub internasional sebagai pintu masuk ke wilayah barat Indonesia. Pelabuhan Kuala Tanjung akan memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEU yang dikembangkan secara bertahap hingga tahun 2023. Proyek ini dikembangkan dan dikelola oleh PT. Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha gabungan dari Pelindo I, PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Waskitya Karya.

Development of Kuala Tanjung International Hub Port
Port development in Kuala Tanjung becomes an international hub port as an entrance to the western territory of Indonesia. Kuala Tanjung Port will have a capacity up to 20 million TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) gradually developed until 2023. This project was developed and managed by PT. Prima Multi Terminal which is a joint subsidiary of Pelindo I, PT. Pembangunan Perumahan, and PT. Waskitya Karya.

Pembangunan Konstruksi Dermaga Eksekutif Merak-Bakauheni
Pelabuhan Merak dan Bakauheni akan segera memiliki dermaga eksekutif yang menelan nilai investasi sebesar Rp 447 miliar. Proyek ini dibangun atas Joint Venture PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. PP (Persero) Tbk. dan Patra Jasa. Dermaga eksekutif Merak-Bakauheni akan dilengkapi kawasan terpadu dengan fasilitas hotel, taman, tempat ibadah, area komersil, dan lounge yang dapat diakses dalam satu area.

Executive Dock Construction Development of Merak-Bakauheni
Merak and Bakauheni Port will immediately have an executive dock which costs an investment of IDR 447 billion. This project was built to the Joint Venture of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. PP (Persero) Tbk. and Patra Jasa. Merak-Bakauheni executive dock will be equipped with an integrated area with hotel facilities, parks, and places of worship, commercial areas, and lounges which can be accessed in one area.

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pelabuhan Labuan Bajo
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) membangun proyek strategis perdananya melalui pembangunan kawasan komersial di Labuan Bajo yang terdiri dari Pelabuhan Marina, peningkatan fasilitas dermaga penyeberangan, hotel, serta area komersil dengan total investasi sekitar Rp 320 miliar.

Development Construction Work of Labuan Bajo Port Area
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) built its first strategic project through a commercial area development in Labuan Bajo which consists of Marina Port, improvement of ferry dock facilities, hotels, as well as commercial areas with a total investment around IDR 320 billion.

Development of Kijing Port

Pembangunan Pelabuhan Kijing
Pengembangan Pelabuhan Kijing adalah pelabuhan yang terletak di provinsi Kalimantan Barat, di Kabupaten/kota Mempawah. Pelabuhan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 32 hektare dan nilai investasi sebesar Rp 5,05 triliun. Pelabuhan yang akan menampung kapasitas hampir satu juta TEU peti kemas ini dikembangkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat ditujukan sebagai hub port dan merupakan pelabuhan pertama di Kalimantan yang berstandar

Kijing Port Development is a port located in West Kalimantan province, in Mempawah Regency/city. The port is planned to have 32 hectares capacity and an investment value of IDR 5,05 trillion. The port that will accommodate this capacity of nearly one million TEU ISO containers is developed by PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Pelindo II. Construction and Development of Kijing Terminal located in Mempawah Regency, West Kalimantan Province is designated as a port hub and is the first port on Kalimantan with international standards. This 200 Ha port is developed by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which will be



internasional. Pelabuhan seluas 200 Ha ini dikembangkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang akan diintegrasikan dengan kawasan pendukung pelabuhan. Pengembangan pelabuhan direncanakan terbagi atas beberapa tahapan dimana untuk pengembangan Tahap I memiliki kapasitas petikemas sebesar 0,95 Juta TEUs, 8,3 Juta Ton Curah Cair, 15 Juta ton Curah Kering, dan 0,5 Juta ton General Cargo. Pembangunan Tahap I tersebut diawali dengan pengembangan tahap inisial yang telah dimulai sejak Juli 2018 dan mencakup pembangunan 1000 m x 100 m Terminal Peti Kemas di area laut sejauh 3,45 km dari pesisir pantai dan 13,8 Ha lapangan penumpukan petikemas di area darat. Pengembangan Tahap Inisial ini direncanakan dengan kapasitas 500.000 TEUs petikemas dengan biaya investasi sebesar Rp 5,05 T dan diperkirakan selesai pada tahun 2020.

Pembangunan dan Pengembangan Kendari New Port
Kendari New Port atau disingkat KNP merupakan rencana pelabuhan baru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang masuk dalam salah satu rangkaian rencana pembangunan dan pengembangan sembilan pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Pengembangan Pelabuhan Tarakan
Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, merupakan salah satu pelabuhan yang akan dijadikan proyek tol laut. Pelabuhan ini akan dihubungkan dengan beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 123,5 miliar untuk membangun lapangan penumpukan peti kemas di Pelabuhan Tarakan

Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III melakukan perbaikan struktur dermaga local dan nusantara di Pelabuhan Tenau Kupang dengan nilai investasi sebesar Rp 194,24 miliar. Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang ini ditujukan agar dapat disinggahi kapal-kapal berukuran besar.

Pengembangan Pelabuhan Bitung
Pelabuhan ini dipilih sebagai Pelabuhan Hub Internasional di Kawasan Timur Indonesia dengan pertimbangan

integrated with the port supporting area. Port development is planned to be divided into several stages where the development of Phase I has ISO container capacity of 0,95 Million TEUs, 8,3 Million Tons of Liquid Bulk, 15 Million Tons of Dry Bulk, and 0,5 Million Tons of General Cargo. The Phase I development begins with the development of an initial phase which began in July 2018 and includes the development of 1000 m x 100 m ISO Container Terminals in the sea area of 3,45 km from the coast and 13,8 Ha ISO container yard in the land area. This Initial Development Phase is planned with a capacity of 500,000 TEUs of ISO containers with an investment cost of IDR 5,05 T and is estimated to be completed by 2020.

Development and Expansion of Kendari New Port
Kendari New Port or abbreviated as KNP is a new port plan in Kendari City, Southeast Sulawesi, which is included in a series of development and expansion plans of nine ports managed by PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Development of Tarakan Port

Malundung Port in Tarakan City, North Kalimantan Province, is one of the ports that will be used as a sea toll project. This port will be connected to several ports in Indonesia. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) will allocate capital expenditure of IDR 123,5 billion to build a stacking field of ISO container in Tarakan Port.

Development of Tenau Kupang Port
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III made improvements to the local and archipelago dock structures in Tenau Kupang Port with an investment value of IDR 194,24 billion. This development of Tenau Kupang Port is intended to be able to be visited by large vessels.

Development of Bitung Port
This port was chosen as International Hub Port in the Eastern part of Indonesia considering that growth in the Eastern part of Indonesia has a higher potential compared to the western part of Indonesia. This project was worked



bahwa pertumbuhan di wilayah Timur Indonesia memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Proyek ini digarap oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV. Pelabuhan ini akan disiapkan untuk menjadi pelabuhan singgah untuk komoditas di wilayah timur Indonesia.

Pembangunan Pelabuhan Sorong - Seget

Pelabuhan yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini akan diarahkan untuk menjadi pelabuhan internasional yang akan menjadi poros transportasi laut di kawasan Pasifik untuk jalur Australia, Jepang, Fiji, serta Asia Tenggara.

Pengembangan Pelabuhan Ambon

Pelabuhan Ambon diharapkan bisa menjadi pelabuhan direct call di kawasan Maluku. Dasar kebijakan tersebut didukung oleh kepentingan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan biaya pengiriman yang lebih murah. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menilai bahwa direct call merupakan cara menekan efisiensi biaya dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain.

Pengembangan Pelabuhan Sorong

Pelabuhan Sorong akan dikembangkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk menjadi pelabuhan internasional. Daerah Sorong juga akan diarahkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sorong ke depan akan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru khususnya di kawasan timur Indonesia.

Pengembangan Pelabuhan Manokwari

Perluasan kawasan pelabuhan Manokwari bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat. Perluasan dermaga ini bertujuan untuk memperlancar pelayaran dan aktivitas bongkar muat petikemas yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Pengembangan Pelabuhan Merauke

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Merauke telah mulai mengembangkan Pelabuhan Merauke dan akan difungsikan mendukung program Tol laut pemerintah. Pengembangan yang dimaksud adalah pembangunan dermaga berukuran 75 meter dan proyek pemasangan fix crane di pelabuhan Merauke.

on by PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) or Pelindo IV. This port will be prepared to become a transit port for commodities in the eastern territory of Indonesia.

Development of Sorong – Seget Port

The port managed by PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) will be directed to become an international port which will become the axis of sea transportation in the Pacific region for Australia, Japan, Fiji, and Southeast Asia routes.

Development of Ambon Port

Ambon Port is expected to become a direct call port in Maluku region. The basis of such policy is supported by the interests of local government to obtain cheaper shipping costs. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) considers that direct call is a way to reduce cost efficiency from one port to another.

Development of Sorong Port

Sorong Port will be developed by PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to become an international port. Sorong area will also be directed to become a Special Economic Zone (SEZ). Sorong in the future will become a center for new economic growth specifically in the eastern part of Indonesia.

Development of Manokwari Port

The expansion of Manokwari port area aims to encourage economic growth in the local area. The expansion of this dock aims to expedite shipping and ISO container loading and unloading activities managed by PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Development of Merauke Port

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) of Merauke Branch has begun to develop Merauke Port and will be used to support the government's sea toll program. The intended development is a 75 meters dock development and a fix crane installment project in Merauke port.



Pengembangan Pelabuhan Jayapura

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan mengembangkan Pelabuhan Jayapura untuk menjadi pelabuhan ekspor agar komoditi yang ada di Papua bisa langsung dikirim ke luar negeri tanpa harus transit di pelabuhan lain.

• Konektivitas Udara

Mengingat persinggungan fisik antara Indonesia dengan dunia internasional dilakukan melalui bandara, maka jaringan koneksi udara sangat penting keberadaannya. Untuk mendukung konektivitas udara, kesiapan Bandar udara dan transportasi pendukung yang menyokongnya sangat penting. Karena itulah, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) giat mengembangkan proyek infrastruktur transportasi tersebut.

Melalui BUMN, pemerintah terus memulai pembangunan bandara-bandara baru di daerah pinggiran dan terpencil. Kehadiran simpul transportasi yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap, tentunya juga meningkatkan pergerakan barang dan manusia. Seiring dengan itu, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan semakin meningkat.

1. Garuda Indonesia Maskapai Kelas Dunia

Kualitas konektivitas udara Indonesia telah diwakilkan secara sangat baik oleh PT. Garuda Indonesia (Persero). Garuda telah memenangkan 23 penghargaan, 13 diantaranya adalah penghargaan domestik, sedangkan 10 lainnya adalah penghargaan internasional. Berikut adalah beberapa penghargaan terbaik yang telah diterima oleh Garuda Indonesia:

Development of Jayapura Port

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) will develop Jayapura Port to become an export port so that commodities in Papua can be sent directly abroad without having to transit in another port.

• Air Connectivity

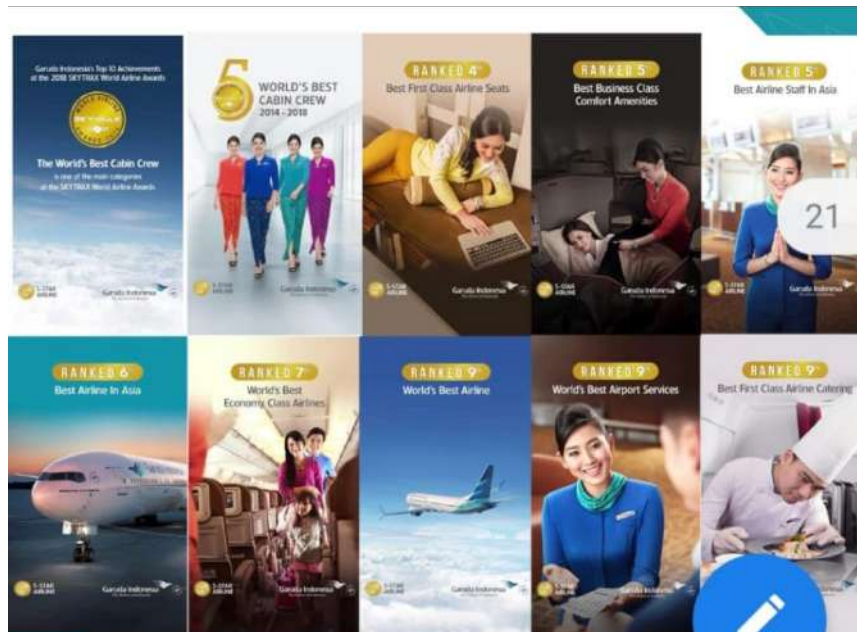
Considering that physical contact between Indonesia and the international world is implemented through airports, thus an existence of air connection network is very important. To support air connectivity, airport preparedness and supporting transportation which supports it are very important. For this reason, the government through BUMN (State-Owned Enterprise) is actively developing such transportation infrastructure project.

Through BUMN (state-owned enterprise), the government continues to start developing new airports in rural and remote areas. The presence of a transportation node which has sufficient facilities certainly increases the movement of goods and human. Along with that, the economic growth in that area will increase.

1. Garuda Indonesia – World Class Airline

Indonesian air connectivity quality has been represented very well by PT. Garuda Indonesia (Persero). Garuda has won 23 awards, 13 of them are domestic awards, whereas 10 others are international awards. Following are some of the best awards received by Garuda Indonesia:





- a. The World's Best Cabin Crew, selama 5 tahun berturut-turut;
- b. Tersertifikasi sebagai 5 Star Airlines yang dianugerahkan oleh Skytrax;
- c. Best First Class Airline Seats;
- d. Best Business Class Amenities;
- e. Best Airine Staff in Asia;
- f. Best Airline in Asia;
- g. World best economy class airline;
- h. World Best Airline;
- i. World Best Airport Service;
- j. Best First Class Airline Catering.

- a. The World's Best Cabin Crew, for 5 consecutive years;
- b. Certified as 5 Star Airlines awarded by Skytrax;
- c. Best First Class Airline Seats;
- d. Best Business Class Amenities;
- e. Best Airline Staff in Asia;
- f. Best Airline in Asia;
- g. World best economy class airline;
- h. World Best Airline;
- i. World Best Airport Service;
- j. Best First Class Airline Catering.

2. Pengembangan Bandar Udara Oleh Angkasa Pura
Angkasa Pura sebagai penyedia layanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara memiliki banyak proyek strategis untuk mengembangkan Bandar udara di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas serta pelayanan demi konektivitas udara yang lebih baik. Berikut adalah beberapa proyek bandara yang akan dikembangkan oleh Angkasa Pura:

2. Airport Development by Angkasa Pura
Angkasa Pura as air traffic services provider and airport business has many strategic projects to develop Airports in Indonesia to increase capacity as well as services for the sake of better air connectivity. Following are some of the airport projects to be developed by Angkasa Pura:

3. Pengembangan Bandar Udara Baru Yogyakarta – Kulon Progo

Development of New Yogyakarta – Kulon Progo Airport

Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan dijadikan pendukung Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Sebagai operator 13 bandara di Indonesia Timur, PT. Angkasa Pura I akan mengembangkan NYIA untuk memiliki daya tampung sebanyak 15 juta

Kulon Progo Airport or New Yogyakarta International Airport (NYIA) will be used as endorser of Adi Sucipto Airport of Yogyakarta. As an operator for 13 airports in the Eastern Part of Indonesia, PT. Angkasa Pura I will develop NYIA to have a capacity of 15 million passengers per year



penumpang per tahun dengan landas pacu sepanjang 3600 meter. Selain itu, Bandara Kulon Progo juga akan menampung sebanyak 28 pesawat berbadan lebar atau widebody jenis B777. Bandara Kulon Progo ini akan menjadi bagian dari rencana Angkasa Pura I dalam mengembangkan Airport City.

4. Proyek Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang

Untuk menampung tingkat pertumbuhan trafik penumpang yang telah mencapai 4,2 juta, Bandara Ahmad Yani Semarang akan dikembangkan menjadi bandara berstandar internasional dengan kapasitas penumpang di tahap ultimate mencapai 5,7 juta penumpang, melayani kargo 25.576 ton per tahun, dan melayani pergerakan pesawat sebanyak 53.270 pergerakan. Selain itu, nanti bandara ini juga dapat melayani penerbangan domestic, internasional dengan jenis pesawat terbesar tipe B767-400.

6. Proyek Pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin

Untuk menampung 3,6 juta penumpang, Bandara Syamsudin Noor membutuhkan pengembangan sarana dan prasarana yang mumpuni. Melalui proyek pengembangan ini, diharapkan Bandara Syamsudin Noor mampu menjadi bandara berstandar internasional dengan kapasitas penumpang di tahap ultimate mencapai 10 juta penumpang, melayani kargo 82,000 ton per tahun, dan melayani pergerakan pesawat sebanyak 79,775 pergerakan.

with runway of 3600 meters. In addition, Kulon Progo Airport will also accommodate 28 wide body aircrafts, type B777. This Kulon Progo Airport will be part of Angkasa Pura I's plan in developing Airport City.

5. Development Project of Ahmad Yani Airport of Semarang To accommodate the level of passenger traffic growth that has reached 4, 2 millions, Ahmad Yani Airport of Semarang will be developed into an international standard airport with passenger capacity at the ultimate stage reaching 5, 7 million passengers, serving 25.576 tons of cargo per year, and serving aircraft movement of 53.270 movements. In addition, later on this airport can also serve domestic, international flights with the largest type of aircraft namely type B767-400.

7. Development Project of Syamsudin Noor Airport of Banjarmasin

To accommodate 3, 6 million passengers, Syamsudin Noor Airport requires the development of qualified facilities and infrastructures. Through this development project, it is expected that Syamsudin Noor Airport can become an international standard airport with passenger capacity at the ultimate stage reaching 10 million passengers, serving 82, 000 tons of cargo per year, and serving aircraft movement of 79, 775 movements.





Indonesia Terang Dari Sabang Sampai Merauke

Bright Indonesia From Sabang To Merauke

Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, terus berkomitmen untuk menerangi Nusantara, termasuk desa-desa yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Saat ini, Pemerintah tengah gencar membangun daerah 3T karena pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sana. Hal ini yang menjadi semangat PLN untuk menjangkau pembangunan kelistrikan di daerah 3T tersebut demi mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.

The Government through PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN, continues to be committed to illuminate the archipelago, including villages in the (3T (terdepan, terluar, tertinggal/ foremost, outermost, left behind)) areas. Currently, the Government intensively builds the 3T areas because the development has not been fully felt by the society there. This is the spirit of PLN to reach out electricity development in the 3T areas in order to encourage the regional economy and the society welfare for a better life.

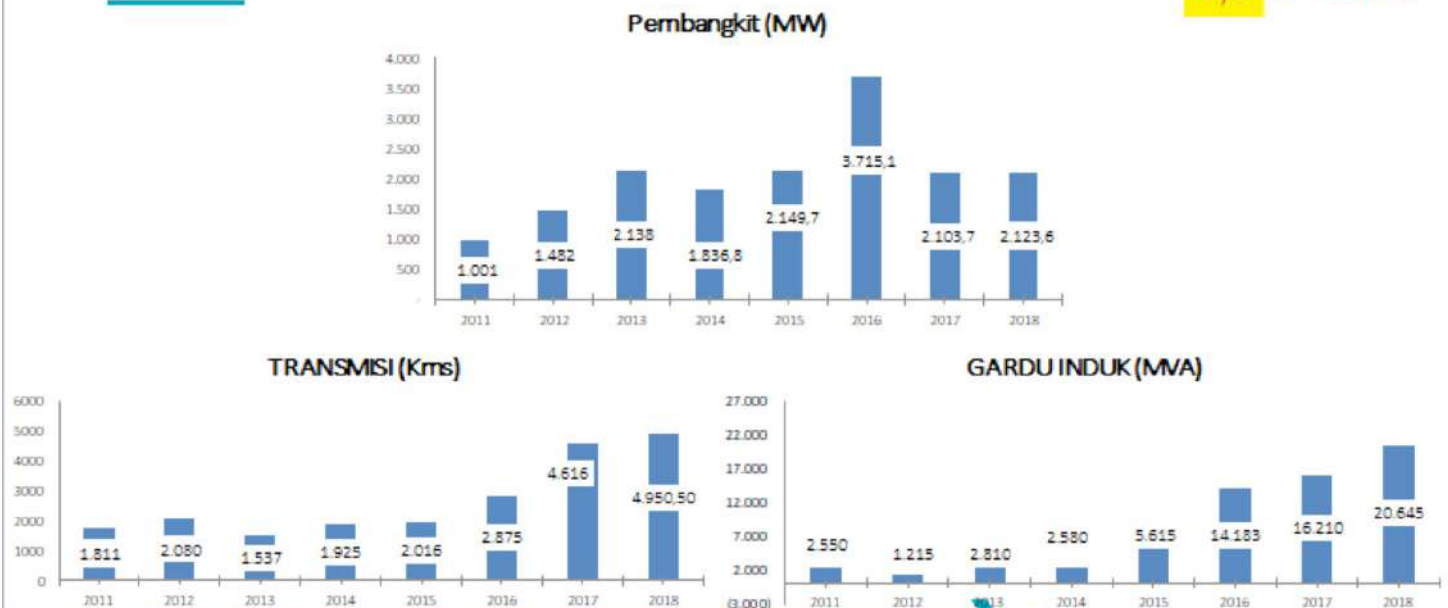
Tahun 2018 menjadi tantangan PLN untuk melistriki desa-desa di seluruh Indonesia di mana desa-desa tersebut

2018 is the challenge of PLN (Perusahaan Listrik Negara/ State-Owned Electricity Company) to electrify villages

memiliki akses yang sulit serta biaya yang tidak murah. Walaupun demikian, PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Kementerian ESDM terus berupaya melistriki seluruh desa-desa di Indonesia, termasuk di daerah 3T. Hal tersebut terlihat dari komitmen PLN dalam melaksanakan proyek 35.000 MW.

throughout Indonesia where those villages have difficult access and costs that are not cheap. Nevertheless, PLN as BUMN (State-Owned Enterprise) along with the Ministry of Energy and Mineral Resources (Kementerian ESDM) continues to electrify all villages in Indonesia, including in the 3T areas. This can be seen from the commitment of PLN in implementing the 35.000 MW project.

REALISASI PENAMBAHAN PEMBANGKIT, TRANSMISI DAN GI TAHUN 2011 - 2018



- 21 Jan 2018 -

www.pln.co.id | 3

Program 35.000 MW adalah proyek Pemerintah untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga 2027. Program 35.000 MW ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik. Pemerintah membuat program 35.000 MW untuk memperluas ketersediaan listrik di seluruh Indonesia. Perluasan ketersediaan listrik di seluruh Indonesia dicerminkan melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Pada tahun 2018 rasio elektrifikasi nasional adalah sebesar 97,2% dimana meningkat 4,2% dari tahun sebelumnya sebesar 93%.

The 35.000 MW program is a government project to build power plant reaching 35.000 MW until 2027. This 35.000 MW program aims to fulfill Indonesian society electricity needs from Sabang to Merauke. This will certainly have a significant impact for the economic growth outside Java, which previously lacked of electricity supply. The Government implements the 35.000 MW program to expand the availability of electricity throughout Indonesia. The expansion of electricity availability throughout Indonesia is reflected through an increase in the national electrification ratio. In 2018 the national electrification ratio was 97, 2%, which increased 4,2% from the previous year by 93%.



Dengan segala bentuk upaya yang telah dilakukan, PLN berhasil menghilangkan pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi tahun 2015, melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkesinambungan. Saat ini, sudah tidak terdapat sistem besar yang mengalami defisit dan terdapat cadangan daya listrik yang memadai pada setiap sistem besar. Tidak hanya sistem besar saja, PLN terus meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan hingga ke daerah-daerah 3T. Hal ini diperlukan untuk tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain menerangi daerah 3T, saat ini PLN bekerja menerangi Nusantara melalui berbagai program strategis, di antaranya Program 35.000 MW, 7.000 MW dan juga pengembangan energi terbarukan. Per Desember 2018, tercatat 32.932 MW dari program 35.000 MW telah ditandatangani kontrak Power Purchased Agreementnya dan progres konstruksi pembangkit telah mencapai 23.425 MW dari total pembangkit yang akan dibangun. Program 35.000 MW ini meliputi pembangunan pembangkit sebesar 35.269 MW sesuai dengan RUPTL 2018 – 2027. Untuk mendukung penyerapan daya terpasang program 35.000 GW maka PLN melakukan pengembangan transmisi dan gardu induk untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan program pembangunan transmisi 46.973 kilometer, dan Gardu Induk 111.762 MVA.

With all forms of effort which have been implemented, PLN has succeeded in eliminating rotating power outages that occurred in 2015, through a continuous development of electricity infrastructure. Currently, there is no longer a large system that has a deficit and there's a sufficient electrical power reserves at any large system. Not just a large system, PLN continues increasing electricity infrastructure to 3T areas. This is required to maintain the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as increasing people's welfare.

In addition to illuminate the 3T areas, PLN currently works to illuminate the archipelago through various strategic programs, including the 35.000 MW, 7.000 MW programs and also the development of renewable energy. As per December 2018, 32,932 MW of the 35,000 MW program, the Power Purchased Agreement contract has been signed and the plant construction progress has reached 23,425 MW of the total power plant to be built. The 35,000 MW program includes the construction of a power plant of 35,269 MW in accordance with RUPTL 2018- 2027. To support the absorption of installed power of the 35,000 GW program, PLN is developing transmission and substation to increase the electrification ratio with 46,973 kilometers transmission development program and 111,762 MVA substations.



Akses Informasi Dan Telekomunikasi Untuk Semua

Access Of Information And Telecommunication For All

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga ke daerah dan pelosok termasuk dalam program pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Masyarakat Indonesia yang tersebar di negara dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi akan semakin terkoneksi dan mudah untuk terhubung melalui jaringan telekomunikasi yang mumpuni.

Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah dapat menjangkau masyarakat Indonesia dengan jaringan telekomunikasi yang tersebar dari barat hingga timur. Salah satu BUMN yang giat dalam memberikan akses informasi dan telekomunikasi ke seluruh pelosok Indonesia adalah Telkom.

Di tahun 2018, Telkom sudah mencetak berbagai prestasi dalam melakukan realisasi jaringan ke daerah:

Telecommunication infrastructure development up to regions and remote areas is included in government programs namely developing Indonesia from the verge by strengthening regions and villages.

Indonesian society spread in the Country with an area around 1,9 million square kilometers will be increasingly connected and easily connected through a qualified telecommunication network.

Through BUMN (State-Owned Enterprise), the government can reach Indonesian Society with telecommunication network spread from west to east. One of the BUMNs that are active in providing access to information and telecommunication to all remote areas in Indonesia is Telkom.

In 2018, Telkom has scored various achievements in implementing network realization to the regions:



Indonesia Digital Network

Indonesia Digital Network

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. atau Telkom, terus berupaya mendukung pembangunan dan digitalisasi bangsa melalui penyediaan infrastruktur dan konektivitas yang merata di daerah tertinggal, terpencil, terluar (3T). Pembangunan infrastruktur dan layanan digital ini diwujudkan dalam bentuk program Indonesia Digital Network (IDN) yang terdiri dari:

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. or Telkom, continuously strives to support the nation's development and digitalization through the provision of infrastructure and connectivity that is evenly distributed in the (3T (terdepan, terpencil dan tertinggal/ foremost, outermost and left behind)) areas.

This infrastructure development and digital services is realized in the form of the Indonesia Digital Network (IDN) program which consists of:



1. id-Access (Indonesia Digital Access)
Merupakan jaringan akses broadband ke pelanggan berbasis fiber optic untuk fixed-broadband dan teknologi 3G/4G untuk mobile broadband.
2. id-Ring (Indonesia Digital Ring);
Merupakan jaringan backbone broadband highway berbasis fiber optic yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke serta internasional.
3. id-Con (Indonesia Digital Convergence);
Merupakan fasilitas layanan IT platform terintegrasi meliputi data center dan berbagai platform layanan digital.

1. id-Access (Indonesia Digital Access)
It is a broadband access network to fiber optic-based customers for fixed-broadband and 3G/4G technology for mobile broadband.
2. id-Ring (Indonesia Digital Ring);
It is a fiber optic based highway broadband backbone network which connects Indonesian islands from Sabang to Merauke as well as International.
3. id-Con (Indonesia Digital Convergence);
It is an integrated IT platform service facility including data center and various digital service platforms.

BBM Satu Harga

One-Price Fuel Oil



BBM satu harga merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada awal Januari 2017. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan kesetaraan yang merupakan amanat konstitusi yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Harapannya semua warga Negara Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke dapat merasakan harga BBM yang sama. Program ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi untuk daerah-daerah 3T sehingga dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Operasional BBM 1 Harga tersebar di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) mulai dari Papua di 32 titik dengan 7 sisa titik yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2019, kemudian Kalimantan di 34 titik dengan sisa 7 titik yang akan selesai pada tahun 2019, Sumatera

One-price Fuel Oil (BBM Satu Harga) is a program launched by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo in early January 2017. This program is the government's effort to implement equality that is the constitutional mandate namely Social Justice for all of the People of Indonesia.

The expectation is that all Indonesian Citizens from Sabang to Merauke can feel the same fuel oil (BBM) price. This program is also expected to be a driver of economic growth for the 3T areas so that it can improve the equality of Indonesian society welfare.

The operational of One-price Fuel Oil (BBM Satu Harga) are spread all over the 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal/ foremost, outermost, left behind) areas starting from Papua in 32 points with 7 remaining points targeted to be implemented in 2019, then Kalimantan in 34 points with



di 24 titik, Nusa Tenggara di 26 titik dengan 10 titik sisa yang akan direalisasikan pada tahun 2019, Sulawesi di 14 titik, Maluku di 16 titik dengan 5 titik yang baru akan dioperasikan pada tahun 2019 dan yang terakhir Jawa-Bali di 4 titik.

Pertamina sebagai BUMN yang diberikan tugas untuk melaksanakan program BBM 1 Harga ini melakukan pendistribusian BBM ke daerah yang dikategorikan sebagai 3T secara berkelanjutan melalui berbagai moda transportasi, baik truk tangki, kapal laut, sampan hingga pesawat Air Tractor khusus pengangkutan BBM.

Berdasarkan Kep. Dirjen Migas No.09.K/10/DJM.O/2017 tanggal 23 Januari 2017, tentang Lokasi tertentu Untuk Pendistribusian JBT & JBKP, Pertamina ditargetkan mendirikan lembaga penyalur BBM Satu Harga di 150 titik selama tiga tahun atau sampai dengan akhir 2019 dengan rincian 54 lokasi untuk tahun 2017, 67 lokasi dan 29 lokasi pada 2019. Pertamina ditargetkan dapat memenuhi seluruh target 150 titik penyaluran BBM 1 Harga dan dapat beroperasi secara optimal melayani masyarakat pada 31 Mei 2019.

7 remaining points to be completed in 2019, Sumatra in 24 points, Nusa Tenggara in 26 points with 10 remaining points that will be realized in 2019, Sulawesi in 14 points, Maluku in 16 points with 5 new points to be operated in 2019 and last one in Java-Bali in 4 points.

Pertamina as BUMN (State-Owned Enterprise) that is given the task of implementing this One-Price Fuel Oil (BBM Satu Harga) program distributes BBM (Fuel Oil) to areas are categorized as 3T on an ongoing basis through various transportation modes, either tank trucks, ships, canoes to Air Tractor aircraft specifically for BBM (Fuel Oil) transportation.

Based on a decision of the Directorate General of Oil and Gas No. 09/K/10/DJM.O/2017 dated January 23rd, 2017, concerning certain Location for the distribution of JBT & JBKP, Pertamina is targeted to establish a channeling institution for One-Price Fuel Oil (BBM Satu Harga) in 150 points within three years or until the end of 2019 with details of 54 locations in 2017, 67 locations in 2018 and 29 locations in 2019. Pertamina is targeted to fulfill the entire target of 150 channeling points of One-Price Fuel Oil (BBM Satu Harga) and can operate optimally to serve the society at May 31st, 2019.





BUMN Hadir Untuk Negeri

State-Owned Enterprise Present For The Country

Pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan perekonomian melalui program inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Tujuannya, yakni adalah untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

The Government of Indonesia has the duty to increase the role of BUMN (State-Owned Enterprise) as economic development agent through financial inclusion program and society economic development. The goal is namely for economic equality and improving the welfare of the people of Indonesia.

Terdapat beberapa program BUMN Hadir Untuk Negeri yang sudah dilaksanakan oleh BUMN, pada bidang inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat, adalah program pembiayaan ekonomi mikro, MEKAAR, Rumah Kreatif BUMN, Rumah Pangan Kita, Kartu Tani, Balkondes, Perhutanan Sosial, dan Padat Karya Tunai.

There are several programs of BUMN (State-Owned Enterprise) Presents for the Country' which has been implemented by BUMN (State-Owned Enterprise), in the field of financial inclusion and society economic development, are micro-economic financing program, MEKAAR, Rumah Kreatif BUMN, Rumah Pangan Kita, Kartu Tani, Balkondes, Perhutanan Sosial, and Padat Karya Tunai.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Kesuksesan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program

PEOPLE'S BUSINESS CREDIT PROGRAM (KUR/KREDIT USAHA RAKYAT)

The success of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) in Indonesia cannot be separated from the government's support and role in encouraging credit distribution to Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan



pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, yaitu ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan.

Peran pemerintah dalam pembiayaan UMKM ini ada pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit. Namun, dana kredit seluruhnya berasal dari berbagai bank yang ditunjuk sebagai pelaksana.

Selain itu pemerintah juga berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim kredit, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

Di bidang peningkatan ekonomi kerakyatan, BUMN menjalankan program inklusi keuangan, melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM. Selama ini bank BUMN sangat aktif terlibat dalam penyaluran kredit-kredit kecil dengan dukungan asuransi BUMN yaitu PT. Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo, khususnya dalam penjaminan KUR.

Kebijakan pendanaan melalui penyaluran KUR tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi para pengusaha ekonomi lemah dan UMKM pada kredit bank/non bank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Menengah). Various Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) financing launched by the government are associated with economic development program and task in certain business sectors, namely food security, livestock and plantations.

The government's role in financing Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) is on the side of providing the State Revenues and Expenditures Budget Funds (dana APBN) for credit scheme interest subsidies. However, the entire credit fund originates from various banks appointed as executors.

In addition, the government also plays a role in preparing Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) in order to be financed by credit scheme, establishing business policies and priorities that will receive credit, provide guidance and assistance during credit period, and facilitate relationship between Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) and other parties.

In the area of increasing people's economy, BUMN (State-Owned Enterprise) executes financial inclusion program, through the distribution of People's Business Credit program (KUR) for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). So far, BUMN (State-Owned Enterprise) bank has been actively involved in channeling small credits with the support of BUMN (State-Owned Enterprise) insurance, namely PT. Askrindo (Persero) and Perum Jamkrindo, especially in the guarantee of People's Business Credit Program (KUR/Kredit Usaha Rakyat).

Financing policy through the distribution of People's Business Credit Program (KUR/Kredit Usaha Rakyat) is aimed at expanding financing sources and facilitating weak economic entrepreneurs and Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) on bank/non-bank credit, increase financing institution and expanding networks, provide convenience to obtain financing and help Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)



to obtain financing and other financial services/products through the government's guarantee.

MEKAAR

Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera alias Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok (beranggotakan 10-30 orang) bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha super mikro melalui pembiayaan modal usaha tanpa agunan (plafon Rp2-5 juta) dengan metode kelompok dan sistem tanggung renteng. Dengan bantuan modal dari Mekaar, perempuan prasejahtera dapat memanfaatkan keterampilan dan waktunya untuk menjalankan usaha super mikro. Hasil usaha akan meningkatkan pendapatan, pendidikan anak dan kesehatan, tabungan, aset dan kesejahteraan keluarga. Terbukti, perempuan dalam keluarga bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan jika diberi kesempatan dan dukungan modal untuk berusaha (entrepreneur).

MEKAAR

Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera in other words Mekaar is a group-based empowerment service (with 10-30 members) for the underprivileged women as super micro businesswomen through venture capital financing without collateral (ceilings of IDR 2-5 million) with the group method as well as jointly and personally liable. With an assistance from Mekaar, underprivileged women can utilize their skills and time to implement a super micro business. The business result will increase revenue, children's education and health, savings, assets and family welfare. Evidently, women in the family can overcome unemployment and poverty if given the opportunity and capital support to do business (entrepreneur).

Manfaat Mekaar dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pra-sejahtera



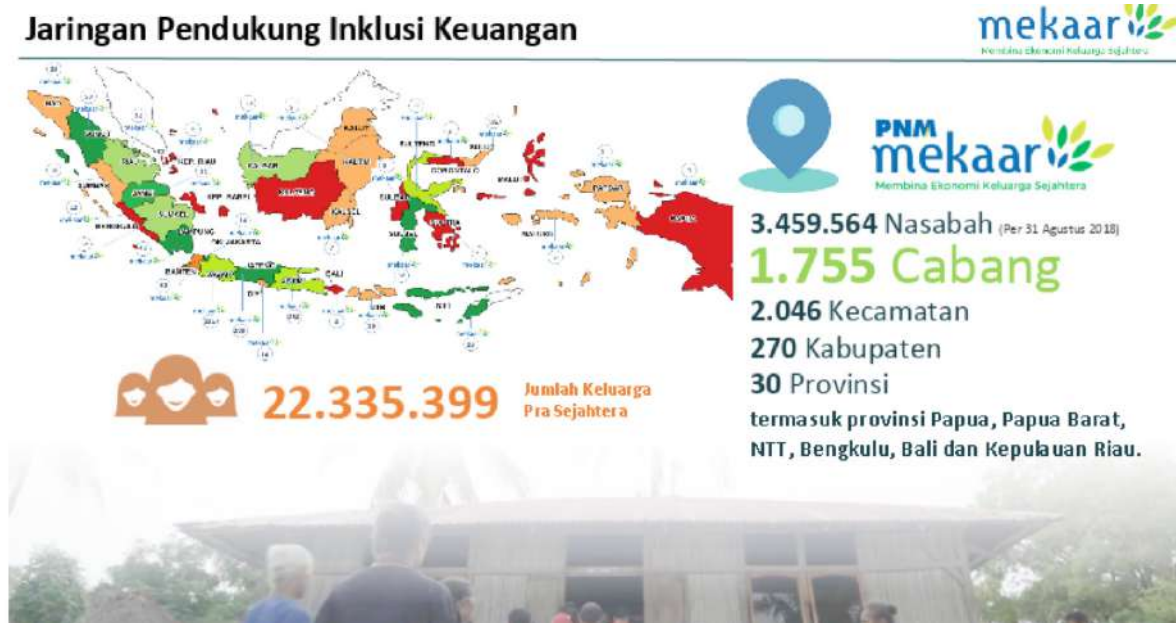
Kementerian BUMN menugasi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, untuk membantu Pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan kaum perempuan prasejahtera. BUMN hadir untuk terus memberikan dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mekaar PNM merupakan wujud nyata

The Ministry of BUMN (State-Owned Enterprise) assigns PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) or PNM to assist the Government in alleviating poverty through the empowerment of underprivileged women. BUMN (State-Owned Enterprise) is present to continue supporting improvement of the society's welfare. Mekaar PNM is a real

keberpihakan pemerintah bagi masyarakat kecil dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, program Mekaar PNM sudah berada di hampir pelosok Nusantara dengan melibatkan ibu-ibu dari keluarga prasejahtera.

manifestation of the government's partisanship for small societies in order to increase economic growth. Currently, the program of Mekaar PNM is already in almost all Archipelago corners involving ladies from underprivileged families.

Jaringan Pendukung Inklusi Keuangan



Mekaar memberikan peminjaman modal serta penanaman nilai penting bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya, disiplin dalam kehadiran disetiap pertemuan dengan kelompok dan juga mengangsur pinjaman serta kerja keras untuk terus mengembangkan usahanya.

Mekaar provides capital loans as well as planting important values for each customer to be honest in implementing their business, discipline in attendance at each meeting with the group and also repay the loan and work hard to continue developing the business.

ULaMM Unit Layanan Modal Mikro, dan pemberdayaan UMK dengan Pembiayaan dan Program Pengembangan Kapasitas Usaha Sasarannya adalah meningkatkan kapasitas dan permodalan usaha UMK Manfaat yang diharapkan adalah penyertaan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan daya saing usaha sektor UMK.

ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) and the empowerment of Minimum Wages (UMK/Upah Minimum Kota atau Kabupaten) with Financing and Business Capacity Development Program. The Target Business capacity is to increase the capacity and capital of Minimum Wages (UMK/Upah Minimum Kota atau Kabupaten) business. The expected benefits are the inclusion of manpower; improvement of value added and improvement of business competitiveness in Minimum Wages (UMK/Upah Minimum Kota atau Kabupaten) sector.



ULaAM

Unit Layanan Modal Mikro alias ULAMM bertujuan untuk membantu usaha mikro dan kecil agar terus berkembang sekaligus mempercepat kemajuan usahanya. Dukungan tersebut meliputi pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan maupun pengelolaan keuangan dan akses pasar. Sasarannya adalah meningkatkan kapasitas dan permodalan usaha UMK. Manfaat yang diharapkan adalah penyertaan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan daya saing usaha sektor UMK.

Melalui pendekatan kluster sektor usaha dalam membiayai UMK, sasaran ULaMM mencakup antara lain kluster makanan tradisional, perajin tas, sepatu dan aksesoris, perajin logam hingga kluster peternak unggas. Dengan asumsi setiap usaha peminjam merekrut tiga orang, maka ULaMM ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 1,2 juta orang dan penerima manfaat sebanyak lima juta orang.

Sejak diluncurkan pada tahun 2008, ULAMM sampai dengan Desember 2018 secara akumulasi telah melayani 302.131 nasabah dan menyalurkan pinjaman sebesar Rp22,38 triliun. ULAMM mengembangkan gerai layanan di bawah satu atap atau "one stop shopping" bagi pengusaha mikro dan kecil dengan memberikan berbagai dukungan teknis guna membantu mempercepat usahanya berkembang. ULAMM memiliki beberapa keunggulan, antara lain: persyaratan yang mudah dan prosedur yang jelas, angsuran ringan yang disesuaikan dengan kemampuan, jaringan yang luas tersebar di seluruh Indonesia (688 kantor layanan), serta layanan yang ramah dan profesional.

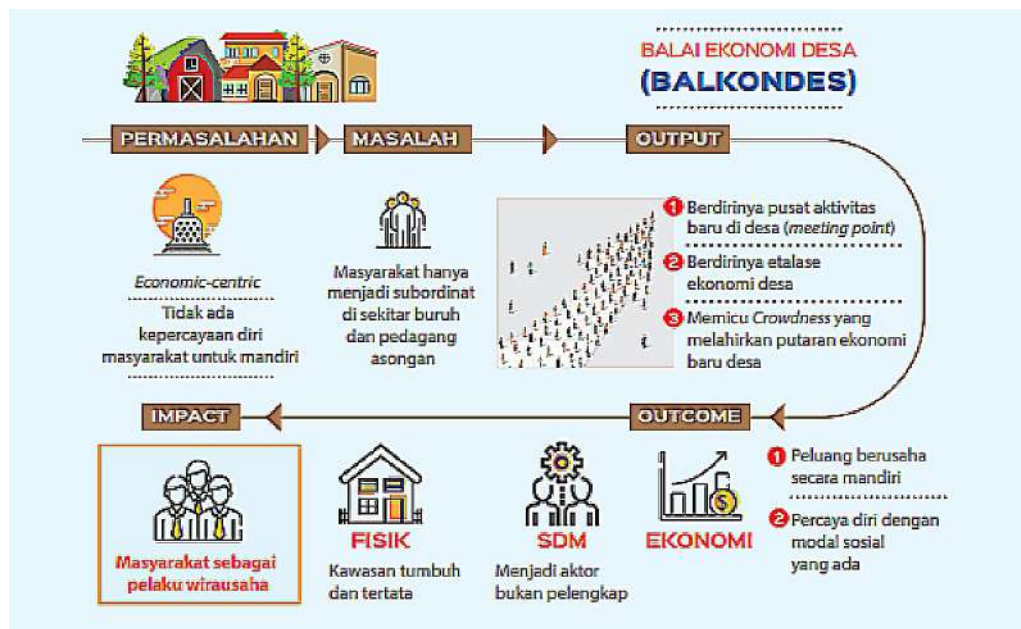
ULaAM

ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) in other words ULAMM aims to assist micro and small businesses in order to continue to grow while accelerating the progress of their business. Such support includes consultation provision, training, mentoring and financial management and market access. The target is to increase the capacity and capital of the Minimum Wages (UMK/Upah Minimum Kota atau Kabupaten) business. The expected benefits are manpower inclusion, improvement of value added and improvement to business competitiveness in Minimum Wages (UMK/Upah Minimum Kota atau Kabupaten) sector.

Through a business sector cluster approach in financing Minimum Wages (UMK/Upah Minimum Kota atau Kabupaten) sector, the ULaMM target includes among others traditional food clusters, bag, shoe and accessory craftsmen, metal craftsmen to poultry breeders clusters. Assuming that each business borrower recruits three people, thus ULaMM is targeted to be able to create employment opportunities for 1,2 million people and beneficiaries amounting to five million people.

Since its launch in 2008, ULAMM as per December 2018, as accumulated has served 302,131 customers and distributed loans of Rp22, 38 trillion. ULAMM develops one-stop shopping for micro and small entrepreneurs by providing various technical supports in order to help accelerate their business development. ULAMM has several advantages, among other: easy requirements and clear procedures, light installments adjusted with capabilities, extensive networks spread throughout Indonesia (688 service offices), and friendly and professional services.

BALKONDES



Balai Ekonomi Desa atau Balkondes merupakan bentuk dukungan BUMN untuk menggenjot kunjungan wisatawan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui Balkondes, masyarakat, khususnya desa, akan dipersiapkan untuk menyambut serta memberikan pelayanan maksimal bagi para wisatawan yang datang ke daerahnya berupa hospitality dan pertunjukan seni budaya serta produk lokal. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada perbaikan ekonomi masyarakat sekitar.

Balai Ekonomi Desa or Balkondes is a form of BUMN (State-Owned Enterprise) support to boost tourist visits in Indonesia. This is in line with the program launched by the Indonesian government. Through Balkondes, the society, specifically villages, will be prepared to welcome and provide maximum service for tourists who come to their area in the form of hospitality and performances of cultural arts and local products. An increase in the number of tourist visits is expected to have a positive impact on the economic improvement of the surrounding society.





Balai Ekonomi Desa atau Balkondes merupakan bentuk dukungan BUMN untuk menggenjot kunjungan wisatawan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui Balkondes, masyarakat, khususnya desa, akan dipersiapkan untuk menyambut serta memberikan pelayanan maksimal bagi para wisatawan yang datang ke daerahnya berupa hospitality dan pertunjukan seni budaya serta produk lokal. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada perbaikan ekonomi masyarakat sekitar.

Balkondes is a form of synergy built by BUMN (State-Owned Enterprise) to support the government's program, namely to realize 10 Leading Tourism Destinations with a target of 20 million foreign tourists in 2019. Through Balkondes, BUMN (State-Owned Enterprise) forms a number of homestays and its management supervisory through one village one BUMN program which has been executed in 20 villages around Borobudur Temple. The society is prepared to welcome tourists visiting the area. This program implemented by 20 BUMNs (State-Owned Enterprise) is expected to give a positive impact on improving the society's economic level.



RUMAH KREATIF BUMN

Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara membangun Rumah Kreatif BUMN (RKB) sebagai rumah bersama untuk berkumpul, belajar dan membina para pelaku UKM menjadi UKM

As an effort to empower the people's economy, specifically for micro, small and medium enterprises (UMKM/Usaha Mikro Kecil dan Menengah), the Ministry of BUMN (State-Owned Enterprise) along with state-owned companies built Rumah Kreatif BUMN (RKB) as a shared house to gather, study and build small and medium enterprises

Indonesia yang berkualitas. Rumah Kreatif BUMN akan mendampingi dan mendorong para pelaku UKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UKM dalam hal Peningkatan kompetensi, Peningkatan Akses Pemasaran dan Kemudahan akses Permodalan.

into quality Indonesian small and medium enterprises (UMK/Usaha Kecil dan Menengah). Rumah Kreatif BUMN will assist and encourage small and medium enterprises (UMK/Usaha Kecil dan Menengah) in responding the main challenges of small and medium enterprises (UMK/Usaha Kecil dan Menengah) business development in terms of competency improvement, Increasing Access to Marketing and Facilitating Capital access.



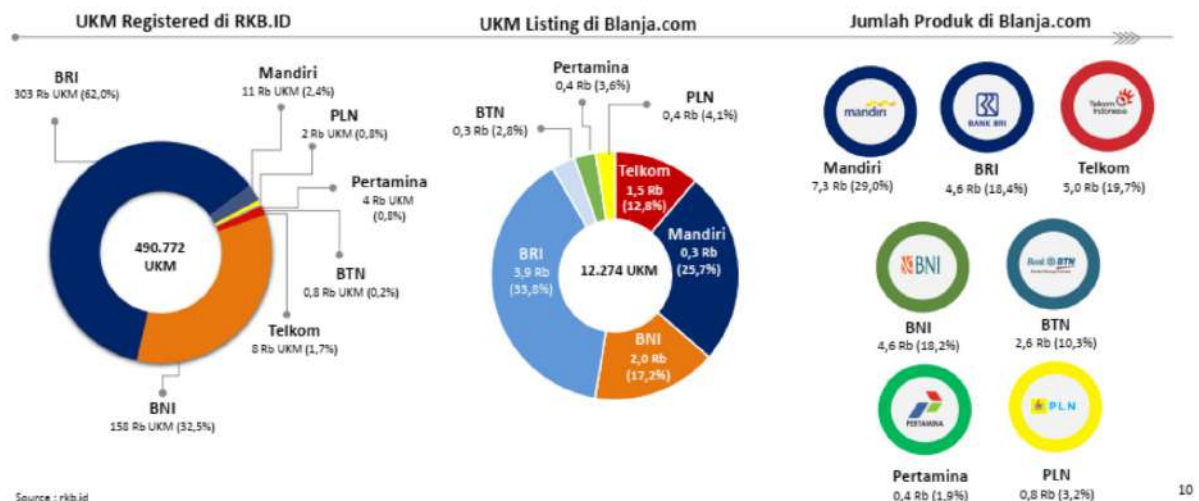
Executive Summary

Data UKM di Tiap BUMN (1/2)



UKM terdaftar di RKB.id sebesar **490.772 Ribu** UKM dimana baru 3% dari total UKM Registered atau **12.274 Ribu** UKM yang listed di Blanja.com.

Hal ini menunjukkan perlu segera dilakukan percepatan pembinaan Go Modern dan Go Digital sehingga dapat meningkatkan UKM yang listing di Blanja.com

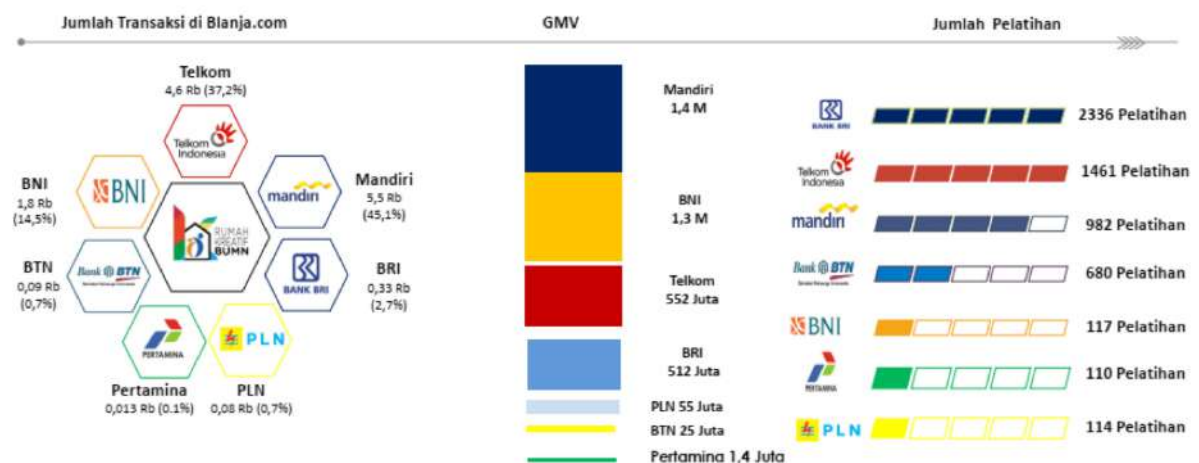


Executive Summary

Data UKM di Tiap BUMN (2/2)



Transaksi UKM RKB di Blanja.com **12.773 Ribu Transaksi** dengan **total GMV 4.042 M** memberi indikasi pertumbuhan yang baik





Melalui program RKB, UMKM di dorong untuk merubah pola bisnis dari konvensional menjadi modern (go modern), kemudian menuju digital (go digital), dan terus menuju penjualan secara online (go online) yang pada akhirnya akan menuju global (go global). Rumah Kreatif BUMN sendiri merupakan wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk Digital Economy Ecosystem melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri. Dalam program ini, pelaku UKM mendapatkan pelatihan sesuai dengan modul yang dibutuhkan, antara lain Bisnis dan Keuangan, Permodalan, Segmentasi dan Target Pasar, Proses Produksi dan Pemasaran serta Total Quality Management.

Through RKB program, micro, small and medium enterprises (UMKM/Usaha Mikro Kecil dan Menengah) are encouraged to change business patterns from conventional into modern (go modern), then goes digital (go digital), and keeps on going online (go online) sales which will eventually aims for global (go global). Rumah Kreatif BUMN itself is a forum for the steps of BUMN (State-Owned Enterprise) collaboration in forming Digital Economy Ecosystem through small and medium enterprises (UMK/Usaha Kecil dan Menengah) development to increase the capacity and capability of small and medium enterprises (UMK/Usaha Kecil dan Menengah) itself. In this program, the small and medium enterprises (UMK/Usaha Kecil dan Menengah) obtains training in accordance with the required modules, including Business and Finance, Capital, Segmentation and Market Target, Production and Marketing Processes and the Total Quality Management.

RUMAH PANGAN KITA

Rumah Pangan Kita alias RPK adalah program kerja sama antara Perum BULOG dan masyarakat, di mana warga yang menjadi agen RPK akan mendapatkan suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung.

Rumah Pangan Kita in other words RPK is a collaboration program between the State-Owned of Logistic Affairs Board (Perum BULOG) and the society, where residents who became RPK agent will obtain food supplies in the form of rice, granulated sugar, cooking oil and flour.

Program RPK merupakan salah satu wujud dari upaya Perum BULOG untuk menstabilkan harga pangan dan juga merupakan perwujudan fungsi Perum BULOG untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau.

The RPK program is one manifestation to the State-Owned of Logistic Affairs Board (Perum BULOG) to stabilize food prices and is also a function manifestation of the Logistic Affairs Board (Perum BULOG) to provide affordable foods.



		Individu Rumah Tangga	Kedai/Toko	Koperasi/Ormas/ Perusahaan
1	Memiliki lahan / tempat untuk outlet penjualan	✓	✓	✓
2	Mengisi Formulir pendaftaran / kesepakatan kerjasama	✓	✓	✓
3	Foto Copy KTP/ SIM dan KK	✓	✓	✓
4	Melakukan Pembelian awal komoditas	✓	✓	✓
5	Izini usaha mikro dan kecil (IUMK) dari kecamatan	✓	✓	✗
6	Fotocopy SIUP dan TDP	✗	✗	✓



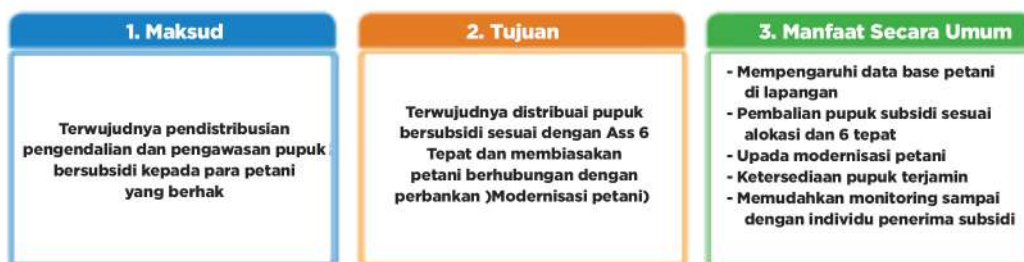
Selain untuk tujuan komersil, RPK didirikan sebagai jaringan kegiatan stabilisasi pangan (beras, gula, minyak goreng, dan lain-lain) terutama saat paceklik atau suplai berkurang di masyarakat. Pada saat harga pangan mengalami fluktuasi tinggi, Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk melakukan operasi pasar komoditas pangan tertentu. Melalui Jaringan Sahabat RPK yang tersebar di seluruh Indonesia, pendistribusian dan stabilisasi harga pangan akan lebih mudah, cepat, dan efektif bagi tercapainya stabilisasi harga sepanjang tahun.

In addition to commercial purposes, RPK was established as food stabilization activity network (rice, sugar, palm oil, etc.), especially when famine or supply is reduced in the society. When food prices experience high fluctuations, the Government assigns Logistic Affairs Board (Perum BULOG) to implement certain food commodity market operations. Through the network of Sahabat RPK spreads throughout Indonesia, the distribution and stabilization of food prices will be easier, faster and more effective to achieve price stabilization throughout the year.

KARTU TANI

Upaya peningkatan ketahanan pangan tidak terlepas dari bagaimana BUMN meningkatkan kesejahteraan Petani, salah satu peran BUMN dalam memperkuat ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, keterjangkauan dan kestabilan harga, serta kualitas beberapa komoditas utama, seperti beras, minyak goreng, dan gula.

Efforts to improve food security cannot be separated from how BUMN (State-Owned Enterprise) improve the welfare of farmers, one of BUMN (State-Owned Enterprise) role in strengthening food security is ensuring the availability of basic needs, affordability and price stability, as well as quality of several key commodities, such as rice, cooking oil and sugar.



Untuk semakin memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, BUMN menggagas diluncurkannya Kartu Tani yang mana dengan kartu tersebut para petani dapat kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan pembiayaan terkait dengan aktivitas pertanian dan untuk biaya hidup selama masa musim tanam. Kehadiran Kartu ini mampu mengintegrasikan sistem untuk kepentingan petani untuk mengetahui data sektor pertanian mulai dari tanam, pemeliharaan, pasca panen, dan pembiayaan.

In order to further strengthen food security in Indonesia, BUMN (State-Owned Enterprise) initiated the launch of Kartu Tani in which with Kartu Tani the farmer gets convenience in obtaining financial needs related to agricultural activities and for living costs during the planting season. The presence of this Card is able to integrate systems for the farmer's interest to find out agricultural sector data starting from planting, maintenance, post-harvest, and financing.

Manfaat Kartu Tani





Melalui Kartu Tani, para petani bisa mendapat kemudahan, seperti akses pembiayaan dengan perbankan di bawah BUMN, mendapat kemudahan kredit murah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau. Selain itu, kartu ini juga dapat memfasilitasi kemudahan sertifikasi tanah melalui skema Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kartu Tani tersebut akan berisi data petani baik lahan maupun masa tanam sehingga akan diketahui dengan mudah kapan para petani akan memanen. Kartu Tani tersebut merupakan bagian sinergi antara bank-bank BUMN (Himbara) dengan Perum BULOG, Perhutani, PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) atau PIHC.

Through Kartu Tani, farmers can obtain facility, such as finance access with banking under BUMN (State-Owned Enterprise); obtain cheap credit facility through the scheme of people's business credit program (KUR/ Kredit Usaha Rakyat) with affordable interest. In addition, this card can also facilitate the ease of land certification through Prona scheme of the National Land Agency (BPN/ Badan Pertanahan Nasional). Kartu Tani will consists of farmer's data both land and planting period so that it will be known easily when farmers will harvest. Kartu Tani is part of the synergy between banks of BUMN (State-Owned Enterprise) (Himbara) with the Logistic Affairs Board Administration (Perum BULOG), Forestry, PT Sang Hyang Seri (Persero), and PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) or PIHC.



Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, multifungsi. Kartu Tani ini juga bisa digunakan sebagai database para petani sehingga petani dapat mengetahui kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (saprota) bersubsidi/non-subsidi, termasuk distribusi pupuk.

Kartu Tani is an integrated banking services access means which function as savings, transactions, loan distribution to subsidy cards (e-wallet). The advantage of this Kartu Tani includes single entry data, online tiered, transparent, multifunctional validation processes. This Kartu Tani can also be used as farmer's database so that farmers can know the certainty to the availability of a subsidized/ non-subsidized agricultural production (saprota/sarana produksi pertanian), including fertilizer distribution.



HUTAN SOSIAL

Di Indonesia terdapat 25.863 desa yang berada di dalam kawasan hutan, di mana lebih dari 70 persen di antaranya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. Terdapat sebanyak 10,2 Juta penduduk belum sejahtera di kawasan hutan dan tanpa aspek legal mengelola sumber daya hutan. Atas dasar tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar hutan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Maka dari itu, dicanangkanlah Program Perhutanan Sosial Tujuan program Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan hutan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Masyarakat dapat mengelola perkebunan tanaman dalam area yang diajukan, yang hasil panen dari perkebunan tersebut dapat kemudian dijual

SOCIAL FOREST

In Indonesia there are 25,863 villages which are inside the forest area, where more than 70 percent of it depend on forest resources. There are as many as 10,2 million people who have not prospered in the forest area and without legal aspects of managing forest resources. On this basis, President Joko Widodo requested that forests should bring prosperity to the society in and around the forest area. Therefore, the Social Forestry Program was launched.

The aim of Social Forestry program is to improve the society's welfare through patterns of forest empowerment and continue to be guided by sustainability aspect. The society can manage plantation in the proposed area, which yields from plantation can be later sold by the society to fulfill their daily economic needs.

oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat. Dalam Program Perhutanan Sosial ini, terdapat sinergi antar BUMN sebagai bentuk dari Komitmen BUMN hadir untuk Negeri. Keseluruhan kegiatan dan tata laksana Perhutanan Sosial ini mendapat dukungan penuh dari BUMN sesuai bidangnya yang bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam bisnis proses terintegrasi.

The concept of social forestry will provide legal aspects of the society planting in society forests. In this Social Forestry Program, there is a synergy between BUMNs (State-Owned Enterprise) as form of 'BUMN (State-Owned Enterprise) Presents for the Country'. The entire activities and management of Social Forestry obtains full support from BUMN (State-Owned Enterprise) in their field which collaborates with relevant Ministries and Institutions in an integrated business process.



Manfaat Perhutanan Sosial bagi Masyarakat:

1. Mendapat kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap;
2. Memperoleh akses sumber pendanaan KUR perbankan;
3. Mendapatkan kepastian pasar/serapan hasil produksi;
4. Mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan;
5. Berpeluang mendapatkan subsidi Saprotan;
6. Mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2Ha per orang);

Benefits of Social Forestry for the Society:

1. Obtain certainty concerning location of an arable land and a period of cultivate rights;
2. Obtain the access of KUR banking financing sources;
3. Obtain certainty to market/absorption of production results;
4. Obtain intensive development from relevant department as well as banking;
5. Having a chance to obtain Saprotan subsidies;



7. Pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti kepada penggarap. Adapun realisasi Program Perhutanan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagaimana yang terlampir pada tabel di bawah ini:

PADAT KARYA TUNAI

Program Padat Karya Tunai atau PKT merupakan program yang mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal desa. Tujuan program PKT adalah untuk membangun dan menyediakan sarana serta prasarana infrastruktur lingkungan yang menunjang tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi daerah tersebut dengan melibatkan masyarakat setempat.

Sampai saat ini, jumlah dana yang tersalurkan untuk keseluruhan program Padat Karya Tunai sebesar Rp 3,37 miliar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 7.523 tenaga kerja. Kegiatan PKT, dilakukan dengan cara/metode berupa:

1. BUMN membuat perencanaan yang mencakup tujuan, struktur organisasi proyek, waktu pelaksanaan, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan, design pekerjaan, Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan waktu pembayaran upah kepada masyarakat.
2. BUMN melakukan koordinasi dengan Dinas atau perangkat daerah setempat.
3. BUMN memastikan bahwa lokasi PKT tidak menerima bantuan dana APBN/APBD.
4. BUMN harus memastikan penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan di sekitar tempat kerja
5. Kriteria pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam kelompok PKT apabila pekerjaan tersebut telah memperhitungkan rasio penggunaan tenaga kerja yang melibatkan minimal 300 masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan KTP. Pimpinan proyek memastikan bahwa masyarakat yang terlibat memang berasal dari warga setempat.

6. Obtain a more economical land management area (2Ha per person);

7. Better and more definite income to cultivators. The realization of Forestry Program until 2017 is as attached on the table below:

PADAT KARYA TUNAI

Padat Karya Tunai Program or PKT Program is a program that prioritizes local resources, local manpower and local village technology. The aim of PKT program is to build and provide infrastructure as well as facilities of environment infrastructure which support the economic activity growth of such area by involving local society.

Until now, an amount of funds disbursed for the entire Padat Karya Tunai program amounting to IDR 3, 37 billion with manpower amounting to 7,523 workers. PKT activities are implemented by means/methods in the form of:

1. BUMN (State-Owned Enterprise) create plans including objective, project organizational structure, time of implementation, number of manpower involved, design of work, Details of Budget Costs (RAB) and time of wages payment to the society.
2. BUMN (State-Owned Enterprise) coordinates with the local service or equipment.
3. BUMN (State-Owned Enterprise) ensure that PKT location does not receive APBN (State Revenues and Expenditures Budget)/APBD (Regional Revenues and Expenditures Budget) funds.
4. BUMN (State-Owned Enterprise) shall ensure the handling of occupational safety and health construction (K3) for everyone who is in the workplace related to the transfer of raw materials, construction work equipment usage, production processes and environment around the workplace.
5. Working criteria which can be included in the PKT group if such work has taken into account the manpower usage ratio involving a minimum of 300 surrounding societies as evidenced by the PKT. The project leader ensures that the society involved is indeed from local residents.



6. Sebelum PKT dimulai, BUMN melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. BUMN memberikan pendidikan/pelatihan singkat terkait skills untuk melakukan PKT.
 - b. BUMN menunjuk pimpinan proyek/mandor yang berasal dari masyarakat sekitar yang mempunyai pengalaman sebagai pimpinan proyek/mandor.
 - c. BUMN menunjuk pengawas yang berasal dari masyarakat dengan rasio satu pengawas memantau 20 pekerja.
 7. Upah untuk masyarakat menggunakan standar upah di wilayah tersebut.
 8. Pembayaran upah kepada masyarakat dilakukan oleh BUMN yang mempunyai cabang di wilayah PKT. Apabila tidak ada BUMN di wilayah tersebut, maka pembayaran dilakukan oleh masyarakat setempat yang ditunjuk sebagai bendahara atau pengelola keuangan. Pembayaran dilakukan atas dasar laporan pelaksanaan pekerjaan dari pengawas. Pada saat pembayaran dibuat bukti tanda terima penerimaan upah dan dikumpulkan sampai dengan akhir pengerjaan.
 9. BUMN menyediakan bahan baku dan material bangunan, sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing BUMN.
 10. Dalam hal pembangunan, BUMN diwajibkan untuk menggunakan tenaga masyarakat sekitar, tidak diperkenankan menyewa pihak ketiga (kontraktor/tenaga lainnya) dalam melakukan pembangunan.
 11. Setelah pekerjaan selesai, pimpinan proyek membuat laporan yang mencakup kualitas, waktu pelaksanaan, dokumentasi (foto dan video) sebelum dan sesudah, penggunaan biaya termasuk bukti transaksi.
6. Before PKT begins, BUMN (State-Owned Enterprise) implement the following matters:
 - a. BUMN (State-Owned Enterprise) provides short education/training related to skills for conducting PKT.
 - b. BUMN (State-Owned Enterprise) designate project leaders/foremen that comes from surrounding societies with experience as project leaders/foremen.
 - c. BUMN (State-Owned Enterprise) appoints supervisors from the society with ratio of one supervisor to monitor 20 workers.
 7. Wages for the society using wage standards in such region.
 8. Payment of wages to the public is implemented by BUMN (State-Owned Enterprise) which have branches in the PKT area. If there is no BUMN (State-Owned Enterprise) in the area, thus payment implemented by the local society appointed as treasurer or financial manager. Payment is implemented based on reports concerning work implementation of the supervisor. When payment is made, proof of receipt on wages is received and collected until the end of work.
 9. BUMN (State-Owned Enterprise) provides raw material and building materials, in accordance with the applicable SOP in each BUMN (State-Owned Enterprise).
 10. In terms of development, BUMN (State-Owned Enterprise) are required to use the power of surrounding society, not allowed to hire third parties (contractors/other personnel) in implementing development.
 11. After work is completed, the project leader creates report which includes quality, implementation time, documentation (photos and videos) before and after, the use of costs including transaction proof.

SISWA MENGENAL NUSANTARA (SMN)

Siswa Mengenal Nusantara (SMN) adalah program pertukaran pelajar yang bertujuan untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini kepada siswa SMA/SMK/SLB. Keragaman kekayaan Nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui interaksi langsung siswa dengan komponen Pemerintahan dan masyarakat di provinsi yang dikunjungi.

Peserta kegiatan adalah Pelajar SMA/SMK/SLB kelas XI sejumlah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi tersebut

Siswa Mengenal Nusantara (SMN) is a student exchange program which aims to plant a sense of pride and an early love to the homeland for students of Senior High School/Vocational High School/Special School Education (SMA/SMK/SLB). The diversity of archipelago's wealth and regional potential is introduced through direct interaction of students with components of Government and society in the visited province.

Participants for activity are class XI of Senior High School/Vocational High School/Special School Education Students in some Districts and Cities at the Province (1



(1 orang dari setiap Kabupaten/Kota) dan juga melibatkan 3 orang yang merupakan siswa penyandang disabilitas dan bersekolah di SLB. Peserta akan didampingi dari Dinas Pendidikan Provinsi yang ditunjuk (1 orang), Guru Teladan Tingkat Provinsi (2 orang) dan perwakilan BUMN PIC asal.

Dalam rangkaian kegiatan ini, disampaikan antara lain (1) Wawasan Sosial Budaya berisi materi pengenalan tentang aspek budaya, pariwisata dan juga tatanan sosial kemasyarakatan di daerah setempat. (2) Wawasan Pendidikan berisi materi pengenalan tentang sistem pendidikan berkualitas yang diselenggarakan oleh sekolah setempat baik sekolah umum (SMU), sekolah khusus (SMK), universitas maupun sarana pendidikan lain yang diselenggarakan atas inisiatif dan swadaya masyarakat. (3) Wawasan Entrepreneurship berisi materi pengenalan tentang UKM/Koperasi di daerah pilihan, mulai dari operasional sampai pada produk-nya. (4) Wawasan pengenalan BUMN berisi materi pengenalan tentang BUMN setempat, mulai dari operasional sampai pada produk-nya, dengan tujuan siswa/i dapat mengenal BUMN. (5) Wawasan Nusantara berisi materi mengenai bela negara (radikalisme, narkoba, patriotisme & cinta tanah air, kesadaran berbangsa, keberagaman, penetrasi budaya asing dan teknologi, Pancasila dan ideologi) yang dilakukan selama 1/2 hari berkoordinasi bersama Kementerian Pertahanan di masing-masing wilayah dan team building selama 1 hari yang berkoordinasi dengan TNI setempat.

Mulai dari Tahun 2015 sampai dengan saat ini, sudah ada 3.685 orang siswa dan guru yang mengikuti kegiatan Siswa Mengenal Nusantara.

Program Pengembangan Taman Bacaan

Pembangunan taman bacaan masyarakat oleh PT Balai

Pustaka dilatarbelakangi oleh kondisi ketersediaan taman bacaan di Indonesia masih sangat minim. Dari 81.253 desa di Indonesia hanya 22 % yang memiliki Taman Bacaan

person from each Regency/City) and also involve 3 persons who are students with disabilities and attending Special School Education. Participants will be accompanied by the designated Provincial Education Service (1 person), Provincial Level Exemplary Teachers (2 persons) and an initial PIC of BUMN (State-Owned Enterprise) representative.

In this series of activities, it was conveyed, among others: (1) Socio-cultural Insights contains introductory material concerning aspects of culture, tourism and also the social order within local area. (2) Educational Insight contains material concerning the introduction of quality education systems organized by local schools namely Public High School (SMU/Sekolah Menengah Umum), Vocational High School (SMK/Sekolah Menengah Kejuruan), universities and other educational facilities organized on the initiative and self-help of the society. (3) Entrepreneurship Insights contains introductory material concerning Small and Medium Enterprises (UKM/Usaha Kecil dan Menengah)/ Cooperatives in selected areas, from operational to product. (4) BUMN (State-Owned Enterprise) Introduction Insights contains introductory material concerning local BUMN (State-Owned Enterprise), from operational to product, with the aim of students being able to get to know BUMN (State-Owned Enterprise). (5) Archipelago insight contains material concerning state defense (radicalism, drugs, patriotism & love for the country, national awareness, diversity, penetration of foreign culture and technology, Pancasila and ideology) implemented for 1/2 day in coordination with the Ministry of Defense in each region and team building for 1 day which coordinates with the local Indonesian Army TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Starting from 2015 to the present time, there have been 3,685 students and teachers who participated in the Siswa Mengenal Nusantara activities.

Reading Park Development Program

Reading Park Development for Society by PT Balai Pustaka

is motivated by conditions that the availability of reading parks in Indonesia is still very minimal. From 81,253 villages in Indonesia, only 22% have Reading Parks with a very simple condition. Thus, out of 212,291 schools in



dengan kondisi masih sangat sederhana. Kemudian, dari 212.291 sekolah di Indonesia, baru 18 % yang memiliki perpustakaan dengan jumlah buku yang terbatas. Dan Jika merujuk pada Indeks minat baca di Indonesia berdasarkan hasil riset Unesco, maka Indonesia tergolong kategori sangat rendah. Dari 1000 orang hanya ada 1 orang yang memiliki minat baca.

Adapun tujuan Program Pengembangan Taman Bacaan ini yaitu:

1. Membangun masyarakat yang berpengetahuan dan berketrampilan
2. Meningkatkan minat baca masyarakat
3. Bagi perusahaan dapat meningkatkan Citra Perusahaan.

Sampai dengan saat ini, PT Bali Pustaka telah berhasil membangun 410 seluruh taman bacaan di Indonesia. Dan pada tahun 2019 akan diupayakan bisa mencapai 1.000 taman bacaan.

Indonesia, only 18% had a library with limited number of books. And if it refers to the index of reading interest in Indonesia based on research results by Unesco, Indonesia is classified as a very low category. Out of 1000 people there is only 1 person who has interest in reading.

The objectives of the Reading Park Development Program are as follows:

1. Building a knowledgeable and skilled society
2. Increasing society's reading interest
3. For companies can improve the company's image.

Until now, PT Bali Pustaka has successfully built 410 reading parks in Indonesia. And in 2019 it will be endeavored to reach 1,000 reading parks.



Peningkatan Nilai BUMN Melalui Pembentukan Holding Sektoral

Increase of the State-Owned Enterprise Value through Sectorial Holding Establishment



Dalam rangka meningkatkan kapasitas BUMN, efisiensi, mendorong potensi BUMN untuk berkontribusi optimal dan membantu penyelesaian berbagai persoalan BUMN terutama terkait kemampuan financial dan fungsi koordinasi, maka Kementerian BUMN terus mendorong dan menjajaki pembentukan holding sektoral BUMN. Sampai dengan saat ini, Kementerian BUMN telah membentuk beberapa Holding BUMN pada beberapa sektor yaitu BUMN sektor Penyediaan Pupuk di bawah PT Pupuk Indonesia Holding Company, BUMN di sektor penyediaan semen di bawah PT Semen Indonesia, BUMN sektor Perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III, Holding sektor Kehutanan di bawah Perum Perhutani.

Sebagai wujud pelaksanaan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam, maka pembentukan holding BUMN

In order to increase the State-Owned Enterprise's capacity, efficiency, encourage the potential of State-Owned Enterprise to contribute optimally and help resolve various State-Owned Enterprise problems, specifically related to financial capabilities and coordination functions, the Ministry of State-Owned Enterprise continues to encourage and explore the establishment of State-Owned Enterprise sectorial holding. Until now, the Ministry of State-Owned Enterprise has established several State-Owned Enterprise holding companies in several sectors, namely the State-Owned Enterprise for Fertilizer Provision sector under PT Pupuk Indonesia Holding Company, the State-Owned Enterprise for cement supply sector under PT Semen Indonesia, the State-Owned Enterprise for Plantation sector under PT Perkebunan Nusantara III, Forestry sector holding under Perum Perhutani.

As implementation realization of Article 33 of the (1945) Constitution of the Republic of Indonesia in order to increase the value added of natural resources,

Industri Pertambangan adalah langkah strategi yang dapat menjadikan BUMN Industri Pertambangan menjadi “besar, kuat dan lincah”. Pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan juga akan meningkatkan bargaining power, sinergi antar BUMN yang lebih baik, dan pengendalian yang lebih baik dari pemerintah Holding BUMN Industri Pertambangan

Holding BUMN Industri Pertambangan terdiri dari 5 perusahaan, yaitu PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Freeport Indonesia. Holding BUMN Industri Pertambangan akan memiliki diversifikasi hasil tambang utama seperti Nikel, Bauksit, emas, tembaga, timah dan batubara.

the establishment of a Mining Industry State-Owned Enterprise holding is a strategic step that turns Mining Industry State-Owned Enterprise into “large, strong and agile.” The establishment of Mining Industry State-Owned Enterprise holding will also increase bargaining power, better synergy between the State-Owned Enterprise, and better control from the government.

Mining Industry State-Owned Enterprise Holding Mining Industry State-Owned Enterprise Holding consists of 5 companies, namely PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk and PT Freeport Indonesia. Mining Industry State-Owned Enterprise Holding will have diversified main mining



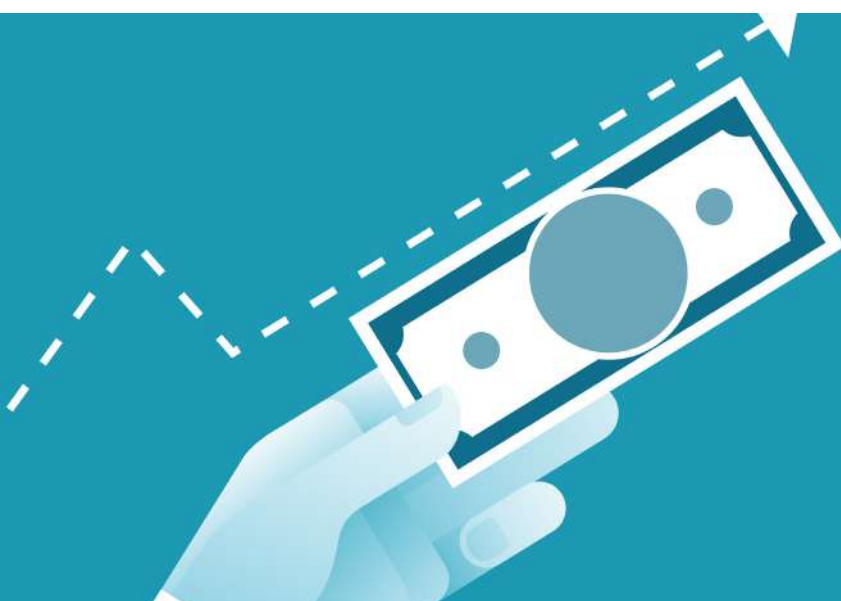


Manfaat pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan antara lain:

1. Peningkatan business scale, dimana setelah restrukturisasi, kapitalisasi pasar holding BUMN Industri Pertambangan menjadi yang ke 5 terbesar di Asia Pasifik (tidak termasuk Republik Rakyat Tiongkok), kapitalisasi pasar perusahaan tambang terbesar di Indonesia, dan menjadi perusahaan tambang terbesar di Asia Tenggara berdasarkan kapitalisasi pasar;
2. Diversifikasi produk dan bisnis, dimana dengan terbentuknya holding BUMN Industri Pertambangan maka holding akan relatif menghadapi siklus harga komoditas sehingga stabilitas kinerja dapat lebih terjaga.
3. Peningkatan posisi keuangan serta perbaikan solvabilitas dan likuiditas, dimana holding BUMN Industri Pertambangan akan memiliki interest coverage ratio sebesar 8,76 kali lebih baik dari pada rata-rata industri dan likuiditas menjadi lebih baik, melebihi rata-rata industri;
4. Terciptanya efisiensi biaya dengan adanya sinergi antara anggota holding, pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Alumunium.

products such as Nickel, Bauxite, gold, copper, tin and coal. The benefits of establishing a Mining Industry State-Owned Enterprise Holding among others are as follows:

1. Increasing business scale, where after restructuring, market capitalizations of Mining Industry State-Owned Enterprise holding is the fifth largest in the Asia Pacific (excluding the People's Republic of China), market capitalizations of the largest mining companies in Indonesia, and the largest mining company in Southeast Asia based on capitalization market;
2. Diversification of products and business, where with the establishment of Mining Industry State-Owned Enterprise holding, the holding will be relatively facing the commodity price cycle so that performance stability can be maintained.
3. Increasing financial position and improving solvency and liquidity, where Mining Industry State-Owned Enterprise holding will have an interest coverage ratio of 8, 76 times better than the industrial average and better liquidity, exceeding the industrial average;
4. Creation of cost efficiency with the existence of synergy between members of the holding, the establishment of Mining Industry State-Owned Enterprise Holding stipulated by Government Regulations of the Republic of Indonesia No. 47 of 2017 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into share capital of PT Indonesia Asahan Alumunium Company (Persero).



MANFAAT EKONOMI SOSIAL

HOLDING BUMN INDUSTRI PERTAMBANGAN



Holding tambang ini terbentuk pada tahun 2017 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk serta seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT Freeport Indonesia.

This mining holding was established in 2017 with the issuance of Government Regulations (PP) No. 47 of 2017 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Indonesia Asahan Aluminum Company (Persero). In this Government Regulation, the transfer of all Series B shares of the Republic of Indonesia to PT Aneka Tambang Tbk Company (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero), and PT Timah Tbk Company (Persero) and all shares of the state of the Republic of Indonesia at PT Freeport Indonesia.

Holding BUMN Minyak dan Gas

Oil and Gas State-Owned Enterprise Holding

Pembentukan Holding BUMN sektor Migas yang melibatkan PGN dan Pertamina bertujuan agar penyediaan

The establishment of Oil and Gas sector State-Owned Enterprise Holding involving PGN and Pertamina aims to



sumber energi berupa gas dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan lebih baik.

Keunggulan Pertamina yang mempunyai kontinuitas suplai gas yang berasal dari domestik maupun impor ditambah jaringan distribusi gas PGN yang luas, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemerintah terutama untuk merealisasikan integrasi pengelolaan gas dalam rangka peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik. Integrasi antara perusahaan yang mempunyai lini bisnis di sektor gas diharapkan dapat mendorong beberapa kunci pertumbuhan bisnis gas di Indonesia, yaitu kelangsungan penyaluran produksi gas hulu nasional, optimalisasi struktur pricing gas serta pengembangan infrastruktur industri gas yang terkoordinasi dengan model pengelolaan gas alam yang terintegrasi dan terkonsolidasi.

Pembentukan holding Migas memberikan dampak positif bagi kedua perusahaan yaitu terciptanya nilai tambah dari sinergi operasional, sinergi capex, dan peningkatan kapasitas investasi. Sinergi operasional tercermin pada meningkatnya laba usaha dan laba bersih holding Migas yang diproyeksikan mencapai USD 11,7 miliar dan USD 5,9 miliar pada tahun 2021. Sinergi capex diperoleh melalui berkurangnya tumpang tindih rencana investasi kedua perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, holding Migas akan meningkatkan kapasitas investasi hingga mencapai USD 15,5 miliar (Nilai Kini) selama 14 tahun ke depan. Total penambahan aset yang dapat diperoleh Pertamina melalui sinergi paska pembentukan holding diproyeksikan mencapai kurang lebih USD 25,3 miliar atau setara dengan Rp 329 triliun.

Manfaat Pembentukan holding Migas, antara lain:

1. Peningkatan efisiensi investasi

Saat ini terjadi tumpang tindih infrastruktur yang dibangun oleh Pertamina dan PGN. Setelah dibentuknya holding, holding Migas mendelegasikan kepada sub-holding gas sebagai representasi dalam pengelolaan gas bumi untuk melakukan kajian atas seluruh infrastruktur yang saat ini dimiliki secara menyeluruh dan juga rencana pengembangan ke depan terutama untuk menghindari pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih atau

provide a better source of energy in the form of gas to be better enjoyed by all Indonesians. Pertamina's superiority, which has a continuous supply of gas from domestic and imported, plus PGN's extensive gas distribution network, can make a significant contribution in helping the government mainly to realize the integration of gas management in order to increase the use of domestic natural gas. Integration between companies that have business lines in the gas sector is expected to encourage several key growths of the gas business in Indonesia, namely the continuity of national upstream gas production distribution, optimization of gas pricing structures as well as development of gas industry infrastructure coordinated with an integrated and consolidated natural gas management models.

The establishment of an oil and gas holding has a positive impact on both companies, namely the creation of added value from operational synergy, capex synergy, and increased investment capacity. Operational synergy is reflected in the increase in operating profit and net income of oil and gas holding projected to reach USD 11, 7 billion and USD 5, 9 billion in 2021. Capex synergy is obtained through the reduction of overlapping investment plans of the two companies in the next few years. In addition, Oil and Gas holding will increase investment capacity to reach USD 15, 5 billion (Current Value) for the next 14 years. The total addition of assets which can be obtained by Pertamina through post-establishment synergy of holding is projected to reach ± USD25, 3 billion, equivalent to IDR 329 trillion.

Benefits of Establishing Oil and Gas holding, including:

1. Increase in Investment Efficiency

Currently there is overlapping infrastructure built by Pertamina and PGN. After the establishment of the holding, the Oil and Gas holding delegates to the gas sub-holding as a representation in natural gas management to review all infrastructures that are currently owned in its entirety and also the future development plan, especially to avoid overlapping or unneeded infrastructure development that will be approved by holding. An investment efficiency of ±



tidak dibutuhkan yang akan disetujui oleh holding. Diperkirakan akan terjadi efisiensi investasi sebesar ±USD 900 juta dengan adanya pembenahan dari tumpang tindih infrastruktur.

2. Peningkatan kapasitas leveraging dan perbaikan finansial

Dengan kemampuan untuk blending harga dan efisiensi biaya, holding Migas akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Dengan diinbrengkannya saham Negara atas PGN ke Pertamina akan meningkatkan aset holding Migas secara konsolidasi akan memberikan penambahan kapasitas kumulatif investasi ±USD 32 miliar antara 2017-2030.

a. Kebijakan dalam penentuan harga

Holding Migas akan memiliki fleksibilitas untuk menentukan harga yang sesuai dengan tipe konsumen dimana supplier gas juga akan tetap mendapatkan pengembalian yang wajar. Untuk konsumen, akan dilakukan penentuan harga berdasarkan pendekatan regional dengan memastikan bahwa harga domestik masih lebih murah daripada harga impor. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk menjaga kesinambungan penyediaan gas dan juga untuk memberikan subsidi silang harga antara harga retail dan harga untuk industri.

b. Optimalisasi aliran gas secara nasional

Holding Migas dapat melakukan optimalisasi pengembangan distribusi gas dengan menggunakan rencana jaringan gas nasional akan terdiri dari kombinasi antara distribusi melalui pipa dan juga pengapalan. Hal ini akan memastikan suplai domestik antar wilayah.

c. Penurunan biaya produksi dan distribusi.

Sinergi dalam Holding Migas akan memberikan dampak positif terhadap harga jual gas nasional. Hal ini dikarenakan Holding Migas dapat menekan biaya penjualan melalui optimalisasi infrastruktur produksi dan jaringan distribusi gas yang sudah dimiliki oleh Pertamina dan PGN, sehingga tidak memerlukan biaya investasi untuk infrastruktur yang lebih besar.

USD 900 million is estimated to occur with improvements from overlapping infrastructure.

2. Increased leveraging capacity and financial improvement

With the ability to blending prices and cost efficiency, Oil and Gas holding will have the ability to improve the company's financial structure. With the integration of State shares of PGN to Pertamina, the oil and gas holding assets will be increased on a consolidated basis and will provide an additional cumulative capacity of ± USD 32 billion investments in 2017-2030.

a. Policy in pricing

Oil and Gas Holding will have the flexibility to determine prices according to the type of consumer where the gas supplier will also still obtain a reasonable return. For consumers, pricing will be based on a regional approach by ensuring that domestic prices are still cheaper than import prices. This is implemented in the hope of maintaining the continuity of gas supply and also to provide cross subsidies between retail prices and industrial prices.

b. Optimizing gas flow nationally

The Oil and Gas Holding can optimize the development of gas distribution using the national gas network plan, which will consist of a combination between distributions through pipes and shipping. This will ensure domestic supply between territories.

c. Decrease in production and distribution costs.

Synergy in Oil and Gas Holding will have a positive impact toward national gas selling price. This is due to the Oil and Gas Holding which may reduce sales costs through optimizing the production infrastructure and gas distribution network which has been owned by Pertamina and PGN, so it does not require investment costs for larger infrastructure.

Kementerian BUMN melalui Kedeputan Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata juga menginisiasi program Holding BUMN Rumah Sakit, yang merupakan wujud jika BUMN memiliki kemampuan untuk bersaing di industri kesehatan, dan mampu bekerja secara efektif dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hal ini merupakan roadmap yang sudah sejak lama diharapkan untuk dapat menjadi kekuatan jejaring bagi RS milik BUMN dalam pelaksanaan procurement dan juga penguatan sumber daya manusia melalui transfer of knowledge dan upskilling tenaga medis dan non-medis melalui continuous medical improvement dengan mekanisme sharing dan benchmark.

The Ministry of State-Owned Enterprise through the Deputy of Energy, Logistics, Region and Tourism Business Fields also initiated the Hospital State-Owned Enterprise Holding program, which is a realization if the State-Owned Enterprise has the ability to compete in the health industry, and is able to work effectively and able to provide best services to the society.

This is a roadmap that has long been expected to become network strength for state-owned hospitals in the procurement and strengthening of human resources through the transfer of knowledge and up skilling of medical and non-medical personnel through continuous medical improvement with sharing and benchmark mechanisms.



Peningkatan Nilai Melalui Akuisisi Saham PT Freeport Indonesia

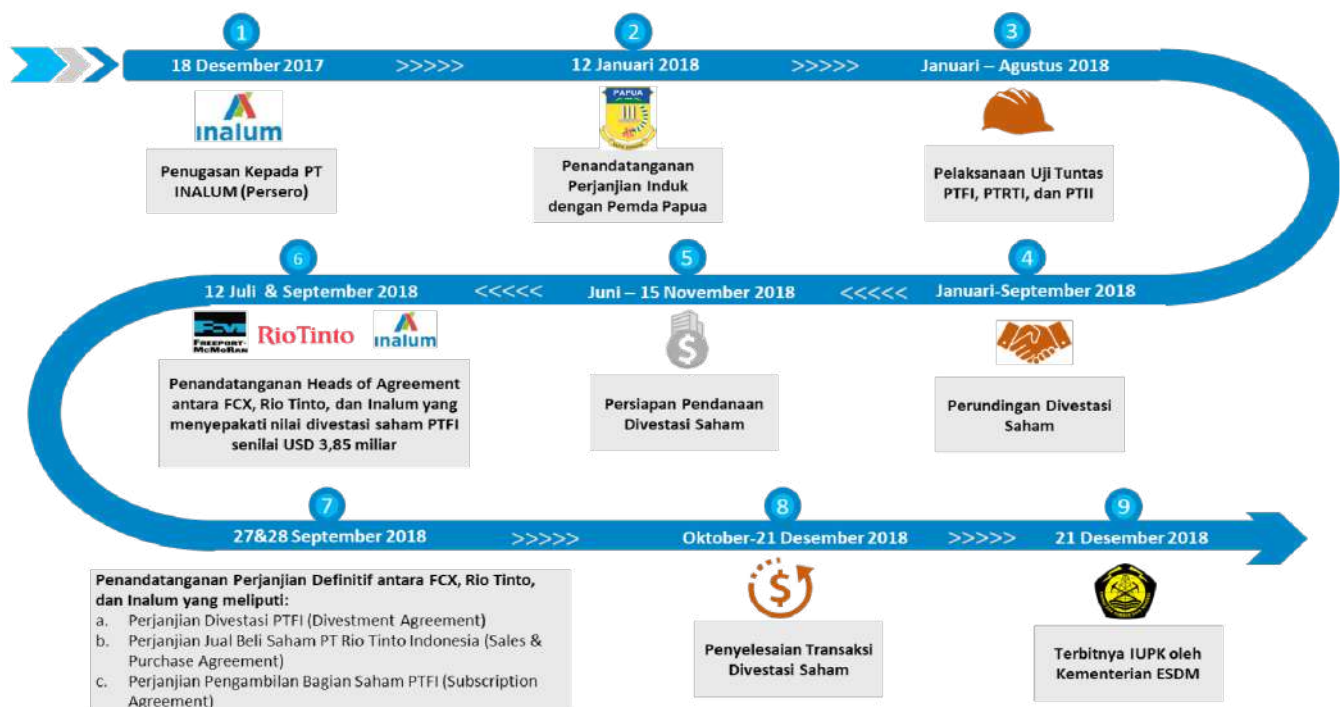
Increase of Value through Share Divestment of PT Freeport Indonesia

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia dari 9,36 persen menjadi 51,2 persen dengan membayar USD 3,85 miliar atau Rp 55 triliun, dimana dari jumlah tersebut, sebanyak 10 persen akan menjadi kepemilikan Pemda Papua. Dengan peningkatan kepemilikan sejumlah tersebut, sekaligus menjadikan PT Inalum sebagai pengendali perusahaan yang memiliki Tambang Grasberg di Papua dengan kekayaan emas, perunggu, dan perak sebesar Rp 2,400 triliun hingga 2041.

PT Indonesian Asahan Aluminium (Persero) increased its ownership in PT Freeport Indonesia from 9,36% to 51,2% by paying US\$ 3,85 billion or IDR 55 Trillion, where from such amount, 10% would become ownership of the Papua Regional Government. With an increase of such ownership amount, while making Inalum the controlling company that owns the Grasberg Mine in Papua with gold, bronze and silver wealth of IDR 2,400 trillion up to 2041.

Flowchart of PT Freeport's divestment.

Kronologis Divestasi Saham PTFI



APA UNTUNGNYA MEMBELI FREEPORT?



Setelah 51 tahun, Indonesia melalui Holding Industri Pertambangan INALUM akan memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dari sebelumnya hanya 9,36%. Berikut keuntungannya untuk Indonesia.

1

MEMILIKI CADANGAN EMAS TERBESAR DI DUNIA

PTFI mengelola kekayaan lambang yang terdiri dari emas, tembaga, dan perak.

Nilainya lebih dari **RP 2.100 TRILIUN** hingga 2041.



2

MILIK WARGA PAPUA

10% saham PTFI nantinya akan dimiliki oleh pemerintah daerah Papua.

PROYEKSI: Mulai 2023, pemerintah daerah Papua akan mendapat **HAMPIR RP 3 TRILIUN/TAHUN** dari dividen PTFI.



FOTO: LIPUTAN.COM

3

PENYUMBANG PENDAPATAN NEGARA

Kontribusi PTFI ke Indonesia dari pajak, royalti, pajak ekspor, dividen, dan pungutan lainnya **SEBESAR RP 10,8 TRILIUN** pada tahun lalu.

SALAH SATU PEMBAYAR PAJAK TERBESAR DI INDONESIA.



4

PENYEDIA LAPANGAN KERJA YANG BESAR

Kapasitas lapangan pekerjaan: **29.000**

Hingga Maret 2018 PTFI merekrut **7.028** karyawan.

2.888 KARYAWAN ADALAH ORANG PAPUA



FOTO: PTFI.CO.ID

DIVESTASI FREEPORT APA MANFAATNYA UNTUK PAPUA?



10% dari **100%** saham PT Freeport Indonesia akan menjadi milik Pemerintah Daerah Papua

Rinciannya:

7% untuk Kabupaten Mimika

3% untuk Provinsi Papua

Selain saham, Pemerintah Daerah juga akan mendapatkan **6% DARI LABA BERSIH** PT Freeport Indonesia

Rinciannya:

2.5% Kabupaten Mimika

2.5% Kabupaten di luar Mimika

1% Provinsi Papua

Pemerintah daerah akan mendapatkan sedikitnya **RP 2.4 TRILIUN PER TAHUN** dari dividen saham dan laba bersih setelah tahun 2021.

DILUAR bantuan CSR dan community development serta pendapatan pajak daerah dan royalti.

Setara dengan biaya pembangunan 8 stadion bola dengan kapasitas 30 ribu penonton beserta lintasan atletiknya.





Upaya Peningkatan Nilai BUMN Melalui Restrukturisasi

Efforts to Increase the State-Owned Enterprise Value through Restructuring

Secara praktis peran BUMN adalah sebagai stabiliator, dinamisator, sekaligus inovator dalam perekonomian nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMN merupakan salah satu instrumen utama negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat banyak BUMN yang kinerjanya kurang baik, maka BUMN perlu diberdayakan secara optimal.

Solusi akan peningkatan kualitas BUMN adalah berkaitan dengan proses restrukturisasi yang dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Practically the role of State-Owned Enterprise is as stabilizer, dynamist as well as innovator in the national economy. This indicates that BUMN is one of the state's main instruments to improve people's welfare. Considering that many BUMNs have poor performance, thus BUMN needs to be optimally empowered.

Solutions in improving the State-Owned Enterprise's quality is related to the restructuring process implemented with the intention of restructuring BUMN to operate efficiently, transparently and professionally. Restructuring is an effort implemented in the framework of restructuring the State-Owned Enterprise, which is one of the strategic steps to improve the company's internal conditions to improve performance and increase company value.



Restrukturisasi yang dimaksud adalah suatu upaya dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai BUMN secara sustainable jangka panjang, dan bukan sebagai alasan untuk memberi bantuan jangka pendek di bidang keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan sustainabilitas.

The intended restructuring is an effort in the framework of restructuring the State-Owned Enterprise which is one of the strategic steps to improve the company's internal conditions in order to improve performance and increase the value of the company. This is aimed at improving the performance and value of the State-Owned Enterprise in a long-term sustainable manner, and not as an excuse to provide short-term assistance in the financial sector by taking into account the principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, liability, independence, fairness and sustainability.

PROGRAM RESTRUKTURISASI TAHUN 2018 RESTRUCTURING PROGRAM OF 2018

1. PT SURVAI UDARA PENAS (PERSERO) / PT PENAS

Profil Perusahaan	
Perusahaan	 PT Survei Udara Penas (Persero) ("PT Penas")
Sektor	Aerial Photography, Survey dan Mapping, Flight Charter
Berdiri	31 Mei 1961
Lokasi	Puri Sentra Niaga, Jakarta
Pemegang Saham	BUMN— 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan Keamanan; Anak usaha : PT Pratama Persada Airbone (100%)
Segmen Usaha	Survai Udara, Survai Darat, Laboratorium foto udara, laboratorium elektronika dan avionik, Jasa konsultan dan perekayasaan di bidang survai dan pemetaan, Aircraft Charter



FAKTOR PENYEBAB KERUGIAN :

Faktor Keuangan

Kesulitan mendapat akses pendanaan akibat ekuitas negatif yang disebabkan akumulasi kerugian beberapa tahun terakhir.

Faktor Operasional

Teknologi alat produksi dan software sudah tertinggal.

Faktor Organisasi

Keterbatasan SDM serta demotivasi karyawan karena keterlambatan pembayaran gaji.

FACTOR CAUSING LOSS:

Financial Factor

Difficulties in obtaining access to funding due to negative equity caused by accumulated losses in recent years

Operational Factor

Production equipment technology and software have been left behind.

Organization Factor

Limited human resources and demotivation of employees due to late payment of salaries.

PROGRAM RESTRUKTURISASI YANG DILAKUKAN :

- 1) Dengan pelaksanaan program Stop Bleeding dan program sinergi dengan BUMN, tahun ini PT Penas mampu mencatat keuntungan sebesar Rp2,55 Miliar (2018P) dimana ini menggambarkan peningkatan kinerja keuangan dari tahun 2017 yaitu mencatat kerugian Rp1,9 M.
- 2) Telah dilaksanakan restrukturisasi operasional dan manajemen dengan skema *bad bank - good bank*.
- 3) Meningkatkan potensi pendapatan dengan melakukan Sinergi dengan BUMN Jasa Survei seperti PT Sucofindo, PT BKI, dan PT SI.
- 4) Pada bulan Agustus – November 2018, PT Penas melakukan penarikan dana RR yang digunakan untuk Revitalisasi dan Restrukturisasi SDM, pendirian anak usaha, dan kalibrasi peralatan.
- 5) Restrukturisasi PT Penas untuk penyelesaian SDM dilakukan melalui skema PHK dengan membayar hutang gaji tertunggak dan pesangon secara bertahap.

RESTRUCTURING PROGRAM THAT IS IMPLEMENTED:

- 1) With the implementation of the Stop Bleeding program and a synergy program with the State-Owned Enterprise, this year PT Penas was able to record a profit of IDR 2, 55 Billion (2018P) which illustrates the increase in financial performance from 2017, namely recording a loss of IDR 1.9M
- 2) Operational and management restructuring has been implemented with a bad bank- good bank scheme.
- 3) Increase the potential of revenue by passing Synergy with the State-Owned Enterprise Survey Services such as PT Sucofindo, PT BKI, and PT SI.
- 4) In August - November 2018, PT Penas withdraws the RR funds used for Revitalizing and Restructuring Human Resourcing, establishing subsidiaries, and calibrating equipment.
- 5) Restructuring PT Penas in the Human Resources department through layoff schemes by paying salary debt and delinquent and severance pay gradually



2. PT KERTAS KRAFT ACEH (PERSERO) / PT KKA

Profil Perusahaan	
Perusahaan	 PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
Sektor	Pulp & Paper
Berdiri	19 April 1985
Lokasi	Lhokseumawe, Aceh Utara
Pemegang Saham	Pemerintah Republik Indonesia – 96,65% PT Alas Helau – 3,35%
Segmen Usaha	Produksi Kertas, Perdagangan, Jasa konsultasi, jasa proyek pembangunan di bidang pulp & paper, penelitian pulp & paper, pemeliharaan alat-alat produksi kertas

FAKTOR PENYEBAB KERUGIAN :

- 1) Tidak adanya kepastian bahan baku akibat kebijakan moratorium kayu pinus dari regulator setempat.
- 2) Tidak adanya kepastian pasokan energi (gas).
- 3) Tidak melakukan investasi untuk memproduksi kertas sesuai spesifikasi yang diminta pasar.
- 4) Produktivitas SDM rendah.

PROGRAM RESTRUKTURISASI YANG DILAKUKAN :

- a. Proses rightsizing karyawan melalui lay-off 934 orang telah diselesaikan dengan dukungan pendanaan dari PT PPA.
- b. Optimalisasi fasilitas pembangkit listrik untuk memperoleh pendapatan untuk menutupi biaya operasional melalui skema sinergi dengan PT PLN, PT PJBS dan PT PPA.
- c. Melakukan kajian skema operasi dan bisnis sebagai upaya untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas kraft baik melalui pencarian investor maupun sinergi BUMN.

FACTOR CAUSING LOSS :

- 1) The lack of certainty of raw materials due to the pine wood moratorium policy from the local regulator
- 2) There is no certainty on supply energy.
- 3) Not investing to meet market specifications (lagging technology)
- 4) Low Human Resources productivity

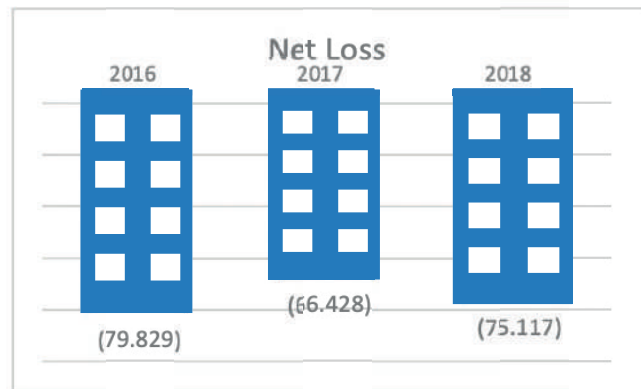
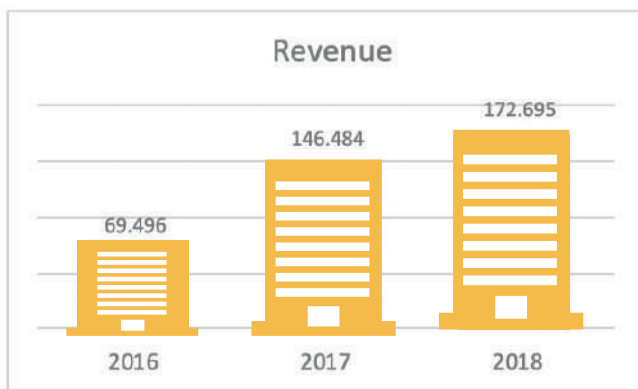
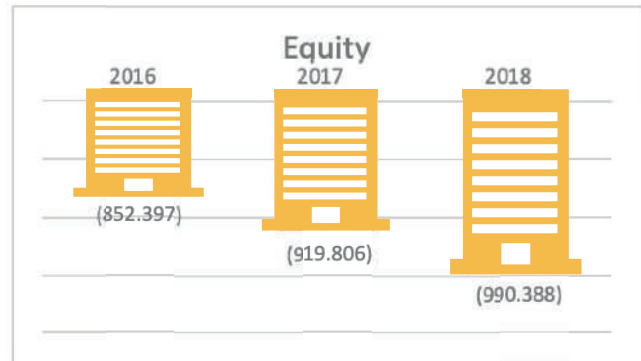
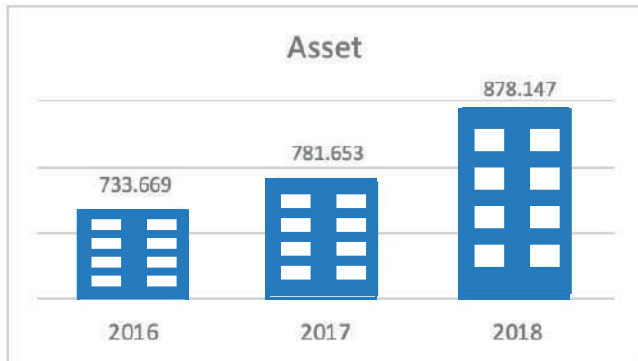
THE IMPLEMENTED RESTRUCTURING PROGRAM :

- a. The rightsizing process of employees through 934 lay-offs has been completed with funding support from PT PPA.
- b. Optimizing electricity generation facilities to obtain revenue to cover operational costs through a synergy scheme with PT PLN, PT PJBS and PT PPA.
- c. Reviewing the scheme of operations and business as an effort to re-operate the kraft paper factory through investor searches and the State-Owned Enterprise synergies.

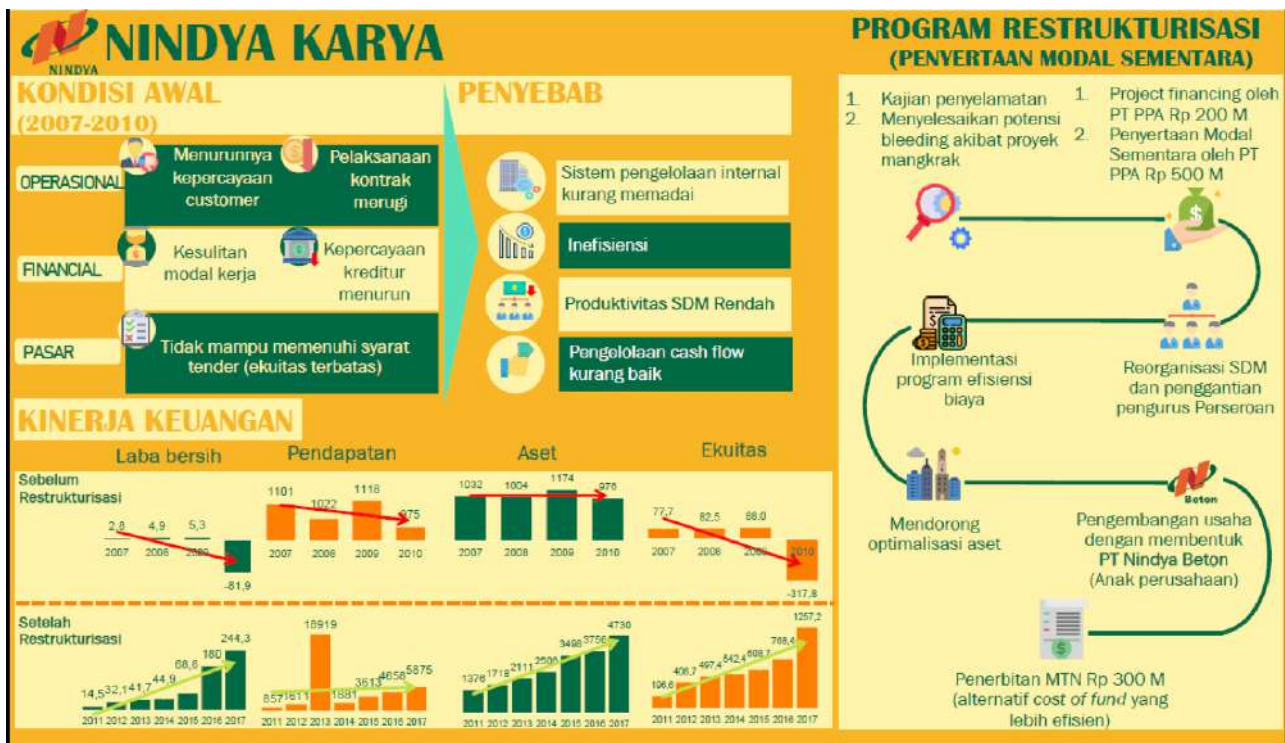


PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN (RP.JUTA) :

**FINANCIAL PERFORMANCE DEVELOPMENT
(IDR.MILLION):**



3. PT Nindya Karya



Kondisi awal (2007-2010)

Operasional:

- Menurunnya kepercayaan customer
- Pelaksanaan kontrak yang dijalankan mengalami kerugian

Keuangan:

- Kesulitan modal kerja
- Kepercayaan kreditur menurun terhadap perusahaan

Pasar:

- Tidak mampunya perusahaan memenuhi syarat tender yang disebabkan terbatasnya ekuitas perusahaan.

Penyebab Performa yang Jauh dari Target:

- Sistem pengelolaan dan pengendalian internal yang kurang memadai
- Inefisiensi dalam operasional perusahaan
- Produktivitas SDM perusahaan yang rendah
- Pengelolaan cash flow yang kurang baik

Initial conditions (2007-2010)

Operations:

- Decrease in customer's trust
- Implementation of an executed contract has suffered losses

Finance:

- Difficulties in working capital
- Creditors' trust decreases toward the company

Market:

- The company is unable to fulfill the tender requirements due to the limited equity of the company.

Causes of Performance which is Far from Target:

- Inadequate management and internal control systems
- Inefficiencies in company's operations
- Low productivity of the Company's Human Resources
- Poor cash flow management



Program Restrukturisasi:

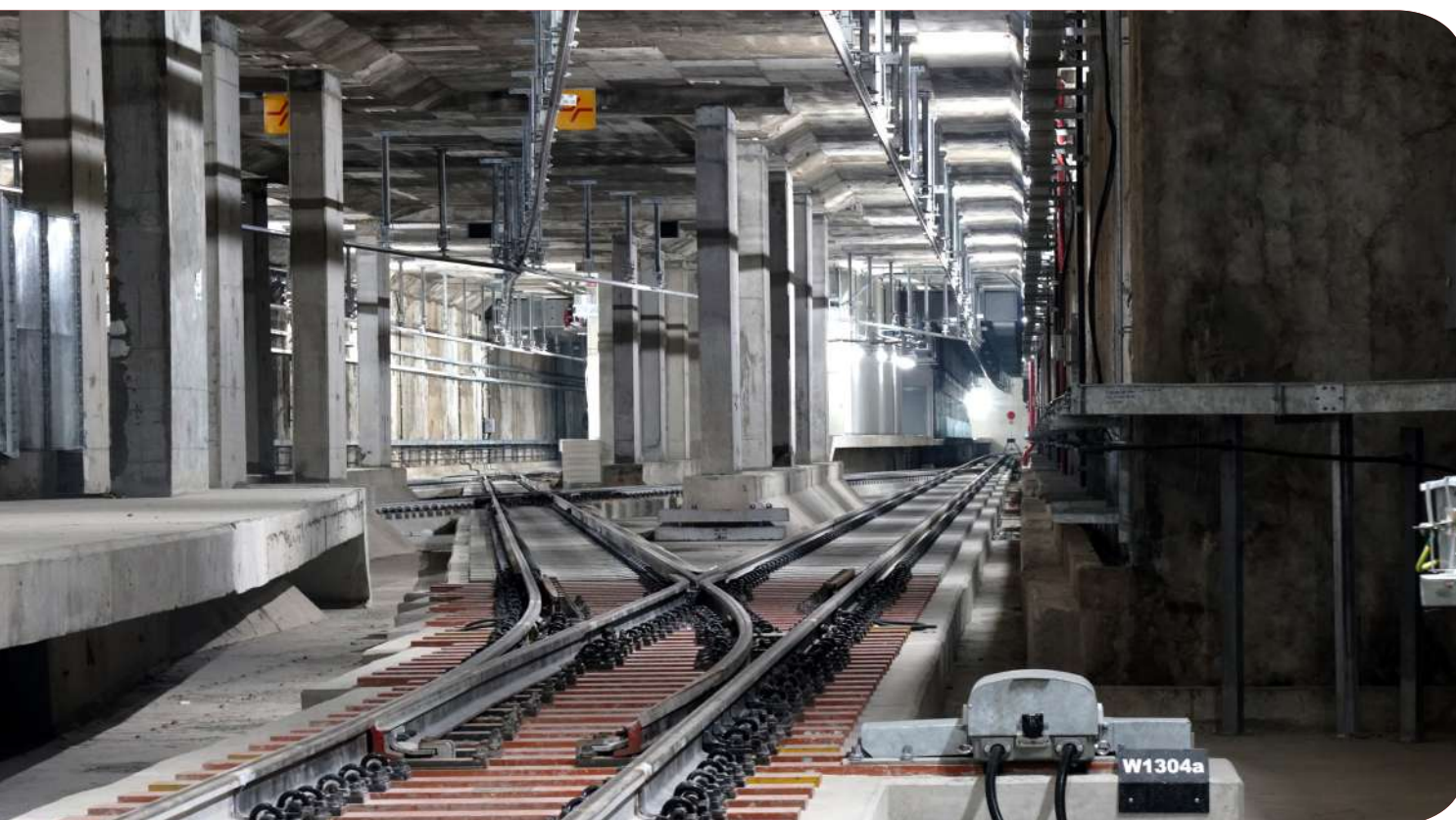
Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk membuat Nindya Karya dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk perekonomian Bangsa adalah melalui strategi restrukturisasi yang diaplikasikan melalui penyertaan modal sementara. Mekanisme penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan potensi bleeding akibat proyek mangkrak
2. Project financing oleh PT PPA sebesar Rp 200 Milyar
3. Penyertaan modal sementara oleh PT PPA Rp 500 Milyar
4. Reorganisasi SDM dan penggantian pengurus Perseroan
5. Implementasi program efisiensi biaya
6. Mendorong optimalisasi asset
7. Pengembangan usaha dengan membentuk PT Nindya Beton (Anak Perusahaan)

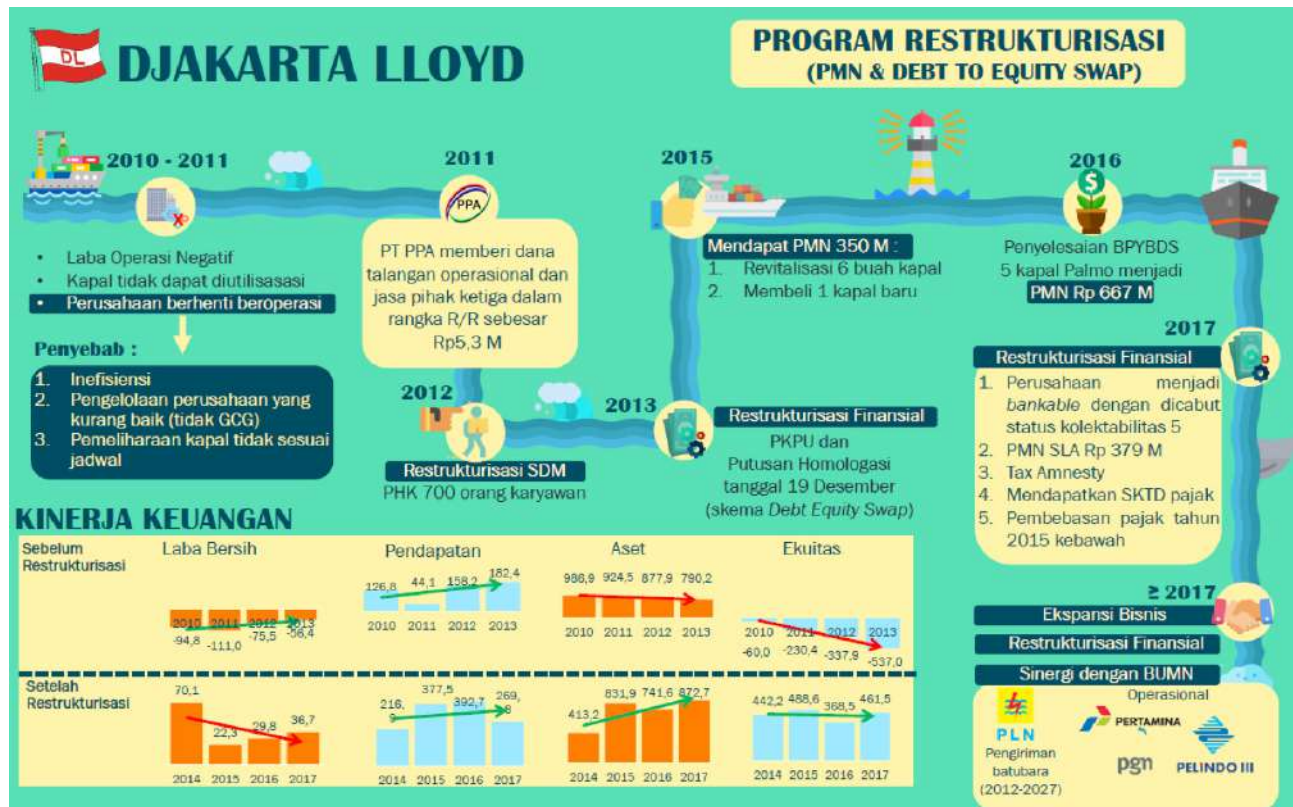
Restructuring Program:

The supervising effort implemented by the Ministry of State-Owned Enterprise to make Nindya Karya able to provide its best contribution to the nation's economy is through a restructuring strategy applied through temporary capital participation. The mechanisms of temporary capital participation implemented by the Ministry of BUMN are as follows:

1. Resolve the potential for bleeding due to a stalled project
2. PT PPA's project financing of IDR 200 billion
3. Temporary capital participation by PT PPA of IDR 500 billion
4. Reorganization of HR and replacement of management to the Company
5. Implementation of cost efficiency programs
6. Encouraging asset optimization
7. Business development by establishing PT Nindya Beton (Subsidiary)



4. PT Djakarta Llyod (Persero)



Kondisi Awal (2010 - 2011):

1. Laba operasi negatif
2. Kapal tidak dapat diutilisasi
3. Perusahaan berhenti beroperasi

Penyebab:

1. Inefisiensi dalam operasional perusahaan
2. Pengelolaan perusahaan yang kurang baik (jauh dari penerapan Good Corporate Governance)
3. Pemeliharaan kapal tidak sesuai jadwal

Proses Restrukturisasi:

2011: PT PPA memberikan dana talangan operasional dan jasa pihak ketiga dalam rangka R/R sebesar Rp 5,3 milyar

Restrukturisasi Sumber Daya Manusia:

2012: Perusahaan melakukan PHK kepada 700 pegawai untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan

Initial Conditions (2010 - 2011):

1. Negative operating profit
2. The ship cannot be utilized
3. The company stops operating

Cause:

1. Inefficiency in the company's operations
2. Poor management of the company (far from implementing Good Corporate Governance)
3. Ship maintenance is not on schedule

Restructuring Process:

2011: PT PPA provides operational bailouts and third party services in the framework of R/R of IDR 5,3 Billion

Restructuring of Human Resources:

2012: The Company laid-off 700 employees to improve the company's operational efficiency

**Restrukturisasi Finansial:**

- 2013: PKPU dan putusan Homologasi pada tanggal 19 Desember melalui skema Debt Equity Swap
- 2015: Mendapat PMN sebesar Rp 350 milyar
- 2015: Revitalisasi terhadap 6 kapal yang telah dimiliki oleh perusahaan; dan membeli 1 kapal baru untuk mendukung peningkatan kinerja operasional perusahaan.
- 2016: Penyelesaian BPYBDS 5 Kapal Palmo menjadi PMN sebesar Rp 667 milyar
- 2017: Perusahaan menjadi bankable dengan dicabutnya status kolektabilitas 5; PMN SLA sebesar Rp 379 Milyar; Tax Amnesty; mendapatkan SKTD pajak; serta pembebasan pajak tahun 2015 ke bawah
- >2017: Ekspansi Bisnis; Restrukturisasi Finansial dan Sinergi dengan BUMN (PLN pengiriman batu bara 2012 – 2027; Pertamina; PGN; PELINDO III.

Restructuring of Financial:

- 2013: PKPU and Homologation decision on December 19th through the Debt Equity Swap scheme
- 2015: Received PMN of IDR 350 billion
- 2015: Revitalization of 6 vessels owned by the company; and purchased 1 new vessel to support the improvement of company's operational performance.
- 2016: Completion of BPYBDS of 5 Palmo Ships into PMN of IDR 667 billion
- 2017: Companies become bankable with revocation of collectability status 5; SLA PMN of IDR 379 billion; Tax Amnesty; obtained tax SKTD; and tax exemption of 2015 and down
- > 2017: Business Expansion; Financial Restructuring and Synergy with BUMN (PLN of 2012 - 2027 coal shipping; Pertamina; PGN; PELINDO III

5. PT Primissima

Proses Restrukturisasi:

1. Mengikuti Tax Amnesty dengan membayar Rp 5,6 miliar dan menghapus kewajiban pajak sebesar Rp 17,6 miliar.
2. Kinerja keuangan sudah baik, laba bersih meningkat dari rugi bersih Rp 9,08 miliar (2015) menjadi Laba Rp 2,4 miliar (2017P).
3. Melakukan sinergi dengan BUMN sinergi BUMN dalam rangka peningkatan pendapatan melalui penyediaan bajuseragam dan batik karyawan.
4. Melakukan sinergi dengan BUMN dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja melalui pendanaan pengadaan benang.
5. Secara umum, kondisi BUMN telah dinyatakan Sehat sehingga tugas pembinaannya dikembalikan kepada Kedeputan Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media

Restructuring Process:

1. Following Tax Amnesty by paying IDR 5, 6 billion and removing tax obligations of IDR 17, 6 billion.
2. Financial performance is already good, net income increased from a net loss of IDR 9, 08 billion (2015) to Profit IDR 2, 4 billion (2017P).
3. Synergize with BUMN synergy in order to increase revenue through provision of employee's uniform and batik.
4. Synergize with BUMN in order to fulfill working capital requirements through funding the thread procurements.
5. In general, BUMN condition has been declared healthy so that its supervising task is returned to the Deputy of Business Strategic Mining and Media Business Fields.



6. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

Proses Restrukturisasi:

1. Dengan pelaksanaan program Stop Bleeding, kerugian PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) menurun dari semula Rp 2,48 triliun (tahun 2015) menjadi Rp 704 miliar (tahun 2017P).
2. PT MNA telah berhenti operasi sejak Februari 2014. Air Operator Certificate (AOC) 121 telah dicabut. Seluruh fasilitas produksi (pesawat terbang) berusia lebih dari 30 tahun dan dalam kondisi rusak (Beyond Economic Repair) telah ditarik. PT MNA terus menerus mengalami kerugian yang mengakibatkan ekuitas negatif Rp 8,64 triliun tahun 2016. Seluruh aset perusahaan telah dijaminkan kepada kreditur.
3. Proses rightsizing karyawan melalui lay-off 1.482 orang telah diselesaikan dengan dukungan pendanaan dari PT PPA.
4. Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan Penjajakan Investor.

Restructuring Process:

1. With the implementation of the Stop Bleeding program, the loss of PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) decreased from an initially IDR 2, 48 trillion (in 2015) to IDR 704 billion (2017P).
2. PT MNA has ceased operating since February 2014. Air Operator Certificate (AOC) 121 has been revoked. All production facilities (aircraft) over 30 years old and in damaged condition (Beyond Economic Repair) have been withdrawn. PT MNA continues to suffer losses resulting in negative equity of IDR 8, 64 trillion in 2016. All company assets have been pledged to creditors.
3. The rightsizing process of employees through 1,482 lay-offs was completed with funding support from PT PPA.
4. Further Restructuring and/or Revitalization programs that are being/will be implemented Investigation of Investors.







7. PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO) / PT ISN

Profil Perusahaan	
Perusahaan	 PT Industri Sandang Nusantara (Persero) ("PT ISN")
Sektor	Sandang (Permintalan, tekstil, karung plastik), <i>Property Developer</i> (melalui anak usaha)
Berdiri	11 Agustus 2008
Lokasi	Jakarta, Jawa Barat, Tengah, Timur, Sulawesi Selatan, Bali.
Pemegang Saham	Pemerintah Republik Indonesia – 100%
Segmen Usaha	Produksi benang, hasil tenun, penjualan, Jasa terkait bidang tekstil, kegiatan usaha lain (trading, property, pergudangan, dll)

PROGRAM RESTRUKTURISASI YANG DILAKUKAN :

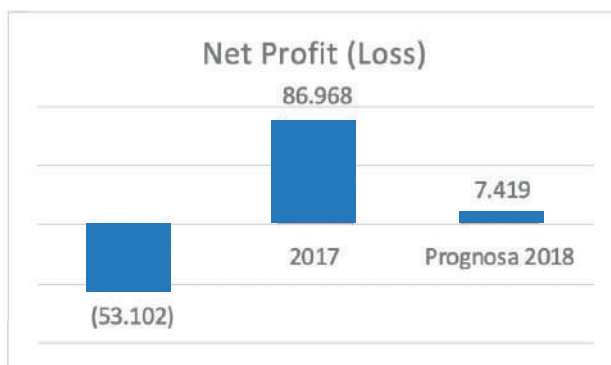
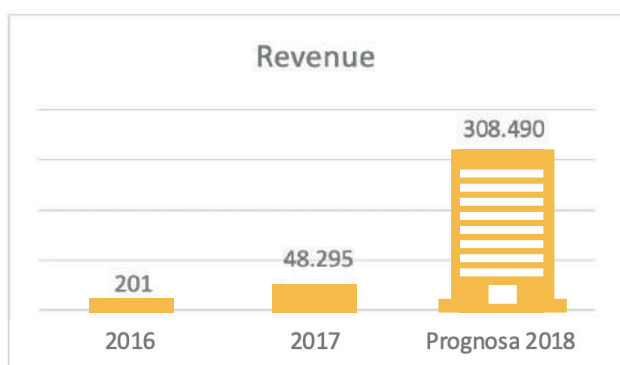
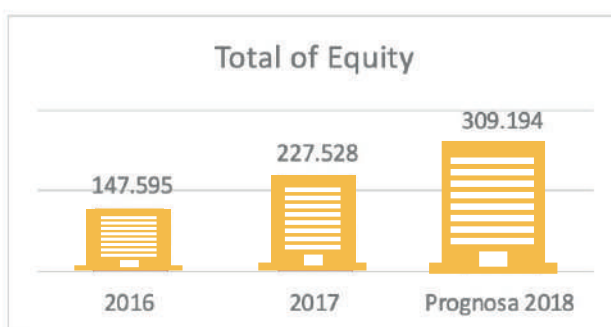
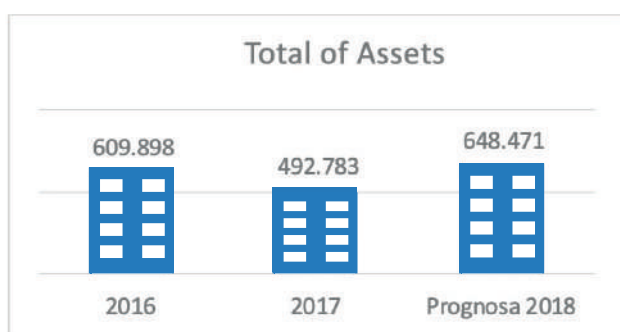
- 1) Melakukan banyak program sinergi dengan BUMN-BUMN, antara lain memperoleh order penyediaan seragam kantor.
- 2) Performance keuangan semakin membaik (laba usaha meningkat dari Rp1,9 M (2017) menjadi Rp25,8 M (2018P).
- 3) Perusahaan mulai berfokus kepada sektor trading dengan proporsi $\pm 70\%$ dari total pendapatan Rp308 M (2018P).
- 4) Dikarenakan kondisi perusahaan mulai membaik, sehingga saat ini kepercayaan kreditur sudah mulai muncul. PT ISN berhasil mendapatkan pendanaan dari PT KBI, PT JIEP, PT SIER dan PT KIM dalam rangka mendukung pengembangan produk sarung dan industri tekstil.

IMPLEMENTED RESTRUCTURING PROGRAM:

- 1) Conducting many synergy programs with the State-Owned Enterprise, including obtaining orders for office uniforms.
- 2) Financial performance has improved (operating income increased from IDR1.9 M (2017) to IDR25.8 M (2018P).
- 3) The company began to focus on trading sector with a proportion of $\pm 70\%$ of the total revenue of IDR308 M (2018P).
- 4) Due to the Company's improving condition, therefore creditor's trust has begun to emerge. PT ISN managed to obtain funding from PT KBI, PT JIEP, PT SIER and PT KIM in order to support the development of sarong products and textile industry.
- 5) Advanced Restructuring and/or Revitalization Program

- 5) Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan: Transformasi kegiatan usaha PT ISN, optimalisasi aset-aset yang dimiliki, mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha hilir sektor TPT, dan mengembangkan kegiatan usaha melalui sinergi BUMN.

that is being/are implemented: Transformation of PT ISN's business activities, optimization of assets owned, developing downstream business activities in the TPT sector, and developing business activities through the State-Owned Enterprise's synergy.

PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN (RP.JUTA) :
**FINANCIAL PERFORMANCE DEVELOPMENT
(IDR.MILLION):**




9. PT INDUSTRI GELAS (PERSERO) / PT IGLAS

Profil Perusahaan	
Perusahaan	 PT Industri Gelas (Persero) ("PT Iglas")
Sektor	Manufaktur Botol Gelas
Berdiri	1 November 1979
Lokasi	Surabaya dan Gresik
Pemegang Saham	Pemerintah Republik Indonesia –63,82% PT BNI (Persero) Tbk –36,18%
Segmen Usaha	Manufaktur kemasan botol gelas

PROGRAM RESTRUKTURISASI YANG DILAKUKAN :

- 1) Pelaksanaan program Stop Bleeding dan upaya-upaya restrukturisasi seperti optimalisasi aset melalui penyewaan lahan dan bangunan, dapat menyebabkan kerugian PT Iglas menurun dari semula Rp5,87 M (tahun 2017) menjadi Rp4,9 M (tahun 2018P). Stop operasi menghentikan beban biaya operasional sebesar Rp5 M per bulan.
- 2) Memaksimalkan pendapatan PT Iglas dengan melanjutkan penjualan sisa persediaan botol sebesar 139 ton.
- 3) Proses rightsizing karyawan melalui lay-off 571 orang telah diselesaikan dengan membayar H2N dan kewajiban pensiun serta biaya pemeliharaan dan pengamanan aset dengan sumber pendanaan dari talangan PT PPA sebesar Rp50 M.
- 4) Program Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi lanjutan yang sedang/akan dilaksanakan:
 - a. Melakukan program pencarian investor atau mitra strategis dalam rangka pengoperasian

IMPLEMENTED RESTRUCTURING PROGRAM:

- 1) The implementation of the Stop Bleeding program and restructuring efforts such as asset optimization through leasing of land and buildings may cause PT Iglas's losses to decrease from initially IDR 5, 87M (in 2017) to IDR 4, 9M (in 2018P). Stop operations ceases the burden of operational costs of IDR 5 M per month.
- 2) Maximizing the income of PT Iglas by continuing to sell the remaining bottle inventory of 139 tons.
- 3) The rightsizing process of employees through the lay-off of 571 people has been completed by paying H2N and pension obligations as well as costs of maintaining and securing assets with funding sources from PT PPA's bail of IDR 50 M.
- 4) Further Restructuring and/or Revitalization Programs that are being/will be implemented:
 - a. Conduct an investor or strategic partner search program in the context of re-operating

kembali pabrik PT Iglas baik untuk produksi botol maupun tranformasi ke segmen bisnis lain yang memungkinkan.

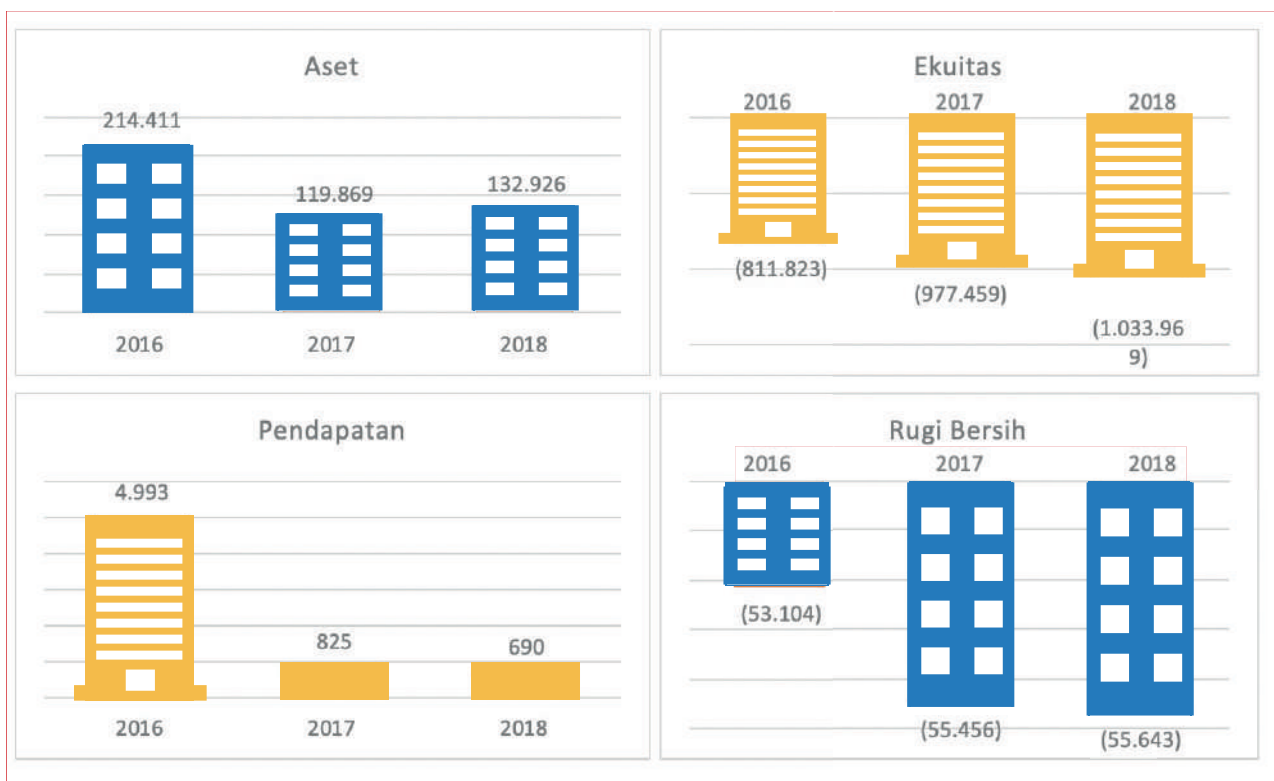
- b. Optimalisasi aset PT Iglas dengan melakukan penyewaan bangunan serta melakukan penjajakan dengan BUMN maupun anak perusahaan BUMN dalam rangka penjualan sebagian aset PT Iglas.

PT Iglas plant for both bottle production and transformation to other possible business segments.

- b. Optimizing the assets of PT Iglas by leasing buildings as well as exploring the State-Owned Enterprise and the State-Owned Enterprise's subsidiaries in order to sell part of PT Iglas's assets.

PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN (RP. JUTA) :

FINANCIAL PERFORMANCE DEVELOPMENT (IDR.MILLION):







KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

5

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Berkinerja

Good, Clean, and Performance Governance

“Kita sudah untung, sekarang marilah kita berbagi program kepada masyarakat, mengenai sembako murah, penghijauan, pembersihan lingkungan, bantu pedesaan, membantu kesejahteraan di desa”

Rini Soemarno,
The Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) of Indonesia



Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Bersih

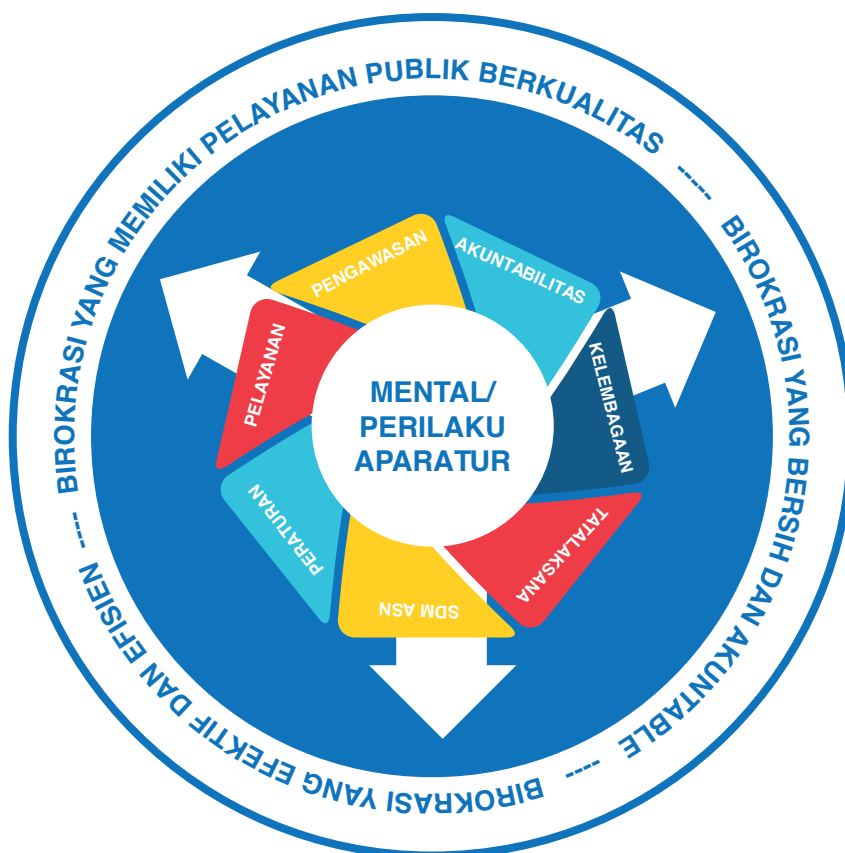
Bureaucratic Reform for Clean Governance

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memperbaiki proses bisnis dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

Bureaucratic reform aims to improve a better business processes and governance.

Secara garis besar, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dalam rangka reformasi birokrasi mengacu pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, yaitu (1) manajemen perubahan, (2) penataan peraturan perundang-undangan, (3) penataan dan penguatan organisasi, (4) penataan tata laksana dalam dunia usaha, (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur, (6) penguatan pengawasan, (7) penguatan akuntabilitas kinerja, dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Broadly speaking, programs and activities to be implemented by the Ministry of State-Owned Enterprise in the framework of bureaucratic reform refer to 8 (eight) areas of change as stipulated in the Regulation of the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reforms Number 20 of 2010 concerning Roadmap for Bureaucratic Reform, namely (1) change management (2) structuring legislation, (3) structuring and strengthening organizations, (4) structuring governance in the business world, (5) structuring the apparatus Human Resources management system, (6) strengthening supervision, (7) strengthening performance accountability, and (8) improving quality of public services.





Penerapan dan Pencapaian Reformasi Birokrasi

Setiap tahunnya, Tim Koordinasi Reformasi Birokrasi dibentuk oleh Sekretaris Kementerian BUMN atas nama Menteri BUMN Rini M. Soemarno sebagai wujud pelaksanaan salah satu area perubahan reformasi birokrasi yaitu manajemen perubahan. Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan program-program reformasi birokrasi yang dijalankan lintas unit atau dapat juga bertindak sebagai inisiator program reformasi birokrasi di Kementerian BUMN.

Tim ini juga berkoordinasi dengan unit organisasi dan reformasi birokrasi dan Inspektorat dalam membantu pelaksanaan self assessment penilaian reformasi birokrasi (PMPRB) dan evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB setiap tahunnya.

Profiling Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian BUMN merupakan program berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien untuk pengelolaan BUMN yang lebih baik. RB Kementerian BUMN dimulai sejak tahun 2013, secara tahunan secara konsisten melakukan perbaikan proses yang dinilai secara internal dan divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB.

Penilaian reformasi birokrasi dibagi ke dalam 2 (dua) komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit memiliki bobot dan total penilaian yaitu sebesar 60%, sedangkan komponen hasil memiliki bobot sebesar 40%. Berikut detail penilaian reformasi birokrasi Kementerian BUMN dari tahun 2015 sampai

Application and Achievement of Bureaucratic Reform

Every year, the Bureaucratic Reform Coordination Team is established by the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprise on behalf of The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno as manifestation of one of the area of change in bureaucratic reform namely change management. The team is tasked with coordinating bureaucratic reform programs that run across units or can also act as initiators of bureaucratic reform programs at the Ministry of State-Owned Enterprise.

The team also coordinates with organizational units and bureaucratic reforms and the Inspectorate in assisting the implementation of self-assessment of bureaucratic reform (PMPRB) and evaluation of bureaucratic reform by the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reforms annually.

Profiling Bureaucratic Reform

Bureaucratic Reform (RB) at the Ministry of State-Owned Enterprise is an ongoing program to create an effective and efficient bureaucracy for a better management of the State-Owned Enterprise. The Bureaucratic Reform of the Ministry of State-Owned Enterprise began since 2013, on an annual basis consistently making process improvements assessed internally and validated by the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reforms.

Assessment of bureaucratic reform is divided into 2 (two) components, namely the lever component and results. The lever component has a weight and total valuation that is equal to 60%, while results component has a weight of 40%. Following are evaluation details of the bureaucratic reform to the Ministry of State-Owned Enterprise from 2015 to 2017.

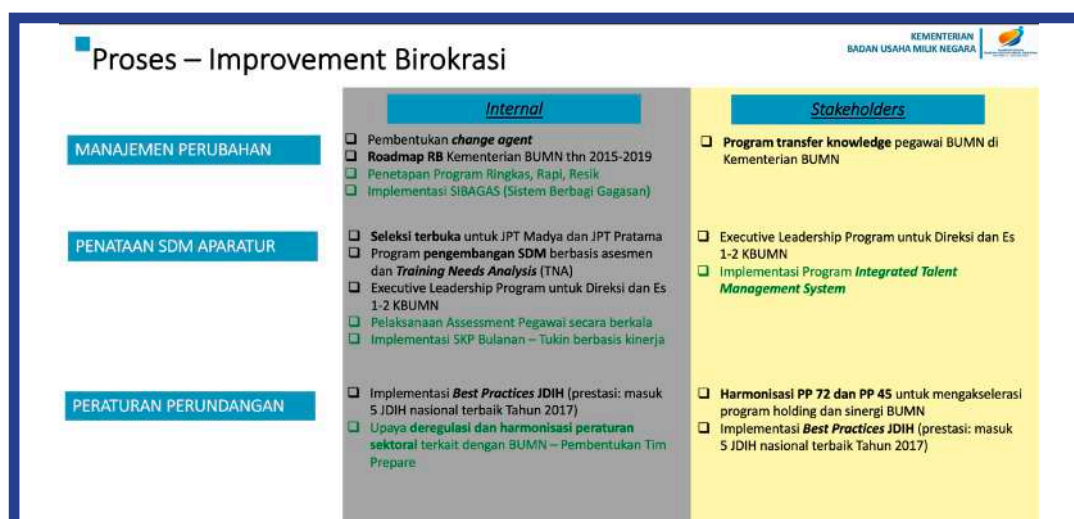
No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,82	3,48
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,34	3,03
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,34	4,09
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,72	3,25
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	13,29	13,42
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,88	3,89
7	Penguatan Pengawasan	12,00	8,28	8,42
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,50	4,53
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	45,16	44,11
II	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,27	9,66
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,87	5,06
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,19	6,26
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,26	8,68
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	31,58	32,66
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	76,75	76,77

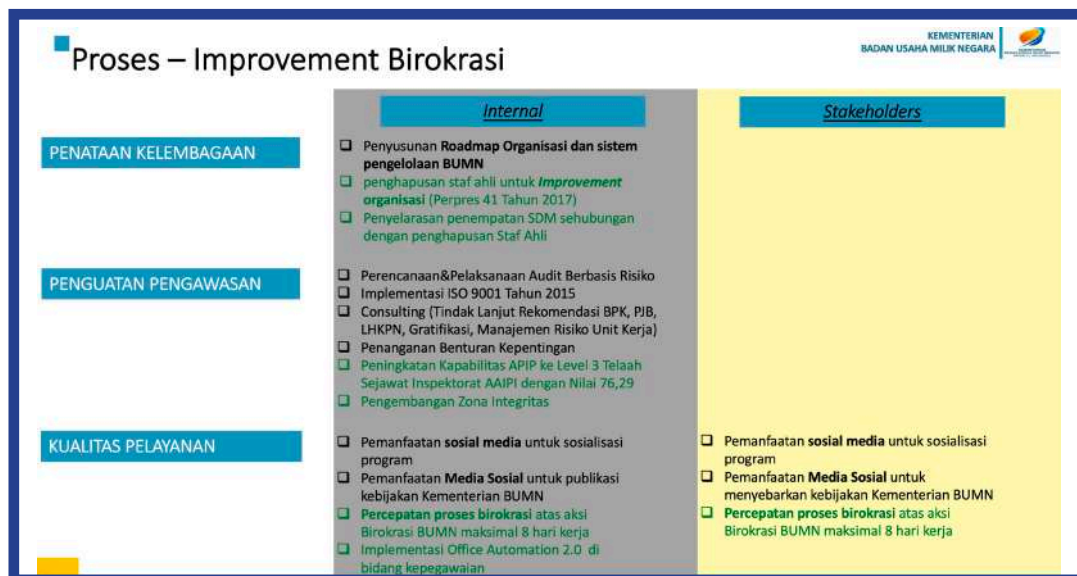
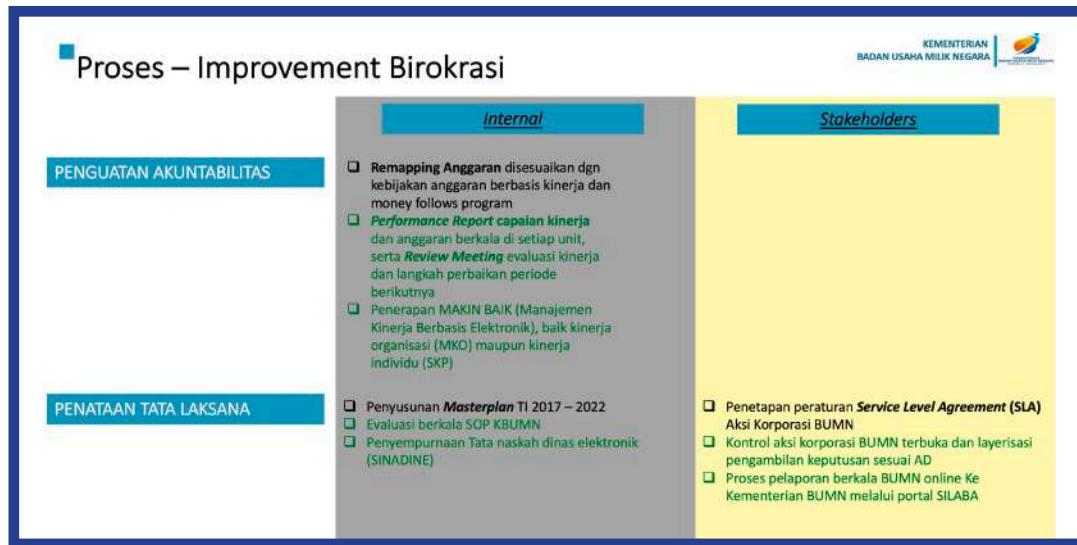
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN yang disampaikan bahwa nilai reformasi birokrasi Kementerian BUMN mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2017 yaitu 86,41 dan diharapkan pada tahun 2018 bisa naik menjadi 90,47.

Based on results of field verification by the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reforms to the implementation of the Ministry of State-Owned Enterprise's Bureaucratic Reform which was conveyed that the value of bureaucratic reform of the Ministry of State-Owned Enterprise experienced a slight increase in 2017, namely 86, 41 and is expected to increase into 90, 47 in 2018.

Proses Improvement RB

Bureaucratic Reform Improvement Process







Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor: PER-08/ MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor: PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor: PER-08/ MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN, yang di dalamnya mencakup ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada di Bagian Humas dan Protokol, serta mekanisme penjawaban permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

Information Disclosure

Information disclosure in the Ministry of State-Owned Enterprise refers to The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno Regulation Number: PER-08/ MBU/2014 dated June 30th, 2014 concerning Guidelines for Management of Information and Documentation in the Ministry of State-Owned Enterprise as updated based on The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno Regulation Number: PER-12/MBU/10/2015 concerning Amendments to The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno Regulation Number: PER-08/ MBU/2014 dated June 30th, 2014 concerning Guidelines for Information and Documentation Management in the Ministry of State-Owned Enterprise, which includes the authority scope of the Ministry of State-Owned Enterprise Public Information Services, appointment of Information Management Officials and Documentation (PPID) which is in the Public Relations and Protocol Section, as well as the mechanism for answering public information requests implemented by the Public Relations and Protocol Section in coordination with other related working units.



Setiap permohonan informasi, kemudian akan diproses, yang secara umum membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing pelayanan, terhitung sejak diterima/mendapat disposisi hingga pengesahan jawaban oleh PPID setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian Humas dan Protokol sebagai pelaksana pelayanan informasi publik, saat ini terdiri atas seorang Kepala Bagian, tiga orang Kepala Subbagian, tiga orang Pelaksana PNS, dan enam orang Pelaksana Non-PNS. Saat ini, pelayanan permohonan informasi publik dilakukan oleh satu orang pelaksana non- PNS.

Pelayanan Terhadap BUMN dan Stakeholders

Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan sebagai sarana bagi Pemerintah untuk melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, core business dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima, baik dalam bentuk pelayanan administratif, pelayanan barang, maupun pelayanan jasa.

Pemberian pelayanan publik tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas dan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Fungsi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah terbagi ke dalam tugas dan fungsi setiap instansi Pemerintah.

Kementerian BUMN merupakan instansi Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan BUMN, sehingga pelayanan yang diharapkan dari Kementerian BUMN berkaitan dengan hal tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian BUMN berbeda dengan instansi lain yang secara langsung melayani kebutuhan masyarakat luas seperti kantor pelayanan pajak atau kantor bea dan cukai. Pelayanan yang diberikan berupa kebijakan, perizinan,

Each information request will then be processed, which generally takes 10 (ten) working days and an extension of 7 (seven) working days for each service, from the time of receipt/obtaining dispositions to the answer ratification by the PPID after coordinating with the related working unit.

The Public Relations and Protocol section as the executor of public information services, currently consists of Head of Section, three Subdivision Heads, three Civil Servant (PNS) Implementers, and six Non-Civil Servant (PNS) Implementing Persons. Currently, the service for requesting public information is implemented by one non-Civil Servant (PNS) implementing person.

Services toward the State-Owned Enterprise and Stakeholders

Bureaucracy is a type of organization that is intended as means for the Government to implement public services in accordance with society's request. Therefore, the core business in administering the government is to serve the society's requirement by providing excellent service, both in the form of administrative services, goods services, and services.

Provision of public services is implemented by paying attention to the basic and principles of public service as stipulated in the Decree of the State Minister for Administrative Reforms Number 63/KEP/M.PAN/7/2003 concerning General Guidelines for the Implementation of Public Services. The function of public services in government's administration is divided into the duties and functions of each Government institution.

The Ministry of State-Owned Enterprise is a Government institution tasked with supervising the State-Owned Enterprise, so that the services expected from the Ministry of State-Owned Enterprise are related to such matter. Services provided by the Ministry of State-Owned Enterprise are different from other institutions that directly serve the requirements of the wider society such as tax service offices or customs and excise offices. Services



maupun regulasi kepada BUMN, meskipun terdapat pula kewajiban menyediakan data dan informasi tentang BUMN maupun Kementerian BUMN kepada masyarakat.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, Kementerian BUMN melakukan pengukuran tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran tingkat pelayanan tersebut dilaksanakan dengan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga dapat diketahui kinerja pelayanan aparatur Pemerintah kepada masyarakat.

Sebagai pedoman dalam penyusunan IKM, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai cara penyusunan IKM serta unsur-unsur dalam penilaian IKM, namun karena jenis pelayanan dan masyarakat atau pemangku kepentingan dari setiap instansi Pemerintah berbeda-beda, pedoman tersebut memberikan fleksibilitas dalam operasionalisasi pengukuran IKM.

provided are in the form of policies, permits, and regulations to the State-Owned Enterprise, although there is also an obligation to provide data and information concerning the State-Owned Enterprise and the Ministry of State-Owned Enterprise to the society.

As an effort to improve public services, the Ministry of State-Owned Enterprise periodically measures the level of performance of service units as material to establish policies in order to improve the quality of subsequent public services. Measuring the level of service is implemented by evaluating society's opinion on service through the preparation of Security Satisfaction Index (IKM) so that the service performance of the Government apparatus to the society can be seen.

As guideline in the formulation of Security Satisfaction Index (IKM), the Decree of the State Minister for Administrative Reforms Number 16 of 2014 has been stipulated concerning Guidelines for the Society Satisfaction Survey on the Implementation of Public Services. In the regulation, it is regulated on how to prepare the Security Satisfaction Index (IKM) as well as elements in the Security Satisfaction Index (IKM) assessment, but because the types of services and societies or stakeholders of each Government institution are different, these guidelines provide flexibility





Adapun pedoman tersebut merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: KEP/25/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perubahan dimaksud adalah terkait penyempurnaan parameter penilaian.

Pelayanan Publik

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian BUMN telah melakukan percepatan alur proses naskah dinas di Lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan pelayanan yang tanggap dan responsif, sebagai bagian dari penilaian kinerja Kementerian BUMN. Setiap pemrosesan naskah dinas dilakukan secara terstandar, terutama dari segi ketepatan waktu dan sesuai dengan pedoman tata naskah dinas guna menghasilkan pelayanan prima sebagai bentuk nyata pelayanan kepada pemangku kepentingan Kementerian BUMN.

Percepatan alur proses naskah dinas diharapkan mampu menjadikan budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN menjadi lebih transparan, profesional, dan akuntabel serta menunjang pengambilan keputusan yang lebih cepat bagi pemangku kepentingan Kementerian BUMN.

Selain itu, Kementerian BUMN juga menaruh perhatian yang serius terhadap kebutuhan informasi publik melalui Desk Information dan Hubungan Masyarakat, yang bertugas merencanakan optimalisasi publikasi Kementerian BUMN, serta Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas dalam penerimaan, pemrosesan, pengkajian, serta pemenuhan kebutuhan informasi publik. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi kepada Kementerian BUMN dan menjadi sebuah kewajiban bagi Kementerian BUMN untuk memenuhi permohonan tersebut selama tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan/atau tidak memiliki dampak merugikan menurut uji konsekuensi. Permohonan informasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme dan standar yang ditentukan.

in the operationalization of Security Satisfaction Index (IKM) measurements;

The guideline constitutes refinement of the previous guidelines, namely the Decree of the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reform Number: KEP/25/M.PAN/2/2004 concerning General Guidelines for Preparing Society Satisfaction Index of Government Institution Service Units. The intended change is related to the improvement of assessment parameters.

Public service

To encourage the improvement of public services quality, the Ministry of State-Owned Enterprise has accelerated the flow of official manuscript processes in the Ministry of State-Owned Enterprise in order to realize responsive services, as part of the performance assessment to the Ministry of State-Owned Enterprise. Each processing of official texts is implemented in a standardized manner, especially in terms of timeliness and in accordance with official script guidelines to produce an excellent service as a tangible form of service to stakeholders of the Ministry of State-Owned Enterprise.

Acceleration to the flow of an official script process is expected to be able to make working culture within the Ministry of State-Owned Enterprise become more transparent, professional, and accountable and support faster decision making for stakeholders of the Ministry of State-Owned Enterprise.

In addition, the Ministry of State-Owned Enterprise also pays serious attention to public information requirements through the Information Desk and Public Relations, which is tasked with planning the optimization of the Ministry of State-owned Enterprise publications, as well as the Information Management and Documentation Team in charge of receiving, processing, reviewing and fulfilling public information requirements. That way, the public can easily submit information requests to the Ministry of State-Owned Enterprise and it is an obligation for the Ministry of State-Owned Enterprise to fulfill the request as long as it does not include excluded information and/or does not have an adverse effect according to the consequence test. Requests for such information can be implemented



Dalam memenuhi pelayanan informasi tersebut, maka ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat ini dibantu oleh sejumlah pejabat fungsional. Keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Kementerian BUMN telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

Lingkup badan publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana APBN/APBD dan mencakup pula organisasi non-Pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Bagian Humas dan Protokol dalam pemenuhan permintaan informasi Publik berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Jawaban atas permohonan Informasi dan dokumentasi dari masyarakat yang merupakan fungsi dari PPID sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan PPID tersebut diberikan kepada masyarakat secara online melalui website, email maupun mendatangi langsung loket permintaan informasi dan dokumentasi.

Pengawasan Internal

Pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN, dilaksanakan Inspektorat Kementerian BUMN, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Inspektorat Kementerian BUMN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan

through specified mechanisms and standards.

In fulfilling such information service, the Information Management and Documentation Officer are appointed. This official is assisted by number of functional officials. Public information disclosure implemented by the Ministry of State-Owned Enterprise is in accordance with the mandate of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness, in which every public entity has an obligation to open access to public information relating to the public entity for wider societies.

The scope of public entity in this Act includes executive, judicial, legislative, and other state administrators that receive the State Revenues and Expenditures Budget (APBN)/Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD) funds and also include non-governmental organizations, both legal entities and non-legal entities, such as non-governmental organizations, associations and other organizations that manage or use funds which are partly or wholly sourced from the State Revenues and Expenditures Budget (APBN)/Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD), donations from the society, and/or overseas.

Public Relation and Protocol Section in fulfilling public information request functions as Information and Documentation Management Officer (PPID). The answers to requests for information and documentation from the public which are functions of PPID are in accordance with the mandate of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness, the PPID services are provided to the public online through website, e-mail and directly to the information and documentation request counter.

Internal monitoring

Internal supervision in the Ministry of State-Owned Enterprise, implemented by the Inspectorate of the Ministry of State-Owned Enterprise, as stipulated in the Regulation of The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarnos Number: Per-10/MBU/07/2015 dated July 23rd, 2015 concerning Organization and Working Procedure of the Ministry of State-Owned Enterprise. In such regulation it was stated that the Inspectorate of the Ministry of State-Owned Enterprise had the task of



tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri BUMN Rini M. Soemarno;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
7. Memastikan kecukupan pengendalian internal Kementerian BUMN;
8. Pelaksanaan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN;
9. Koordinasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi

implementing internal supervision within the Ministry of State-Owned Enterprise. In implementing the tasks as intended, the Inspectorate is administratively coordinated by the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprise.

Main Tasks and Functions

The Inspectorate has the task of implementing internal supervision within the Ministry of State-Owned Enterprise. In implementing the tasks referred to above, the Inspectorate implements the following functions:

1. Preparation of internal supervision policy formulation;
2. Implementation of internal supervision toward financial management through audits, reviews, evaluations, monitoring, and other supervisory activities;
3. Implementation of supervision on performance achievements of each working unit presented in the Performance Accountability Report;
4. Implementation of supervision for certain purposes toward the assignment of The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno;
5. Composition of report on supervision result;
6. Implementation of Inspectorate administration;
7. Ensure an internal control adequacy of the Ministry of State-Owned Enterprise;
8. Monitoring of reporting the State Administration Assets Report (LHKPN) and the State Civil Apparatus Wealth Report (LHKASN) of human resources of the



Birokrasi; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno.

Ministry of State-Owned Enterprise;

9. Coordinating the implementation of Bureaucratic Reform Self-Assessment; and
10. Implementation of other tasks provided by The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno.

Jenis Dan Kegiatan Pengawasan Intern

Audit

Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas (3E). Audit kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban. Audit kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu antara lain meliputi audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas penyelenggaraan SPIP.

Types and Activities of Internal Supervision

Audit

Audit is the process of problem identification, analysis, and evaluation of evidence implemented independently, objectively and professionally based on audit standards, to assess the truth, accuracy, credibility, effectiveness, efficiency and reliability of information on the implementation of duties and functions of organizational units within the Ministry of State-Owned Enterprise.

Performance audit is an audit of state finances management and the implementation of duties and functions of the Ministry which consist of economics, efficiency and effectiveness (3E) aspects. Performance audits produce information that is useful to improve performance of a program and facilitates decision making for those responsible to monitor and take corrective actions and increasing accountability. Performance audits produce findings, conclusions, and recommendations.

Audits with specific objectives include audits which are not included in the performance audit. Audits with specific objectives include audits of other matters in the field of finance, investigative audits, and audits on the SPIP implementation.





Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Kegiatan evaluasi paling sedikit terdiri dari evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta evaluasi atas Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian dilakukan berdasarkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang diterapkan khusus di lingkungan Kementerian dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (Kementerian PAN-RB).

Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan evaluasi terpisah untuk menilai mutu kinerja sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah dilakukan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan evaluasi terpisah harus mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya. Dalam melakukan evaluasi, apabila diperlukan, evaluator dapat menggunakan metode atau alat lain yang sesuai seperti perbandingan (benchmarking), kuesioner, bagan arus, dan teknik kuantitatif. Inspektorat dapat meminta bantuan dari instansi pemerintah yang berkompeten untuk melakukan evaluasi terpisah.

Monitoring/Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan paling sedikit terdiri dari pemantauan berkelanjutan atas sistem pengendalian intern dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Evaluation

Evaluation activity is a series of activities comparing results or achievements of an activity with standards, plans, or norms which has been stipulated, and determine factors which influence the success or failure of an activity in achieving the objective.

Evaluation activities consist of at least an evaluation of Government Institution Performance Report (LKIP) and Government's Internal Control System (SPIP) as well as an evaluation of Self-Assessment for Bureaucratic Reform Program (PMPRB).

Performance evaluation of organizational unit within the Ministry is implemented based on Internal Performance Accountability Evaluation Guidelines which are specifically applied in the Ministry's environment by referring to provisions stipulated by an authorized institution (State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reforms).

Evaluation of Government's Internal Control System (SPIP) is a separate evaluation to assess performance quality of the internal control system with certain scope and frequency based on the risk assessment and the effectiveness of ongoing monitoring procedures. Separate evaluation is implemented through self-assessment, review, and testing the effectiveness of an internal control system by using internal control test list which complies with statutory provisions.

Separate evaluation shall consider the scope and frequency of evaluations, methodologies, and resources. In evaluating, if necessary, evaluators can use other appropriate methods or tools such as benchmarking, questionnaires, flow charts, and quantitative techniques. The Inspectorate can request assistance from competent government institutions to conduct separate evaluations.

Monitoring

Monitoring is the process of evaluating the progress of a program or activity in achieving its stated objectives. Monitoring activities consist of at least continuous monitoring of the internal control system and monitoring of follow-up recommendations on audit results.



Yang dimaksud dengan pemantauan berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus-menerus dan menyatu dalam kegiatan Instansi Pemerintah. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.

Reviu

Kegiatan reviu merupakan proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Inspektorat wajib melaksanakan pekerjaan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian. Pelaksanaan reviu harus berpedoman pada Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Kementerian Keuangan).

Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya mencakup penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada BUMN, pemantauan LHKPN dan LHKASN, dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta penugasan lainnya berdasarkan penugasan Menteri BUMN Rini M. Soemarno/Sekretaris Kementerian BUMN.

Continuous monitoring is defined as an assessment of the quality of performance of an Internal Control System continuously and united in the activities of Government Institutions. Continuous monitoring is implemented through routine management activities, supervision, benchmarking, reconciliation, and other actions related to the implementation of tasks. Follow-up recommendations from audit results shall be immediately completed and implemented in accordance with the mechanism for resolving recommendations of the stipulated audit result.

Review

Review activities are process of reviewing the implementation of accounting and presentation of financial statements by auditors who are competent to provide limited confidence that accounting has been implemented based on the accounting system of institutions and financial statements have been presented in accordance with Government Accounting Standards, in an effort to help the Minister produces quality financial reports.

The Inspectorate is obliged to implement a review work on the Ministry's Financial Report. The review shall be guided by Review Standards on Financial Statements of State Ministries/Institutions issued by an authorized Institution (Ministry of Finance).

Other Monitoring Activities

Other monitoring activities include the completion of follow-up recommendations on results of BPK audits of the State-Owned Enterprise, monitoring of State Administration Assets Report (LHKPN) and the State Civil Apparatus Wealth Report (LHKASN), and construction of Integrity Zones towards Corruption Free Areas (WBK) and Clean Serving Bureaucracy Areas (WBBM), as well as other assignments based on the assignment of Minister of State-Owned Enterprise/Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprise.



Kegiatan Penunjang Pengawasan

Kegiatan penunjang pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan untuk menunjang terselenggaranya pengawasan intern yang tepat waktu, bermutu dan tepat guna. Kegiatan penunjang ini mencakup pengembangan kapabilitas Inspektorat dan profesionalisme SDM Inspektorat, Penyusunan rencana kerja berupa PKPT dan Peta Risiko Unit Kerja Kementerian BUMN, penyusunan RKA/Tapkin, penyusunan SOP/pedoman pengawasan, dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Inspektorat.

Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Seluruh hasil pengawasan intern akan didiskusikan dengan unit kerja yang diaudit untuk mendapatkan tanggapan atas hasil pengawasan tersebut. Tanggapan diharapkan dalam bentuk komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan. Untuk mendapatkan gambaran yang obyektif mengenai hasil pengawasan, seluruh atribut temuan pengawasan akan dipaparkan dan didiskusikan dengan unit kerja yang di audit.

Monitoring Support Activities

Monitoring support activities are activities to support the implementation of timely, quality and effective internal supervision. These supporting activities include capability development of the Inspectorate and the professionalism of Inspectorate Human Resources, Preparation of work plans in the form of PKPT and Risk Map of the Ministry of State-Owned Enterprise Work Unit, preparation of RKA/Tapkin, preparation of SOP/supervision guidelines, and preparation of Inspectorate Activity Accountability.

Exposure of Internal Monitoring Results

All results of internal monitoring will be discussed with the audited work unit to obtain a response toward supervision results. The response is expected in the form of commitment to follow up on monitoring recommendations. To obtain an objective picture of supervision results, all attributes of supervision findings will be presented and discussed with the audited work unit.



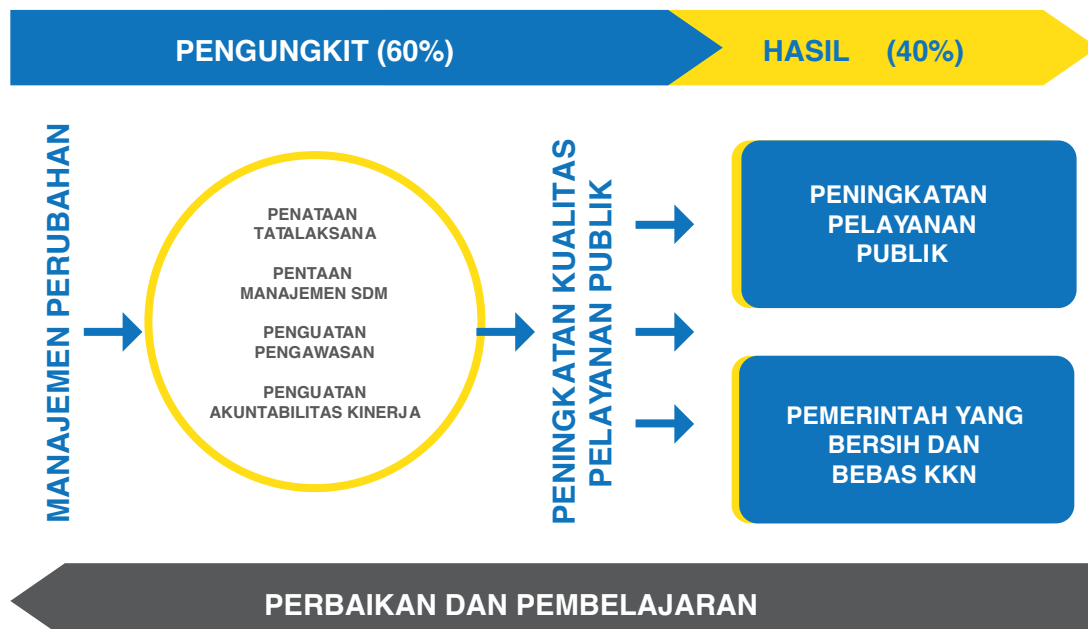


Zona Integritas

Bureaucratic Reform for Clean Governance

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada dua komponen yakni komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen hasil mencakup Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.

The Integrity Zone development process is focused on components, namely components of levers and yield components. The lever component is a component that determines the achievement of targets for Integrity Zone development towards WBK/WBBM. There are six components of levers, namely Change Management, Management Procedure, Human Resources Management Arrangement, Strengthening Performance Accountability, Strengthening Supervision, and Improving the Quality of Public Services. Components of results include Public Service Improvement and Community Service that is free and clean from Corruption, Collusion & Nepotism.



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas

Through this model, it can be explained that the Change Management program, Management Procedure, Human Resources Management Arrangement, Strengthening Performance Accountability, Strengthening Supervision,



Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

and Improving the Quality of Public Services are the components of leverage that are expected to produce a government targets that are free and clean from Corruption, Collusion & Nepotism and improve the quality of public services.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM adalah sebagai berikut:

Details of the work unit assessment weighting component that is certified toward WBK/WBBM are as follows:

Tabel 1. Rincian Bobot Komponen Pengungkit

NO.	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Sedangkan Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM adalah sebagai berikut:

Whereas for the Work Unit Result Indicator Weighting Component that is certified toward WBK/WBBM are as follows:

Tabel 2. Rincian Bobot Indikator Hasil

NO.	UNSUR INDIKATOR HASIL BOBOT	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

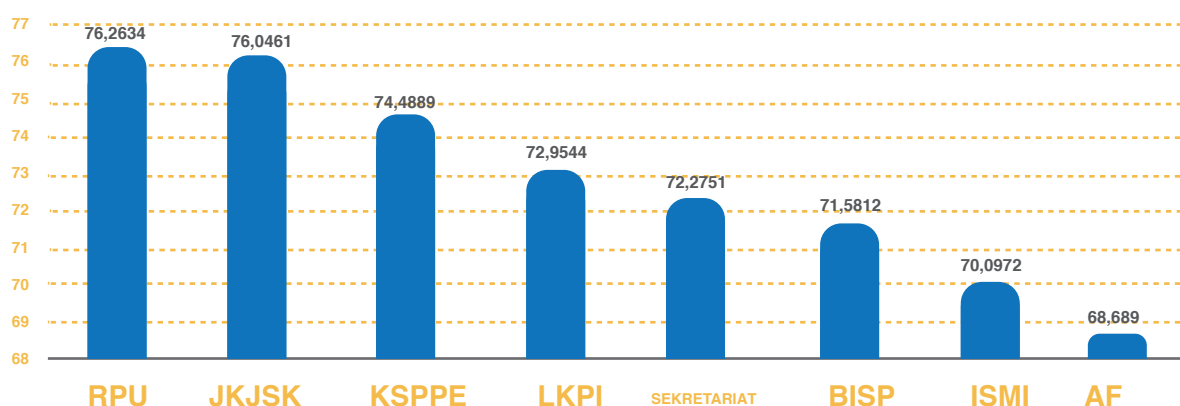
Hasil Penilaian

Dad proses penilaian terhadap 8 (delapan) unit kerja, didapatkan hasil penilaian sebagai berikut

Assessment Results

From the assessment process of 8 (eight) work units, assessment results are obtained as follows:

SKOR ZONE INTEGRITAS





Sebagaimana tertuang di dalam Bab III huruf B butir 4.1 Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 tahun 2014, salah satu syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75. Berkaitan dengan hal tersebut, unit kerja yang dapat diusulkan sebagai untuk mendapat prediket WBK adalah Kedeputan Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha (RPU) dan Kedeputan Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan (JKJSK).

Rekomendasi

Secara keseluruhan praktik yang perlu diperbaiki adalah:

1. Manajemen Perubahan, yaitu Pembentukan Tim Kerja, Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas dan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
2. Penataan Tatalaksana, yaitu Prosedur operasional tetaD (SOP) kegiatan utama dan E-Office.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM, yaitu Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu dan Penegakari aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.
4. Penguatan Pengawasan, yaitu Pengendalian Giatifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, Whistle-Blowing System dan Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu Standar Pelayanan dan Budaya Pelayanan Prima.

Sebagai bagian dalam proses menuju perbaikan Zona Integritas, Kementerian BUMN juga terus menghimbau kepada setiap Pimpinan untuk melaporkan kewajibannya berupa pelaporan LHKPN. Adapun pada tahun 2018, kepatuhan pelaporan LHKPN adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	%
1.	Menteri	100%
2.	Eselon I	85,71%
3.	Eselon II	61,11%

As set forth in Chapter III letter B point 4.1 Ministerial Regulation of the State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reform No. 52 of 2014, one of the requirements of work units which can be determined as WBK is to have a minimum total value (leverage and yield) of minimum 75. In this regard, the work unit which can be proposed as WBK predicate is the Deputy for Business Restructuring and Development (RPU) and Deputy for Financial Services, Survey Services and Consultants (JKJSK).

Recommendation

Overall practices that require to be improved are:

1. Change Management, namely the Establishment of a Working Team, Compilation of the Development Plan for Integrity and Failure Monitoring and Evaluation Zone.
2. Management Procedures, namely the main operational procedure and E-Office.
3. Structuring the Human Resources Management System, namely competency-based employee development, Determination of individual performance and Enforcement of rules of discipline/code of ethics/code of conduct of employees.
4. Strengthening Supervision, namely Giatification Control, SPIP Implementation, Society Complaints, Whistle-Blowing System and Handling Conflict of Interest.
5. Quality Improvement of Public Services, namely Service Standards and Culture of Excellent Service.

As part of process toward an improvement of Integrity Zone, the Ministry of State-Owned Enterprise appealed every Chairperson to report his/her obligation in the form of LHKPN reporting. As for 2018, compliance of LHKPN reporting are as follows:



MAKIN BAIK Manajemen Kinerja Berbasis Elektronik

MAKIN BAIK Electronic Based Performance Management

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berpedoman kepada kedua hal tersebut, Kementerian dan Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Renstra selanjutnya dijabarkan setiap tahun secara lebih rinci dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Selain itu, Renstra juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Setiap tahunnya, RPJMN dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara itu, Kementerian dan Lembaga menyusun RKT dan Renja disusun setiap tahun sekali berdasarkan kinerja dan anggaran dalam Renstra dan mendetilkannya dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA tersebut akan menjadi dasar penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada akhir tahun. Maksimal 1 bulan setelah DIPA telah ditetapkan, maka pejabat di lingkungan Kementerian dan Lembaga wajib menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang berisi target-target dalam satu tahun yang ditandatangani oleh pejabat dan pimpinannya. Pada akhir periode, Kementerian dan Lembaga menyusun Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan PK yang ditetapkan oleh unit kerja.

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, disebut Akuntabilitas Kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat,

In order to achieve the vision and mission of the Government of the Republic of Indonesia, the Government drafted the Government's Long Term Development Plan (RPJPN) and the National Medium Term Development Plan (RPJMN). Guided by these two matters, the Ministries and Institutions developed Strategic Plan (Renstra) which is an elaboration of the RPJMN. The next Strategic Plan is elaborated every year in more detail in the Annual Performance Plan (RKT). In addition, the Strategic Plan is also used as a guideline in the preparation of Ministries/Institutions Work Plans. Every year, the RPJMN is outlined in the Government Work Plan (RKP). Meanwhile, the Ministries and Institutions compile RKTs and Renja once a year based on performance and budget in the Strategic Plan and determine them with the Work Plan and Budget (RKA). The RKA will be issued by the issuance of the Budget Implementation List (DIPA) at the end of the year. A maximum of 1 month after DIPA has been stipulated, officials in the Ministry and Institution shall compile a Performance Agreement (PK) containing targets in one year signed by officials and their leaders. At the end of the period, the Ministries and Institutions prepare a Performance Report (LKJ) based on the PK determined by the working unit.

The realization of the obligation of a government institution to account for the success/failure of the implementation of Programs and Activities mandated by stakeholders in order to achieve the organization's mission measurably with the performance targets/targets stipulated through periodic government institution performance reports, called Performance Accountability. Government Institution Performance Accountability System, hereinafter abbreviated as SAKIP, is a systematic series of various activities, tools, and procedures designed for the purpose



dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Kementerian BUMN mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi dan terobosan implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Kementerian BUMN untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kementerian BUMN. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar Kementerian BUMN juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan

of setting and measuring, data collection, classification, and reporting of performance in government institutions, in the framework of accountability and performance improvement of government institutions.

Strengthening performance accountability is one of the programs implemented in the framework of bureaucratic reform to create clean and free government from Corruption, Collusion & Nepotism (KKN), increasing the quality of public services to the society, and increasing the capacity and accountability of bureaucratic performance. Strengthening accountability is implemented by implementing the Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) as referred to in Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP).

To find out the extent to which the Ministry of State-Owned Enterprise implements its Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP), as well as to encourage an increase in the performance of government institutions, an evaluation toward Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) implementation is necessary. This evaluation is expected to be able to encourage the Ministry of State-Owned Ministry to consistently improve the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) and realize the performance achievements (results) of its institutions as mandated in the RPJMN.

Evaluation of the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) is a systematic analysis activity, providing values, attributes, appreciation, and recognition of problems, as well as providing solutions to problems found for the purpose of increasing the accountability and performance of the Ministry of State-Owned Enterprise. In various cases, evaluation is implemented through monitoring the existing system, but sometimes evaluations cannot be implemented only by using information generated by the information system in the institution. Data from outside the Ministry of State-Owned Enterprise is also very important



data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Di lingkungan Kementerian BUMN, seluruh aktivitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dapat diakses melalui aplikasi SiManis dalam menu Makin Baik. Sistem Manajemen Informasi atau SiManis merupakan portal yang memudahkan Kementerian BUMN dalam pengelolaan administrasi dan

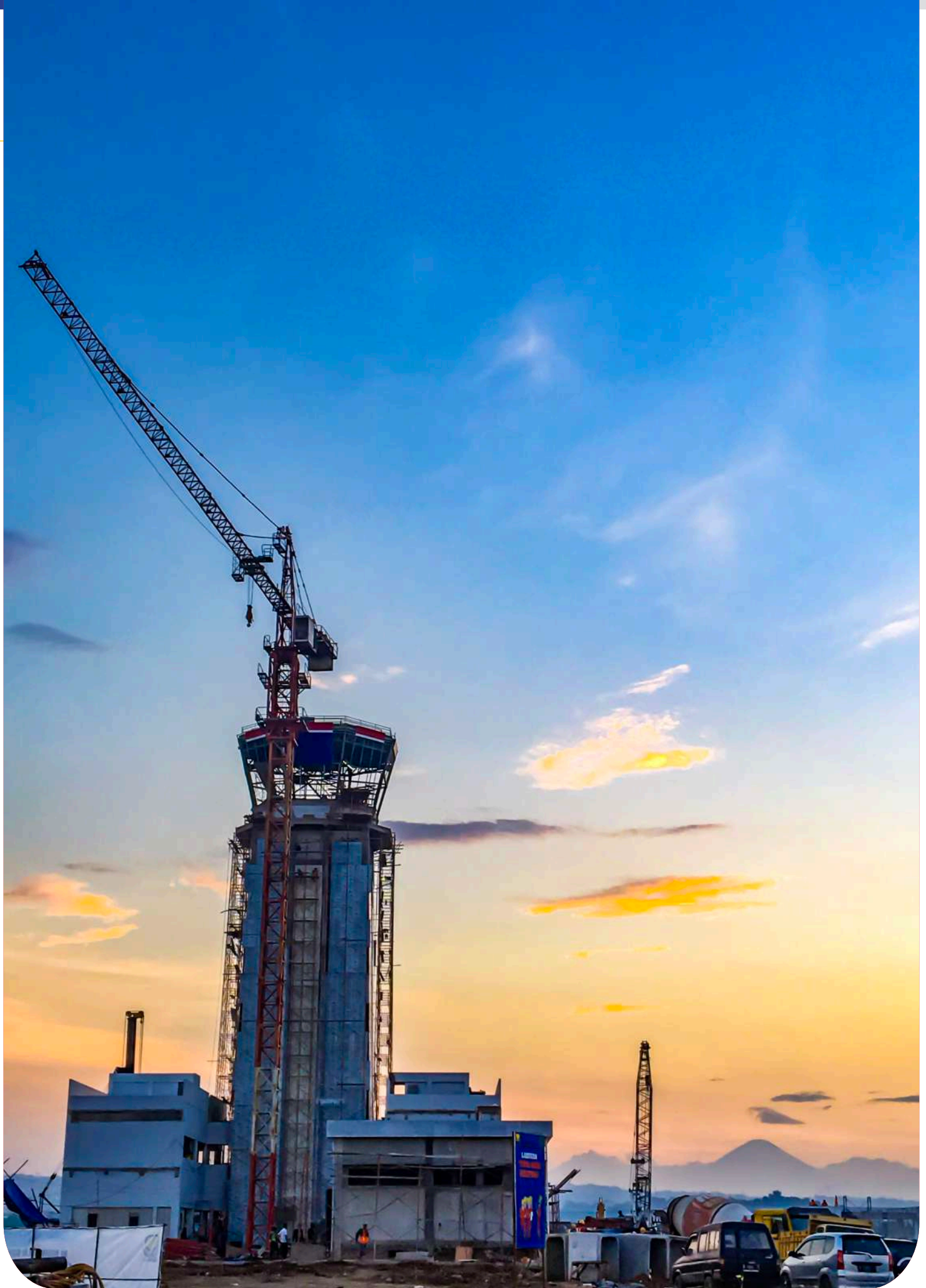
as an analysis material. Evaluation can be implemented by not having to depend on the completeness and accuracy of existing data. Adequate information can be used to support arguments concerning requirements for improvement. The use of data for evaluation prioritizes the speed of obtaining data and its usefulness. Thus, evaluation results will be more quickly obtained and corrective actions can be taken immediately. Evaluation focuses more on data collection and analysis to build arguments for formulating suggestions/recommendations for improvement. The nature of evaluation is more persuasive, analytical, and considers the possibility of its application.

The evaluation purpose of the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) can be determined annually in accordance with the established evaluation policy. The goals and objectives of the evaluation are highly dependent on users of evaluation results and policies of institutions/working unit chairperson that is authorized to implement evaluations, taking into account on various constraints which exist.

Generally, the purpose of evaluating the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) is to:

1. Obtain information concerning Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP) implementation.
2. Assessing implementation level of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP);
3. Providing suggestions for improvement to increase the implementation of Performance Accountability System of Government Institutions (SAKIP).
4. Monitoring recommendation follow-up from previous evaluation results.

In the Ministry of State-Owned Enterprise, all performance planning activities, performance measurement, performance evaluation, and performance achievements can be accessed through SiManis application in Makin Baik menu. The Information Management System (SiManis) is a portal that facilitates the Ministry of State-Owned



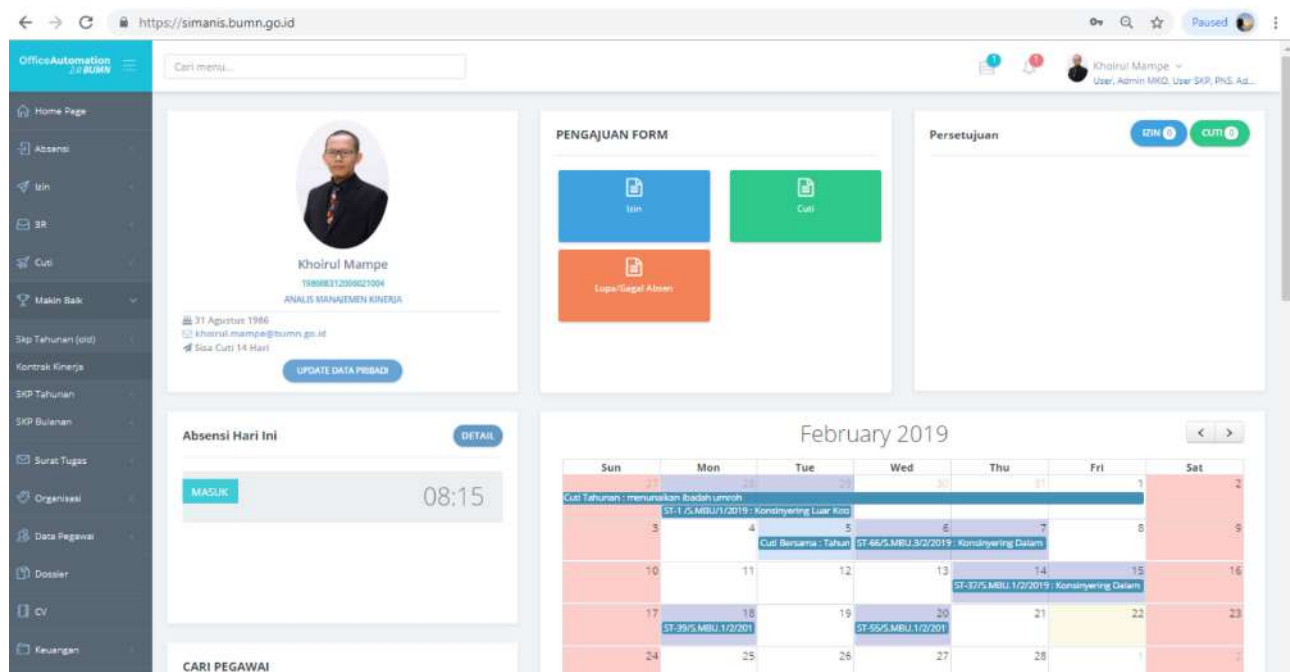


data kepegawaian, manajemen kinerja organisasi dan individu, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pengelolaan organisasi dan proses bisnis internal lainnya.

Enterprise in managing administration and employment data, management of organizational and individual performance, accountability for financial management, management of organizations and other internal business processes.

Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian BUMN, SiManis menjadi alat untuk penguatan pelaksanaan manajemen kinerja individu dan organisasi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi Makin Baik (Manajemen Kinerja Berbasis Elektronik).

In managing performance accountability in the Ministry of State-Owned Enterprise, SiManis is a tool for strengthening the implementation of performance management for individuals and organizations, in which there is Makin Baik application (Electronic Performance Based Management).



Makin Baik ini menjadi solusi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian BUMN. Dengan adanya menu Makin Baik ini IKU Kementerian BUMN dapat dipastikan turun dari IKU Renstra sampai dengan level individu di lingkungan Kementerian BUMN. Alignment antara IKU dari Renstra sampai dengan level individu selama ini menjadi kendala di hamper semua Kementerian dan Lembaga, namun dengan adanya Makin Baik, Kementerian BUMN dapat memastikan bahwa IKU di dalam Renstra Kementerian BUMN telah align dan dilaksanakan oleh unit kerja eselon I yang sesuai, Eselon II yang melaksanakan, Eselon III yang membawahi, Eselon IV yang bertanggung jawab, bahkan sampai dengan level

This Makin Baik becomes a solution in implementing performance accountability in the Ministry of State-Owned Enterprise. With the existence of this Makin Baik Menu, the Key Performance Indicator of the Ministry of State-Owned Enterprise can be ascertained to drop from Key Performance Indicator Strategic Plan to the individual level within the Ministry of State-Owned Enterprise. Alignment between the Key Performance Indicator from Strategic Plan to individual level has become an obstacle to almost all Ministries and Institutions, but with Makin Baik, the Ministry of State-Owned Enterprise can ensure that the Key Performance Indicator in the Ministry of State-Owned Enterprise's Strategic Plan aligns and is implemented by



pelaksana di lapangan.

Target kinerja dan realisasinya disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pegawai menjadi lebih mudah dan cepat dalam membuat target kinerja, realisasi kinerja sampai dengan pelaporan kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Penyusunan dilakukan untuk target kinerja tahunan maupun bulanan, realisasi bulanan maupun tahunan dan pelaporan bulanan maupun pelaporan tahunan.

Makin Baik disusun berdasarkan hasil kolaborasi antara peraturan di Pemerintahan yang mengatur mengenai akuntabilitas kinerja, dan penilaian kinerja di korporasi. Untuk memperoleh menghasilkan Makin Baik, Kementerian BUMN melakukan benchmarking pelaksanaan manajemen kinerja ke instansi Pemerintah yang memiliki nilai SAKIP tertinggi, kepada BUMN yang memiliki nilai Good Corporate Governance (GCG) yang terbaik, mengundang narasumber profesional, dan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). Hal ini dilakukan semata untuk memperoleh model manajemen kinerja terbaik, mudah dipakai namun tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Target kinerja jabatan/individu ditentukan oleh pengelola manajemen kinerja organisasi. Dalam hal ini pengelola manajemen kinerja organisasi mereviu dan memastikan bahwa target kinerja tahunan ataupun bulanan yang disusun pegawai telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat di dalam informasi jabatan dan telah align dengan IKU unit kerja sampai dengan IKU-IKU yang tercantum di dalam Rensrta Unit Kerja Eselon I dan terutama IKU-IKU di dalam Renstra Kementerian BUMN. Pengelola manajemen kinerja organisasi mengidentifikasi dan menyusun Bank IKU yang harus dicapai serta cara menghitung capaian IKU tersebut pada setiap nama jabatan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Tugas dan fungsi di dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja;
2. Target IKU Renstra unit kerja Eselon II

the appropriate echelon I working unit, Echelon II that subordinated, Echelon III that is in charge, Echelon IV that is responsible, even up to the executor level in the field.

Performance targets and their realization are arranged in such a way that all employees become easier and faster in making performance targets, realization of performance up to performance reporting, both individual performance and organizational performance. Compilation is implemented for annual and monthly performance targets, monthly and annual realization and monthly reporting and annual reporting.

Makin Baik is arranged based on collaboration results between regulations in the Government that regulate performance accountability, and performance appraisal in the corporation. To obtain Makin Baik results, the Ministry of State-Owned Enterprise implements benchmarking of performance management to Government institutions that have the highest SAKIP value, to the State-Owned Enterprise that have the best value of Good Corporate Governance (GCG), invite professional speakers, and implement Focus Group Discussions (FGD). This is solely implemented to obtain the best performance management model, easy to use but still fulfills an applicable provision.

Position/individual performance targets are stipulated by the organization's performance management manager. In this case, the organization's performance management manager reviews and ensures that the annual or monthly performance targets compiled by employees are in accordance with the tasks and functions contained in job information and aligned with the working unit Key Performance Indicator up to the Key Performance Indicators listed in the Strategic Plan of Echelon I Working Unit and specifically Key Performance Indicators of Strategic Plan in the Ministry of State-Owned Enterprise. Organizational performance management managers identify and compile the Bank's Key Performance Indicator which shall be achieved and how to calculate the achievement of Key Performance Indicator on each position name using several approaches, namely:

1. Tasks and functions in the Ministerial Regulation concerning Organization and Procedure;
2. Target of Key Performance Indicator Strategic Plan of



3. Target IKU Renstra unit kerja Eselon I;
4. Target IKU Renstra Kementerian BUMN;
5. Ketentuan yang mengatur mengenai manajemen kinerja;
6. Best practice yang dijalankan oleh perusahaan besar dan instansi Pemerintah;
7. Wawancara terhadap perwakilan pegawai yang menjabat pada nama jabatan yang sama/serupa;
8. Informasi eksternal lainnya.

Setelah memiliki bank IKU dan cara perhitungannya, maka para pegawai tidak perlu lagi membuat target-target IKU tahunan dan bulanan. Dalam menyusun target kinerja tahunan dan bulanan, mereka hanya cukup memilih data dari Bank IKU tersebut yang telah disusun dan disetujui oleh pengelola manajemen kinerja organisasi.

Dalam pemilihan IKU tahunan dan bulanan pun para pegawai tidak dapat memilih sesuka hati. Untuk target kinerja tahunan, masing-masing pegawai memiliki 5 target, dimana 2 IKU target tahunan adalah target mandatory dari informasi jabatan dan Renstra, 1 IKU dipilihkan oleh atasannya, 1 IKU dipilih sendiri oleh pegawai yang bersangkutan dan 1 IKU akuntabilitas kinerja. IKU akuntabilitas kinerja merupakan rata-rata nilai capaian kinerja pegawai setiap bulan. Capaian kinerja bulanan pegawai akan mempengaruhi capaian kinerja tahunan. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa para pegawai menjalankan aktivitas sesuai dengan rencana dan timeline yang telah ditentukan.

Sementara itu, target kinerja bulanan setiap pegawai dengan jumlah minimal 1 output dalam satu bulan. Pegawai tidak diperkenankan mengosongkan target kinerja dalam bulan berjalan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap perhitungan tunjangan kinerja pegawai setiap bulannya.

Target kinerja pegawai baik bulanan dan tahunan harus memperoleh approval dari atasan masing-masing. Setelah

Echelon II working unit

3. Target of Key Performance Indicator Strategic Plan of Echelon I working unit;
4. Target of Key Performance Indicator Strategic Plan the Ministry of State-Owned Enterprise;
5. Provisions governing performance management;
6. Best practices run by large companies and Government institutions;
7. Interviews with representatives of employees serving the same/similar position names;
8. Other external information.

After having the bank's Key Performance Indicator and how to calculate it, the employees no longer require to make annual and monthly Key Performance Indicator targets. In preparing annual and monthly performance targets, they only have to select data from the Bank's Key Performance Indicator which has been prepared and approved by the organization's performance management manager.

Even in the annual and monthly Key Performance Indicator elections, employees cannot choose accordingly. For annual performance targets, each employee has 5 targets, of which 2 Key Performance Indicator annual targets are mandatory targets from position information and Strategic Plan, 1 Key Performance Indicator is chosen by his/her supervisor, 1 Key Performance Indicator is chosen by the relevant employee and 1 Key Performance Indicator is accountable for performance. Performance Accountability of Key Performance Indicator is an average value of employee performance achievements every month. Achievement of employee's monthly performance will affect annual performance achievements. This is implemented in hope that employees implementing their activities in accordance with the stipulated plan and timeline.

Meanwhile, monthly performance target of each employee with a minimum of 1 output in one month. Employees are not allowed to vacate performance targets in the current month, because this will affect the calculation of employee performance benefits each month.

Employee performance targets both monthly and annually shall obtain approval from their respective supervisors.



pegawai mengisi target kinerja, maka atasan mereka akan memperoleh notifikasi agar melakukan approval atas target kinerja yang telah dibuat oleh bawahannya. Bawahan tidak akan bisa mengisi realisasi capaian kinerja, ketika target kinerja mereka belum di approve oleh atasan mereka.

Dalam penyusunan target kinerja, seorang atasan dapat meng-claim target kinerja salah satu atau seluruh target bawahannya. Apabila atasan melakukan claim target bawahan, dan pada saat target bawahan tersebut telah tercapai, maka secara otomatis target kinerja atasan tersebut juga akan tercapai. Hal ini tentunya akan memotong rangkaian aktivitas serupa (upload dokumen yang sama). Target kinerja dan realisasi kinerja pegawai dapat diklaim oleh pegawai lain dengan hubungan vertikal dalam struktur organisasi.

Dengan adanya Makin Baik, terbukti bahwa kepedulian pegawai Kementerian BUMN terhadap penyusunan target kinerja meningkat melebihi ekspektasi. Sebelum tahun 2018, jumlah pegawai yang menyusun target kinerja tidak lebih dari 50%, namun ketika Makin Baik ini diluncurkan, jumlah pegawai yang menyusun target kinerja adalah 100%. Salah satu faktor yang membuat para pegawai menggunakan Makin Baik adalah fiturnya yang sederhana dan mudah dipakai. Adanya keterkaitan antara pengisian Makin Baik dengan tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai juga mempengaruhi hal ini. Tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian BUMN tidak hanya dihitung berdasarkan presensi dan hukuman disiplin pegawai, melainkan juga dipengaruhi oleh capaian kinerja bulanan pegawai dan ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja pegawai. Apabila pegawai tidak mencapai kinerja dalam bulan tertentu, maka tukin pegawai tersebut akan dipotong (punishment). Demikian juga, apabila terdapat pegawai yang tidak menyampaikan realisasi bulanan, maka pembayaran tunjangan kinerja mereka akan ditunda sampai dengan pegawai yang bersangkutan menyampaikan realisasi capaian kerjanya.

After employees fill the performance target, their supervisor will obtain notification to approve performance targets made by their subordinates. Subordinates will not be able to fill the realization of performance achievements, when their performance targets have not been approved by their supervisors.

In preparing performance targets, supervisor can claim the performance target of one or all of his/her subordinate targets. If the supervisor claims subordinate's target, and when subordinate's target has been reached, the supervisor's performance target will automatically be achieved. This of course will cut a series of similar activities (upload the same document). Performance targets and realization of employee performance can be claimed by other employees with vertical relationships in the organizational structure.

With the existence of Makin Baik, it is evident that the concern of employees of the Ministry of State-Owned Enterprise towards the preparation of performance targets has exceeded expectations. Before 2018, the number of employees who compiled a performance target was not more than 50%, but when Makin Baik was launched, the number of employees who compiled the performance target was 100%. One factor that makes employees use Makin Baik is its simple and easy to use feature. The relationship between filling in Makin Baik and the performance allowances received by employees also affects this. Employee performance benefits in the Ministry of State-Owned Enterprise are not only calculated based on the presence and punishment of employee discipline, but are also influenced by the achievement of monthly employee performance and the timeliness of reporting employee performance achievements. If the employee does not achieve performance in a particular month, thus the employee will be cut (punishment). Likewise, if there is an employee who does not submit monthly realization, thus the payment of their performance benefits will be postponed until the relevant employee conveys the realization of performance achievements.



Capaian realisasi target bulanan yang diupload ke dalam Makin Baik juga memiliki kriteria, yaitu merupakan dokumen akhir dari sebuah proses. Dokumen tersebut bukan hanya file mentah, melainkan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Achievement of the realization of monthly targets uploaded into Makin Baik also has criteria, which is the final document of a process. The document is not only a raw file, but a document that is authorized by an authorized official.

Makin Baik ini berisi pula tentang daftar penilaian prestasi kerja (DP3) dan nilai prestasi individu (NPI). NPI ini dipengaruhi oleh nilai DP3, tingkat kerapian tempat kerja, nilai keaktifan dalam berbagi gagasan di SiBagas dan laporan penugasan lainnya. Makin Baik merupakan kolaborasi dan jawaban atas kebutuhan Kementerian BUMN dalam melakukan manajemen kinerja yang lebih baik.

Makin Baik contains the work performance assessment list (DP3) and individual achievement scores (NPI). The NPI is influenced by the value of DP3, the level of neatness of the workplace, the value of activeness in sharing ideas in SiBagas and other assignment reports. Makin Baik constitutes collaboration and answers to the requirement of the Ministry of State-Owned Enterprise in implementing a better performance management.

Makin Baik adalah aplikasi IT untuk mempermudah proses bisnis manajemen kinerja baik dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi. Penggunaan aplikasi IT adalah suatu keharusan mengingat di Kementerian BUMN memiliki tidak kurang dari 142 fungsi yang berbeda-beda untuk masing-masing individu pegawai dan tidak kurang dari 2.500 jenis indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur manajemen kinerja seluruh pegawai Kementerian BUMN. Jumlah tersebut dapat meningkat sesuai dengan sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kementerian BUMN kedepannya.

Makin Baik is an IT application to facilitate the process of performance management business either from planning, reporting and evaluation. The use of IT application is mandatory considering that in the Ministry of State-Owned Enterprise, there are no less than 142 different functions for each employee individual and no less than 2.500 types of performance indicators used to measure the performance management for the entire employees to the Ministry of State-Owned Enterprise. Such amount can increase according to the target and policy to be achieved by the Ministry of State-Owned Enterprise in the future.





Tata Kelola dan Kinerja yang Akuntabel

Accountable Governance and Performance

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Performance Accountability is the realization of government institution's responsibility to account for accomplishments and failures of organization mission in achieving objectives and purposes which have been stipulated, periodically through accountability system.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Dikatakan juga dalam Inpres tersebut bahwa sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja

Performance Accountability is the realization of government institution's responsibility to account for accomplishments and failures of organization mission in achieving objectives and purpose which have been stipulated, periodically through accountability system.

Within Presidential Instruction No. 7 Year 1999 it is expressed that the purpose of Government Institution Performance Accountability System is to promote the creation of government institution's performance accountability as one of prerequisites for a good and trusted government. Government Institution Performance Accountability System is performed over all government Institutions' main activities. It is also mentioned in Presidential Instruction that the target of Government Institution Performance Accountability System are as follows:

- a. Shaping accountable Government Institutions in order to operate efficiently, effectively, and responsively towards society's aspiration and their environment
- b. Realization of the transparency of Government Institutions
- c. Realization of society's participation in implementing national development
- d. Maintaining society's trust towards the Government

Realization of this accountability is then arranged and delivered in form of Ministry of State Owned Enterprises



Kementerian BUMN.

Dalam upaya memperoleh gambaran implementasi SAKIP, maka selanjutnya setiap instansi dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam proses penilaiannya, evaluasi SAKIP didasarkan pada 5 komponen pokok penilaian sebagai berikut:

Performance Report.

In order to achieve implementation overview of SAKIP (Performance Accountability System of Government Institutions), then each institution will be evaluated for SAKIP implementation as the execution of Presidential Regulation Number 29 year 2014 concerning Government Institution Performance Accountability System: In general, the objective of SAKIP implementation evaluation are as follows:

1. Obtaining information concerning SAKIP implementation;
2. Assessing SAKIP implementation level;
3. Providing suggestions for improvement in order to improve SAKIP implementation;
4. Monitoring the follow-up of evaluation results recommendation of the previous period.

In the assessment process, SAKIP evaluation is based on 5 assessment primary components which are as follows:

No	Component	Weight	Sub-component
1.	Performance Planning	30%	Strategic Planning, Yearly Performance Planning
2.	Performance Measurement	25%	Fulfillment of measurement, measurement quality, measurement implementation
3.	Performance Reporting	15%	Fulfillment of report, report quality, utilization of report
4.	Internal Evaluation	10%	Fulfillment of evaluation, evaluation quality, utilization of evaluation results
5.	Performance Achievement	20%	Reported performances, performance of the current year



1. Perencanaan Kinerja Performance Planning

Perencanaan Kinerja merujuk pada RPJMN yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra Kementerian BUMN Tahun 2015-2019 dengan arah kebijakan untuk mendukung Nawacita dan roadmap BUMN.

Performance Planning refers to RPJMN which is derived into Ministry of State Owned Enterprises' Strategic Planning for 2015-2019 with policy direction towards supporting State-Owned Enterprise's Nawacita and Roadmap.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Performance planning is a performance plan arrangement process as a description of objectives and programs which are stipulated in strategic planning, which are performed by government Institutions through various yearly activities. Within performance plan, yearly performance achievement plans for all performance indicators which are included in objective levels are determined and performance plan arrangement activity is implemented along with arrangement agenda and budget policy, it is also a commitment for Institutions to achieve the said performance plan within the specified year.

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Strategic Planning for 2015 – 2019

Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019

Merupakan penjabaran visi misi Kementerian BUMN selaku penyelenggara urusan Pemerintah di bidang pembinaan BUMN yang dilengkapi dengan rencana nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden yang berisi:

Tujuan (UU 19/2013)

- ❖ Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai organisasi yang profesional.
- ❖ Mewujudkan peran dan kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional.

Sasaran Strategis

- ❖ 4 perspektif.
- ❖ 11 sasaran strategis.
- ❖ 37 indikator kinerja utama.

Arah Kebijakan

- ❖ Selaras dengan Trisakti.
- ❖ Mendukung Nawacita.
- ❖ Transparansi, RB dan transformasi.
- ❖ Framework roadmap BUMN.

Kerangka Regulasi

Mengoperasionalkan kebijakan terpilih yang dimaksudkan untuk mendukung dan memantapkan prioritas pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan dan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah.

Visi

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.

Misi

Sesuai dengan 7 misi pembangunan Pemerintah.

Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis K/L (APBN dan non APBN).

Target Kinerja

Kinerja yang hendak dicapai Kementerian (Perjanjian Kinerja) dan alignment sampai dengan target unit kerja.

Kerangka Regulasi

- ❖ Penguatan koordinasi antar instansi.
- ❖ Penataan tugas, fungsi dan kewenangan KBUMN.
- ❖ Penyederhanaan struktur organisasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas.
- ❖ Penyempurnaan aturan main.
- ❖ Penyediaan ASN profesional, berintegritas, dan berkinerja.





Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan nasional, Kementerian BUMN merumuskan target ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa sasaran strategis (SS) organisasi. Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan yakni periode 2015-2019. Pada periode tersebut Kementerian BUMN menjalankan 11 sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja utama. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan empat perspektif, yakni stakeholder perspective, customers perspective, internal perspective dan learning and growth perspectives. Adapun penjelasan terkait keempat perspektif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perspektif Stakeholders

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholders. Stakeholders (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

b. Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi.

c. Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

d. Perspektif Learning and Growth

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna

In order to achieve visions and missions of national development, the Ministry of State-Owned Enterprise formulates objectives in a more oriented and operational way in form of organization strategic objectives (SS, Sasaran Strategis). Strategic objectives are formulations or implementations of mission statements which will be achieved or generated in span of 1 to 5 years, 2015 – 2019. Within the said period, Ministry of State-Owned Enterprise had performed 11 strategic objectives with 37 main performance indicators. These strategic objectives are arranged based on four perspectives, i.e. stakeholder perspective, customer perspective, internal perspective, and learning and growth perspectives. As for the description associated with the said four perspectives are as follows:

a. Stakeholder Perspective

This perspective includes SS which is desired to be realized by the organization in order to fulfill expectations so as to be assessed as successful in stakeholders' perspective. Stakeholders are internal or external parties which are directly or indirectly have interests towards outputs or outcomes from the organization but do not directly utilize the said organization's services.

b. Customer Perspective

This perspective includes SS which is desired to be realized by the organization in order to fulfill the expectations from customers and/or organization expectations towards customers. Customers (service users) are external parties associated with organization services.

c. Internal Process Perspective

This perspective includes SS which is desired to be realized through a series of process managed by the organization in order to provide services and creates values for stakeholders and customers (value chain).

d. Learning and Growth Perspective

This perspective includes SS which is ideal condition concerning organization's internal resources which are desired to be realized or what should be owned by the

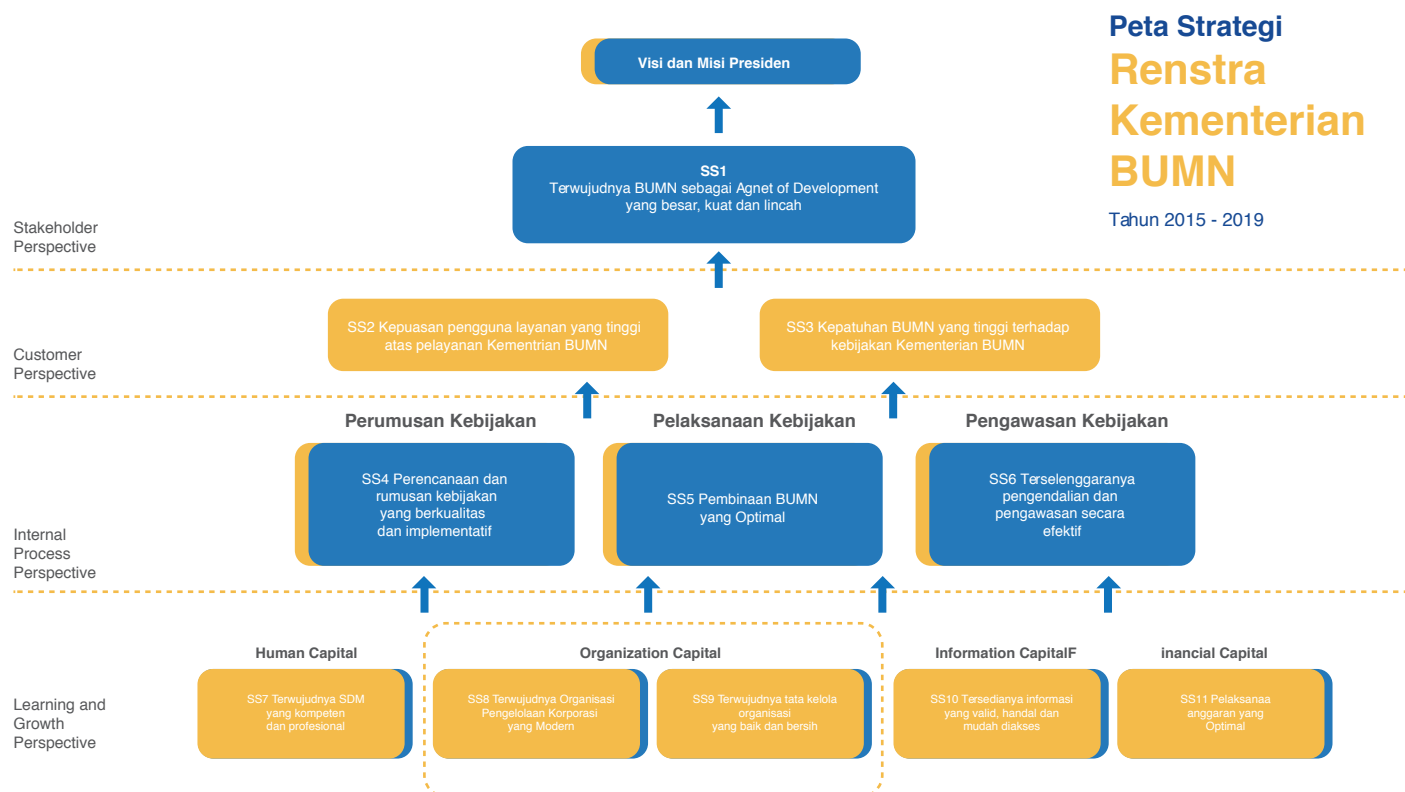


menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

organization in order to perform business process to generate organization output or outcome corresponding to customers and stakeholders' expectations.

Gambaran peta strategi Kementerian BUMN tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

The overview of the Ministry of State-Owned Enterprise's strategic map for 2015 – 2019 are as follows:



Kemudian peta strategi tersebut dituangkan ke dalam rencana sebagai berikut:

Thus, the strategic map is explained into the plan as follows:



Peta Strategi Tahun 2015-2019 yang ditandatangani oleh Menteri dan seluruh Deputi sebagai Komitmen Bersama





Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan organisasi yang menggambarkan rencana capaian 1 (satu) tahunan yang diturunkan dari Renstra. Di dalam RKT tersebut juga dijelaskan IKU yang dijadikan target, Program Kerja yang akan dilaksanakan, Trajectory target per triwulan dan juga anggaran yang disediakan untuk mencapai target dan untuk menjalankan program yang sudah direncanakan.

Rencana Kinerja Tahunan wajib disusun dari level Kementerian BUMN, Unit Eselon I dan Eselon II.

Annual Performance Plan (RKT)

The Annual Performance Plan is an organizational planning document that describes the 1 (one) year achievement plan derived from the Strategic Plan. The Annual Performance Plan also describes Key Performance Indicator as the target, the Work Program to be implemented, the Trajectory target per quarter and also the budget provided to achieve targets and to execute the planned program.

Annual Performance Plans shall be prepared from the level of the Ministry of State-Owned Enterprise, Echelon I and Echelon II Units.





2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Performance Agreement for 2018

Seluruh pengelolaan kinerja organisasi maupun kinerja pegawai dilakukan melalui aplikasi digital yaitu Makin Baik (Aplikasi Manajemen Kinerja Berbasis Elektronik).

The whole organization performance management as well as employee performance are implemented through digital application, that is Makin Baik (Aplikasi Manajemen Kinerja Berbasis Elektronik, Electronic Based Performance Management Application)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Performance agreement is a sheet/document which contains assignments from an institution leader of higher position to institution leader of lower position to execute programs/activities which is accompanied with performance indicators. Through performance agreement, commitment of trustee recipient and deal between the trustee recipient and trustee on a specified measured performance based on assignment, function, and authority, along with available resources is realized. The performance which is agreed by both parties is not limited to the generated performance from the associated activity for the year, but also the performance (outcome) which should be realized which resulted from activities of the past years. Thus, a performance objective which is agreed upon also includes the outcome which is generated from activities of the past years so performance continuity for each year is realized.





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah	Jumlah aset BUMN	Rp 7,375 Triliun
		Jumlah laba BUMN	Rp 195 Triliun
		Jumlah ekuitas BUMN	Rp 2,848 Triliun
		Jumlah capex BUMN	Rp 610,7 Triliun
		BUMN yang masuk perusahaan kelas dunia	4 BUMN
		Kontribusi BUMN terhadap negara	Rp 315 Triliun
		Persentase pencapaian roadmap BUMN	75% dari seluruh tahapan Roadmap
2	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN	Tercapainya SLA penugasan PSO	97%
		Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	92%
3	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN	Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait /stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN	86%
		Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100%
		Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	100%
4	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif	Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100%
		Terpenuhinya Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)	Agustus 2018
5	Pembinaan BUMN yang optimal	Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	100%
		Penetapan Direksi Sesuai dengan Peraturan	100% Sebelum masa jabatan berakhir
		Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu	100% RUPS RKAP
			100% RUPS Audit
		Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN	100% tersedia kontrak kinerja



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif	Persentase Tindak Lanjut LHP BPK	100%
7	Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional	Indeks peningkatan kompetensi pegawai	4 (Skala 1-5)
8	Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern	Persentase Pencapaian Road Map Transformasi Organisasi	75% seluruh tahapan roadmap
9	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	75
		Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	76
		Nilai Zona Integritas	76
10	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	95%
		Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi	≥90%
11	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Persentase Pemanfaatan Anggaran	≥90%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP Kementerian BUMN	

Dari IKU yang tercantum pada Renstra Kementerian BUMN tahun 2015-2019, terdapat beberapa perubahan IKU sebagai tindak lanjut dari hasil assesment SAKIP Kementerian BUMN dan kebijakan Pimpinan atas beberapa program yang untuk sementara waktu ditiadakan antara lain terkait penilaian KPKU, penilaian GCG dan beberapa indikator pada sasaran strategis pewujudan SDM yang kompeten dan profesional yaitu semula a) pemenuhan jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat b) persentase pencapaian standar kompetensi jabatan dan c) persentase pelaksanaan diklat yang sesuai dengan Training Needs Analysis (TNA) yang kemudian diganti menjadi a) Indeks peningkatan kompetensi pegawai dan b) Indeks sistem Merit.

Kemudian dalam rangka mencapai seluruh sasaran dan target yang telah ditetapkan di atas, maka telah

of State-Owned Enterprise Strategic Planning for 2015 - 2019, there are few KPI changes as a follow-up to Ministry of Performance SAKIP assessment results and the Leader's policy for some programs which is temporarily absent, among others are those associated with KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) assessment, GCG assessment, and some indicators within strategic planning for realization of Competent and professional Human Resources, which are a) fulfillment of employee numbers which meets the standard training time, b) achievement percentage of position competency standard, and c) percentage of training executions in accordance with Training Needs Analysis (TNA) which are changed to a) Employee's competence improvement index and b) Merit system index.

Then in order to achieve every objectives and purposes which are already determined in the above description,



dianggarkan untuk masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut (data secara lengkap terdapat pada lampiran):

then it has been budgeted for the respective strategic objectives and performance indicators as follows (complete data is included in appendix):

No	Strategic Objective	PAGU 2018 Billion IDR
1.	Realization of the State-Owned Enterprise as a great, strong, and agile Agent of Development	38.348
2.	High satisfaction of service user with the Ministry of State-Owned Enterprise's services	5.800
3.	High State-Owned Enterprise obedience towards the Ministry of State-Owned Enterprise's policies	10.442
4.	Policy planning and formulation with quality and can be implemented	14.029
5.	Optimal State-Owned Enterprise coaching	2.600
6.	Execution of an effective control and supervision	3.000
7.	Realization of competent and professional Human Resources	59.077
8.	Realization of a modern corporation management organization	86.808
9.	Realization of a good and clean organization governance	5.000
10.	Availability of valid, reliable, and easily accessible information	17.955
11.	Optimal and accountable budget execution	4.000
Total		247.041

Selanjutnya, atas seluruh Perjanjian Kinerja Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Eselon I dan Eselon II dilakukan cascading sampai dengan level pelaksana untuk menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Next, based on all Ministry of State-Owned Enterprises, Echelon I, and Echelon II Performance Agreement, cascading is implemented to acting level in order to be Employee Performance Objective (SKP, Sasaran Kinerja Pegawai).

Hal yang membedakan pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya, dalam rangka perencanaan target per pegawai harus dilakukan maksimal tanggal 20 Desember sebelum tahun berjalan. Bagi pegawai yang terlambat, maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan pengisian target SKP dan selanjutnya mendapatkan sanksi sebagaimana ketentuan maupun kebijakan dari Pengelola Kinerja Pegawai.

What differs 2018 to the past year, target planning for each employee must be implemented no later than 20th of December before the following year begins. For employees who are late to do so, then the associated employees cannot file their SKP targets and then will receive sanctions as applicable based on regulations as well as policies from Employee Performance Management.



Dalam rangka penyusunan target SKP Tahunan, setiap pegawai baik level Eselon I s.d. Pelaksana diwajibkan menyusun Kontrak Kinerja, target SKP Tahunan dan juga target SKP Bulanan yang telah dijabarkan sejak bulan Januari sampai dengan Desember.

In arranging yearly SKP targets, each employee, be they from Echelon I to Acting level, are required to arrange Performance Contract, Yearly SKP targets and also Monthly SKP targets which are described from January to December.

Pengukuran dan Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja di Kementerian didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN yang mengatur pengelolaan kinerja untuk level Kementerian BUMN, Unit Eselon I dan Eselon II. Di dalam peraturan tersebut diatur bagaimana cara melakukan penyusunan rencana strategis, sasaran strategis, indikator kinerja utama. Termasuk di dalamnya adalah mengatur mekanisme pelaporan dan penilaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada metode dan formulasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tersebut dan masing-masing perspektif diberikan bobot yaitu a) perspektif stakeholders 30%, b) perspektif customers 30%, c) perspektif internal process 20%, d) perspektif learning and growth 20%.

Adapun capaian akhir dari kinerja suatu unit dinyatakan dalam bentuk NKO (Nilai Kinerja Organisasi) dengan kriteria sebagai berikut:

Performance Measurement and Assessment

Performance measurement is implemented by comparing performance (that should have been) implemented with expected performance. This performance measurement is implemented periodically (quarterly) and yearly. Performance measurement and comparison in Performance Report must be adequately depicting performance position of government Institutions.

Performance measurement in the Ministry is based on the State-Owned Enterprise's Ministerial Decree Number SK-217/MBU/10/2017 concerning Ministry of State-Owned Enterprise's Organization Performance Management which regulates performance management for the Ministry of State-Owned Enterprise's level, Unit Echelon I and Echelon 2 levels. Within that regulation, it is regulated how to arrange strategic plans, strategic objectives, key performance indicator. Included within is regulating performance reporting and assessment mechanisms.

Performance achievement measurement is based on methods and formulations as specified within the said regulation and weights are given to respective perspectives, which are a) stakeholders perspective 30%, b) customers perspective 30%, c) internal process perspective 20%, d) learning and growth perspective 20%.

As for the final achievements of a unit's performance is expressed in NKO (Nilai Kinerja Organisasi, Organization Performance Score) with the following criteria:

Capaian NKO	Kriteria
≥110	Terpuji
≥100 s.d. <110	Sangat Memuaskan
≥90 s.d. <100	Memuaskan
≥80 s.d. <90	Cukup Memuaskan
<80	Kurang Memuaskan



Adapun untuk penilaian kinerja individu, mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-11/S.MBU/06/2018 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian BUMN. Sistem tersebut mengatur pengelolaan kinerja pegawai sejak dari perencanaan, bimbingan/ peninjauan, penilaian dan dan pemberian apresiasi kinerja.

Sistem tersebut diberlakukan kepada seluruh pegawai baik berasal dari PNS maupun pegawai lainnya yaitu Pegawai non PNS yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada penilaian kinerja pegawai, dibedakan ke dalam SKP Bulanan dan SKP Tahunan. SKP Bulanan diukur setiap bulan dan dikaitkan dengan jumlah pembayaran tunjangan kinerja per pegawai. Adapun SKP Tahunan diukur setiap tahun untuk mendapatkan gambaran kinerja pegawai dalam tahun yang bersangkutan serta digunakan untuk menilai pegawai selama 1 tahun.

Perhitungan kinerja tahunan didasarkan pada pengukuran NPI (Nilai Prestasi Individu) yang terdiri dari:

As for individual performance assessment which refers to the State-Owned Enterprise Ministerial Secretary Decree Number SK-11/S.MBU/06/2018 concerning Ministry of State-Owned Enterprise's Employee Performance Assessment System. The said system regulates employee performance management since planning, supervision/ observation, and assessment and performance appreciation awards.

That system applies to every employee be they civil servant or other employee that is non-civil servant who is appointed from office which has received approval from the minister who organized government affairs in the field of state apparatus utilization and bureaucratic reform.

On employee performance assessment, it is differentiated to monthly SKP and yearly SKP. Monthly SKP is assessed each month and is associated with performance allowance payment per employee. As for annual SKP that is assessed each year to obtain the performance overview of the said employee in the associated year which also being used to assess the employee for 1 year.

Annual performance calculation is based on NPI (Nilai Prestasi Individu, Individual Accomplishment Score) which is composed of:

No	Faktor Penilaian	Bobot Penilaian
a	Capaian SKP	100%
	1) SKP Tahunan	60%
	2) Perilaku Kerja	40%
b	Aspek Dinamis	20%
	NPI	120%

Aspek dinamis merupakan indikator penilaian yang bersifat dinamis setiap tahunnya dengan tujuan untuk mendorong perubahan budaya kerja di Kementerian BUMN. Pada tahun 2018, aspek dinamis yang dijadikan penilaian meliputi a) 3R (Ringkas Rapi Resik) yaitu untuk mendorong pegawai

Dynamic Aspect is an assessment indicator which being dynamic for every year with objective to promote the change of working culture in the Ministry of State-Owned Enterprise. In 2018, Dynamic Aspect which is used as assessment comprises a) 3R (Neat, Clean, Concise) that



agar bekerja dalam keadaan rapi ringkas dan selalu menjaga kebersihan ruang kerjanya maupun ruang kerja unitnya, b) Program Berbagi Pengetahuan melalui aplikasi SIBAGAS (Sistem Berbagi Gagasan). Pegawai didorong agar membuat tulisan di dalam bentuk blog maupun mereview tulisan pegawai lainnya.

Pada penilaian NPI di atas, kemudian dikategorikan sebagai berikut:

is to promote the employees to work in neat and concise state and always maintaining a clean workspace be it their own or their unit's workspace, b) Knowledge Sharing Program through SIBAGAS (Sistem Berbagi Gagasan, Idea Sharing System) application. Employees are driven to make an article in form of blog or review other employees' blogs.

ON NPI assessment above, it is categorized as follows:

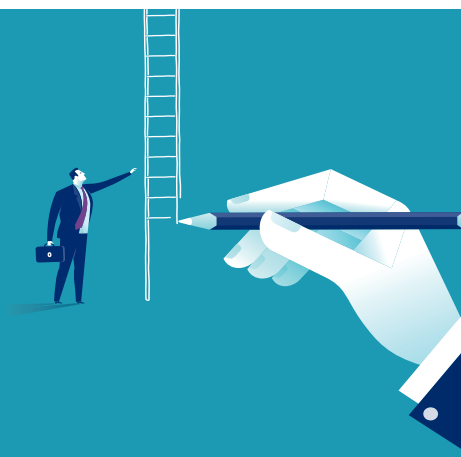
Capaian NPI	Kategori
≥110	Terpuji
≥100 s.d. <110	Sangat Memuaskan
≥90 s.d. <100	Memuaskan
≥80 s.d. <90	Cukup Memuaskan
<80	Kurang Memuaskan

Reward dan Punishment

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai, selanjutnya dilakukan pengukuran capaiannya yang nantinya dikaitkan dengan tingkat pembayaran tunjangan kinerja maupun reward dan punishment sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor PER-05/MBU/03/2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN.

Reward dan Punishment

Based on employee performance assessment, further achievement measurement is implemented which will be associated with performance allowance payment level as well as reward and punishment as regulated in clause of the State-Owned Enterprise's Ministerial Regulation Number PER-05/MBU/03/2018 regarding to Calculation and Employee Performance Allowance Payment Procedures in the Ministry of State-Owned Enterprise's Environment.







3. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Evaluation and Performance Reporting

PR merupakan dokumen berisi ringkasan capaian kinerja setiap unit pada setiap triwulan. Adapun RM merupakan kegiatan meeting untuk mereview seluruh capaian kinerja setiap triwulan yang wajib dihadiri oleh Pimpinan Unit dan pegawai di unit tersebut.

PR is a document containing summary of each unit's performance achievement in each quarter. As for RM is a meeting activity to review all performance achievement for each quarter which is mandatory for Unit Leader and employees in the said unit.

Dalam pengelolaan kinerja unit kerja, pengelolaan dilakukan oleh Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi (MKO) yang terdiri dari:

In work unit performance management, management is implemented by the Managers of Organization Performance Management (MKO, Manajemen Kinerja Organisasi) which consists of:

1. Penanggung Jawab MKO (PMKO) yaitu pejabat kementerian BUMN yang ditunjuk dan diberikan tugas dan fungsi untuk menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan MKO.
2. Pengelola MKO (PMKO) yaitu pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan diberikan tugas untuk membantu PJMKO dalam merumuskan kebijakan MKO, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
3. Manajer MKO I (MMKO I) pejabat setara eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi pelaksanaan MKO dan pelaporan kinerja unit eselon I
4. Manajer MKO II (MMKO II) pejabat setara eselon III atau IV yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi pelaksanaan MKO dan pelaporan kinerja unit eselon II.

Seluruh pengelolaan kinerja organisasi tersebut diwajibkan menjalankan tugasnya dan diwajibkan menjadi koordinator untuk melakukan evaluasi kinerja berupa pembahasan Performance Report (PR) di masing-masing unit yang dikelola yang nantinya dituangkan dalam bentuk risalah Review Meeting (RM). PR merupakan dokumen berisi ringkasan capaian kinerja setiap unit pada setiap triwulan. Adapun RM merupakan kegiatan meeting untuk mereview seluruh capaian kinerja setiap triwulan yang wajib dihadiri oleh Pimpinan Unit dan pegawai di unit tersebut. Adapun jadwal evaluasi adalah sebagai berikut:

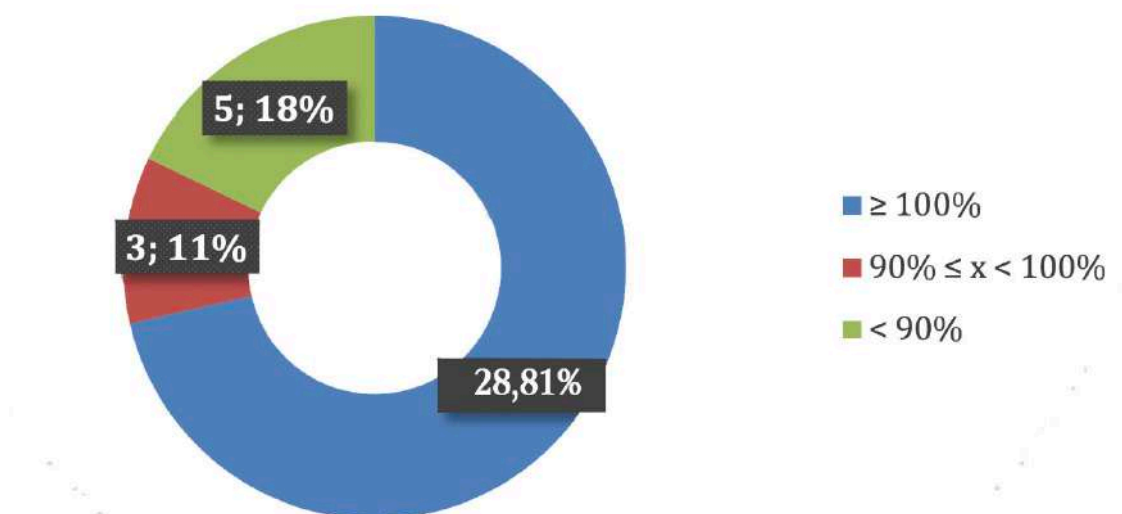
All organization performance management are required to perform their assignment and are required to be coordinator in order to perform performance evaluation in form of Performance Report (PR) discussion within the respective managed units which will be expressed in form of Review Meeting (RM) treatise. PR is a document containing summary of each unit's performance achievement in each quarter. As for RM is a meeting activity to review all performance achievement for each quarter which is mandatory for Unit Leader and employees in the said unit. As for the evaluation schedule is as follows:



Capaian Kinerja

Performance Accountability

Overall	Achievement	Bobot	Value
Percentage of Aggregate Achievement in Stakeholder Perspective	93,38	30%	29,78
Percentage of Aggregate Achievement in Customer Perspective	104,25	30%	31,28
Percentage of Aggregate Achievement in Internal Process Perspective	105,00	20%	21,00
Percentage of Aggregate Achievement in Learning and Growth Perspective	97,39	20%	19,48
NKO	400,01		101,53



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian BUMN pada tahun 2018 tercapai sebesar 101,53 persen. Berdasarkan mekanisme pengukuran kinerja sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor SK-217/

The Organizational Performance Value (NKO) of the Ministry of BUMN in 2018 was reached at 101,53 percent. Based on performance measurement mechanism as referred to in the Decree of BUMN Minister Number

Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN, maka capaian NKO sebesar 101,53 persen termasuk dalam kategori “memuaskan”.

SK-217/MBU/10/2017 concerning Management of the Organizational Performance of the Ministry of BUMN, NKO's achievement of 101,53 percent is included in the “satisfying” category.



SS1. Sasaran Strategis Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat & lincah

SS1. Strategic Target to the realization of BUMN as an Agent of Development that is large, strong & agile

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Total Asset of BUMN	7.375 trillion	8.097 trillion	110%
Total Profit BUMN	195 trillion	203,5 trillion	104%
Total Equity of BUMN	2.848 trillion	2.479 trillion	87%
Total Capex of BUMN	610,7 trillion	487 trillion	80%
BUMN which enters Global Fortune 500	4 BUMN	1 BUMN	25%
Contribution of BUMN toward the State	315 T	422 T	134%
Percentage of BUMN Roadmap Achievement	75%	75%	100%
The Achievement of SLA on PSO Assignment	97%	97,5%	100,5%



Gambaran umum capaian target s.d. 2018 / General illustration of target achievement up to 2018.

Seluruh pengelolaan data kinerja BUMN sudah dilakukan secara digital melalui portal Silaba (Sistem Informasi Laporan Berkala) untuk mendukung percepatan proses bisnis pembinaan BUMN.

All management of the State-Owned Enterprise performance data has been implemented digitally through Silaba portal (Periodic Report Information System) to support the acceleration of the State-Owned Enterprise supervision business process.



1. Total Aset BUMN

Total Asset of BUMN

Year	2015	2016	2017	2018
Asset	5,449 trillion	6,325 trillion	7,223 trillion	8,097 trillion

Data diatas menunjukkan bahwa Kementerian BUMN berhasil meningkatkan aset BUMN dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, total aset BUMN terealisasi sebesar Rp 8,097 triliun. Dengan demikian Kementerian BUMN telah melampaui target total aset tahun 2018 yakni sebesar Rp 7,375 triliun. Sehingga persentase capaian IKU ini sebesar 110 persen. Kenaikan total aset pada tahun 2018 sebesar 11 persen merupakan bukti kerja nyata Kementerian BUMN dalam mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Total aset menjadi IKU pertama dalam Kementerian BUMN karena aset menunjukkan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Aset terbesar dimiliki oleh BUMN dari sektor energi yaitu PLN, sektor perbankan BRI, Mandiri, BNI dan sektor migas yakni Pertamina.

The data above indicates that the Ministry of BUMN managed to increase BUMN assets from year to year. In 2018, the total assets of BUMN were realized at IDR 8,097 trillion. Thus the Ministry of BUMN has exceeded the target of total assets in 2018, amounting to IDR 7,375 trillion. So the percentage of IKU's achievements is 110 percent. The increase of total assets in 2018 by 11 percent is evidence of the Ministry of BUMN's real work in encouraging companies to continue improving their performance. Total assets become the first IKU in the Ministry of BUMN because assets indicates a fairly certain future economic benefit which acquires or controls by an entity as a result of transactions or past events. The largest assets are owned by B from the energy sector, namely PLN, banking sectors of BRI, Mandiri, BNI and the oil and gas sector namely Pertamina.

2. Total Laba BUMN

Total Profit of BUMN

Tahun	2015	2016	2017	2018
Laba	147 triliun	166 triliun	172 triliun	203 triliun

Pada akhir tahun 2018 total laba BUMN terealisasi sebesar Rp 203 triliun. Sedangkan target total laba pada tahun 2018 sebesar Rp 195 triliun. Sehingga persentase capaian IKU ini adalah 104 persen. Penurunan capaian ini merupakan imbas atas lemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD yang membuat kinerja keuangan BUMN-BUMN yang bertransaksi menggunakan kurs mata uang asing tidak optimal. Salah satu BUMN tidak dapat mencapai target labanya adalah PT PLN yang mengalami rugi selisih mata uang yang asing dan peningkatan biaya produksi akibat depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini tidak semata-merta menjadikan kinerja BUMN-BUMN memburuk karena ketidaktercapaian total laba disebabkan oleh aspek uncontrollable. Hal yang sama juga terjadi dengan PT Pertamina yang mengalami penurunan laba antara lain karena kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Adapun beberapa BUMN dengan laba terbesar diantaranya adalah Bank BRI, PT Telkom, Bank Mandiri, Bank BNI, dan PT Pertamina. Ke depan, berbagai hal yang bersifat uncontrollable tersebut perlu diantisipasi disiapkan skema untuk memperkuat posisi dan kinerja perusahaan.

At the end of 2018 the total BUMN profits were realized at IDR 203 trillion. While the target of profit total in 2018 was IDR 195 trillion. So the percentage of this IKU achievement is 104 percent. This degradation in achievement was an impact of the weak rupiah exchange rate against USD which made the financial performance of BUMNs transacted using foreign exchange rates of not being optimal. One of the BUMNs which cannot achieve its profit target is PT PLN which experiences loss of foreign currency differences and increased production costs due to the depreciation of Rupiah exchange rates against foreign currencies. This does not necessarily make BUMNs performance deteriorate due to the inaccessibility of total profits caused by an uncontrollable aspect. The same thing happened with PT Pertamina, which experienced decline in profits, partly due to the increase in world oil prices and weakening of the rupiah exchange rate. As for several State-Owned Enterprises with the biggest profits among others are Bank BRI, PT Telkom, Bank Mandiri, Bank BNI, and PT Pertamina. In the future, variety of uncontrollable things requires to be anticipated in preparing a scheme to strengthen the company's position and performance.



3. Total Ekuitas BUMN

Total Equitas of BUMN

Year	2015	2016	2017	2018
Equity	1,763 trillion	2,235 trillion	2,398 trillion	2479 trillion

Realisasi total ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp 2.479 triliun belum dapat melampaui target sebesar Rp 2,848 triliun. Dengan demikian persentase capaian IKU ini adalah 87 persen. Meski belum mencapai target, capaian total ekuitas Kementerian BUMN berangsur-angsur mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian BUMN juga senantiasa berupaya melakukan peningkatan nilai kekayaan pemerintah yang diinvestasikan dalam bentuk kepemilikan perusahaan (BUMN). BUMN dengan nilai ekuitas terbesar adalah PT PLN, PT Pertamina, Bank Mandiri, Bank BRI dan PT Telkom.

Realization of total equity in 2018 of IDR 2.479 trillion has not been able to exceed the target of IDR 2, 848 trillion. Thus the percentage of IKU achievement is 87 percent. Even though not yet achieved the target, the total equity achievement of the Ministry of BUMN gradually increased compared to the previous year. The Ministry of BUMN also always strives to increase the value of government assets invested in the form of company ownership (BUMN). BUMN with the largest equity value are PT PLN, PT Pertamina, Bank Mandiri, BRI Bank and PT Telkom.

4. Total CAPEX BUMN

Total CAPEX of BUMN

Year	2015	2016	2017	2018
CAPEX	268 trillion	298 trillion	301 trillion	487 trillion

Realisasi capital expenditure BUMN terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2018. Capital expenditure yang terus tumbuh dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga diharapkan produktivitas BUMN meningkat. Pada tahun 2018 BUMN mencapai total capital expenditure sebesar Rp 487 triliun. Namun angka ini masih belum dapat melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 610 Triliun. Sehingga persentase capaian IKU ini sebesar 80 persen. Penyebab ketidaktercapaian IKU ini adalah adanya proyek-proyek yang perlu dikaji ulang terkait kelayakan bisnisnya yang disebabkan oleh pembebasan lahan seperti pembangunan jalan tol Jawa dan Sumatera yang sering kali bermasalah sehingga menghambat proses pembangunan. Selain itu, adanya pelemahan bisnis industri tertentu seperti industri semen juga menyebabkan capaian capital expenditure BUMN ini belum maksimal dan sesuai target. Adapun capital expenditure terbesar dimiliki BUMN PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, Jasa Marga dan Utama Karya. Beberapa langkah yang dilakukan di 2019 adalah dengan melakukan perencanaan yang lebih matang dalam penyusunan RKAP 2019 dengan tetap mengacu pada Shareholders Aspiration Letters yang merupakan arahan dalam penyusunan RKAP 2019 serta melakukan evaluasi dan kontrol secara rutin atas setiap target capex.

The realization of BUMN capital expenditure has continued to increase since 2015 to 2018. Capital expenditure which continues to grow can increase production capacity so that it is expected that BUMN productivity will increase. In 2018 BUMN achieved the total capital expenditure of IDR 458, 7 trillion. However, this number still cannot exceed the stipulated target at IDR 610 Trillion. So the percentage of IKU achievements is 80 percent. Causes of this IKU failure are projects which need to be reviewed in relation to the feasibility of its businesses due to land acquisition such as constructions of Java and Sumatra toll roads which are often problematic that hampers the development process. In addition, the weakening of certain industrial businesses such as cement industry also caused the achievement of BUMN IKU capital expenditure of not being maximized and according to the target. The largest capital expenditure is owned by BUMN PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, Jasa Marga and Utama Karya. Several steps taken in 2019 are to implement a more careful plann in preparing of the 2019 RKAP while still referring to the Shareholders Aspiration Letters which are directives in preparing the 2019 RKAP and to regularly evaluate and control each capex target.



5. BUMN yang masuk Global Fortune 500

BUMN which enters Global Fortune 500

Tahun 2018, Pertamina masih eksis pada daftar Global Fortune 5000. Adapun dari Daftar Forbes 2000, dari enam perusahaan Indonesia yang masuk Forbes 2000, empat diantaranya berasal dari BUMN yaitu BRI, Bank Mandiri, PT Telkom dan Bank BNI.

In 2018, Pertamina still exists in the Global Fortune 5000 list. As for the Forbes 2000 list, of the six Indonesian companies that entered Forbes 2000, four of them came from the State-Owned Enterprise, namely BRI, Bank Mandiri, PT Telkom and Bank BNI.

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
BUMN which enters Global Fortune 500	4 BUMN	1 BUMN	25%

Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Fortune yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkatkan berdasarkan pendapatan bruto mereka setelah penyesuaian dibuat oleh Fortune untuk menghindari dampak pajak eksis yang dikumpulkan perusahaan. Terdapat 1 BUMN yang terdaftar dalam Global Fortune 500 atas capaian kinerjanya di tahun 2017 yakni PT Pertamina (Persero). Berdasarkan hal tersebut target BUMN yang masuk Global Fortune 500 sebanyak 4 BUMN pada tahun 2018 tidak tercapai dikarenakan proses pembentukan holding BUMN perbankan dan jasa keuangan dan holding sektor pelabuhan belum terealisasi. Dengan demikian capaian atas IKU ini tercapai sebesar 25 persen. Upaya yang perlu dilakukan kedepannya ialah dengan mendorong BUMN-BUMN yang telah ditargetkan untuk terus meningkatkan kinerja.

Namun disisi lain, dalam upaya mendorong BUMN agar kinerjanya berkelas dunia, Kementerian BUMN terus mendorong BUMN untuk bersaing di kancah global. Selain penilaian melalui Global Fortune 500, terdapat pula penilaian lain: Forbes 2000 yaitu perusahaan publik yang terbesar di dunia. Ada 2000 perusahaan yang termasuk emiten terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan dari Indonesia pun termasuk ke dalam daftar tersebut. Dari enam perusahaan Indonesia yang masuk Forbes 2000, empat diantaranya berasal dari BUMN yaitu BRI, Bank Mandiri, PT Telkom dan Bank BNI.

Global Fortune 500 is an annual list compiled and published by Fortune magazine which ranks the top 500 public and government-owned companies ranked according to their gross income after adjustments made by Fortune to avoid the existing tax effects collected by the Company. There are 1 BUMN registered in the Global Fortune 500 for its performance achievements in 2017, namely PT Pertamina (Persero). Based on such matter, the target of BUMN which enters Global Fortune 500 as many as 4 BUMNs in 2018 was not achieved because the process of establishing financial services and banking BUMN holding and port sector holding had not been realized. Thus the achievement of this IKU is reached by 25 percent. The effort which needs to be implemented in the future is to encourage state-owned enterprises (BUMNs) that have been targeted to continue improving performance.

However on the other hand, in an effort to encourage the State-Owned Enterprise to have world-class performance, the Ministry of State-Owned Enterprise continues to encourage the State-Owned Enterprise to compete in the global arena. In addition to assessments through the Global Fortune 500, there are also other assessments: Forbes 2000 namely the largest public company in the world. There are 2000 companies which are among the largest issuers in the world. Companies from Indonesia are included in the list. Of the six Indonesian companies that entered Forbes 2000, four of them came from the State-Owned Enterprise, namely BRI, Bank Mandiri, PT Telkom and Bank BNI.



6. Kontribusi BUMN terhadap Negara

Contribution SOE toward the State

Tahun	2015	2016	2017	2018
Kontribusi terhadap Negara	164 triliun	206 triliun	239 triliun	422 triliun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pembayaran pajaknya dimana pajak adalah salah satu kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional terutama dalam penerimaan Negara.

Based on Act No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Taxation Procedures, Tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or an entity that is a force based on the Law, by not receiving direct compensation and being used for state purposes as large as possible for people's prosperity. This IKU aims to improve performances of the company, which in turn will have an impact on increasing tax payments where taxes are one of BUMN contributions to the national economy, especially in state revenues.

7. Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

Percentage of BUMN Roadmap Achievement

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Percentage of BUMN Roadmap Achievement	75%	75%	100%

Roadmap BUMN tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman Kementerian BUMN dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN serta menjadi acuan bagi manajemen BUMN untuk menetapkan berbagai kebijakan strategis yang lebih detail dalam bentuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada masing-masing perusahaan.

BUMN Roadmap for 2015-2019 is the guideline to the Ministry of BUMN in guiding and supervising BUMNs as well as being a reference for BUMN management to specify a more detail various strategic policies in the form of the Company's Long Term Plan (RKAP/Rencana Jangka Panjang Perusahaan) at each company.

Dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019, sasaran program (outcome)/sasaran kegiatan (output) berupa persentase pencapaian roadmap ditargetkan mencapai 100 persen di akhir tahun 2019 dengan pendistribusian sebanyak 25 persen tiap tahun dimulai dari tahun 2016. Pada akhir tahun 2019 ditargetkan terdapat 15 (lima belas) holding sektoral BUMN yang dapat terwujud, dengan asumsi bahwa setiap tahun akan

In the 2015-2019 BUMN Ministry's Strategic Plan, the program target (outcome)/activity target (output) in the form of roadmap achievement percentage is targeted to reach 100 percent by the end of 2019 with a distribution of 25 percent each year starting in 2016. At the end of 2019 there are targeted 15 (fifteen) BUMN sectorial holdings which can be realized, assuming that every year 4 (four) BUMN sectorial holdings will be established; specifically in



terbentuk 4 (empat) holding sektoral BUMN, khusus di tahun 2019 rencananya ada tiga holding sektor.

Namun demikian pada perkembangannya, pembentukan holding sektoral BUMN memakan waktu yang cukup lama dikarenakan perlunya sosialisasi bersama dengan stakeholder terkait sehingga indikator pencapaian roadmap Tahun 2018 adalah jumlah holding yang terbentuk, usulan holding yang telah dikirim ke Kementerian Keuangan, dan kajian holding yang telah selesai dengan rincian sebagai berikut:

2019 there will be three holding sectors.

However, in its development, the establishment of BUMN sectorial holding took a long time due to the need for joint socialization with relevant stakeholders so that indicators of roadmap achievement for 2018 were the number of established holdings, proposed holding which had been sent to the Ministry of Finance, and holding review which has been complemented with the following details:

No	Holding	Information
A. Holding which has been Established		
1	Mining Sector	On November 10th, 2017, Government Regulations (PP) No. 47 of 2017 concerning Capital Participation Addition of the Republic of Indonesia into Share Capital of PT Indonesia Asahan Aluminum Company (Persero) was the foundation in Establishing Mining Sector Holding. In this Government Regulation, the transfer of all Series B shares of the Republic of Indonesia to PT Aneka Tambang Tbk (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Persero), and PT Timah Tbk (Persero) and all shares of the Republic of Indonesia at PT Freeport Indonesia.
2	Oil & Gas Sector	On February 28th, 2018, Government Regulations (PP) No. 6 of 2018 concerning Capital Participation Addition of the Republic of Indonesia into Share Capital of PT Pertamina Company (Persero) was the foundation in establishing the Oil and Gas Sector holding. In this Government Regulation, the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia to PT Perusahaan Gas Negara Company (Persero).
B. Proposed of Holding to the Ministry of Finance		
3	Banking and Financial Services Sector	S-178/MBU/03/2016 dated March 14th, 2016, with structure: PT Danareksa as Holding and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) as holding members.
4	Housing Sector	S-364/MBU/06/2016 dated June 20th, 2016 and S-148/D4.MBU/1/11/2018 November 13th, 2018, with structure: Perum Pembangunan Perumahan Nasional as holding and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero), PT Virama Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Bina Karya (Persero) as holding members.
5	Infrastructure Sector	S-540/MB/08/2018 dated August 23rd, 2018, with structure: PT Hutama Karya (Persero) as holding and PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero) as holding members.



6	Food Sector	S-620/MBU/10/2016 dated October 25th, 2016, with structure: Perum BULOG (Logistic Affairs Board Administration) as holding and PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Bhanda Ghara Reksha (Persero), PT Berdikari (Persero) as holding members.
7	Survey Services Sector	S-785/MBU/11/2018 dated November 26th, 2018, with structure: PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as holding and PT Sucofindo (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero) as holding members.
8	Restructuring Sector	S-509/MBU/08/2018 dated August 3rd, 2018, with structure: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as holding and PT Nindya Karya (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Primissima (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Indosat Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri as holding members.
C. Holding Review Has Been Completed		
9	Insurance Sector	Holding review has been compiled with structure: PT Jasa Raharja (Persero) as holding, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Asuransi Asei Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Jasaraharja Putera, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) and Perum Jaminan Kredit Indonesia as holding members.
10	Pharmacy Sector	Holding review has been compiled with structure: PT Bio Farma (Persero) as holding and PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Phapros Tbk as holding members.
11	Sector of National Defence & High Technology Industry (NDHI)	Holding review has been compiled with structure: PT Dirgantara Indonesia (Persero) as holding and PT Dahana (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero), PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) as holding members.
12	Sector of National Publishing & News Corporation (NPNC)	Holding review has been compiled with structure: Perum LKBN Antara as holding, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, PT Balai Pustaka (Persero), Perum Produksi Film Negara as holding members.

Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d (PP nomor 72 tahun 2016) dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 72 Tahun 2016 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas merupakan payung hukum untuk pembentukan Holding Sektoral.

In the event of state assets in the form of state-owned shares in BUMN as referred to in Article 2 paragraph (2) letter d (PP no. 72 of 2016) used as state capital participation in other BUMN so that majority of shares are owned by other BUMN, thus BUMN becomes BUMN subsidiary with state provisions are required to have shares with special rights as stipulated in the articles of association.

Government Regulations (PP) No. 72 of 2016 concerning procedures for participation and state capital administration at BUMN and Limited Liability Company is a legal umbrella for the establishment of Sectorial Holdings.



Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 penjelasan atas pasal 2A ayat (1) dan ayat (2), yang dimaksud dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar antara lain hak untuk menyetujui:

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris;
2. Perubahan anggaran dasar;
3. Perubahan struktur kepemilikan saham;
4. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

In accordance with provisions of Government Regulations (PP) No. 72 of 2016, an explanation of article 2A paragraph (1) and paragraph (2), what is meant by privileges stipulated in the articles of association among others rights to approve:

1. Appointment to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
2. Amendment to the articles of association;
3. Amendment to share ownership structure;
4. Merger, consolidation, separation and dissolution, as well as corporate assignment by other companies.

State-owned shares in BUMN or Limited Liability Company essentially constitutes of state assets which have been separated from the State Budget, so that transfer of intended shares to be used as participation in BUMN or Limited Liability Company is not implemented through State Budget mechanisms.

8. Tercapainya SLA Penugasan PSO

The Achievement of SLA on PSO Assignment

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
The achievement of SLA on PSO Assignment	97%	97,5%	100,5%

Public Service Obligation (PSO) atau subsidi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Dasar hukum penerapan PSO ini yakni UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3, UU No 19 Tahun 2013, dan PP No 45 Tahun 2005 mengenai penugasan yang diberikan pemerintah dalam rangka memberikan kewajiban pelayanan umum (PSO) yaitu berupa kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Public Service Obligation (PSO) or subsidy is a cost to be incurred by the state due to differences in the cost of goods sold by BUMN or the private sector with prices for certain products/services specified by the government so that the service of products/services is guaranteed and affordable by most societies. The legal foundation of this PSO implementation is the (1945) Constitution of Article 34 Paragraph 3, Act No. 19 of 2013, and PP No. 45 of 2005 concerning assignments provided by the government in order to provide public service obligations (PSO), namely in the form of government obligations to provide certain goods and services which is very much needed by the society.



Pada tahun 2018, terdapat 8 BUMN yang mendapat penugasan PSO dari Pemerintah yakni PT PLN, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, PT Pelni, PT KAI, PT ASDP Ferry Indonesia, PT Pos Indonesia, dan Perum LKBN Antara. Total anggaran PSO untuk kedelapan BUMN tersebut yakni sebesar Rp 185,961 triliun. Adapun realisasi dari pelaksanaan PSO tersebut sampai dengan akhir tahun 2018 yakni sebesar Rp 181,384 triliun. Berdasarkan hal tersebut, maka persentase ketercapaian SLA penugasan PSO dari realisasi yang dibandingkan dengan target yakni sebesar 97,5 persen. Angka tersebut sudah melampaui target ketercapaian SLA penugasan PSO pada tahun 2018 yakni sebesar 97 persen sehingga persentase capaiannya menjadi 100,5 persen.

Permasalahan yang sering terjadi terhadap pelaksanaan PSO/Subsidi antara lain:

1. Keterlambatan pembayaran PSO/Subsidi oleh pemerintah berdampak pada kinerja operasional serta menjadikan adanya piutang PSO/subsidi yang besar pada beberapa BUMN, misal: PT PIHC, PT Pertamina dan PT PLN.
2. Biaya pelaksanaan penugasan pada kenyataannya lebih tinggi dari nilai yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga mengurangi margin keuntungan.
3. Pendapatan beberapa BUMN cukup bergantung terhadap pendapatan yang bersumber dari PSO/Subsidi dengan rasio hingga diatas 50 persen seperti PT Pelni, PT Pos dan PT PIHC.

Berdasarkan permasalahan tersebut, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan penugasan serta mengantisipasi timbulnya kembali permasalahan di tahun-tahun mendatang, maka diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan awal nilai pagu untuk PSO/subsidi penghitungan dilakukan lebih cermat dan perlu mengikutsertakan Kementerian BUMN guna dapat memberikan pandangan kepada kementerian teknis atas dampak penugasan terhadap kinerja maupun going concern perseroan.
2. BUMN agar terus berkoordinasi dengan kementerian teknis guna mendorong penandatanganan perjanjian kerjasama paling lambat diawal tahun sehingga dapat memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan

In 2018, there were 8 BUMN that received PSO assignments from the Government namely PT PLN, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, PT Pelni, PT KAI, PT ASDP Ferry Indonesia, PT Pos Indonesia, and Perum LKBN Antara. The total of PSO budget for the eight BUMNs is IDR 185, 961 trillion. The realization of PSO implementation until the end of 2018 is IDR 181, 384 trillion. Based on this, the percentage of SLA achievement on PSO assignment from the realization compared to the target is 97, 5 percent. This figure has exceeded the target of SLA achievement of PSO assignment in 2018 namely 97 percent so that the percentage of achievement becomes 100, 5 percent.

Problems that often occur in the implementation of PSO/Subsidies among others are as follows:

1. Delays in PSO/Subsidy payments by the government have an impact on operational performance and make PSO/subsidies large in some BUMNs, for example: PT PIHC, PT Pertamina and PT PLN.
2. The cost of assignment implementation is in fact higher than the agreed value in the agreement, thereby reducing profit margins.
3. Revenues of some BUMNs are quite dependent toward income sourced from PSO/Subsidies with a ratio of up to 50 percent such as PT Pelni, PT Pos and PT PIHC.

Based on these problems, in order to improve the quality of assignment implementation and anticipate the re-emergence of problems in the coming years, the following matters are sought:

1. Initial discussion of the ceiling value for PSO/ subsidy calculation is implemented more carefully and it is necessary to include the Ministry of BUMN in order to provide views to the Ministry of technical on the impact of assignment toward company's performance and going concern.
2. BUMN shall continue to coordinate with the ministry of technical in order to encourage the signing of cooperation agreement for no later than the beginning of the year so that it can provide a strong



- maupun pembayaran PSO/subsidi
3. Kedeputan teknis serta Kedeputan RPU perlu secara intensif memonitor pelaksanaan penugasan pemerintah tersebut sebagai antisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan diatas
 4. Kedeputan teknis terus mendorong BUMN dimaksud untuk tidak terlalu bergantung terhadap pendapatan dari PSO/Subsidi dengan terus berupaya meningkatkan pendapatan komersial

- foundation for the implementation and payment of PSO/subsidies.
3. Technical Deputy and RPU Deputy need to intensively monitor the implementation of government assignments in anticipating possibilities to the above problems.
 4. Technical deputy continues to encourage BUMN to not be too dependent on revenues from PSO/ Subsidies by continuing to strive in increasing commercial revenues.

Sasaran Strategis Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

Strategic Target on High service user satisfaction toward services of the Ministry of SOE

Dalam rangka proses perbaikan dan percepatan proses bisnis dan pelayanan, Kementerian BUMN telah mengembangkan berbagai layanan digital misalnya PPID dan standardisasi pelayanan dalam bentuk sertifikasi ISO 12000

In the framework of improving process and accelerating business processes and services, the Ministry of State-Owned Enterprise has developed various digital services such as PPID and standardization of services in the form of ISO 12000 certification

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2018	% Pencapaian
Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	92%	92%	100%
Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait /stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN	86%	75%	87%

1. Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN

Satisfaction index of BUMN toward services of the Ministry of BUMN

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Satisfaction index of BUMN (State-Owned Enterprise) toward services of the Ministry of BUMN	92%	92%	100%

Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN diukur pada triwulan II tahun 2018. Skor yang didapat dari survey tersebut adalah 5,15 dari skala 6 atau

Satisfaction index of BUMN toward services of the Ministry of BUMN was measured in the second quarter of 2018. The score obtained from the survey was 5, 15 on a scale



mencapai 85,9 persen yang menunjukkan persepsi BUMN terhadap pelayanan Kementerian BUMN masuk dalam kategori baik. Namun skor tersebut masih berada dibawah target yaitu 92 persen. Persentase capaian atas IKU ini adalah 93,37 persen. Sehingga untuk kedepannya area of improvement dalam pelayanan perlu untuk ditindaklanjuti juga mutu layanan sesuai dengan SOP yang berlaku perlu ditingkatkan agar indeks kepuasan pelayanan terhadap BUMN dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

of 6 or reaching 85, 9 percent which indicates that BUMN perception toward services of the ministry of BUMN was in the good category. However such score is still below the target of 92 percent. The achievement percentage for this IKU is 93, 37 percent. Therefore in the future, the area of improvement in services needs to be followed up as well as the quality of services in accordance with the applicable SOP so that the service satisfaction index toward BUMN can increase as expected.

2. Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait /stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN

Satisfaction index of related government institutions/stakeholders toward services of the Ministry of BUMN

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Satisfaction index of related government institutions/ stakeholders toward services of the Ministry of BUMN	86%	75%	87%

Pengukuran indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN dilakukan dengan cara melakukan survey melalui kuesioner. Survey tersebut telah selesai dilaksanakan dengan bekerjasama dengan PT Sucofindo (Persero) sebagai pihak ketiga pelaksana survey. Pada tahun 2018, diperoleh nilai kepuasan Stakeholder Kementerian BUMN yakni sebesar 75 persen sehingga persentase capaian terhadap target ialah sebesar 87 persen. Nilai tersebut merupakan penilaian kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kementerian BUMN tahun 2017. Nilai tersebut memiliki arti bahwa secara keseluruhan, tingkat kepuasan stakeholder Kementerian BUMN masuk dalam kategori puas dengan bentuk kerja sama yang diberikan. Beberapa atribut yang telah dinilai positif oleh stakeholder adalah:

1. Kontribusi Kementerian BUMN dalam mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMN
2. Alur layanan/kerjasama Kementerian BUMN yang jelas dan sistematis
3. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan BUMN
4. Kontribusi Kementerian BUMN dalam mendorong peningkatan penerimaan Negara
5. Keramahan personil Kementerian BUMN dalam menjalankan tugas
6. Kesopanan personil Kementerian BUMN dalam

Measurements on satisfaction index of related government institutions/stakeholders toward services of the Ministry of BUMN are implemented by implementing surveys through questionnaires. The survey was completed by collaborating with PT Sucofindo (Persero) as a third party of survey implementer. In 2018, the satisfaction value of the Ministry of BUMN Stakeholders was 75 percent so that the achievement percentage against the target was 87 percent. This value is a stakeholder satisfaction assessment toward performance of the Ministry of BUMN in 2017. This value means that overall the level of stakeholder satisfaction of the Ministry of BUMN is included in the satisfaction category with the form of cooperation provided. Several attributes which have been positively assessed by stakeholders are:

1. Contribution of the Ministry of BUMN in encouraging the empowerment of the people's economy through BUMN
2. A clear and systematic flow of service/cooperation of the Ministry of BUMN
3. Formulation and stipulation of policies in the field of BUMN supervision
4. Contribution of the Ministry of BUMN in encouraging increased state revenues
5. Hospitality of the Ministry of BUMN personnel in implementing their duties



menjalankan tugas

6. Courtesy of the Ministry of BUMN personnel in implementing their duties

Sasaran Strategis Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN

High compliance of State-Owned Enterprise against statutory laws and policies of the Ministry of State-Owned Enterprise

Berbagai proses perbaikan dan pengembangan terus dilakukan dalam setiap pengawasan pembinaan BUMN dalam upaya meningkatkan kepatuhan BUMN terhadap setiap peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan Kementerian BUMN antara lain dengan menetapkan KPI Direksi yang mengarah pada perbaikan kinerja.

Various processes of improvement and development continues to be implemented in each development monitoring of the State-Owned Enterprise in an effort to improve the State-Owned Enterprise compliance with each regulation and policy issued by the Ministry of State-Owned Enterprise, among others by establishing Directors' KPIs that lead to performance improvements.

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Percentage on compliance toward planning process of BUMN	100%	100%	100%
Percentage on compliance toward operational process of BUMN	100%	100%	100%
Percentage on compliance toward reporting process of BUMN	100%	100%	100%

1. Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

Percentage on compliance toward planning process of BUMN (State-Owned Enterprise)

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Percentage on compliance toward planning process of BUMN	100%	100%	100%

Perencanaan BUMN disusun dalam RKAP tahun 2018 dimana proses perencanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno. Menurut Keputusan Menteri BUMN Rini M. Soemarno No. KEP-101/ MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, BUMN diharuskan telah menyampaikan

BUMN planning is compiled in the RKAP of 2018 where planning process has been implemented in accordance with provision and Regulation to the Minister of BUMN. Based on the Decree of the Ministry of BUMN Number KEP-101/MBU/2002 concerning Preparation of Work Plans and Company Budgets of BUMN, BUMN is required to submit the BUMN planning contained in the RKAP for no later than



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ditetapkan bahwa Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup.

In accordance with Act No. 19 of 2003 concerning BUMN, it is stipulated that the Board of Directors shall submit an annual report to the RUPS (GMS) to obtain ratification within 5 (five) months after Company's financial year is closed.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, ditetapkan bahwa Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup.

In accordance with Act No. 19 of 2003 concerning BUMN, it is stipulated that the Board of Directors shall submit an annual report to the RUPS (GMS) to obtain ratification within 5 (five) months after Company's financial year is closed.

Indikator Kinerja Persentase kepatuhan proses pelaporan BUMN pada tahun 2018 dapat tercapai 100 persen karena seluruh BUMN sudah menjalankan kepatuhan proses pelaporan BUMN, yaitu penyampaian Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Performance Indicator to Percentage on compliance toward reporting process of BUMN in 2018 can be achieved 100 percent because all BUMNs have complied with the reporting process of BUMN, namely the submission of Financial Statements of 2017's Financial Year in accordance with a predetermined time limit.

Sasaran Strategis Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif

Strategic Target of Planning and formulating quality and implementable policies

Shareholder Aspiration Letter (SAL) yaitu sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno yang disampaikan kepada Direksi BUMN mengenai hal-hal yang menjadi perhatian, aspirasi, dan target yang ditetapkan pemegang saham sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang akan datang pada BUMN.

Shareholder Aspiration Letter (SAL), which is a document issued by The Minister of State-Owned Enterprise Rini M. Soemarno that is submitted to the State-Owned Enterprise Directors concerning matters of concern, aspirations, and targets set by shareholders as guidelines in the preparation of the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) that will come to the State-Owned Enterprise.

1. Terpenuhinya batas waktu penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)

Fulfilment on Issuance Time Limit of SAL (Shareholder Aspiration Letter)

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Fulfilment on Issuance Time			
Limit of SAL (Shareholder Aspiration Letter)	Agustus 2018	Agustus 2018	100%

BUMN sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Negara harus dikelola dengan baik. Pengelolaan BUMN diatur oleh berbagai peraturan, salah satunya adalah mengenai akuntabilitas keuangan. Pengaturan mengenai akuntabilitas keuangan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN yang juga dapat meningkatkan kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat pada BUMN. Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut

BUMN as a business entity owned by the State shall be managed properly. Management of BUMN is governed by various regulations, among others concerning financial accountability. The regulation concerning BUMN financial accountability is regulated in the Minister of BUMN Regulation No. PER-21/MBU/2012 concerning Guideline to Implement BUMN's Financial Accountability which has the main objective to improve the accountability of BUMN financial management which may also improve the performance and level of public trust in BUMN. One of the things regulated in the Ministerial Regulation is the Shareholder Aspiration Letter (SAL), which is a document



adalah Shareholder Aspiration Letter (SAL) yaitu sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno yang disampaikan kepada Direksi BUMN mengenai hal-hal yang menjadi perhatian, aspirasi, dan target yang ditetapkan pemegang saham sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang akan datang pada BUMN.

Menurut peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno tentang penyusunan RKAP, dokumen tersebut paling lambat harus sudah diserahkan kepada Pemegang Saham/ Pemilik Modal 60 hari sebelum tahun pelaksanaan RKAP. Oleh karena itu, guna mendukung proses penyusunan RKAP, dokumen SAL harus segera diterbitkan paling lambat bulan Agustus setiap tahunnya. Pada tahun 2018, melalui surat nomor S-564/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018, Menteri BUMN Rini M. Soemarno telah menyampaikan APS untuk penyusunan RKAP tahun 2019. Oleh karena itu, pencapaian indikator ini tercapai 100 persen.

issued by the Minister of BUMN submitted to BUMN Directors concerning concerned matters, aspirations, and targets specified by shareholders as guideline in preparing the future Work Plan and Company Budget (RKAP) for BUMN.

According to the BUMN Minister's regulation concerning RKAP preparation, the document shall be submitted to the Shareholders/Capital Owners for no later than 60 days before the year of RKAP implementation. Therefore, in order to support RKAP preparation process, SAL document shall be issued for no later than August each year. In 2018, through letter number S-564/MBU/08/2018 dated August 31st, 2018, the Minister of BUMN has submitted the APS for RKAP preparation in 2019. Therefore, this indicator achievement is 100 percent achieved.

Sasaran Strategis Pembinaan BUMN yang optimal

Strategic Target to Optimum supervision of BUMN (State-Owned Enterprise)

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Fulfilment of a proposed response time concerning corporate action according to service standards	100%	100%	100%
Stipulation of the Board of Directors in accordance to the Regulation	100%	179%	179%
Timely Arrangement of RUPS (GMS)	100%	100%	100%
Availability of BUMN Performance Contracts	100%	100%	100%



1. Terpenuhiya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan

Fulfilment of a proposed response time concerning corporate action according to service standards

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Fulfilment of a proposed response time concerning corporate action according to service standards	100%	100%	100%

IKU ini bertujuan untuk menjadikan budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN menjadi lebih transparan, profesional dan akuntabel serta menunjang pengambilan keputusan yang lebih cepat terutama dalam usulan aksi kegiatan BUMN. IKU ini diukur berdasarkan oleh Standar

The IKU aims to make the work culture within the Ministry of BUMN environment to become more transparent, professional and accountable and to support faster decision making, especially in the proposed action of BUMN activities. This IKU is measured based on the

IKU ini bertujuan untuk menjadikan budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN menjadi lebih transparan, profesional dan akuntabel serta menunjang pengambilan keputusan yang lebih cepat terutama dalam usulan aksi kegiatan BUMN. IKU ini diukur berdasarkan oleh Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri BUMN Rini M. Soemarno atau Sekretaris Kementerian BUMN. Target pencapaian IKU ini difokuskan pada layanan Evaluasi Kinerja Triwulanan/Berkala dan persetujuan corporate action yang ditargetkan atas seluruh proses sesuai dengan standar layanan.

The IKU aims to make the work culture within the Ministry of BUMN environment to become more transparent, professional and accountable and to support faster decision making, especially in the proposed action of BUMN activities. This IKU is measured based on the Minimum Service Standards stipulated by the Minister of BUMN or the Secretary of the Ministry of BUMN. IKU's achievement target is focused on Quarterly/Periodic Performance Evaluation services and corporate action agreements targeted at all processes according to the service standards.

Selama tahun 2018, IKU ini telah tercapai 100 persen. Hal ini berarti Kementerian BUMN telah merespon usulan aksi korporasi dari BUMN melalui pemberian evaluasi kinerja triwulanan atau berkala dan persetujuan corporate action sesuai dengan standar layanan.

During 2018, this IKU has reached 100 percent. This means that the Ministry of BUMN has responded to the proposed corporate action from BUMN through provisions of quarterly or periodic performance evaluations and corporate action agreements according to the service standards.

2. Penetapan Direksi Sesuai dengan Peraturan

Stipulation of the Board of Directors in accordance to the Regulation

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Stipulation of the Board of Directors in accordance to the Regulation	100%	179%	179%



Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Rini M. Soemarno Nomor: PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Keasdepan MSE BUMN merupakan unit kerja Eselon II di bawah Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN yang memiliki tugas pokok “melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif BUMN”. Salah satu fungsinya adalah “koordinasi penataan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN”.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Keasdepan MSE BUMN Tahun 2018 adalah “Penetapan Direksi & Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan peraturan”, dengan target sebanyak 119 orang Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, jumlah Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan mutasinya berjumlah 213 orang dengan rincian 92 orang (43,19 persen) yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018, dan 121 orang (56,81 persen) yang belum berakhir masa jabatannya pada tahun 2018. atau mencapai 178,99 persen dari target sebesar 119 orang. 213 orang tersebut terdiri dari

Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan mutasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama tahun 2018 dilakukan secara intensif dan tidak hanya ditujukan kepada pengurus BUMN (Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 tersebut, bahkan secara komposisi lebih dominan dilakukan terhadap Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang masih dalam masa jabatannya (pemberhentian antar waktu). Secara umum, pertimbangan dilakukannya mutasi antar waktu tersebut adalah dalam rangka penataan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN (perubahan nomenklatur jabatan/struktur organisasi), adanya penugasan khusus dari

Based on the Minister of BUMN Regulation Number: PER-10/MBU/07/2015 concerning Organization and Work Procedure of the Ministry of BUMN, Keasdepan MSE BUMN is an Echelon II working unit under the Deputy of Business Infrastructure Field of the Ministry of BUMN which has the main task of “implementing preparation of policy formulation, coordinating the implementation of policies, monitoring, analysis, evaluation, and reporting to increase the capacity of executive management of BUMN human resources. One of its functions is “coordinating the arrangement of the Board of Directors and the Board of Commissioners/BUMN Supervisory Board”.

In accordance with the main tasks and functions, one of the Main Performance Indicators (IKU) of the BUMN MSE in 2018 is “Determination of Directors & the Board of Commissioners/Supervisors in accordance with regulations”, with a target of 119 Directors and the Board of Commissioners/BUMN Supervisory Board.

As of December 31st, 2018, the number of Directors and the Board of Commissioners/Supervisory Board with its stipulated mutations was 213 people with details of 92 people (43, 19 percent) whose service period ended in 2018, and 121 people (56, 81 percent) whose service period has not ended in 2018 or reached 178, 99 percent of the target of 119 people. The 213 people consist of

This condition indicates that the mutation of the Board of Directors and the Board of Commissioners/ BUMN Supervisory Board during 2018 is implemented intensively and is not only directed at BUMN management (Directors or Board of Commissioners/Supervisory Board) whose service period ended in 2018, even in a more dominant composition implemented on the Board of Directors or the Board of Commissioners/BUMN Supervisory Board that is still in his/her service period (termination among times). Generally, consideration of mutation among times is in the framework of structuring Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners/ BUMN Supervisory Board (changes in job nomenclature/ organizational structure), specific assignments from



Pemerintah sehingga membutuhkan kualifikasi tertentu untuk posisi Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut, terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, meninggal dunia, dan alasan lain yang dipandang tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.

Ke depan atau mulai tahun 2019, pengukuran kinerja atas mutasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN direncanakan untuk disesuaikan menjadi berdasarkan jumlah BUMN per periode/waktu. Hal ini sekaligus agar proses yang dilakukan di bawah koordinasi Keasdepan MSE BUMN, lebih diprioritaskan kepada mutasi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang akan berakhir masa jabatannya dalam periode tersebut.

the Government so that certain qualifications are required for the position of Directors and/or the Board of Commissioner/BUMN Supervisory Board, there are legal problems faced by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/BUMN Supervisory Board, passed away, and other reasons deemed appropriate by the General Meeting of Shareholders/Capital Owners.

Going forward or starting in 2019, performance measurement on mutations of the Directors and the Board of Commissioners/BUMN Supervisory Board are planned to be adjusted to be based on number of BUMN per period/time as well as the process implemented under the coordination of Keasdepan MSE BUMN, prioritizes the mutation of the Board of Directors and the Board of Commissioners/BUMN Supervisory Board which service period will be terminated.

3. Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu

Timely Arrangement of RUPS (GMS)

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Timely Arrangement of RUPS	100%	100%	100%

RUPS adalah adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Penyelenggaraan RUPS tepat waktu menjadi salah satu IKU Kementerian dengan tujuan agar kepentingan pemegang saham dapat terlindungi. Dengan terlaksananya RUPS tepat waktu dan dipersiapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan BUMN oleh Kementerian BUMN. Pelaksanaan RUPS yang telah dilakukan selama tahun 2018 adalah RUPS maupun RPB Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2018 serta RUPS maupun RPB Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017. Selama tahun 2018, pelaksanaan RUPS telah dilakukan 100 persen tepat waktu dimana seluruh BUMN telah melaksanakan RUPS tepat waktu dimana sesuai dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 23

RUPS is an organ of Persero that holds the highest authority in the Persero and holds all authorities that are not submitted to the Directors or Commissioners. The timely arrangement is one of the Ministry's IKU with aim that the interests of shareholders can be protected. With the implementation of timely RPUS and prepared in accordance with Company's articles of association, the company is expected to be able to improve the quality of BUMN supervisory by the Ministry of BUMN. The implementation of RUPS which has been implemented during 2018 is RPUS and RPB on Ratification of Company's Budget Work Plan as well as RUPS and RPB on Ratification of 2017 Financial Year Annual Report. During 2018, the implementation of RUPS has been implemented 100 percent on time where all BUMNs have implemented the timely RUPS where in accordance with Act No.19 of 2003 concerning BUMN article 23 states that the Annual



menyatakan bahwa batas waktu RUPS Laporan Tahunan paling lambat 5 bulan setelah tahun berlalu. Sementara itu untuk pelaksanaan RUPS RKAP diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Rini M. Soemarno No.KEP- 101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, dimana batas waktu RUPS adalah 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan.

Report RUPS time limit is no later than 5 months after the year has elapsed. Meanwhile for the implementation of RUPS RKAP is regulated in the Decree of the Minister of BUMN No.KEP-101/MBU/2002 concerning Preparation of Company's Work Plan and Budget of BUMN, where the timeline for RUPS is 60 days before entering company's fiscal year.

4. Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN

Availability of BUMN (State-Owned Enterprise) Performance Contracts

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Availability of BUMN Performance Contracts	100%	100%	100%

Kontrak kinerja adalah suatu kesepakatan yang berisi mengenai indikator kinerja yang ingin dicapai baik sasaran pencapaiannya maupun jangka waktu pencapaiannya. Ada 2 (dua) hal yang perlu dicantumkan dalam kontrak kinerja

Performance contract is an agreement which contains performance indicators to be achieved both achievement target and achievement period. There are 2 (two) things which needs to be included in the performance contract,



yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai serta program kerja untuk mencapainya.

namely final target to be achieved as well as working program to achieve it.

Selama tahun 2018, seluruh target kontrak kinerja BUMN sudah terealisasi pada saat pelaksanaan RUPS dan RPB Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 sehingga persentase capaian dari IKU ini sebesar 100%.

During 2018, all targets of BUMN performance contract has been realized during the time of RUPS implementation and RPB on Ratification of Company's Work Plan and Budget in 2018 so that the percentage of achievement from IKU is 100%.

Sasaran Strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif Strategic Target of Effective implementation of controls and supervision

Sebagai bagian dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, setiap temuan BPK diupayakan agar bisa diselesaikan secara tuntas.

As part of implementing a clean and accountable government, every BPK finding is sought so that it can be resolved completely.

1. Persentase tindak lanjut LHP BPK

Percentage of LHP BPK Follow-Up

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Percentage of LHP BPK Follow-Up	100%	100%	100%

Selama Tahun 2018 telah terbit Surat BPK terkait monitoring LHP BPK, yaitu hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) KBUMN Tahun 2017 yang terdiri dari 10 temuan dan 33 rekomendasi. Kementerian BUMN telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dan seluruhnya diusulkan selesai (status S).

During 2018, BPK Letter was issued related to BPH LHP monitoring, namely audit results of 2017 KBUMN Financial Report which consists of 10 findings and 33 recommendations. The Ministry of BUMN has followed up all recommendations and all proposed to have been completed (S status).

Capaian progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Tahun 2018 adalah 100 persen. Sampai dengan akhir tahun 2018, dari 179 temuan dan 385 rekomendasi, telah ditindaklanjuti seluruhnya. Dari 385 bukti tindak lanjut (TL), BPK menganggap 319 rekomendasi telah selesai dan 66 rekomendasi masih diperlukan tambahan bukti tindak lanjut.

Progress achievement of the Follow-Up on BPK Audit Result Recommendation up to 2018 is 100 percent. Until the end of 2018, out of 179 findings and 385 recommendations, all of which have been followed up. Out of 385 follow-up evidences, BPK considers 319 recommendations to have been completed and 66 recommendations still required additional follow-up evidence.



Sasaran Strategis Terwujudnya SDM yang kompeten dan professional

Strategic Target of the Realization of competent and professional human resources

SDM merupakan aset utama Kementerian BUMN dalam melakukan pembinaan yang optimal. Oleh karena itu, program pengembangan pegawai sangat penting dalam upaya meningkatkan kompetensi.

Human Resources is the main asset of the Ministry of State-Owned Enterprise in implementing optimal guidance. Therefore, employee development programs are very important in efforts to improve competence.

1. Indeks peningkatan kompetensi pegawai

Index of increasing Employee competency

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Index of Increasing Employee Competency	4 (Scale 1-5)	4 (Scale 1-5)	100%

Pada bulan September 2018, Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN melakukan asesmen kompetensi terhadap pegawai mulai dari Pelaksana sampai dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dari hasil asesmen tersebut, diketahui bahwa rata-rata kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian BUMN berada pada skala 4, yaitu tingkat kesenjangan kompetensi rendah.

Skala tersebut menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Kementerian BUMN sudah baik relative setara. Program pengembangan lanjutan diperlukan untuk menutup kesenjangan kompetensi yang masih ada di beberapa area, salah satunya pada kompetensi customer focus.

Skala pengukuran dimaksud mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dimana yang dimaksud dengan kesenjangan kompetensi rendah yaitu telah memenuhi $\frac{3}{4}$ dari seluruh indikator perilaku kompetensi jabatannya

In September 2018, Human Resources Management Section of the Ministry of BUMN performed competency assessment toward employees starting from the Implementer to Primary Executive Officer. From the assessment results, it is known that the average competency of employees in the Ministry of BUMN is on a scale of 4, namely the level of low competency gap.

The scale indicates that the competency possessed by the Ministry of BUMN employees is relatively equal. Continuous development programs are required to close competency gaps which still exist in several areas, one of which is customer focus competency.

The measurement scale refers to the Regulation of State Administration Institution No. 10 of 2018 concerning Competence Development of Civil Servants, which is meant by a low competency gap that is fulfilling $\frac{3}{4}$ of all position competency behaviour indicators.



Sasaran Strategis Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern

Strategic Target to the Realization of a modern corporate management organization

1. Indeks peningkatan kompetensi pegawai

Index of increasing Employee competency

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Percentage of Organizational Transformation Road Map Achievement	75%	75%	100%

Dalam rangka pencapaian Roadmap Transformasi Organisasi, pada awal tahun telah ditetapkan 3 Inisiatif Organisasi, yaitu: Tim IPO/RI Anak Perusahaan, Tim monitoring pelaksanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Komite komunikasi dan publikasi BUMN. Selain itu, telah dibentuk Tim Kelembagaan yang bertugas untuk melakukan evaluasi kelembagaan sekaligus menjadi counterpart team pada kegiatan audit organisasi. Telah dibentuk pula Tim RUU BUMN yang bertugas untuk mengawal perubahan UU BUMN. Kegiatan evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan meliputi persiapan pelaksanaan evaluasi dan pengumpulan data. Untuk kegiatan audit telah melalui tahapan kick off meeting pada 6 Juli 2018 dan pelaksanaan FGD antara Kementerian BUMN dengan stakeholder-stakeholder terkait.

In order to achieve Organizational Transformation Roadmap, 3 Organizational Initiatives were established at the beginning of the year, namely: the IPO/RI Subsidiary Team, the Monitoring Team for the implementation of Jakarta-Bandung Fast Train Project, and the Communication Committee and BUMN publication. In addition, an Institutional Team was established which was tasked to conduct institutional evaluations as well as being a counterpart to the team in the organization audit activities. The RUU BUMN Team was also established to escort the changes in BUMN Law. Institution evaluation activity which has been implemented includes preparation of evaluation implementation and data collection. The audit activities have gone through kick off meeting stages on July 6th, 2018 and the implementation of the FGD between the Ministry of BUMN and related stakeholders.



Pada semester kedua, organisasi transisi Kementerian BUMN telah dikomunikasikan dengan Kementerian PAN-RB dan Bappenas dalam forum Audit Organisasi untuk penyusunan Kabinet 2019-2023 yang diharapkan dapat menghasilkan organisasi pengelola BUMN yang profesional, tepat fungsi dan tepat ukuran (right size). Hasil kajian organisasi transisi Kementerian BUMN telah ditindaklanjuti dengan penataan nomenklatur dan kelas jabatan melalui Evaluasi Jabatan sekaligus penyediaan alternatif pola karir bagi pegawai di lingkup Kementerian BUMN. Usulan evaluasi jabatan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian PAN-RB untuk dibahas dan divalidasi.

In the second semester, transitional organization of the Ministry of BUMN was communicated with PAN-RB Ministry and Bappenas in Organizational Audit forum for the preparation of 2019-2023 Cabinet which was expected to produce professional BUMN management organizations, right functions and right size. Transitional organization review result of the Ministry of BUMN have been followed up by structuring nomenclature and class positions through Job Evaluation while providing alternative career patterns for employees within the Ministry of BUMN. The proposed evaluation of such position was submitted to the Ministry of PAN-RB for discussion and validation.

Disamping itu, pada penghujung tahun 2018, telah ditetapkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-313/MBU/12/2018 tentang Tim Asistensi Transformasi Organisasi Kementerian Badan usaha Milik Negara. Keputusan Menteri tersebut ditetapkan dalam rangka penentuan arah kebijakan peran BUMN sebagai agen pembangunan. Kementerian BUMN perlu menetapkan berbagai kebijakan inisiatif strategis transformasi agar pelaksanaan tugas BUMN sebagai agent pembangunan berjalan secara efektif dan terarah. Oleh karena itu, realisasi transformasi organisasi di tahun 2018 ini adalah sesuai dengan target yakni 75 persen, sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen.

In addition, at the end of 2018, decision of the Minister of BUMN No. SK-313/MBU/12/2018 has been stipulated concerning the Assistance Team for Organizational Transformation to the Ministry of BUMN. The Ministerial Decree was stipulated in the framework of determining policy direction of BUMN role as an agent of development. The Ministry of BUMN needs to establish various policies on transformation strategic initiatives so that the implementation of BUMN duties as development agent runs effectively and directed. Therefore, the realization of organizational transformation in 2018 is in accordance with the target of 75 percent, so the percentage of achievement is 100 percent.





Sasaran Strategis Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih

Strategic Target to the Realization of good and clean organizational governance

Upaya meningkatkan penerapan RB dan SAKIP di Kementerian BUMN terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi hasil assesment Kementerian PAN dan RB.

Efforts to improve the application of Bureaucratic Reform and SAKIP in the Ministry of State-Owned Enterprise continue to be implemented. This is in line with the assessment result recommendations of the Ministry of State Minister for Administrative Reforms and Bureaucratic Reforms.

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Score of Institution			
Performance	75	70,14	94%
Accountability System			
Implementation value of Bureaucratic Reform to the Ministry of BUMN	76	76,74	101%
Integrity Zone Value	85	76,26	90%

1. Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN

Score of Government Institution Performance Accountability System (SAKIP/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) to the Ministry of BUMN (State-Owned Enterprise)

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Score of Government Institution			
Performance Accountability			
System (SAKIP/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) to the Ministry of BUMN	75	70,14	94%

Pada tahun 2018, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan surat dengan Nomor B/628/M.AA.05/2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Kementerian BUMN memperoleh nilai SAKIP 70,14 atau predikat BB pada tahun 2017. Dijelaskan pula bahwa nilai tersebut berarti tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian BUMN sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan.

In 2018, the Ministry of PAN and RB issued a letter with Number B/628/ M.AA.05/2018 concerning Evaluation Results on Government Institution Performance Accountability in 2017. In the letter it is stated that the Ministry of BUMN obtained a SAKIP value of 70, 14 or a predicate BB in 2017. It was also explained that the value meant the level of effectiveness and efficiency of budget usage compared to performance achievements, the quality of bureaucratic performance culture development and the results-oriented government implementation to the Ministry of BUMN had shown good results, however still required several improvements.



Skor SAKIP Kementerian BUMN berangsur-angsur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian BUMN secara terus-menerus berupaya untuk memperbaiki akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Beberapa aspek penilaian yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di antaranya adalah aspek perencanaan kinerja meningkat sebesar 1,34 poin menjadi 22,01, aspek pengukuran kinerja meningkat sebesar 0,83 poin menjadi 16,3, aspek pelaporan kinerja meningkat sebesar 0,48 menjadi 11,25, aspek evaluasi kinerja meningkat sebesar 0,58 poin menjadi 6,89. Sedangkan untuk capaian total tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 meningkat sebesar 3,95 poin menjadi 70,14. Namun, capaian Skor SAKIP di tahun 2017 ini masih belum dapat melampaui target yakni sebesar 75 sehingga persentase capaiannya yakni 93,52 persen. Adapun upaya perbaikan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan di antaranya adalah penyelerasan Renstra Eselon I dengan Renstra Kementerian BUMN, pengembangan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) berbasis elektronik dan bersifat cascading, dan peningkatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

SAKIP score of the Ministry of BUMN has gradually increased every year. This indicates that the Ministry of BUMN constantly strives to improve accountability or liability for the outcome toward budget usage in the framework of realizing results-oriented government.

Several assessment aspects that have increased compared to the previous year among others are performance planning aspect increased by 1, 34 points to 22, 01, performance measurement aspect increased by 0, 83 points to 16, 3, performance reporting aspect increased by 0, 48 to 11, 25, performance evaluation aspect increased by 0, 58 points to 6, 89. As for the total achievement in 2017 compared to 2016 increased by 3, 95 points to 70, 14. However, the achievement of SAKIP Score in 2017 still cannot exceed the target of 75, so the percentage of achievement is 93, 52 percent. The improvement efforts implemented in accordance with recommendations provided among others is the synchronization of Echelon I Strategic Plan with the Ministry of BUMN Strategic Plan, development of an electronic-based and cascading Employee Performance System (SKP), and an increase in internal performance accountability evaluation.

2. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN

Implementation value of Bureaucratic Reform to the Ministry of BUMN (State-Owned Enterprise)

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Implementation value of Bureaucratic Reform to the Ministry of BUMN	76	76,74	101%

Untuk mendukung program reformasi birokrasi, Kementerian BUMN dituntut untuk selalu dapat membangun organisasi yang Good Governance dan Clean Government. Untuk melihat sejauh mana kesesuaian reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian BUMN dalam memenuhi harapan masyarakat, maka diperlukan

To support the bureaucratic reform program, the Ministry of BUMN is required to always be able to build an organization with Good Governance and Clean Government. To see to what extent the suitability of bureaucratic reform implemented by the Ministry of BUMN in fulfilling society's expectation, it is necessary to assess the implementation



adanya penilaian atas pelaksanaan program-program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dengan menggunakan metode penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Model PMPRB ini menitikberatkan penilaian pada 2 (dua) komponen utama yaitu Komponen Pengungkit (enablers) meliputi kriteria kepemimpinan, perencanaan strategik, SDM aparatur, kemitraan dan sumber daya, serta proses; dan Komponen Hasil (result) yang terdiri dari kriteria hasil pada masyarakat/ pengguna layanan, kriteria hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional, kriteria hasil pada sumber daya manusia aparatur, dan kriteria hasil kinerja utama. IKU ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

of bureaucratic reform programs within the Ministry of BUMN using assessment methods in accordance with Regulations of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 1 of 2012 concerning Guidelines for Self-Assessment to the Implementation of Bureaucratic Reform (PMPRB). Self-Assessment of the Implementation of Bureaucratic Reform is an instrument to assess the progress of implementing bureaucratic reform independently implemented (self-assessment) by the Ministry/Institution and Regional Governments.

This PMPRB model emphasizes the assessment of 2 (two) main components, namely the Enablers Component which includes the criteria for leadership, strategic planning, administrative reform of HR, partnerships and resources, as well as processes; and Component Result which consist of results criteria to the society/service users, results criteria in the local, national and international communities, results criteria for administrative reforms of human resources, and the main performance result criteria. IKU aims to assess the implementation of bureaucratic reform program in the Ministry of BUMN. This IKU achievement leads to achievement which exceeds the target (maximizing), where higher target achievement is the expected achievement.





BUMN atas penilaian 2017 adalah 76. Menurut surat B/25/M.RB.05/2018 nilai Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN adalah 76,14. Dengan demikian capaian IKU ini adalah 100,18 persen. Keunggulan Kementerian BUMN yang mendorong pencapaian nilai tersebut diantaranya adalah sudah terdapat MKO (Manajemen Kinerja Organisasi) di setiap ke deputian untuk memantau pelaksanaan manajemen kinerja, sudah terdapat pertemuan rutin antara pimpinan dengan pegawai untuk menyamakan persepsi terkait perkembangan Kementerian BUMN, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan JDIH Nasional, Sudah disusun permen tentang pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi dan individu, laporan kinerja dibuat per triwulan dalam rangka memastikan bahwa pencapaian kinerja dimonitor dan dilaporkan secara berkala, sudah dilakukan movev terhadap SOP.

Implementation value on 2017 assessment is 76. According to letter B/25/M.RB.05/2018 the Implementation value of BUMN Ministry's Bureaucratic Reform is 76, 14. Thus the achievement of IKU is 100, 18 percent. The advantage to the Ministry of BUMN which encourage the value achievement among others the existence of MKO (Organizational Performance Management) in each deputy to monitor the implementation of performance management, there have been regular meetings between leaders and employees to equalize perceptions related to the development of BUMN Ministry, well managed Legal Information Documentation Network and integrated with National JDIH, Ministerial Government has been compiled on providing performance benefits based on organizational performance and individual achievements, performance reports are made quarterly in order to ensure that performance achievements are regularly monitored and reported, monitoring and evaluation toward SOP has been implemented.

3. Nilai Zona Integritas

Integrity Zone Value

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Integrity Zone Value	85	76,26	90%

Penilaian Zona Integritas (ZI) dilakukan berdasarkan instrumen evaluasi pembangunan Zona Integritas yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014. Berdasarkan penilaian mandiri, Kedepuyan Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha (RPU) dan Kedepuyan Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan (JKJSK) mendapatkan nilai tertinggi yaitu 76,26 dan 76,06. Kedua unit kerja tersebut, ditargetkan menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2019.

Beberapa hambatan yang menyebabkan Program Zona Integritas belum berjalan optimal disebabkan karena belum ada keseragaman terhadap penerapan reformasi birokrasi pada level unit kerja. Pada tahun 2019, akan dilakukan Focus Group Discussion dengan mengundang narasumber Kementerian/Lembaga yang

The Integrity Zone Assessment (ZI) was implemented based on Integrity Zone development evaluation instrument set forth in PAN and RB Ministerial Regulation Number 52 of 2014. Based on independent assessment, the Deputy for Business Restructuring and Development (RPU) and Deputy for Financial Services, Survey Services and Consultants (JKJSK) obtained the highest score of 76, 26 and 76, 06. The two working units are targeted to become an Integrity Zone towards a Corruption-Free Region by 2019.

Several obstacles which caused the Integrity Zone Program of not running optimally since there are no uniformity toward bureaucratic reform implementations on the level of working unit. In 2019, Focus Group Discussion will be implemented by inviting speakers from Ministries/ Institutions which have implemented the Integrity Zone



telah menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sesuai ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

toward a Corruption-Free Regions (WBK) in accordance with provisions to the Minister of State Administrative Reform and Bureaucratic Reform.

Sasaran Strategis Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

Strategic Target to the Availability of valid, reliable and easily accessible information

Seluruh data capaian IKU tersebut didapatkan dari aplikasi digital Silaba (Sistem Informasi Laporan Berkala) sebagai bagian dari perubahan pembinaan ke arah yang lebih baik.

All Key Performance Indicator achievement data are obtained from Silaba digital application (Periodic Report Information System) as part of the change in guidance towards a better direction.

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Availability of valid BUMN data through the portal	95%	90,24%	95%
Percentage of information system Service Level Agreement Index (SLAI) Achievement	≥90%	99,87%	111%

1. Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal

Availability of valid BUMN (State-Owned Enterprise) data through the portal

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Availability of valid BUMN data through the portal	95%	90,24%	95%

Dalam rangka mempermudah pengumpulan data dan pencarian laporan berkala BUMN, Kementerian BUMN telah membangun portal EIS yang berfungsi untuk menerima pelaporan BUMN dan Perusahaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas (PPKNM) sejak tahun 2009. Berdasarkan evaluasi selama 5 tahun, diketahui bahwa kepatuhan BUMN dalam penyampaian laporan berkala BUMN melalui portal masih rendah yang disebabkan belum adanya kebijakan hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu disusunlah kebijakan penyampaian data, laporan dan

In the framework of facilitating data collection and BUMN periodic report searches, the Ministry of BUMN has built an EIS portal which functions to receive BUMN reporting and Minority State Ownership Portfolio Company (PPKNM) since 2009. Based on 5 years evaluation, it is known that BUMN compliance in submitting BUMN periodic reports through the portal are still low due to the absence of an underlying legal policy. Therefore a policy to submit data, reports and BUMN documents electronically are compiled and stipulated in Ministerial Regulation Number PER-



dokumen BUMN secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor PER-18/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2016 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara Secara Elektronik dan Surat Edaran Menteri BUMN Rini M. Soemarno No SE-03/MBU/6/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Penghentian Penyampaian Data dan Dokumen/Laporan Berkala BUMN secara tercetak (berbasis kertas).

Selain penyusunan kebijakan dilakukan pula penyederhanaan input data dengan melakukan perubahan Portal EIS (2009 – 2014) menjadi Portal FIS (2014 – Juni 2018) dan terakhir melakukan pengembangan portal sesuai perkembangan teknologi terkini dan kebutuhan data stakeholders sehingga penamaan portal berubah lagi menjadi portal Silaba (Juli 2018 – sekarang).

Realisasi penyampaian laporan oleh BUMN melalui portal FIS/Silaba selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

18/MBU/10/2014 dated October 16th, 2016 concerning Data Submission, Reports, and Documents of Electronic BUMN and Circular Letter to the Minister of BUMN No. SE-03/MBU/6/2015 dated June 12th, 2015 concerning Termination on Submission of printed (paper-based) BUMN Periodic Data and Documents/Reports.

In addition to policy arrangement, simplification of data input was also implemented by changing EIS Portal (2009-2014) into FIS Portal (2014-June 2018) and finally developing portals according to the latest technological development and stakeholders' data requirement so that the naming of portal changed again into Silaba portal (July 2018 – present time).

The realization of report submission by BUMN through FIS/Silaba portal during 2018 can be seen in the following table:

No	Target	Realization of 2018	Realisasi		Persentase	
			Pelaporan lengkap	Data Valid	Kepatuhan	Validasi
a	b	c	d	e	d/c	e/d
1	Annual Unaudit of 2017	98	96	84	98,0%	87,5%
2	Final RKAP of 2018	98	70	64	71,4%	91,4%
3	Annual Audit of 2017	115	96	93	83,5%	96,9%
4	Quarterly I of 2018	115	109	94	94,8%	86,2%
5	Semester I of 2018	115	109	96	94,8%	88,1%
6	Quarterly III of 2018	115	109	100	94,8%	91,7%
7	Proposed RKAP 2019	98	89	79	90,8%	88,8%
Total		754	678	610	89,7%	90,1%

Catatan: Target periode tahunan unaudited 2017, RKAP Final 2018 dan RKAP Usulan 2019 hanya dikhususkan bagi BUMN Non Tbk.

Note: 2017 unaudited annual period target, Final RKAP of 2018 and Proposed RKAP of 2019 are only reserved for Non-Tbk BUMNs.



Realisasi penyampaian data oleh BUMN melalui portal FIS/Silaba selama tahun 2018 sebanyak 678 pelaporan atau 89,7 persen dari target 754 pelaporan, sementara yang valid hanya berjumlah 610 pelaporan atau 90,1 persen dari realisasi pelaporan. Sementara itu bila dibandingkan dengan target tahun 2018 yang mencapai 95 persen, maka realisasi ketersediaan data valid melalui portal tahun 2018 masih di bawah target. Penyebab belum tercapainya target antara lain:

1. Tingkat kepatuhan pelaporan BUMN khususnya periode RKAP Final 2018 masih rendah, mengingat ada kelemahan pada belum adanya dasar hukum penyampaian RKAP setelah ditetapkan oleh RUPS.
2. Partisipasi BUMN untuk melakukan perbaikan data atas data yang belum valid (invalid) masih kurang memadai, mengingat dokumen bukti penyelesaian kewajiban pelaporan yang dihasilkan oleh sistem Silaba belum dijadikan satu-satunya indikator pengukuran kepatuhan pelaporan.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data valid melalui portal, perlu mendorong baik Unit Teknis maupun BUMN untuk menjadikan dokumen bukti penyelesaian kewajiban pelaporan yang dihasilkan oleh sistem Silaba sebagai satu-satunya indikator pengukuran kepatuhan pelaporan BUMN.

Data submission realization by BUMN through FIS/Silaba portal during 2018 was 678 reports or 89, 7 percent to the target of 754 reporting, while the applicable ones only amounted to 610 reports or 90, 1 percent of reporting realizations. Meanwhile, when compared with 2018 target that reached 95 percent, the realization of valid data availability through 2018 portal is still below the target. Causes for not achieving the target among others are as follows:

1. BUMN reporting compliance level, specifically the period of 2018 RKAP Final is still low, considering there are weaknesses in the absence of legal foundation of RKAP submission after it has been determined by RUPS.
2. BUMN participation to improve data on invalid data is still inadequate, considering that completion proof of reporting obligations produced by the Silaba system has not been used as the only measurement indicator of measurement of reporting compliance.

In the framework of increasing the availability of valid data through the portal, it is necessary to encourage both Technical Unit and BUMN to make reporting obligation completion proof document

2. Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi

Percentage of information system Service Level Agreement Index (SLAI) Achievement

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Percentage of Information			
System Service Level Agreement	≥90%	99,87%	111%
Index (SLAI) Achievement			

Sebagai jaminan atas keberlangsungan pelayanan Teknologi Informasi, maka telah ditetapkan Standar Pelayanan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian BUMN sesuai dengan Nomor : PERJ-01/S.MBU/2012 dan PERJ-01/D5.MBU.4/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian diterbitkan juga Katalog Layanan Teknologi Informasi Komunikasi untuk melengkapi standar pelayanan sistem informasi sebagai dokumen terstruktur yang berisi informasi mengenai semua layanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang tersedia di Kementerian BUMN.

As guarantee to the continuity of Information Technology services, thus Information System Service Standards has been established in the Environment to the Ministry of BUMN in accordance with Number: PERJ-01/S.MBU/2012 and PERJ-01/D5.MBU.4/2012 on December 17th, 2012 which also issued a Communication Information Technology Service Catalogue to complete the information system service standard as a structured document containing information concerning all Communication Information Technology (ICT) services available at the Ministry of BUMN.



Untuk mengukur pelaksanaan ditetapkan Standar Pelayanan Sistem Informasi digunakan aplikasi berbasis open source yang bernama GLPI (Gestionnaire libre de pare informatique). Implementasi SLA dimaksud kemudian diinputkan ke dalam aplikasi GLPI.

Dari hasil pengukuran yang tercatat dalam aplikasi GLPI sampai dengan 31 Desember 2018, atas layanan SLA yang terselesaikan mencapai 99,88 persen. Jumlah permasalahan/permintaan Layanan Sistem Informasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 4015 tiket, dengan permasalahan terbesar adalah untuk Layanan Aplikasi OA, Layanan Desktop, dan Layanan Jaringan & Internet.

To measure the implementation, Information System Service Standard is stipulated using an open source based application named GLPI (Gestionnaire libre de pare informatique). The intended SLA implementation is then entered into GLPI application.

From measurement results recorded in GLPI application as of December 31st, 2018, the completed SLA services reached 99,88 percent. The number of problems/requests for Information System Services up to December 31st, 2018 is 4015 tickets, with biggest problems such as OA Application Services, Desktop Services, and Network & Internet Services.

Tabel 2. Persentase Tiket Tahun 2018 Berdasarkan Status Tiket GLPI

Table 2. Ticket Percentage of 2018 Based on GLPI Ticket Status

Status Tiket	Jumlah Tiket	Realization of 2018
tahun 2018	Persentase (%)	99,87%
Ticket Solved + Closed:	4010	99,88
Processing/Ticket Not Solved	4	0,10
Pending	1	0,02
Opened Ticket:	4015	100

Tabel 17. Persentase Tiket Berdasarkan Jenis SLA

Table 17. Ticket Percentage Based on SLA Types

Jenis-jenis SLA	Jumlah Tiket	Realization of 2018
tahun 2018	Persentase (%)	99,87%
Layanan Akses Gate	16	0.40
Layanan Aplikasi diluar aplikasi milik KBUMN	19	0.47



Layanan Aplikasi SMS Gateway	1	0.02
Layanan Aplikasi OA	1013	25.23
Layanan Desktop	753	18.75
Layanan Email	187	4.66
Layanan File Sharing	59	1.47
Layanan Jaringan & Internet	526	13.10
Layanan Konsultasi TI dan Otomasi Sistem	336	8.37
Layanan Multimedia	20	0.50
Layanan Pelatihan TI	8	0.20
Layanan Telekomunikasi	42	1.05
Layanan Perangkat Data Center	149	3.71
Layanan Portal ASET	39	0.97
Layanan Portal FIS	165	4.11
Layanan Portal PKBL	289	7.20
Layanan Portal Publik	50	1.25
Layanan Portal SDM	54	1.34
Perbaikan Bug dan Error	59	1.47
Layanan Aplikasi Digital Map	2	0.05
Layanan Aplikasi Untuk Negeri	32	0.80
Layanan Aplikasi Sinadine	12	0.30
Un-Categories SLA *)	184	4.58
Total :	4015	100.00



Sasaran Strategis Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

Strategic Target of Optimal and Accountable budget implementation

Serapan anggaran tahun 2018 mencapai 102% dari target dan hasil audit BPK adalah WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program dan anggaran di Kementerian BUMN telah berjalan baik dan akuntabel.

Absorption of the 2018 budget reached 102% of the target and BPK audit were WTP. This indicates that performance of the program and budget implementation in the Ministry of State-Owned Enterprise has been running well and is accountable.

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Percentage of Budget Utilization	≥90%	91,55%	102%
BPK Opinion on the Financial Report to the Ministry of BUMN	WTP	WTP	100%

1. Persentase Pemanfaatan Anggaran

Percentage of Budget Utilization

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
Percentage of Budget Utilization	≥90%	91,55%	102%

Sebagaimana DIPA Induk Kementerian BUMN tahun 2018 Nomor SP DIPA-041.01-0/2018 tanggal 5 Desember 2017 dan DIPA Petikan Kementerian BUMN tahun 2018 Nomor SP DIPA- 041.01.1.606538/2018 tanggal 21 November 2017, pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp 247.041.755.000,-. Adapun komposisi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

As main DIPA to the Ministry of BUMN in 2018 Number SP DIPA-041.01-0/2018 dated December 5th, 2017 and Excerpt DIPA to the Ministry of BUMN in 2018 Number SP DIPA-041.01.1.606538/2018 dated November 21st, 2017, the budget ceiling to the Ministry of BUMN in 2018 has been specified at IDR 247,041,755,000. The budget compositions are as follows:





Types of Expenditure	Ceiling	Percent
Salary Expenditure	52.159.826.000	21,12
Goods Expenditure	137.436.650.000	55,63
Capital Expenditure	57.445.279.000	23,25
Total	247.041.755.000	100,00

Pendanaan & Realisasi Kementerian BUMN

Tahun 2015 - 2019

Capaian renstra yang disusun untuk kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut

Tahun	Pagu (Rp M)	%Real
2015	28	85
2016	71	94
2017	65	94
2018	61	92
2019*	80	98**

* Pagu Indikatif
** Target

Pembinaan BUMN

Kementerian BUMN

Tahun	Pagu (Rp M)	%Real
2015	148	84
2016	191	93
2017	199	95
2018	247	92
2019*	222	98**

Dukungan Manajemen

Tahun	Pagu (Rp M)	%Real
2015	120	84
2016	115	93
2017	134	96
2018	186	92
2019*	142	98**

Dalam membina BUMN dan menyehatkan BUMN yang memiliki total aset sebesar Rp 8.097 T (Des 2018) Kementerian BUMN hanya menggunakan anggaran sebesar (average) Rp 200 juta

Anggaran Kementerian BUMN tahun 2018 disusun berdasarkan rencana kinerja Kementerian BUMN tahun 2018 yang telah align sampai dengan indikator kinerja utama Sasaran Strategis Renstra Kementerian BUMN 2015-2019. Anggaran Kementerian BUMN tahun 2018

Budget to the Ministry of BUMN in 2018 is prepared based on performance plan of the Ministry of BUMN in 2018 which aligns with the main performance indicators of Strategic Target of BUMN Ministry Strategic Plan of 2015-2019. Budget to the Ministry of BUMN in 2018 has



juta telah align dengan Renstra Eselon I, Renstra Eselon II, Perjanjian Kinerja Eselon I, Perjanjian Kinerja Eselon II dan Sasaran Kinerja Pegawai. Untuk meminimalisir permasalahan yang dapat ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja, Kementerian BUMN telah menyesuaikan aktivitas dalam upaya mencapai target kinerja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Pada tahun 2018, seluruh target kinerja Kementerian BUMN telah didukung dengan jumlah anggaran yang mencukupi. Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian BUMN juga menyusun rencana pencairan dana sebagaimana rencana aktivitas pencapaian kinerja. Hal ini berdampak positif terhadap gap antara Rencana Pencairan Dana (RPD) dan realisasi anggaran sangat kecil. Dengan demikian, Kementerian BUMN telah merealisasikan anggaran sebagaimana RPD yang telah sinkron dengan rencana waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah disusun, dituangkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan, dan masuk ke dalam perjanjian kinerja pegawai.

Target realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2018 adalah sebesar 92,13 persen atau tercapai sebesar 102 persen dari target sebesar 90 persen dengan rincian sebagai berikut:

Types of Expenditure	Ceiling	Realization	Percent
Salary Expenditure	52.159.826.000	48.718.451.954	93,40
Goods Expenditure	137.436.650.000	125.196.880.557	91,09
Capital Expenditure	57.445.279.000	53.692.692.743	93,47
Total	247.041.755.000	227.608.025.254	92,13

Pencapaian anggaran yang mencapai optimal dan sesuai dengan perencanaan (RPD) disebabkan oleh komitmen pimpinan yang tinggi atas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian BUMN. Komitmen pimpinan dalam hal anggaran menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian

aligned with Echelon I Strategic Plan, Echelon II Strategic Plan, Echelon I Performance Agreement, Echelon II Performance Agreement and Employee Performance Target. To minimize problems which can be caused in the framework of implementing the budget in order to achieve performance targets, the Ministry of BUMN has adjusted its activities in an effort to achieve performance targets with the necessary budgetary requirements. In 2018, all performance targets to the Ministry of BUMN have been supported with sufficient budget amounts. In implementing budget, the Ministry of BUMN also draws up a plan for disbursing funds as performance achievement activities plan. This has a positive impact toward the gap between Fund Disbursement Plan (RPD) and budget realization is very small. Thereby, the Ministry of BUMN has realized the budget as RPD which has been synchronized with activity implementation time plan in the event of a prepared performance achievement, set forth in the Annual Performance Plan, and entered into employee performance agreements.

The budget realization target of BUMN Ministry in 2018 is 92 13 percent or reached 102 percent of the target of 90 percent with the following details:

The achievement of budget that reaches optimal and in accordance with the planning (RPD) is caused by the commitment of leaders who are high on budget implementation within the Ministry of BUMN. The leadership commitment in terms of budget is the main supporting factor in the implementation of budget within



BUMN di tahun 2018. Hal ini juga didukung dengan diselenggarakannya monitoring dan evaluasi bulanan dengan mengundang seluruh unit kerja. Evaluasi tersebut membahas mengenai capaian kinerja unit, termasuk di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran dan pencapaian output. Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi bulanan atas realisasi anggaran dan pencapaian output dievaluasi secara berkala sehingga kualitas monitoring realisasi anggaran dan pencapaian output bulanan dapat lebih efektif.

the Ministry of BUMN in 2018. This is also supported by the implementation of monthly monitoring and evaluation by inviting all working units. Such evaluation discusses the achievement of unit performance, including discussing budget implementation, budget realization and output achievement. The technical implementation of monthly monitoring and evaluation of budget realization and output achievement is periodically evaluated so that the quality of monitoring budget realization and monthly output achievement can be more effective.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN

BPK Opinion on the Financial Report to the Ministry of BUMN (State-Owned Enterprise)

Performance Indicator	Target	Realization of 2018	% Achievement
BPK Opinion on the Financial Report to the Ministry of BUMN	WTP	WTP	100%

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian BUMN adalah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Pencapaian IKU tersebut merupakan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2017, yang

As mandated by the Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2003 concerning State Finance, it is stated that the Minister/Chairperson of an Institution as Goods/Budget User has the task, among others, preparing and submitting financial statements of the State/Institutions Ministries he leads. The Ministry of BUMN is a reporting entity so that it is obliged to implement accounting and accountability reports on the implementation of State Revenues and Expenditures Budget by preparing financial report in the form of Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Equity Changes Report and Notes to Financial Statements.

Financial Report Preparation to the Ministry of BUMN refers to Government Regulations No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and sound financial management principles in Government. This Financial Report has been prepared and presented on an accrual basis so that it will be able to present financial information that is transparent, accurate and accountable.

IKU achievement constitutes BPK Opinion on Financial Report to the Ministry of Finance in 2017, issued by BPK in May-June 2018. The obstacles faced during 2018 are that there are still shortcomings in the competence



dikeluarkan oleh BPK pada bulan Mei-Juni 2018. Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2018 adalah masih terdapat kekurangan pada kompetensi dan kualifikasi pejabat perbendaharaan dan staf pengelola keuangan, pengelolaan BMN belum optimal, kesalahan penganggaran belanja, pengendalian sewa tanah dan/atau bangunan yang belum sesuai dengan ketentuan.

and qualifications of treasury officials and financial management staff, BMN management which is not optimal, errors in expenditure budgeting, controlling of land and/or building leases which have not been in accordance with the provision.



Hasil Assessment SAKIP

SAKIP Assessment Result

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penilaian kinerja terdiri atas Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), Capaian Kinerja (20%). Hasil akumulasi nilai dari komponen-komponen tersebut akan dikonversikan menjadi kategori yang merepresentasikan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan.

Based on Regulations to the Minister of State Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 12 of 2015 concerning Evaluation Guidelines to the Implementation of Government Institutions' Performance Accountability Systems, Performance Assessment consists of Performance Planning (30%), Performance Measurement (25%), Performance Reporting (15%), Internal Evaluation (10%), and Performance Achievement (20%). Results of accumulated values from these components will be converted into categories which represents level of accountability to relevant institutions.

Category	Score	Interpretation
AA	>90 – 100	Highly Satisfied
A	>80 – 90	Satisfied
BB	>70 – 80	Very Good
B	>60 – 70	Good
CC	>50 – 60	Moderate
C	>30 – 50	Poor
D	0 – 30	Very Poor

Selama kurun waktu 2012-2017, Kementerian BUMN berhasil meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari CC menjadi BB. Pada tahun 2012, Kementerian BUMN mendapatkan nilai hasil evaluasi sebesar 55,97 sehingga tingkat akuntabilitas kinerjanya dikategorikan menjadi CC. Nilai ini terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2013 Kementerian BUMN dapat memperoleh skor 59,30. Mulai tahun 2014 hingga 2016, Kementerian BUMN berupaya mempertahankan tingkat akuntabilitas kinerja menjadi B. Pada tahun 2017, Kementerian BUMN memperoleh skor 70,14 atau memperoleh nilai BB dan tahun 2018 naik menjadi 71,24. Hal ini tidak lepas dari seluruh perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN atas rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PAN & RB.

During 2012-2017 periods, the Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) managed to increase the value of performance accountability from CC to BB. In 2012, the Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) obtained an evaluation result value of 55, 97 so that the level of its performance accountability was categorized as CC. This value continues to be increased so that in 2013 the Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) can obtain a score of 59, 30. From 2014 to 2016, the Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) seeks to maintain the level of performance accountability to B. In 2017, the Ministry of State-Owned Enterprise (BUMN) obtained a score of 70, 4 or obtained a BB score and increased to 71, 24 in 2018. This matter cannot be separated from all restorations and developments implemented by the Ministry of BUMN on provided recommendation by the Ministry of State Administrative Reform and Bureaucratic Reform.



Assessed Components	Weight	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Performance Planning	35%	20,91	21,48	23,67	20,11	20,67	22,01	22,07
Performance Measurement	20%	10,89	10,48	12,70	12,91	15,47	16,30	17,36
Performance Reporting	15%	8,00	8,31	9,55	10,81	10,77	11,25	11,36
Internal Evaluation	10%	4,27	5,02	6,14	6,81	6,31	6,89	6,29
Performance Achievement	20%	11,9	14,01	13,04	14,04	12,97	13,54	14,16
Evaluation Result Value	100%	55,97	59,30	65,10	64,05	66,19	70,14	71,24
Performance Accountability Level		CC	CC	B	B	B	BB	BB

Hasil Evaluasi

Nilai 70,14 pada assesment SAKIP tahun 2017 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian BUMN sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan.

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Komitmen yang tinggi sudah ditunjukkan di tingkat pimpinan pusat, namun belum sepenuhnya diikuti oleh jajaran di bawahnya khususnya di unit kerja dalam mengimplementasikan manajemen kinerja. Penerapan manajemen kinerja di tingkat unit kerja belum menggambarkan kinerja atau hasil yang diharapkan dari pendirian unit kerja tersebut;
2. Uji petik pelaksanaan evaluasi yang kami lakukan terhadap Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata dan Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan belum menunjukkan hasil yang diharapkan dalam penerapan SAKIP ini.
3. Definisi kinerja pada unit kerja tidak selalu selaras

Evaluation result

The value of 70, 14 in the 2017 SAKIP assessment indicated the level of effectiveness and efficiency of budget use compared to the achievement of performance. The quality of building a culture of bureaucratic performance and results-oriented governance at the Ministry of State-Owned Enterprise has indicated good results, but still requires some improvement.

The full brief description of evaluation results are as follows:

1. The Ministry of State-Owned Enterprises has implemented the Government Institution Performance Accountability System as the implementation of public sector performance management. High commitment has been indicated at the central leadership level, but has not been fully followed by the ranks below, especially in the work units in implementing performance management. Implementation of performance management at the work unit level has not yet described the performance or expected results of the work unit establishment;
2. Evaluation implementation test that we did with the Deputy of the Energy, Logistics, Region and Tourism Business and the Deputy of the Construction and Transportation Infrastructure and Facilities Business Field has not shown the expected results in this SAKIP implementation.
3. The definition of performance in the work unit is not always aligned with the performance at the ministerial



dengan kinerja pada tingkat kementerian serta tidak selalu menggambarkan proses bisnis yang telah dibangun. Perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada unit kerja belum menggambarkan manfaat atau hasil yang menjadi mandat keberadaan organisasi;

level and does not always describe the business processes which have been built. The formulation of strategic targets and performance indicators in the work unit has not described the benefits or results which have become the mandate of the organization's existence;

4. Perencanaan kinerja dan proses bisnis organisasi pada unit kerja tidak sepenuhnya mampu dijabarkan pada dokumen penganggaran. Perencanaan dan penganggaran pada tingkat eselon II teknis tidak selalu menggambarkan proses bisnis, serta tugas fungsi serta peran yang telah ditetapkan;
5. Pengembangan aplikasi e-performance sebagai alat pemantauan perkembangan capaian kinerja dan anggaran belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan kinerja satuan kerja;
6. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat belum mampu memicu perbaikan penerapan manajemen kinerja.
4. Performance planning and organizational business processes in the work unit are not fully able to be described in the budgeting document. Planning and budgeting at the echelon II level of the technical does not always describe the business process, as well as the assigned functions and roles;
5. The development of e-performance applications as a monitoring tool for the development of performance and budget achievements has not been utilized optimally in the management of work unit performance;
6. The quality of internal performance accountability evaluation implemented by the Inspectorate has not been able to trigger improvements in the implementation of performance management.





Rekomendasi Hasil Assesment

Recommended Assessment Results

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Kementerian BUMN
1.	Melakukan penyempurnaan definisi kinerja pada unit kerja serta menyelaraskan dengan proses bisnis yang telah dibangun. Penyempurnaan ini juga mencakup penyelarasan perencanaan kinerja antara kementerian dan unit kerja; Improving the definition of performance in work units and aligning with business processes that have been built. This improvement also includes aligning performance planning between ministries and work units;	Pada tahun 2018, telah dilakukan kajian mengenai penyusunan teknokratik Renstra 2020-2024 sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Pada Renstra 2020-2024 yang akan dibantu penyusunannya oleh konsultan ahli, diharapkan dapat disusun pula penyempurnaan definisi kinerja pada level Kementerian sampai dengan level Unint Kerja Eselon II. In 2018, technocratic drafting study of the 2020-2024 Strategic Plan was implemented as input for the preparation of the Strategic Plan to be implemented in 2019. In the 2020-2024 Strategic Plan which will be assisted by expert consultants, it is also expected to develop performance definitions at the Ministry level up to the level of Echelon II Work Unit.
2.	Meningkatkan pemanfaatan aplikasi e-performance dalam pengelolaan kinerja mulai dari penetapan target kinerja, sampai dengan pemantauan dan evaluasi kinerja. Aplikasi ini sebaiknya juga dimanfaatkan oleh setiap pimpinan pada berbagai tingkatan dalam pelaksanaan upervisi, coaching, dan mentoring kepada setiap bawahan; Improve the use of e-performance applications in performance management starting from setting performance targets, to monitoring and evaluating performance. This application should also be used by every leader at various levels in implementing supervision, coaching, and mentoring to each subordinate;	Saat ini, aplikasi MKO yang mengelola kinerja unit maupun aplikasi Makin Baik yang mengelola kinerja individu telah berjalan secara baik. Pada tahun 2019, direncanakan akan dilakukan penggabungan dan integrasi kedua aplikasi tersebut dan telah disiapkan pula program coaching kinerja yang akan dibantu Unit SDM. Currently, MKO applications that manage unit performance and Makin Baik application which manages individual performance has been running well. In 2019, it is planned to merge and integrate the two applications and a performance coaching program has been prepared which will be assisted by the Human Resources Unit.
3.	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward and punishment kinerja, dan sebagainya Improve the quality of internal performance accountability evaluations to accelerate the implementation of performance management and encourage the growth of performance culture within the Ministry of State-Owned Enterprise through the utilization of various documents which have been compiled, such as periodic performance appraisal, reward and punishment performance mechanisms, and so forth	Saat ini, evaluasi akuntabilitas sudah mulai berjalan dan dilaksanakan oleh Inspektorat. Hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja juga sudah disampaikan kepada Pimpinan masing-masing unit kerja dan telah dilaporkan tindak lanjutnya yang tertuang di dalam Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II. Currently, accountability evaluation has begun and it is implemented by the Inspectorate. Recommendation results for performance accountability evaluation have also been submitted to the chairperson of each work unit and the follow-up has been reported as stated in the Echelon I and Echelon II Work Unit Performance Reports.



Selain itu, dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:—Pindahan dari bab Penutup

1. Memperbaiki dan mempercepat proses bisnis di internal Kementerian BUMN menuju digitalisasi. Selain itu, standardisasi proses juga perlu dilakukan terhadap proses bisnis yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Kementerian BUMN melalui ISO 12000;
2. Mendorong unit kerja untuk terus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mendorong BUMN untuk berkinerja lebih tinggi. Selain itu, pembekalan pegawai terutama pegawai yang menangani pembinaan BUMN harus lebih diarahkan pada kompetensi berbasis korporasi;
3. Mendorong unit kerja untuk menggunakan anggaran yang mengarah pada peningkatan kinerja dan fokus pada sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, dalam proses perumusan target di setiap unit maupun setiap pegawai agar tetap memperhatikan cascading dari level tertinggi;
4. Menyiapkan rumusan perbaikan Rencana Strategis untuk tahun 2020-2024 yang lebih mengarah pada penciptaan nilai BUMN dan peningkatan peran BUMN terhadap negara.
5. Melaksanakan Spending Review untuk evaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan dan alokasi anggaran tahun 2019;

In addition, in an effort to encourage improved performance and face challenges in the future, following should be implemented:

1. Improving and accelerating business processes within the Ministry of State-Owned Enterprise to digitalization. In addition, standardization of processes also requires to be implemented on business processes which have a significant effect on the performance of the Ministry of State-Owned Enterprise through ISO 12000;
2. Encouraging working unit to continue creating new innovations in encouraging the State-Owned Enterprise to perform higher. In addition, debriefing of employees, specifically employees who handle the development of State-Owned Enterprise, should be directed more towards corporate-based competencies;
3. Encouraging working unit to use budgets which led to improved performance and focus on the stipulated target. In addition, in the process of formulating targets in each unit and every employee to keep paying attention in cascading from the highest level;
4. Prepare a formula for the Strategic Plan's improvement of 2020-2024 which is more directed at creating value for the State-Owned Enterprise and increasing the role of State-Owned Enterprise in the state.
5. Implement Spending Review for evaluation in order to improve policies and budget allocations in 2019;





Wajah Baru Gedung Kementerian BUMN

New Look of the Ministry of State-Owned Enterprise Building

Dalam rangka menumbuhkan semangat kerja dan citra positif Kementerian BUMN yang tercermin dalam tag line “One Nasion, One Vision, One Family to Excellence”, Kementerian BUMN memerlukan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan memberikan kebanggaan kepada seluruh insan Kementerian BUMN dan keluarga besar BUMN.

Tahun 2018 Kementerian BUMN telah menyelesaikan pembangunan tahap I dengan desain yang selaras dengan arus perubahan zaman yang semakin modern. Transformasi ini diiringi dengan perubahan struktur bangunan kantor Kementerian BUMN agar menumbuhkan citra positif dan profesional kepada masyarakat luas dan investor-investor BUMN.

Pembangunan tahap I pada gedung Kementerian BUMN dimulai dengan modernisasi facade gedung induk yang telah selesai dikerjakan pada penghujung tahun 2018. Tower utama didesain menggunakan 8 mullion. Sedangkan untuk tahap II, akan dilakukan pengembangan podium dasar dan penyesuaian dengan gedung di sebelah kanan-kiri Kementerian BUMN sehingga tercipta kompleks perkantoran modern sebagai icon nasional dengan mengambil abstraksi cakar garuda untuk podium dasar dan twin tower simetris sebagai lambang sayap Garuda Pancasila.

Walaupun gedung Kementerian BUMN akan bertransformasi menjadi gedung perkantoran yang modern tetapi karakter dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan yang mengedepankan profesionalisme tetap tercipta dengan adanya manifestasi Garuda Pancasila dan adanya unsur 17 Agustus '45 sebagai tanda semangat juang Kementerian BUMN untuk terus berkontribusi memajukan negeri.

In the framework to grow work spirit and a positive image of the Ministry of State-Owned Enterprise reflected in the “One National, One Vision, One Family to Excellence” tag line, the Ministry of State-Owned Enterprise requires support for adequate work facilities and infrastructure and gives pride to all the Ministry of State-Owned Enterprise's people and the big family of the State-Owned Enterprise.

In 2018 the Ministry of State-Owned Enterprise has completed stage I development with design that is in line with an increasingly modern flow of change. This transformation was accompanied by changes in the structure of the Ministry of State-Owned Enterprise's office building to grow a positive and professional image to wider societies and investors of the State-Owned Enterprise.

Development in phase I to the Ministry of State-Owned Enterprise building started with the main building façade modernization which has been completed at the end of 2018. The main tower was designed using 8 mullions. On the other hand for phase II, base podium will be developed and the alignment with the building in the right and left of the Ministry of State-Owned Enterprise so that a modern office complex can be created as national icon by taking garuda claw abstraction for base podium and a symmetrical twin tower as a symbol of Garuda wing.

Even though the Ministry of State-Owned Enterprise building will be transformed into a modern office building but characters in the framework of implementing governmental function which prioritizes professionalism is still created with the manifestation of Garuda Pancasila and the existence of August 17 '45 as a sign of the Ministry of State-Owned Enterprise's fighting spirit to continue to contribute in improving the state.

Lampiran

PERNYATAAN TELAH DIRIVIU LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN TAHUN ANGGARAN 2018

STATEMENT HAS BEEN REVIEWED
THE MINISTRY OF STATE-OWNED ENTERPRISE PERFORMANCE REPORT
BUDGET YEAR OF 2018

Kami telah meriviu Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Riviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian BUMN.

We have reviewed the Ministry of State-Owned Enterprise Performance Report for the budget year of 2018 according to the Review Guidelines for Performance Report. The substance of information contained in the Performance Report becomes the responsibility of management to the Ministry of State-Owned Enterprise.

Riviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

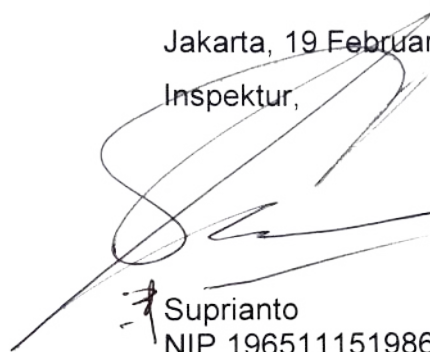
The review aims to provide limited confidence that performance report have been presented accurately, reliably and validly.

Berdasarkan riviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Based on our review, there are no conditions or matters which cause differences in the reliability of information presented in this performance report.

Jakarta, 19 Februari 2019

Inspektur,



Suprianto

NIP 196511151986031001

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2. VISI

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

3. MISI

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2018 (RIBU)
Total		0,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
------	---	-------------	---------------------

01	Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah		38.348.832,0
01.01	Jumlah Aset BUMN	7065	
01.02	Jumlah Laba BUMN	166	
01.03	Jumlah Ekuitas BUMN	1680	
01.04	Skor Penilaian Kinerja BUMN (Jumlah BUMN yang masuk kategori Good Performance)	60	
01.05	Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500	5	
01.07	Jumlah CAPEX BUMN	616	
01.09	Tercapainya Service Level Agreement Penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)	75	
02	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN		5.800.000,0
02.01	Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	92	
02.02	Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN	86	
03	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap kebijakan Kementerian BUMN		10.422.055,0
03.01	Nilai rata-rata GCG BUMN	87	
03.02	Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100	
03.03	Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	100	
03.04	Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100	
04	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif		14.029.452,0
04.01	Terpenuhinya batas waktu penerbitan SAL	tepat waktu	
04.02	Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan bahan pertimbangan perumusan kebijakan	≥80	
04.03	Persentase kebijakan yang dibuat sesuai dengan visi dan misi	100	
05	Pembinaan BUMN yang optimal		2.600.471,0
05.01	Waktu respon aksi sesuai standar layanan	Batas waktu standar	
05.02	Penetapan Direksi sesuai Peraturan	Sebelum masa jabatan	
05.03	Penyelenggaraan RUPS tepat waktu	Januari dan Juni	
05.04	Ketersediaan kontrak kinerja BUMN	100	
06	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif		3.000.000,0

06.01	Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI	100	
06.02	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100	
07	Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional		59.077.996,0
07.01	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pendidikan dan pelatihan	87	
07.02	Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan	80	
07.03	Persentase pelaksanaan diklat sesuai Training Needs Analysis	≥90	
08	Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern		86.806.974,0
08.01	Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN	80	
09	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih		5.000.000,0
09.01	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	82	
09.02	Nilai penerapan reformasi birokrasi Kementerian BUMN	76	
09.03	Nilai inisiatif anti korupsi	82	
10	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses		17.955.975,0
10.01	Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	95	
10.02	Pencapaian Service Level Agreement Index Sistem Informasi	≥90	
10.03	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi	≥4	
10.04	Persentase downtime layanan TIK	≤3	
11	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel		4.000.000,0
11.01	Persentase pemanfaatan anggaran	≥90	
11.02	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN	WTP	
Total			247.041.755,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2019	2020	2021
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								

041.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	169.684.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169.684.970,0	178.177.821,3	190.819.506,4	227.563.015,4
041.01.06	Program Pembinaan BUMN	77.356.785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77.356.785,0	81.197.984,0	87.024.108,6	94.202.794,7
Total		247.041.755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247.041.755,0	259.375.805,3	277.843.615,0	321.765.810,1

Jakarta, 29 May 2017
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian BUMN

Imam Apriyanto Putro
NIP. 196403221991031001

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG

02 - Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

04 - Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

06 - Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif

07 - Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

08 - Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern

09 - Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih

11 - Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel

3. PROGRAM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN

4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2018 (RIBU)
Total		0,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN		5.800.000,0
01.01	Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	92	
01.02	Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN	86	
02	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif		3.000.000,0
02.01	Persentase tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI	100	
02.02	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100	
03	Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional		59.077.996,0
03.01	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pendidikan dan pelatihan	87	
03.02	Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan	80	
03.03	Persentase pelaksanaan diklat sesuai Training Needs Analysis	90	
04	Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern		2.100.000,0
04.01	Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN	80	
05	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik dan Bersih		5.000.000,0
05.01	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	82	
05.02	Nilai penerapan reformasi birokrasi Kementerian BUMN	76	
05.03	Nilai inisiatif anti korupsi	82	
06	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel		4.000.000,0
06.01	Persentase pemanfaatan anggaran	90	
06.02	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN	WTP	
07	Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai		84.706.974,0
07.01	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum	90	
08	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif		6.000.000,0
08.01	Peraturan Perundang-Undangan terkait Peningkatan Kinerja BUMN	9	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
08.02	Persentase Kebijakan Pimpinan yang sejalan dengan Pencapaian Visi dan Misi Presiden	100	
Total			169.684.970,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Layanan Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi	66.177.996,0
01.01	Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN	
01.02	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pendidikan dan pelatihan	
01.03	Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan	
01.04	Persentase pelaksanaan diklat sesuai Training Needs Analysis	
01.05	Persentase pencapaian roadmap organisasi dan SDM Kementerian BUMN	
01.06	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	
01.07	Nilai penerapan reformasi birokrasi Kementerian BUMN	
01.08	Persentase pemanfaatan anggaran	
02	Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	4.000.000,0
02.01	Peraturan Perundang-Undangan terkait Peningkatan Kinerja BUMN	
03	Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Keuangan, Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol	94.506.974,0
03.01	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN	
03.02	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum	
03.03	Kepuasan Penggunaan Layanan yang Tinggi Atas Pelayanan Kementerian BUMN	
04	Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN	3.000.000,0
04.01	Persentase tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	
04.02	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	
04.03	Nilai inisiatif anti korupsi	
05	Hasil Penelaahan Kebijakan Pimpinan	2.000.000,0

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
05.01	Persentase Kebijakan Pimpinan yang sejalan dengan Pencapaian Visi dan Misi Presiden	
Total		169.684.970,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2019	2020	2021
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
2617	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi	66.177.996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.177.996,0	70.706.121,2	75.721.313,6	81.091.430,7
2618	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0	4.284.000,0	4.588.170,0	4.913.920,0
2619	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Keuangan, Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat dan Protokol	94.506.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94.506.974,0	97.437.700,1	103.910.022,8	133.807.664,7
2620	Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.350.000,0	3.700.000,0	4.350.000,0
2621	Penelaahan Kebijakan Pimpinan	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	2.400.000,0	2.900.000,0	3.400.000,0
Total		169.684.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169.684.970,0	178.177.821,3	190.819.506,4	227.563.015,4

Jakarta, 29 May 2017
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Sekretaris Kementerian BUMN

Imam Apriyanto Putro
NIP. 196403221991031001

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Perbandingan Realisasi 2018 terhadap Target 2019	Renstra 2019	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	No
1	Terwujudnya BUMN sebagai <i>Agent of Development</i> yang besar, kuat dan lincah	Jumlah Aset BUMN	7,375 Triliun	8.097 Triliun	102,3%	7.913 Triliun	Jumlah Aset BUMN	Terwujudnya BUMN sebagai <i>Agent of Development</i> yang besar, kuat dan lincah	1
		Jumlah Laba BUMN	203 Triliun	188 Triliun	112,7%	180 Triliun	Jumlah Laba BUMN		
		Jumlah Ekuitas BUMN	2,848 Triliun	2.479 Triliun	131,7%	1.882 Triliun	Jumlah Ekuitas BUMN		
		Jumlah Capex BUMN	610 Triliun	487 Triliun	63,7%	Rp764 Triliun	Jumlah Capex BUMN		
		BUMN Yang Masuk Global Fortune 500	4	1 BUMN	83,3%	6 BUMN	Perubahan IKU menjadi: BUMN yang masuk perusahaan kelas dunia (Saat ini ada 5 BUMN; Global Fortune 500- Pertamina; Forbes 2000- Bank Mandiri, BRI, BNI, Telkom		
		Kontribusi BUMN Terhadap Negara	315 Triliun	454 Triliun	117,9%	385 Triliun	Kontribusi BUMN terhadap negara (pajak, dividen dan PNBK)		
		Persentase Pencapaian Roadmap BUMN	75%	75%	75%	100%	Pelaksanaan Roadmap BUMN		
		Tercapainya SLA Penugasan PSO	97%	97,50%	97,5%	100%	Tercapainya SLA penugasan PSO		

2	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN	Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN	92%	92%	NA	3,5 (Skala likert 1-5)	Tahun 2019 diubah target dan skala pengukurannya	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN	2
		Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait /stakeholders atas pelayanan Kementerian	86%	75%	NA	3,5 (Skala likert 1-5)	Tahun 2019 diubah target dan skala pengukurannya		
3	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN	Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	100%	100%	100%	100%	Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN	3
		Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	100%	100%	100%	100%	Persentase kepatuhan proses operasional BUMN		
		Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	100%	100%	100%	100%	Persentase kepatuhan pelaporan BUMN		
4	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif	Terpenuhinya Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)	Agustus 2018	Agustus 2018	100%	Agustus 2019	Terpenuhinya Batas Waktu Penerbitan Shareholder Aspiration (SLA)	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan implementatif	4
5	Pembinaan BUMN yang	Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	100%	100%	100%	100% Tepat Waktu	Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan	Pembinaan BUMN	5
		Penetapan Direksi Sesuai dengan Peraturan	100%	179%	100%	100% Sebelum masa jabatan berakhir	Penetapan Direksi Sesuai dengan Peraturan (waktu berakhirnya jabatan)		

5	BUMN yang optimal	Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu	100%	100%	100%	100% RUPS RKAP 100% RUPS Audit	Penyelenggaraan RUPS tepat waktu	yang optimal	5
		Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN	100%	100%	100%	100% tersedia kontrak kinerja	Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN		
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif	Persentase Tindak Lanjut LHP BPK	100%	100%	100%	100%	Persentase Tindak Lanjut LHP BPK	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif	6
7	Terwujudnya SDM yang kompeten dan professional	Indeks peningkatan kompetensi pegawai	4 (Skala 1-5)	4 (Skala 1-5)	NA	Sedang (71)	Tahun 2019 IKU dan target diubah menjadi: Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit	Terwujudnya SDM yang kompeten dan professional	7
					NA	Baik (0,61)			
8	Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern	Persentase Pencapaian Road Map Transformasi Organisasi	75%	75%	75%	100% seluruh tahapan roadmap	Persentase Pencapaian Roadmap Transformasi Organisasi	Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern	8
9	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN	75	71,24	93,74	76	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kementerian BUMN	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih	9
		Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN	76	76,77	95,96	80	Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN		

		Nilai Inisiatif Anti Korupsi	85	72,8	91%	80	IKU dan target diubah menjadi :Nilai Zona Integritas		
10	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	95%	90,24%	90,24%	100%	Ketersediaan data BUMN yang valid	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses	10
		Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi	≥90 %	99,87%	109,7%	>90%	Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi		
11	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Persentase Pemanfaatan Anggaran	≥90 %	91,55%	100,6%	>90%	Persentase Pemanfaatan Anggaran	Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel	11
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN		



Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110

T: 021 - 29935678
F: 021 - 29935740